



HUBUNGAN
Indonesia dan Jepang
DALAM LINTASAN SEJARAH

HUBUNGAN
Indonesia dan Jepang
DALAM LINTASAN SEJARAH

HUBUNGAN
Indonesia dan Jepang
DALAM LINTASAN SEJARAH



**DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2018**

HUBUNGAN
Indonesia dan Jepang
DALAM LINTASAN SEJARAH

PENGARAH

Hilmar Farid
(Direktur Jenderal Kebudayaan)

EDITOR

Taufik Abdullah
Triana Wulandari

PENYUSUN

Aiko Kurasawa, Aminudin T.H. Siregar, Didi Kwartanada,
Jajat Burhanudin, Nino Oktorino, Susanto Zuhdi

SEKRETARIAT DAN PRODUKSI

Suharja, Tirmizi, Agus Hermanto, Bariyo,
Dwi Artiningsih, Budi Harjo Sayoga,
Esti Warastika, Dirga Fawakih, Oti Murdiyati Lestari,
Krida Amalia Husna, Isti Sri Ulfiarti

TATA LETAK DAN GRAFIS

M. Abduh, Rawan Kurniawan

PENERBIT

Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270. Tlp/Fax: 021-572504
Cetakan Pertama
Tahun 2018

ISBN 978-623-7092-00-1

Foto sampul Gambar ilustrasi dari artikel kebudayaan tentang kesenian tari, menurut sumber kebudayaan Nippon yang ditulis oleh M.R. Dajoh dan dimuat dalam majalah Pandji Poestaka No.6 th. XX terbitan 16 tahun 1942. Sumber: Perpustakaan Nasional RI.

DAFTAR ISI

Daftar Isi - i

Sambutan Direktur Sejarah - ii

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan - iii

Pengantar Ahli - 1

Keynote Speaker Direktur Jenderal Kebudayaan - 7
Hilmar Farid

Indonesia—Jepang, 1900—1941: Hubungan Antarbangsa dalam Perspektif Historis - 13
Susanto Zuhdi

Banzai!: Operasi Militer Jepang untuk Menguasai Indonesia - 27
Nino Oktorino

Menemukan Identitas Melalui Propaganda: Seni Rupa Indonesia di Zaman Pendudukan Jepang - 59
Aminudin T.H. Siregar

Dinamika dalam Keberagaman: Jepang, Etnik Tionghoa dan Pribumi (1942-1945) - 89
Didi Kwartanada

Islam dan Dai Nippon: Respon Intelektual Muslim atas Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) - 135
Jajat Burhanudin

Hubungan Indonesia-Jepang 1945-1957 - 167
Aiko Kurasawa

Daftar Pustaka - 195

Indeks - 207

Penulis dan Editor - 211

SAMBUTAN

Direktur Sejarah

Buku ini diterbitkan dalam rangka peringatan 110 tahun hari Kebangkitan Nasional yang bersamaan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 di Perpustakaan Nasional. Kegiatan ini mengusung tema “Hubungan Indonesia-Jepang dalam Lintasan Sejarah”. Penyelenggaraan seminar kesejarahan ini dalam upaya untuk melihat peluang kerja sama kedua negara terutama dalam bidang budaya di masa akan datang. Salah satu keluaran dalam kegiatan seminar ini adalah penerbitan kompilasi makalah para pembicara dalam bentuk buku (prosiding).

Buku kompilasi ini ditulis oleh para sejarawan dan pakar baik dari dalam maupun luar negeri. Buku ini memuat enam makalah yang membahas berbagai aspek kesejarahan seperti sosial, ekonomi, politik, militer, seni dan agama. Enam judul makalah tersebut adalah, “Indonesia—Jepang, 1900—1941: Hubungan Antarbangsa dalam Perspektif Historis”, “Banzai!: “Operasi Militer Jepang untuk Menguasai Indonesia”, “Menemukan Identitas Melalui Propaganda: Seni Rupa Indonesia di Zaman Kependudukan Jepang”, “Dinamika dalam Keberagaman: Jepang, Etnik Tionghoa dan Pribumi (1942-1945)”, “Islam dan Dai Nippon: Respon Intelektual Muslim Atas Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945)”, dan “Hubungan Indonesia-Jepang: 1945-1957”.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memperkaya historiografi tentang hubungan Indonesia dan Jepang dalam lintasan sejarah, baik tema, maupun metodologi. Dalam kesempatan ini tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini. Kepada para penulis yang dengan senang hati makalahnya diterbitkan dalam bentuk buku kompilasi. Kepada editor, Prof. Dr. Taufik Abdullah yang telah dengan kritis dalam menelaah dan menyunting naskah. Dan tentunya kepada tim sekretariat yang telah dengan segenap tenaga mensukseskan penerbitan buku ini. Saya ucapkan selamat membaca. Semoga menginspirasi.

Direktur Sejarah

Triana Wulandari²

SAMBUTAN

Direktur Jenderal Kebudayaan

Sejak tahun 1958, Indonesia dan Jepang menjalin persahabatan dan kerja sama yang cukup erat dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik maupun pendidikan. Meskipun dalam konteks sejarah, sesungguhnya hubungan keduanya telah terjalin jauh sebelum itu. Namun dalam konteks hubungan bilateral, hubungan keduanya telah secara resmi terjalin pada 20 Januari 1958. Enam puluh tahun melintasi sejarah, hubungan kedua negara semakin harmoni, mesra dan kuat. Peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang pada tahun 2018 ini menjadi momentum bagi kedua negara untuk melakukan kajian terhadap berbagai kemajuan yang telah dicapai selama enam dekade. Hal ini penting sebagai upaya memperkuat jalinan persahabatan dan kemitraan yang lebih dinamis pada masa akan datang.

Pada tahun-tahun terakhir ini, hubungan kedua negara semakin menguat, terutama dalam bidang politik, teknologi dan infrastruktur. Untuk lebih menguatkan hubungan kedua negara di masa akan datang, kerja sama yang semakin erat perlu ditingkatkan dan diperluas dalam bidang-bidang lain, seperti kerja sama dalam bidang budaya. Kerja sama dalam bidang budaya dapat memberikan makna yang lebih mendalam bagi hubungan kedua bangsa. Dengan demikian hubungan yang telah terjalin tidak terbatas pada hubungan pemerintah dengan pemerintah, melainkan melibatkan masyarakat kedua bangsa secara menyeluruh. Pendekatan melalui proses pertemuan budaya akan segera menyentuh pada hubungan dari hati ke hati dan bukan hanya atas dasar kepentingan pemerintahan.

Penerbitan kompilasi tulisan hasil Seminar Kesejarahan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi salah satu upaya dalam memperkuat hubungan dalam bidang budaya antarkedua negara itu. Buku ini dapat menjadi catatan reflektif hubungan kedua bangsa yang dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang mempunyai minat untuk melihat rekam jejak hubungan kedua bangsa. Dengan berpegang pada catatan-catatan sejarah itulah kemudian diharapkan kerja sama yang lebih baik dan dinamis akan terus menguat di masa yang akan datang. Saya menyambut gembira penerbitan buku ini. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menyegarkan kembali kajian tentang hubungan Indonesia-Jepang dalam berbagai

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

aspek kehidupan. Akhirnya, saya ucapkan selamat membaca. Semoga dapat memperkaya khazanah intelektual kita.

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hilmar Farid', with a stylized, cursive script.

Hilmar Farid

KATA PENGANTAR AHLI

Prof. Dr. Taufik Abdullah

Kadang-kadang terasa lucu juga ketika betapa waktu yang sambung-bersambung itu bisa dibagi-bagi. Maka waktu satu hari terbagi atas dua puluh empat jam sedangkan satu jam berarti enam puluh menit dan seterusnya. Tetapi bukankah tanpa adanya pembagian ini, arus perjalanan waktu akan terasa tidak punya arti apa-apa? Jadi tidaklah perlu diherankan kalau seketika dinamika perjalanan sejarah telah disadari, maka kearifan yang paling awal didapatkan ialah fakta bahwa, “zaman sekarang” berbeda dari “masa lalu”.

Begitulah, dengan landasan kesadaran tentang waktu ini maka bab awal dari pelajaran sejarah pun telah dimasuki. Maka janganlah heran kalau kadang-kadang terasa sebagai hal yang biasa saja jika ada yang mengatakan bahwa, “dahulu lebih baik daripada sekarang” atau sebaliknya. Hanya saja dalam realitas, kedua kata ini tidak mempunyai kepastian waktu. Karena itulah seketika konsep “dulu” dan “sekarang” telah dipakai maka tuntutan akan kepastian dari dinamika perjalanan waktu tidak terhindarkan.

Mungkin tidak ada salahnya kalau sebuah episode dari sejarah tanah air dipakai sebagai contoh soal. Tetapi episode sejarah yang manakah yang sebaiknya dipakai? Bagaimana kalau masa awal dari kebangkitan rasa kebangsaan dikisahkan? Andaikan episode ini hendak diteliti, maka peristiwa apakah yang harus dipakai untuk mengisahkan episode sejarah yang kritis ini? Karena telah diketahui, bahwa peristiwa ini terjadi di saat Kepulauan Nusantara telah berada di bawah kekuasaan Bangsa Barat, maka timbul juga pertanyaan, “apakah bangsa yang telah terjajah ini pernah mendapat inspirasi dari pengalaman bangsa dari belahan timur?”

Seketika hal ini telah dimantapkan sebagai awal kisah. Maka sebuah episode dari sejarah awal abad ke-20 bisa dipakai. Salah satu episode yang biasa terlupakan dalam pelajaran sejarah ialah, bahwa pada awal abad ke-20, beberapa orang terpelajar kelahiran wilayah yang masih disebut “tanah Hindia” ini telah menyatakan kekaguman mereka pada peristiwa kebangkitan Bangsa Jepang, sebuah bangsa dari wilayah timur. Bukankah bangsa yang mendiami sederetan kepulauan dari utara ke selatan yang terhampar sekian puluh mil di seberang daratan Tiongkok, pernah mengalahkan bangsa besar yang berada di seberang kepulauan mereka? Bagaimana mungkin Jepang, sebuah kerajaan kecil, bisa

KATA PENGANTAR AHLI

mengalahkan kemaharajaan Tiongkok yang sedemikian besar dan sedemikian berkuasa? Maka janganlah heran kalau kemenangan Jepang atas Tiongkok di tahun 1895 ini sering juga disebut-sebut dalam majalah *Insulinde*, sebuah majalah yang terbit di Kota Padang (1901-1904). Majalah inilah yang pertama memopulerkan seruan “kemajuan” dan mendorong anak negeri untuk berkecimpung dalam dinamika “*dunia maju*”. Karena telah menyadari apa makna “kemajuan” dalam perjalanan sejarah, maka bisalah dipahami kalau berita tentang kemenangan Jepang di tahun 1904 dalam perang melawan kemaharajaan Rusia cukup bergema di kalangan masyarakat pribumi yang telah terkena seruan “kemajuan” itu. Bagaimana mungkin Jepang, sebuah kerajaan kecil di Asia, bisa mengalahkan kemaharajaan Rusia, kekuatan besar dari benua Eropa?

“Kemenangan Jepang atas Rusia” adalah ingatan kesejarahan yang langsung ataupun tidak, meningkatkan rasa hayati “kemajuan” di kalangan anak negeri di “tanah Hindia”. Tulisan-tulisan Dokter Abdul Rivai dalam berkala *Bintang Hindia* yang diterbitkan di negeri Belanda itu tidak henti-hentinya memopulerkan seruan “kemajuan” dan menyerukan semangat kebangkitan “tanah Hindia”. Bahkan beberapa kali ia menganjurkan agar anak negeri Hindia ini mendirikan perkumpulan seperti yang telah dilakukan oleh orang Tionghoa demi tercapainya “kemajuan”. Jadi bisa dipahami juga kalau seruan ini memberi inspirasi pada Dokter tua, Wahidin, untuk menulis karangan yang mengulang anjuran Dokter Abdul Rivai dalam tulisannya yang dimuat dalam berkala yang terbit di Solo. Anjuran inilah yang memengaruhi Sutomo, seorang mahasiswa STOVIA, untuk mendirikan Boedi Oetomo pada bulan Mei 1908. Tidak lama kemudian masyarakat pedagang di Kota Solo pun mengubah nama organisasi mereka, Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Peristiwa setelah kejadian ini? Maka biarlah sejarah nasional berkisah pengetahuan tentang betapa Jepang, sebuah negara Asia, berhasil mengalahkan sebuah negara besar Eropa dirasakan pula sebagai bukti bahwa peradaban Asia tidak lebih rendah dari Eropa.

Mungkin hanya suatu kebetulan saja, tetapi dalam perjalanan waktu, setapak demi setapak semangat harga diri bangsa pun semakin menaik juga. Mula-mula perasaan ini mungkin hanya di kalangan terpelajar di kota-kota besar, tetapi dalam perjalanan waktu, perasaan ini semakin meluas juga. Masa “pemberontakan desa”, ketika penduduk desa di wilayah-wilayah tertentu mengangkat senjata melawan keharusan yang dipaksakan kekuasaan asing mungkin telah berakhir, tetapi kesadaran kebangsaan yang disebarakan dan dipupuk karena pelebaran wilayah “kebudayaan pena”, surat-surat kabar dan alat komunikasi tertulis lain, dan tumbuhnya perkumpulan sosial, politik, dan keagamaan semakin menaik juga.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

Dalam suasana inilah pula Kerajaan Jepang mulai “menyajikan daya tariknya”. Pada waktu inilah barang-barang impor dari Jepang dengan harga murah semakin banyak memenuhi toko-toko dan di samping itu, siapakah yang bisa melupakan aktivitas para tukang potret Jepang yang ramah? Dalam suasana inilah beberapa orang kaum terpelajar dari “tanah Hindia”, yang telah mulai menyebut diri *Indonesia*, semakin tertarik pada kebangkitan ekonomi dan politik Jepang dan mulai pula mempelajari pengalaman bangsa ini dalam usaha mengembangkan dirinya. Bagaimanakah sebuah negara Asia bisa tampil sebagai kekuatan yang sama sekali tidak “segan” dengan Eropa? Hanya saja setelah mendalami perilaku Jepang, beberapa tokoh pergerakan kebangsaan yang telah dipaksa oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk bermukim di wilayah pembuangan seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir mulai kritis juga pada gerak-gerik Jepang. Bukankah tampak juga betapa Jepang asyik juga mencari sumber-sumber energi untuk perkembangan dunia industrinya?

Akhirnya peristiwa yang telah diramalkan itupun terjadi juga. Tentara Jepang mulai menghadapkan serbuannya ke daerah selatan. Setelah “Pertempuran Laut Jawa” yang dahsyat, akhirnya pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda pun mengibarkan bendera putih. Begitulah, ketika waktunya telah tiba maka dengan bendera Dai Nippon di tangan kanan, para pemuda di kota-kota besar pun menyambut dengan gembira kedatangan tentara Dai Nippon. Bendera *Merah Putih* yang entah sudah berapa tahun dilarang untuk dikibarkan, kini dipakai untuk menerima kedatangan tentara yang telah memakai semboyan *Asia Timur Raya* itu. Seketika terasa juga betapa “fajar zaman baru” telah menyingsing.

Tetapi alangkah cepatnya berlalu. Dua tiga minggu kemudian sang penguasa baru, militer Jepang, melarang pengibaran bendera Merah Putih. Sementara itu wilayah Hindia Belanda yang merupakan suatu kesatuan politik kini telah terbagi atas tiga wilayah kekuasaan militer, Sumatra (yang digabungkan dengan Tanah Semenanjung dan Singapura), Jawa, dan wilayah Indonesia bagian timur. Ketiga wilayah ini pun setapak demi setapak mulai mengalami apa artinya berada di bawah kekuasaan militer di saat perang “Asia Timur Raya” (sebagaimana Jepang menamakan apa yang biasa disebut kekuasaan Barat sebagai “Perang Pasifik”) sedang berkecamuk. Dalam suasana ini puluhan atau lebih tepatnya ratusan ribu anak negeri dipekerjakan Pemerintah Militer Jepang sebagai *Romusha*, pekerja paksa bagi kepentingan militer dan pertahanan. Tetapi dalam masa ini pula, sekian puluh ribu pemuda dilatih untuk menjadi tentara, baik sebagai pembantu militer Jepang ataupun sebagai tentara rakyat untuk membantu Jepang dalam mempertahankan kepulauan Indonesia. Atau dengan kata lain, sekian puluh ribu

KATA PENGANTAR AHLI

orang yang menjadi *Heiho*, tentara bantuan bagi militer Jepang. Disamping itu, sekian puluh ribu pula yang bergabung dalam PETA (Pembela Tanah Air) atau *Gyugun*, yang dilatih sebagai laskar bantuan.

Situasi Perang Asia Timur Raya memang bukan saja menuntut peletakan landasan bagi persiapan perang yang kuat, tetapi juga penguasaan sistem komunikasi yang meniadakan keberlakuan sistem yang ditinggalkan pemerintah kolonial yang terdahulu. Hanya saja, pelarangan pemakaian Bahasa Belanda sebagai bahasa dalam pemerintahan dan ilmu pengetahuan ternyata tidak dengan begitu saja bisa digantikan oleh Bahasa Dai Nippon. Maka bisalah dikatakan bahwa salah satu dampak yang tidak terlupakan dari masa pendudukan militer Jepang ini ialah dimulainya pengembangan dan pemakaian Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmu Pengetahuan. Salah satu dampak langsung dari keputusan militer ini ialah didirikannya “komisi istilah”, komisi inilah yang menentukan padanan istilah dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Belanda.

Dalam suasana ketika perang sedang berkecamuk dan kekuasaan asing telah memaksakan perubahan dalam sistem komunikasi akademis maka, mestikah diherankan kalau Bahasa Indonesia pun semakin berkembang pula? Maka begitulah, “zaman pendudukan Jepang” akan selalu diingat bukan saja masa ketika istilah-istilah ilmu pengetahuan dalam Bahasa Indonesia atau Indonesianisasi istilah asing mulai dikembangkan, tetapi adalah pula suatu periode sejarah ketika orientasi baru dalam dunia sastra telah bermula. Boleh dikatakan bahwa zaman pendudukan Jepang adalah awal dari kebangkitan apa yang kemudian disebut sebagai “angkatan ‘45”. Memang nama Chairul Anwar, Asrul Sani, Achdiat Kartamihardja, Idrus, dan lain-lain lebih dikenal ketika mereka telah menjadi bagian dari dinamika “Revolusi Kemerdekaan”. Tetapi sebenarnya, mereka telah mulai berkarya di saat kekuasaan militer Jepang masih teramat kuat. Dalam zaman pendudukan Jepang inilah pula seni rupa tidak lagi terpaku pada kecenderungan “tanah Hindia yang cantik” (*Mooi Indie*), yang bersifat naturalistik, tetapi telah mulai menjelajahi kecenderungan baru, entah yang bercorak impresionistik, entah ekspresionistik. Dalam suasana pendudukan Jepang yang militeristik ini, berkesenian tidak lagi selamanya harus berkarya dalam kesendirian. Ternyata kreativitas perseorangan dalam dunia seni bisa dipupuk dalam suasana kebersamaan.

Zaman pendudukan Jepang tidak terlalu lama, hanya sekitar tiga setengah tahun. Tetapi dalam masa yang relatif pendek ini sistem kekuasaan asing yang didominasi oleh kepentingan militer ini ternyata membawa perubahan penting dalam dinamika perpolitikan nasional. Dalam masa kependudukan inilah kaum ulama Indonesia, mula-mula di Pulau Jawa, dibawa oleh kekuasaan militer Jepang

untuk terlibat dalam dunia politik dan sejak itu, jalan kembali ke suasana yang terkurung di pesantren telah berakhir pula. Meskipun para ulama menolak *saikere* (menundukkan kepala ke arah Tokyo) dan tidak pula mau mengumumkan Perang Asia Timur Raya (*dai toa senso*) sebagai perang suci, tetapi pada Oktober 1943 Pemerintah Militer Jepang mendirikan Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), yang menghimpun semua organisasi keagamaan Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain dalam suatu organisasi kerja sama. Dengan begini maka kaum modernis dan konservatif Islam dilebur dalam satu kesatuan. Dalam situasi inilah pula pemerintah Jepang mengadakan kursus bagi kaum ulama di Jakarta.

Salah satu tema sejarah nasional yang biasa terlupakan ialah arti kehadiran historis dari kelompok minoritas Tionghoa. Padahal tanpa memperhitungkan kehadiran mereka bukan saja pemahaman tentang perekonomian kota-kota terabaikan, berbagai aspek dari perkembangan kemasyarakatan anak negeri pun terbiarkan tanpa tersentuh. Maka begitulah sebuah pertanyaan pun tertanyakan juga. Bagaimanakah jadinya dengan masyarakat kolonial yang terbagi atas tiga lapis (kelas sosial tertinggi ialah keturunan keturunan Eropa, kelas kedua ialah golongan Tionghoa dan Arab, sedangkan kelas sosial yang ketiga ialah anak negeri atau bumiputera) ketika tentara Jepang berkuasa?

Zaman Jepang bisa dilihat bukan saja sebagai periode ketika kepulauan Indonesia sedang ditarik ke dalam kancah peperangan, yakni perang yang disebut sebagai bagian dari Perang Dunia kedua, tetapi adalah pula masa ketika kelas-kelas sosial yang diperkenalkan kolonialisme Barat sedang digugat. Bukankah salah satu pengumuman (September 1942) yang dikeluarkan Pemerintah Militer Jepang ialah bahwa kehadiran Dai Nippon sebagai "Pemimpin Asia" ialah, "menghapus segala perbedaan antara golongan dan bangsa-bangsa"? Meskipun kadang-kadang terlupakan (ataukah "dilupakan"?) tetapi bagaimanakah akan mengingkari bahwa empat orang tokoh golongan Tionghoa adalah anggota dari Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yaitu badan yang dibentuk pemerintah militer Jepang untuk merumuskan landasan kemerdekaan Indonesia. UUD 1945 (sebelum direvisi di masa awal reformasi) adalah hasil karya badan bentukan militer Jepang ini. Sidang inilah pula yang menyetujui perumusan akhir dari Pancasila berdasarkan pidato Bung Karno yang diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945.

Salah satu aspek dari Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia yang kurang diketahui ialah perkembangan sistem kemiliteran Jepang menjelang dan di saat Perang Pasifik telah berkecamuk. Karena itulah buku ini secara panjang lebar menguraikan aspek sejarah yang terlupakan ini. Tidak kurang pentingnya ialah

KATA PENGANTAR AHLI

catatan militer Pemerintah Jepang ketika mereka sedang berkuasa di kepulauan Indonesia dan di saat masalah hubungan Jepang dengan Indonesia setelah Perang Asia Timur Raya berakhir dan Jepang harus menghadap masalah pampasan perang dengan wilayah yang pernah dikuasainya.

Demikianlah, buku ini bukan sekedar mengingatkan apa yang mungkin telah diketahui, tetapi, dan lebih penting, menjelaskan hal-hal yang selama ini agak kabur dalam uraian sejarah dan menguraikan hal-hal yang selama ini berada di luar perhatian kesejarahan tanah air.

Selamat membaca. Selamat meneladani dinamika sejarah yang selama ini masih agak kabur dalam perbendaharaan pengetahuan kesejarahan nasional.

Taufik Abdullah
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

KEYNOTE SPEAKER
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Hilmar Farid

Izinkan saya menyampaikan pengantar diskusi seminar peringatan 110 tahun Kebangkitan Nasional yang bersamaan dengan peringatan Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang, yang kini memasuki usianya yang ke-60 tahun.

Pertama-tama saya ingin mengingatkan kita semua, bahwa hubungan diplomatik Indonesia – Jepang meski secara resmi baru dimulai pada tahun 1957, namun sesungguhnya hubungan keduanya telah jauh lebih lama. Saya telah membaca beberapa studi tentang hubungan Jawa dan Jepang, sejak masa lalu, ternyata orang Jepang telah mulai mengunjungi beberapa wilayah di Nusantara ini sejak lama. Tentu saja sejak kapan hal ini bermula masih belum diketahui secara pasti. Karena tentu hal ini masih perlu dilakukan penelitian. Perlu data lagi untuk mengambil suatu kesimpulan tentang sejak berapa lama sebenarnya hubungan bilateral kedua wilayah ini sudah terjalin .

Saya akan berbicara mengenai dua hal. *Pertama* mengenai historiografi hubungan Indonesia dan Jepang, dan *problem* yang mengitarinya dan juga masalah sumber sejarah. Tetapi sebelum itu perkenalkanlah saya untuk memberikan semacam pengantar mengapa kita perlu belajar dan juga mendalami sejarah. Menurut hemat saya sejarah ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan publik. Kita mempelajari sejarah itu untuk beberapa hal. *Pertama*, yang saya kira sangat menonjol dan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, fungsi belajar sejarah adalah agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan begitu kita akan menjadi lebih bijak, karena belajar dari apa-apa yang terjadi di masa lalu. Karena kita juga belajar sejarah karena ingin tahu apa yang membawa kita sampai pada situasi kehidupan kita saat ini. Masa lalu jelas membentuk masa kini, jika dua hal ini kita pegang dengan baik maka yang ketiga adalah kita bisa mengarungi masa depan dengan lebih baik. Karena kita lebih mawas diri dan lebih bijak memahami apa yang terjadi. Pada saat bersamaan sejarah juga dapat membuat kita lebih paham sifat dan dinamika kemasyarakatan, sebab banyak pengertian dan kategori yang digunakan dalam ilmu sosial dan ilmu politik yang kita terima begitu saja. Misalnya saja pengertian yang sangat mendasar soal bangsa dan negara, sering kali kita mengacaukan kedua istilah ini dengan mengasumsikan kedua hal ini sebagai hal yang sama.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

Jika Hubungan Indonesia dan Jepang dipelajari maka kita pun sadar juga bahwa, pembentukan negara modern di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh proses politik di dalam *Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan* (BPUPK). Ini adalah lanjutan soal sumber. Sampai hari ini, Direktorat Sejarah di bawah pimpinan Ibu Triana Wulandari terus mencari naskah-naskah sumber-sumber asli Sidang-sidang BPUPK, misalnya sudah ditemukan 14 koleksi dari A.K. Pringgodigdo, dan banyak lagi cerita tersendiri yang jika dibuat cerita mirip novel *Da Vinci Code*. Kemudian banyak dimensi keasikan tersendiri dari ilmu sejarah. Intinya dengan belajar sejarah kita akan mendapat kedalaman pengertian yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Di dalam studi sejarah hubungan Indonesia-Jepang, saya kira banyak hal menarik dan penting untuk dijadikan pelajaran. Misalnya di dalam makalah Ibu Aiko beliau menyampaikan bahwa, tidak lama setelah kemerdekaan telah disinggung masalah yang kita kenal dengan istilah Pampasan Perang tahun 50-an. Cerita yang kita ketahui contoh produk dari Pampasan Perang antara lain hotel-hotel yang sekarang di Bali, Yogyakarta, dan di satu-dua wilayah lainnya. Kakak dari ayah saya pun pergi ke Jepang berkat dana Pampasan Perang. Saya baru sadar ternyata informasi tentang Pampasan Perang itu ketika saya masuk jurusan sejarah. Ketika saya tanya beliau menyatakan bahwa Pampasan Perang dipakai juga untuk menciptakan kader-kader terampil.

Tetapi sejarah juga bersinggungan dengan berbagai masalah politik dan segi-segi yang akan menjadi legal formal. Kembali pada konteks Pampasan Perang. Tentu saja ada pertanyaan, apakah benar Jepang harus membayar kerugian pada Indonesia? Bukankah Jepang pada saat itu datang untuk membebaskan Indonesia dari kolonialisme Belanda? Mengapa sekarang ada pendapat yang kemudian diminta untuk membayar upeti kerugian. Apakah dapat dibenarkan, ini pertanyaan lain, apakah benar ataukah apakah dapat dibenarkan jika Belanda kemudian juga ikut menuntut ganti rugi? Apakah kita sebagai orang Indonesia ini bisa membenarkan Belanda ketika mereka menumpang kepada Indonesia untuk mendapatkan ganti rugi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan historis. Tetapi jelas sesungguhnya kaitan dengan prinsip, pertanyaan-pertanyaan sejarah yang kemudian masuk ke dalam ranah hukum, masuk ke dalam ranah politik dan membimbing kita berdiskusi mengenai bagaimana sebaiknya kita menghadapi masa lalu yang rumit.

Banyak pertanyaan lain yang dapat diajukan. Tetapi yang menyebabkan hal ini semakin menarik ialah ketika sederet pertanyaan yang telah kita yakini jawabannya, ialah kita, sebagai orang Indonesia, ditanya "apakah Jepang harus membayar ganti

rugi?" Kita jawab "pasti". Karena itu adalah Pampasan Perang, jadi jelas bahwa Jepang sudah melakukan kejahatan perang. Kalau begitu halnya, maka bagaimana misalnya dengan Jerman? Setelah Perang Dunia II, ketika Berlin dibebaskan oleh tentara Soviet, banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh tentara Soviet terhadap orang Jerman. Apakah Rusia harus membayar ganti rugi kepada orang Jerman, yang sudah melakukan begitu banyak kejahatan kepada orang Rusia?

Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita ajukan, maka kita akan mendapatkan situasi yang tidak sama. Kita, ternyata akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Seluruh batas pengertian politik menjadi sangat jelas berbeda dan bahkan berbalik. Tugas sejarawan adalah mengajukan pertanyaan, bukan memberikan jawaban politik atas pertanyaan-pertanyaan itu. Pemberian jawaban itu adalah tugas para politisi, tugas pemimpin negara, para cendikia, intelektual. Tugas sejarawan yang utama adalah mengajukan permasalahan. Dalam banyak hal sejarawan terkadang tidak tahu, tidak paham tentang hal ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit harus terus dihadirkan kepada publik agar bisa melihat persoalan-persoalan kita secara lebih jelas.

Banyak orang Indonesia ketika menghadapi situasi pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945, berfikir tentang kekuasaan Jepang dalam konsep fasisme. Ini adalah suatu konsep, di dalam dunia politik yang muncul pada tahun 1922-1932 di Eropa. Kemudian orang melakukan perlawanan terhadap Jepang pada masa itu dengan membuat gerakan-gerakan antifasisme berkolaborasi dengan Belanda. Sehingga seakan bertukar tempat dalam sejarah.

Ada satu persoalan ketika semua produk yang berasal dari Jepang dianggap Fasisme. Lagu Indonesia Raya tiga stanza ditetapkan pada zaman Jepang. Lantas apakah kita berhenti menyanyikan lagu Indonesia Raya yang ditetapkan pada masa itu? Kemudian bagaimana dengan bahasa Indonesia yang ditetapkan pada masa Jepang, ketika Jepang yang secara efektif melawan pemakaian bahasa Belanda? Jadi persoalan-persoalan historis yang muncul ke permukaan tiba-tiba menjadi persoalan-persoalan politik. Jadi sepatutnya bagaimana, apakah kita harus mengutuk atautkah berterima kasih?

Sejak awal kita ingin membantahnya, itulah sejarah yang sangat luas. Punya banyak dimensi. Ada kebahagiaan di sana dan penderitaan di sini. Ada pula persahabatan di sana dan ada pengkhianatan di sini. Tugas sejarawan adalah melihat berbagai persoalan yang ada secara utuh. Jawaban-jawaban dari persoalan ini bukan berarti menjadi putusan sepihak, yang dibuat penetapannya dan tidak boleh diubah.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

Pengertian dasar kita mengenai prinsip universalitas yang sering diagungkan oleh semua orang tiba-tiba menjadi relatif. Hal ini disebabkan prinsip universalitas dalam situasi-situasi tertentu, di dalam konteks tertentu, untuk kalangan tertentu, tidak selalu dapat dibenarkan.

Ada pertanyaan yang akan terus muncul. Tugas sejarawan adalah membuat debat publik menjadi lebih mempunyai dasar informasi yang kuat, sehingga terjadi *well informed decision*. Terjadi pencapaian dengan bukti-bukti yang terus bertambah dari waktu ke waktu, yang bisa membuka pikiran kita. Inilah menurut hemat saya tugas sejarawan. Dengan latar belakang itu saya masuk ke persoalan pertama, historiografi.

Selama ini fokus kita mungkin hanya pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, antara 1942 sampai Agustus 1945. Padahal hubungan ini sudah jauh panjang terjalin. Kita mempertemukan dua arus penting, 110 tahun hari Kebangkitan Nasional, yang terjadi pada tahun 1908 ketika Budi Utomo didirikan dan Hubungan Indonesia Jepang. Jangan lupa bahwa para pendiri bangsa kita mulai mengobarkan perlawanan terhadap Belanda, pada awalnya diilhami oleh kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905. Kalau kita baca koran-koran pada masa itu, ternyata berita tentang orang Asia bisa mengalahkan orang Eropa, disampaikan ke mana-mana, sampai Manchuria dan Semenanjung Korea. Hal ini yang terus ditanamkan dari waktu ke waktu dalam berbagai bentuk

Mungkin sebagian dari kita paham juga bahwa saat inipun kita sangat dipengaruhi, bahkan terinspirasi pada ide-ide yang berkembang di Jepang, sebuah negeri yang modern, meski tetap bepijak pada tradisi yang tetap hidup di dalam masyarakat.

Dalam seminar nanti akan disampaikan makalah tentang seni rupa Indonesia. Kita bisa melihat, orang-orang seperti Sudjojono seperti mendapatkan tempat yang baru, di tahun 1942-1945. Hal ini tidak mungkin ditemukan pada masa kolonial yang hirarkis. Tiba-tiba orang-orang ini mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan diri secara langsung dalam bahasa yang mereka miliki.

Dalam dunia sastra Indonesia, Chairil Anwar muncul dalam bahasa yang lebih lugas jika dibandingkan dengan Pujangga Baru. H.B. Jassin mengatakan, bahwa apa yang dikatakan oleh Pujangga Baru dalam dua ratus halaman, selesai dalam dua kalimat oleh Chairil Anwar. Karena begitu lugas dan ringkasnya, langsung menusuk. Hal ini tidak mungkin, bila tidak ada situasi perubahan masa zaman ini. Pertanyaan etikanya, apakah kita harus berterima kasih kepada Jepang yang sudah datang menghilangkan kolonialisme dalam hitungan hari?

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

Bagi saya, salah satu potret kedatangan Jepang ke Jawa yang paling memukau adalah memoar Pramoedya Ananta Toer, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* yang menceritakan bagaimana orang Indonesia menyambut gembira kedatangan Jepang, dan setahun kemudian memaki-maki. Perasaan datang silih berganti, tergantung tempat kita di dalam masyarakat. Bagi saya yang menarik dari hal itu adalah, kita belajar untuk lebih bersahaja, lebih mawas diri, lebih tenang melihat kenyataan-kenyataan historis.

Saya senang karena dalam pertemuan ini, di dalam seminar ini nanti, kebetulan saya sempat membaca makalah-makalah para pembicara. Prof. Susanto Zuhdi memberikan informasi mengenai masa sebelum pendudukan Jepang, sedangkan Bu Aiko antara tahun 1945-1948. Jadi kita mendapat kurang lebih lanskap hubungan kedua negara. Aminudin Siregar menulis soal seni rupa, yang tentunya akan memperkaya historiografi Indonesia-Jepang. Pertanyaan besar yang mungkin nanti akan memunculkan perdebatan tentang apa sebenarnya dampak pendudukan Jepang bagi Indonesia modern.

Ben Anderson di dalam disertasinya mengklaim bahwa pergerakan itu menurunkan jalannya untuk menuju revolusi hingga periode kemerdekaan di masa Jepang. Kenapa terjadi deprivatisasi tiba-tiba, pemuda-pemuda kampung tidak punya suara sama sekali dalam proses partai politik. Proses politik pada masa tahun 1908-1942 itu masih banyak diisi oleh kaum terpelajar yang banyak mendominasi kecakapan membuat resolusi, surat kabar dan sebagainya. Tapi ingat, hanya 6,4 % orang Indonesia yang bisa membaca pada saat itu. Artinya, sebetulnya kita bangsa Indonesia tumbuh dipimpin oleh kaum terpelajar, kemudian semangat yang ditiupkan dari kaum pelajar itu semakin menguat di dalam periode pendudukan Jepang.

Ketika pertanyaan yang sama diajukan, lantas bagaimana kita harus memahami periode ini? Saya kira beberapa pertanyaan akan muncul ketika historiografi penulisan sejarah dari periode ini dialami. Masih banyak hal lain saya kira yang pantas untuk didiskusikan dan bisa dialami dalam seminar ini. Saya berharap seminar ini bisa membuahkan agenda sunyi tentang apa-apa saja saja peluang kajian tentang masa Jepang yang masih kosong. Selanjutnya saya mau masuk ke dalam rumusan yang kedua mengenai sumber sejarah.

Historiografi atau penulisan sejarah tumbuh karena ketersediaan sumber, yang bisa berkembang ketika ada sumber-sumber lain. Sumber-sumber lama ini juga bukan lagi semuanya diturunkan setelah sekian lama tertimbun. Saya bisa memahami yang disebut-sebut sebagai sumber baru itu sebenarnya adalah sumber lama yang menjadi proses baru dalam konteks kita sekarang.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

Nanti untuk sumber sidang BPUPK kita masih kekurangan pidato Yamin, dan juga pidato Soepomo yang sampai saat ini belum berhasil ditemui salinannya. Saya berharap dalam kesempatan ini kita dapat bekerjasama dengan pihak Kedutaan Besar Jepang. Apakah mungkin catatan historigrafis dari sidang BPUPK yang merupakan rekaman otentik kata perkata itu bisa ditemukan di Jepang.

Dalam hemat saya, sebuah sidang yang penting diselenggarakan atas restu pemerintah Jepang, mustahil hasilnya tidak dibawa oleh pemerintah Jepang ke Jepang. Pertanyaannya adalah di manakah sumber itu disimpan. Saya berharap Dirjen Kebudayaan bersama Kedubes Jepang dapat kerjasama melacak kembali sumber-sumber ini.

Ketika kita punya sumber lama dan kita baca dengan cara yang baru, di sini, saya kira yang sangat menarik, kaitannya dengan pameran ini adalah media propaganda Jepang. Ini adalah sumber lama yang kita ketahui, dan selama itu saya kira kita menggunakannya sebagai sumber informasi. Tetapi sekarang itu dalam historiografi, metodologi baru, pertemuan antara ilmu sejarah dan ilmu-ilmu lain termasuk kajian budaya yang bisa melihat sumber-sumber ini, membaca sumber-sumber ini dari perspektif yang berbeda.

Jadi kalau dahulu, misalnya orang mencurigai propaganda itu sebagai sumber yang kurang bisa diandalkan karena sebenarnya lebih mencerminkan harapan dari orang yang membuatnya. Jadi kita bisa membaca sumber-sumber lama dengan cara-cara baru. Saya sangat berharap dengan adanya seminar seperti ini dan juga sumber-sumber baru kemungkinan-kemungkinan baru juga akan muncul. Sehingga itu tidak mudah mengenyahkan, menyangdingkan bisnis sumber-sumber yang selama ini dibaca dalam satu cara saja.

Ketiga adalah sumber-sumber yang selama ini cenderung tidak dimasukan, misalnya foto. Foto diambil sebagai pelengkap dalam menerbitkan buku saja, cari fotonya biar bukunya lebih bagus, tapi fotonya sendiri cenderung tidak dianggap sebagai sumber sejarah dan sebetulnya jika memasuki dunia foto saya kira penting mengetahui siapa yang di dalam foto, dan siapa yang membuat foto itu tentunya itu akan berpengaruh terhadap sudut pandang terhadap yang difoto tersebut, dan ini adalah isu yang sangat menarik dan sangat layak dihidupkan kembali. Ini akan membuat pikiran kita lebih mendalam dan sebagai sikap perilaku juga akan lebih bersaing. Bagi saya belajar sejarah membuat kira mengerti bahwa tempat kita di dalam dunia ini sangat kecil, baik secara geografis maupun temporal. Dengan sejarah kita juga belajar menumbuhkan rasa empati. Hal inilah saya kira kita bisa mengangkat Indonesia.

Perpustakaan Nasional, 2 Agustus 2018

**INDONESIA—JEPANG, 1900—1941 :
HUBUNGAN ANTARBANGSA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS**

Susanto Zuhdi

“Sebagai rakyat yang dijajah dan ditindas dan karenanya mempunyai inferioritas-kompleks, kita mungkin tidak percaya bahwa bangsa Asia mempunyai kesanggupan menyamai orang-orang Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi”
(Ahmad Subardjo Djojoadisuryo, 1978:196)

Pendahuluan

Topik hubungan Indonesia—Jepang dalam periode yang dibicarakan ini tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan negara yang bernama Hindia Belanda (*Dutch East-Indies*). Dengan demikian, maka secara konseptual perlu diterangkan makna kata “Indonesia” dalam konteks historis. Berbeda dengan kata “Jepang” yang menunjuk pada konsep negara sekaligus suatu bangsa, Indonesia secara eksplisit baru muncul pada awal dekade kedua abad ke-20. Ketika inilah perhimpunan mahasiswa yang berasal dari kepulauan yang masih Hindia Belanda berdiri di Leiden, Nederland. Perhimpunan mahasiswa itu bernama *Indonesische Vereniging* kemudian menjelma menjadi *Perhimpunan Indonesia* dengan majalah yang diterbitkan bernama *Indonesia Merdeka*. Meskipun kata Indonesia sesungguhnya lahir sebagai bukti dari perjuangan politik, pengertian semula mengacu pada lahirnya suatu “bangsa”, artinya belum menjadi sebuah “negara”. Di dalam perjuangan politik untuk melawan dan mengakhiri kolonialisme Belanda itulah, Indonesia mewujud sebagai bangsa dalam suatu Ikrar Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kemudian Indonesia sebagai cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan dalam pergerakan nasional baru terwujud sebagai negara pada 1945.

Dalam periode yang dibahas ini *Indonesia*, yang dimaksud adalah suatu “bangsa” yang sedang berada dalam proses pembentukannya. Jepang sebagai bangsa yang tak pernah dijajah bangsa asing, merupakan negara di Asia yang kuat dan dijadikan acuan bangsa yang maju dan modern tetapi tidak meninggalkan tradisi dan kebudayaannya. Kemajuan Jepang ditandai dengan kemampuannya bersaing dan sejajar dengan negara-negara Eropa. Bahkan Jepang lah bangsa Asia

INDONESIA—JEPANG, 1900—1941 :
HUBUNGAN ANTARBANGSA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

yang pernah mengalahkan bangsa Eropa (Rusia) dalam perang 1905. Beritanya segera meluas, termasuk ke wilayah Hindia Belanda, yang dalam beberapa tahun kemudian menginspirasi lahirnya kesadaran kebangsaan Indonesia.

Tema nasionalisme masih relevan untuk dibicarakan meskipun gejala globalisasi dan transnasional(isme) semakin deras masuk ke dalam kehidupan masyarakat-bangsa. Dengan kemajuan pesat di bidang teknologi dan informasi, bumi manusia kini “rata” seperti dikatakan Thomas Friedman. Persebaran orang oleh karena dorongan apapun faktornya, apakah karena faktor ekonomi sampai politik, atau karena mencari negeri yang aman; negara-bangsa kini banyak menghadapi masalah lintas apakah berdampak sosial, ekonomi maupun politik. Masalah yang dihadapi masyarakat-bangsa pun tidak hanya karena isu di wilayah perbatasan, melainkan isu global seperti, pemanasan global dan bencana alam, sampai perang yang diciptakan manusia sendiri telah menambah dorongan manusia bermigrasi, berdiaspora atau pencarian suaka yang lebih aman. Pelajaran apa yang dapat dipetik dari hubungan Indonesia – Jepang dalam periode yang dibicarakan ini akan menunjukkan betapa pentingnya kerjasama guna menyongsong masa depan yang lebih baik. Dalam hal Indonesia—Jepang tetapi juga bagi kemaslahatan peradaban manusia itu sendiri. Hidup Bersama dalam planit bumi yang semakin “punah” karena berbagai polusi, memerlukan jalan keluar kerjasama antarbangsa. Bagi Indonesia, seperti diungkapkan Bung Karno, nasionalisme Indonesia akan tumbuh subur dalam taman sarinya internasionalisme.

Makalah ini membahas mengenai hubungan diplomasi antara pemerintah Hindia Belanda dengan Jepang dan antara bangsa Jepang dengan bangsa Indonesia. Pola hubungan yang pertama memperlihatkan kepentingan politik dan ekonomi. Dalam aspek politik hubungan antarkedua negara itu sangat jelas di dalam konstelasi persaingan dan perebutan kuasa, sedangkan dalam aspek ekonomi berkaitan dengan perdagangan dan penanaman modal di bidang industri. Aspek ekonomi sudah tentu diharapkan resiprokal dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, Jepang maupun Belanda. Akan tetapi penetrasi ekonomi dan disusul dengan ekspansi politik Jepang menunjukkan bahwa pemerintah Belanda mengalami kerugian daripada sebaliknya. Kerangka masalah yang dibangun berkaitan dengan bagaimana penetrasi Jepang ke Hindia Belanda sehingga menimbulkan dampak terhadap berakhirnya kolonialisme Hindia Belanda dan pengaruhnya terhadap kebangkitan bangsa Indonesia.

Jepang dalam Pandangan Orang Indonesia

Tak pelak lagi bahwa Jepanglah yang tepat dinobatkan sebagai “Macan Asia” pertama, karena kemampuannya bersaing dan bahkan mengalahkan negara Barat. Pasca Perang Dunia I (pertama), bersama Amerika Serikat dan Inggris, Jepang merupakan tiga kekuatan besar dunia. Kepulauan Pasifik yang berada di sekitar garis khatulistiwa, yang terletak di wilayah pengaruh kekuasaan Amerika yakni Philipina dan Guam, semula dikuasai Jerman, kini menjadi wilayah yang diserahkan kepada Jepang. Menghadapi fakta tersebut, Inggris harus memperkuat kepentingannya di China, Singapura, dan Hongkong bagi pijakan yang kuat. Sementara itu untuk mendapatkan dukungan Inggris, maka Amerika Serikat dan China berupaya mengurangi kepentingan Jepang di negerinya. Dalam konstelasi seperti itu intensifikasi konfrontasi antara Jepang dan Amerika Serikat tidak dapat dihindarkan. Pada 1922, Aliansi Inggris-Jepang dibatalkan dan pada tahun yang sama Jepang dengan terpaksa menandatangani Washington Naval Treaty, diikuti London Naval Treaty pada 1930. Pada tahun 1931, terjadi insiden Manchuria, yang menyebabkan Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa pada 1933¹.

Prototipe orang Indonesia dalam memandang Jepang, dalam konteks menggambarkan kontak sebelumnya, sebagaimana dikemukakan Kanahale², terdapat nama Gatot Mangkupraja dan Mohammad Hatta. Setelah mengunjungi Jepang pada akhir 1933, Gatot dikenal sebagai seorang penganut “Pan-Asianisme” Jepang yang menyokong pergerakan nasionalisme Indonesia. Dalam perkembangannya Gatot Mangkupraja berperan besar dalam pembentukan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) pada tahun 1943. Sedangkan pendapatnya mengenai pandangan Hatta, Kanahale mengemukakan :

“mengingat keyakinan nasionalismenya yang mendalam, paling sedikit dapat dikatakan bahwa Hatta tidak mudah dipengaruhi; namun ia bukannya sama sekali tidak bersimpati terhadap Jepang pada waktu itu. Meskipun ia dengan tegas menolak kegiatan imperialisnya, ia tidak mengecam tantangan dinamis Jepang terhadap rongrongan dari pihak negara-negara Barat. Apakah pada waktu ia dapat menggambarkan Jepang sebagai penyokong gerakan nasionalis Indonesia, sangat sukar untuk diketahui”³.

Akan halnya kutipan Notosusanto dari Kanahale terhadap dua pandangan orang Indonesia itu, dikemukakan sebagai berikut “dalam hal itu antara sikap Hatta dan sikap Gatot Mangkupraja terbentang sikap kebanyakan nasionalis Indonesia berada

INDONESIA—JEPANG, 1900—1941 :
HUBUNGAN ANTARBANGSA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

di antaranya.⁴ Menarik untuk membaca sendiri tulisan Hatta dalam memoarnya. Hatta pergi ke Jepang dalam perjalanan bisnis pamannya, Ayub Rais, yang mengajaknya pada awal tahun 1933. Hatta menulis bahwa dirinya dijuluki “Gandhi dari Jawa” oleh pers Jepang. Hatta dalam memoir mengatakan terkesan pada sikap sopan santu pelayan di hotel. Kunjungan ke pabrik oto pada saat siswa melakukan praktis, membongkar oto buatan Ford Amerika Serikat, mereka memperhatikan bagian-bagiannya kemudian menyusunnya kembali, setelah itu seorang guru memeriksa hasil siswanya, “terpikir dalam hatiku, cara beginilah Jepang mengejar ketertinggalannya dari Eropa dan Amerika. Ditiru lebih dahulu dan kemudian dibuat sendiri dalam bentuk yang diperbaiki”.⁵ Kehadiran Hatta di Jepang meskipun tidak dalam kaitan perjalanan resmi, telah dimanfaatkan Jepang untuk mengambil simpati. Begitulah misalnya dengan pendudukan Jepang ke Manchuria, yang merupakan bukti perwujudan imperialisme, maka argumentasi Jepang, seperti disampaikan kepada Hatta, mengapa Jepang merebut Manchuria dari Tiongkok, (karena) Jepang takut, daerah itu akan diduduki oleh Soviet Rusia dan akan menjadi pistol di dada Jepang seperti kedudukan Jerman sebelum Perang Dunia Pertama.⁶

Catatan Hatta mengenai Jepang, menggambarkan kemajuan Jepang sebagai negara industri. Bangsa Jepang di mata Hatta, disiplin kerja keras, peniru dan akhirnya berhasil.⁷ Dalam pandangan Hatta yang lain, orang Jepang mendorong rakyat untuk yakin bahwa orang Indonesia mampu memerintah dirinya sendiri⁸. Dalam kaitan itu Hatta menulis “ ...dentuman meriam di Port Arthur membuka mata pemuda-pemuda Asia dan menanamkan di dalam hatinya suatu kepercayaan kepada suatu jaman yang akan datang. Dalam medan pertempuran Manchuria tentara raksasa Rusia dikalahkan dan dihancurkan oleh Jepang, yang merupakan negara yang begitu kecil. Rundingan perdamaian di Portsmouth pada Juni 1905 mengukuhkan pandangan itu karena telah menerima Jepang sebagai negara yang penting. Hal itu dianggap oleh rakyat dunia Timur bukan saja sebagai pengakuan atas kemenangan Jepang terhadap Rusia, melainkan pertama kali sebagai kemenangan Asia terhadap Eropa. Di seluruh dunia cahaya kebangunan nasional mulai bersinar di antara bangsa-bangsa tertindas dan terhina (Mohammad Hatta dalam Notosusanto, 1979:14).

Sementara itu orang Indonesia biasa juga mulai mengenal orang Jepang secara pribadi, umpamanya dalam hubungan antara pembeli dengan pemilik toko. Mereka dapat berbelanja dengan harga terjangkau karena barang-barang dari Eropa mahal. Dalam konteks ini Notosusanto mengemukakan “ dari pengalaman pribadi sebagai anak Batavia (Jakarta) sebelum perang, karena orang tua saya sering berbelanja di sebuah toko Jepang di sudut Jalan Kramat Raya dan Jalan

Kwitang yang bernama Toko Okamura. Di toko itulah kami biasa membeli “barang-barang bagus” kami seperti pakaian, alat tulis-menulis khususnya pulpen (merk Pilot atau Sailor, tapi tidak ada yang merk Soldier!) dan, yang paling saya ingat: mainan anak-anak. Saya masih terkenang akan yang punya toko sebagai orang yang sopan santun dan selalu tersenyum, yang saya duga itulah “image” orang Jepang di mata orang Indonesia pada waktu itu”.⁹

Ahmad Subarjo (1896—1978)

Dalam kaitan dengan Jepang, Ahmad Subarjo seorang tokoh pergerakan kebangsaan seangkatan Hatta dan Sukarno, tampaknya perlu diberi tempat tersendiri. Subarjo kurang lebih setahun tinggal di Jepang. Kesan-kesannya mengenai Jepang, yang begitu mendalam dituliskannya dalam beberapa topik. Dilihat dari tahun lahirnya Subarjo beberapa tahun lebih tua dari kedua tokoh proklamator. Subarjo adalah sosok nasionalis yang dengan sadar dalam membangun hubungan antara bangsa Indonesia dan Jepang dalam kerangka kesamaan dengan Pan Asianisme yang disponsori Jepang. Ide ini dianggapnya memudahkan perjuangan rakyat Indonesia dalam melepaskan diri dari kolonialisme Belanda. Berada cukup lama di Jepang di pertengahan 1930-an, ketika hubungan Pemerintah Hindia-Belanda dan Jepang mulai tegang, Subarjo sedikit elite nasional Indonesia yang banyak menulis tentang Jepang. Ia bersikap nonkooperasi terhadap pemerintah Hindia-Belanda, tapi yang menarik, seperti dikemukakan Goto, Subarjo luput dari penangkapan dan pembuangan seperti yang dialami Sukarno, Hatta, Syahrir dan lain-lain. Mengikuti analisis Goto mengenai pembentukan jiwa Subarjo sehingga memiliki prinsip dan pendapat yang “berpihak” ke Jepang melalui perjalanan spiritual yang sangat menyentuh yakni pada saat bergaul dengan Raden Ngabehi Wedyodipuro (tidak lain adalah Rajiman Wedyodiningrat), Sutatmo Suryokusumo, dan Cipto Mangunkusumo. Dari ketiga cendekiawan Jawa ini, Subardjo merasakan perlu untuk mengimbangi pengetahuan dari Barat dengan pengetahuan dengan aspek-aspek dari kebudayaan Timur, khususnya kebudayaan Jawa. Bagi Subardjo, kesadaran akan Eropa (rezim) dan Asia (penentang) dapat dianggap sebagai salah satu faktor sehingga mempunyai perhatian yang mendalam terhadap Jepang. Bagi Subardjo lagi, sebagaimana dicatat Goto, Jepang tidak lain adalah Asia dan kemenangan Jepang dari Rusia dianggapnya sebagai “titik balik sejarah Asia”.¹⁰

Akan halnya perjalanan dan kemudian pengalaman Subardjo yang pernah tinggal di Jepang selama kurang lebih satu tahun, Goto melukiskan secara mendalam dengan melihat latar dan konteks zamannya. Merasa sesak dalam

INDONESIA—JEPANG, 1900—1941 :
HUBUNGAN ANTARBANGSA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

situasi politik di dalam negeri sekitar tahun 1930-an, Subarjo tampaknya terpicat dengan slogan “Kembali ke Asia” terhadap masyarakat dunia sejak Jepang keluar dari Liga Bangsa-bangsa, Subarjo mencari jalan keluar. Akhirnya ia memperoleh kesempatan untuk pergi ke Jepang dan memperoleh pekerjaan dalam posisi sebagai koresponden surat kabar *Matahari*, yang dikelola Oei Tjiat di Semarang. Dari pekerjaannya inilah, Subardjo dapat membiayai kehidupannya di Jepang.¹¹

Dalam salah satu pikirannya, Subardjo menyatakan, “Jepang adalah satu-satunya negara di Asia yang dapat menggabungkan secara sempurna peradaban teknologi Barat dengan moral budaya Asia”. Tetapi Jepang dalam pandangan Subarjo, walaupun sudah membangun industri modern, Jepang kuat memelihara adat tradisi sebagai negara agraris yang terlihat di dalam agama, moral, dan tradisi masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan dewa-dewa dan setan. Semua itu diyakini sebagai suatu yang benar-benar ada. Kesatuan antara dewa dan manusia merupakan akar dari Sinto, agama tertua di Jepang.¹²

Hal paling penting dalam pengalaman Subardjo adalah bagaimana bangsa Jepang mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk suatu cita-cita besar. Maka Subardjo pun memaparkan upaya Jepang untuk “menguasai” wilayah atau daerah yang menjadi tujuan ekspansinya. Dalam upaya memahami politik Jenderal Baron Tanaja, Perdana Menteri Jepang tahun 1927, Subardjo menulis:

“..saya mulai mengerti kenapa perpustakaan per-kereta-api an Manchuria Selatan ini diatur sedemikian rapi. Memorial Tanaka antara lain memuat rencana politik yang bersemangat sebagai berikut: untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di Asia Timur, Jepang harus menjalankan “politik Darah dan Besi”. Untuk merebut dunia, Jepang harus mengalahkan Eropa dan Asia; untuk mengalahkan Eropa dan Asia, Jepang pertama-tama mengalahkan Cina; untuk mengalahkan Cina, Jepang harus merebut Manchuria dan Mongolia. Jepang mengharap dapat melaksanakan rencana ini dalam 10 tahun”¹³

Fakta menarik lainnya yang memesona Subardjo pada Jepang adalah bahwa bukan hanya keterangan tentang Manchuria yang diperoleh di perpustakaan, tetapi juga karena berbagai tulisan yang sangat terperinci mengenai Asia Tenggara dan khususnya Hindia Belanda. Dalam ketakjubannya, Subardjo mengatakan bahwa untuk membuat disertasi doctor tentang hukum ia tidak harus pergi dan belajar ke Leiden. Dalam otobiografinya, ia mengatakan begitu banyaknya jumlah buku tentang hukum hasil karya Snouck Hurgronje, Colenbrander, terbitan Bataafsche Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen,

keputusan-keputusan Volksradd dan lain sebagainya. Belum lagi surat kabar yang terbit di Hindia Belanda antara lain *Het Nieuws van den Dag*; *Bataviaasche Nieuwsblad*, *De Locomotief*. Dengan dukungan sumber literatur yang luas itu maka wajar politik ekspansi Tanaka dapat dirancang dengan baik. Dengan begitu Jepang telah mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai daerah-daerah yang akan ditaklukkan. Maka sewaktu pasukan Jepang memasuki Jawa, kepala distrik dan subdistrik menjadi heran dihubungi dengan bahasa Melayu yang lancar, dan disebutkan nama mereka secara pribadi.¹⁴

Jika umum diketahui tentang ungkapan terutama dalam kaitannya dengan propaganda bahwa Jepang merupakan “saudara tua yang akan membebaskan saudara muda (Indonesia) dari penjajahan Eropa”, Subardjo memperoleh keterangan sebaliknya. Dalam suatu pembicaraan dengan Dr. Ichikawa, Kepala Lembaga Kebudayaan Jepang (*Nihon Bunka Renmei*), Subardjo memperoleh kesan bagaimana kebudayaan digunakan untuk tujuan merancang cita-cita Jepang membangun “dunia masa depan”. Ichikawa seperti ingin menegaskan bahwa “Jepang adalah bagian dari Asia, dan rakyat Asia harus sadar mengenai ikatan-ikatan kebudayaan yang akan membawa kita saling pengertian yang baik”. Dalam kaitan hubungan Jepang dengan Indonesia, Ichikawa melanjutkan, tidak hanya secara kultural tetapi juga dalam kebangsaan. Jepang menganggap dirinya juga sebagai bangsa Melayu. Setidaknya Jepang berasal dari bangsa campuran Melayu, Mongol, dan Ainu. Begini kata Ichikawa sebagaimana yang ditulis Subardjo “...cobalah mengunjungi Pulau Kyushu. Di sana banyak dilihat penduduk yang berkulit hitam, ada pula yang berambut keriting. Orang-orang Indonesia sesungguhnya adalah saudara tua kita (Jepang:sz), karena nenek moyang kita datang dari Selatan”. Tetapi komentar Subardjo akan pengisahan Dr. Ichikawa menarik juga..”saya sedikit meragukan keterangan Dr. Ichikawa. Mungkin ia mempunyai maksud untuk mendapatkan rasa simpati terhadap Jepang dari para pengunjung (Lembaga Kebudayaan Jepang:sz). Saya pikir ini sangat diplomatis¹⁵.

Dalam metode sejarah, suatu prosedur kerja sejarawan memperoleh fakta, (oto)biografi merupakan sumber yang termasuk kategori primer dalam arti diperoleh dari tangan pertama—dalam hal ini Subardjo sebagai pelaku sekaligus sebagai saksi dalam peristiwa tertentu. Sekedar keterangan tentang “apa”, “siapa”, “di mana”, dan “bila”, yang dapat diperoleh, maka sumber biografi memberi kita informasi di balik fakta, yakni “kesan” dan “penilaian” penulisnya. Meskipun bersifat subyektif, namun justru di situlah terletak kekuatan (oto) biografi. Pembaca diajak untuk memasuki cara berpikir dan pandangan subyek atas peristiwa yang dialaminya. Dengan demikian sejarah semakin menemukan

INDONESIA—JEPANG, 1900—1941 :
HUBUNGAN ANTARBANGSA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

karakternya sebagai sumber informasi untuk mengungkap hal-hal bersifat hakiki dalam diri manusia, seperti mengenai aspirasi, cita-cita, harapan, semangat, pun rasa takut dan lain sebagainya.

Ekspansi dan Penetrasi Ekonomi Jepang

Dalam periodisasi sejarah Indonesia, tahun 1930-an dikenal sebagai masa sulit bagi kaum pergerakan terutama karena sikap dan kebijakan politik keras dari Gubernur Jenderal de Jonge. Oleh karena itu masa ini juga disebut juga sebagai “masa bertahan”. Dengan nada congkaknya, gubernur jenderal inilah yang mengatakan “ kami telah 300 tahun berada di Hindia dan akan 300 tahun lagi...”. Dari konstataasi inilah muncul ungkapan “Indonesia dijajah selama 350 tahun...”. Di dalam masa sulit itulah barang-barang produksi Jepang “mibanjir” ke Hindia Belanda. Dalam kaitan itu Ir. Sukarno menulis “ Impor Dari Japan Suara Rachmat Bagi Marhaen ?” :

“ ada orang mengatakan (sangat dangkal, menurut Sukarno) “..di dalam zaman meleset ini, dimana Marhaen hidup hanya dengan sebangggol sehari, Japan telah memasukkan barang-dagangan di Indonesia yang murah kelihat-murah: Kemeja lima belas sen, handuk lima sen, saputangan dua sen, piring empat sen,—dan begitu seterusnya!—, itu belum pernah kejadian di Indonesia sebelum zaman sekarang ini. Jagoan dimata saudara ini adalah suatu *deus machina*, suatu dewa penulung yang datang dari langit, bagi Marhaen yang kini begitu kekurangan uang ... Tetapi, tetapi ! apakah benar kita wajib memuji impor dari Japan ini sampai muluk-muluk, membilang terima kasih di atasnya sampai habis-habisan, mengeramatkan kepadanya sampai semua radikalisme yang ada di dalam dada kita habis kabur kekayaan? Apakah benar impor dari Japan itu kita pandang sebagai rakhmat bagi Marhaen, sehingga pantas kita sokong dan pantas kita aju-ajukan?. Awaslah awas, sekarang barang Japan murah, sekarang barang Japan itu seakan-akan meringankan nasibmu, tetapi nanti, kalau imperialisme Japan itu sudah menang persaingannya dengan imperialisme Barat, nanti kalau ia sudah menggagahi sendiri seluruh pasar di benua Timur ini, nanti kalau tidak ada konkurensi lagi dari Barat, nanti ia naikkan harga barang-dagangannya itu, memahalkan barang-dagangannya itu, memberatkan nasibmu sampai kepada dasar-dasarnya kamu punya kantong dan dasar-dasarnya kamu punya bakul nasi”.¹⁶

Sukarno di depan pengadilan Belanda 1930 “Indonesia Menggugat” mengemukakan : “ ... tetapi imperialisme modern Asia baru kita lihat pada negeri Jepang tempo akhir-akhir ini, imperialisme modern di Asia adalah suatu “barang baru”, suatu *unicum*, suatu *nieuwigheid*; memang hanya negeri Jepang saja dari negeri-negeri Asia yang sudah masuk ke dalam kapitalisme-modern itu. Kapitalisme modern Jepang yang butuh akan minyak tanah dan arang batu, kapitalisme Jepang yang juga membangkitkan tambahnya penduduk yang deras sekali sehingga melahirkan nafsu mencari negeri-negeri emigrasi (sejak tahun 1834 Jepang turut dalam balapan imperialisme, menduduki wilayah Tiongkok, Korea, dan Rusia (Sakhalin). Kapitalisme modern Jepang itu membikin rakyat Jepang lupa akan kesatriaannya dan menanamkan kuku-kuku cengkeramannya di Semenanjung Sakhalin dan Korea dan Manchuria”.¹⁷

Suatu gejala mencolok dalam sejarah Asia Timur di masa Perang Dunia Pertama (1914—1918) adalah munculnya Jepang dalam bidang industri. Dalam periode itu Jepang dengan cepat mengarahkan pandangannya ke Hindia Belanda karena merupakan daerah yang bagus bagi kegiatan bisnis. Seiring dengan gejala itu, maka arus masuk pendatang orang Jepang pun dimulai. Antara 1917—1927 populasi orang Jepang berfluktuasi. Latar belakang pekerjaan orang Jepang antara lain di bidang-bidang: pertanian, pabrik, transportasi, pegawai negeri, dan bekerja sendiri. Meskipun demikian, umumnya terjadi kecenderungan pertumbuhan yang lambat. Sejak 1927 populasi orang Jepang menanjak dengan cepat. Perkembangan selanjutnya mulai mendatar sampai pada 1931, meskipun meningkat 500 orang setiap tahun. Setelah berpuncak pada 1933, jumlah orang Jepang mulai turun seiring dengan krisis setelah Perang, ditandai dengan berkurangnya pekerja di bidang perdagangan. Faktor yang melatarbelakangi gejala tersebut, karena pada tahun itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi Darurat tentang Pembatasan Impor dan Ordonansi Darurat tentang Pembatasan Orang Asing. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah masuknya barang-barang Jepang dengan harga murah, yang semakin luas mencakup bagian besar pasar-pasar di Hindia Belanda¹⁸.

Dalam artikelnya, Murayama memilah populasi orang Jepang di Hindia Belanda dengan bidang pekerjaannya. Sumber data yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan orang Jepang adalah survey yang dikerjakan Konsulat Jepang secara resmi di Batavia pada tahun 1912. Namun ditengarai dari catatan kasar 1909 mengenai kedatangannya orang Jepang di Hindia Belanda. Kebanyakan wanita Jepang sebagai pelacur sedangkan kebanyakan kaum pria Jepang bekerja di sektor perikanan sebagai nelayan, khususnya penyelam untuk mendapatkan

INDONESIA—JEPANG, 1900—1941 :
HUBUNGAN ANTARBANGSA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

kerang Mutiara di Alor, sekarang termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jumlah laki-laki Jepang berada di pulau ini sejumlah 94 orang, yang tercatat pada 1909 dalam komposisi sebanyak 155 orang, sedangkan perempuan Jepang 61 orang. Perubahan radikal terjadi pada 1912. Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk melarang prostitusi, akibatnya jumlah perempuan Jepang di Hindia Belanda menurun. Menjelang 1914 jumlah laki-laki Jepang melebihi jumlah perempuan.¹⁹

Gejala yang menarik dari perkembangan aktivitas orang Jepang di Hindia Belanda adalah pergeseran dari nelayan ke pedagang keliling. Mereka adalah yang berjualan barang jenis obat-obatan didorong Perang Jepang—Rusia (1904-1905). Murayama mencatat periode pertama komunitas Jepang dari 1912—1935, ciri pertama, di bidang pertanian sangat kecil. Dalam periode kedua, 1936-1937 tampak bahwa bidang perkebunan Jepang di Hindia Belanda meliputi 1870.700 hektar, merupakan 66,8% dari jumlah keseluruhan perkebunan Jepang di Asia Tenggara, jumlah itu telah melampaui angka dibandingkan dengan Malaya (149). Dalam gelombang pertama perdagangan ini terdiri atas pedagang keliling dan pemilik toko. Pada 1914 terdapat 74 pemilik toko dan 144 pekerja toko di Jawa. Terjadi pergeseran barang dagangan dari obat-obatan ke barang keperluan sehari-hari (kelontong), aktivitas para pedagang pun menyebar ke berbagai daerah dan kota kecil, selain Surabaya dan Semarang yang waktu paling ramai. Dampak Perang Dunia Pertama, ialah menjadi terganggunya impor barang dari Eropa, sehingga merugikan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini menjadi faktor pendorong semakin banyaknya kegiatan perdagangan Jepang di Hindia Belanda. Di Kediri, sebuah kota kecil di pedalaman Jawa Timur, misalnya, seperti yang tertulis dalam suatu laporan “Kami (pedagang Jepang:SZ) terutama terlibat di dalam kebutuhan sehari-hari kepada penduduk asli, sehingga kita tidak di dalam terpengaruh oleh depresi seperti pedagang-pedagang di kota. Dengan kerajinan, tidak sulit untuk mendapat untung yang layak²⁰.

Suatu gambaran yang terjadi di kota kecil lainnya di Jawa, suatu kajian tentang Cilacap, dapat dikemukakan di sini. Pada 1929 impor Jepang ke Hindia Belanda bertambah 42% jika disbanding dengan tahun sebelumnya. Sesungguhnya ekspor-impor perdagangan Hindia Belanda dan Jepang mulai terlihat tak seimbang pada 1927. Ekspor Hindia Belanda ke Jepang semakin merosot. Pada 1937 ekspor gula dari Jawa misalnya mengalami penurunan tajam. Sementara itu Jepang mulai mengembangkan produksi gula di pabrik-pabrik yang didirikan di di Taiwan. Dalam periode terakhir masa kolonial Belanda, kapal Jepang tidak hanya ke pelabuhan besar, tetapi juga ke Cilacap, suatu pelabuhan di selatan Jawa. Selain kapal-kapal

dari Eropa, kapal Jepang yang masuk ke Cilacap adalah maskapai Osaka Shosan Kaisha, seperti terlihat di di tabel di bawah ini.²¹

Jumlah Kapal yang Datang di Pelabuhan Cilacap

Tahun	Belanda	Jerman	Inggris	Jepang	Italia	Perancis	Cina
1923	87	11	28	5	-	-	-
1924	99	12	33	11	-	-	-
1933	118	16	10	14	2	1	-
1934	121	15	14	13	3	-	-
1935	99	17	15	11	2	-	-
1936	91	20	11	11	1	-	-
1937*	41	7	4	6	-	-	1

Sumber: diolah dari *Memorie van Overgave Resident Banyumas GHF van Huis*, 1937. ARA – DH. Hlm. 315 dan *Verslag NHM Agentschap Tjilatjap 1901-1939* (*sampai dengan bulan Juni).

Dari tabel di atas, penambahan kedatangan kapal di Cilacap dari tahun 1923 terus meningkat dari 5 menjadi 11 dan hanya berkurang sedikit sampai tahun 1936 (11 kapal) dan anjlok pada 1937 menjadi 6 kapal. Pada umumnya keadaan yang terus merosot karena depresi ekonomi dunia 1929 dirasakan berat bagi perdagangan Hindia Belanda. Sepanjang tahun 1930—1933 memiliki toko di Cilacap mengalami banyak kerugian. Akan tetapi justru di masa itulah masuknya barang-barang murah dari Jepang. Seperti tabel di atas, tahun-tahun 1933- sampai 1936 misalnya, jumlah kapal Jepang ke Cilacap relatif tetap tinggi, rata-rata 11 kapal. Aktivitas perdagangan Jepang di Cilacap, sebagai juga di Jawa, ini mendapat keuntungan dengan masuknya barang Jepang. Apalagi terdapat slogan “barang Jepang harus didistribusikan oleh orang Jepang sendiri”. Masuknya kapal ke Cilacap memberi keuntungan dengan 85% dibanding impor dari negara lainnya.²² Boleh saja tidak terlalu menguntungkan bagi Jepang untuk berbisnis di Cilacap, tetapi suatu aspek yang menarik dikaji lebih lanjut adalah peran penting pelabuhan Cilacap bagi sistem pertahanan Belanda, telah diketahui Jepang. Cilacap adalah salah satu tempat yang diserang dari udara secara cukup massif. Sejarah kemudian mencatat bahwa evakuasi orang Belanda ke Australia yaitu melalui pelabuhan ini pada Februari dan awal Maret 1942.²³

Bagitulah beberapa hal Pertama, dinamika hubungan Indonesia—Jepang dalam gambaran umum. Kedua, persepsi atau pandangan orang Indonesia

INDONESIA—JEPANG, 1900—1941 :
HUBUNGAN ANTARBANGSA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

terhadap Jepang, baik sebagai bangsa yang mengancam, karena menjalankan imperialisme, maupun sebagai inspirator bagi kebangkitan nasional Indonesia. Ketiga, dalam perspektif historis yang dimaksud sebagai upaya untuk memperluas berbagai aspek kultural bagi suatu upaya untuk saling memahami karakter dalam konteks antarbangsa.

Catatan Akhir

- ¹ *The War History office of the National Defence College of Japan.* (2015). *The Invasion of the Dutch East Indies.* Edited and translated by Willem Remmelink. Leiden University Press.
- ² Nugroho Notosusanto. (1979). *Tentara PETA pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia.
- ³ Nugroho Notosusanto. (1979). *Tentara PETA pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia. Hal: 14-15.
- ⁴ Nugroho Notosusanto. (1979). *Tentara PETA pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia.
- ⁵ Hatta, Mohammad. (2002). *Memoir.* Jakarta: Panitia Penerbitan. Hal: 304.
- ⁶ Hatta, Mohammad. (2002). *Memoir.* Jakarta: Panitia Penerbitan. Hal: 302-303.
- ⁷ Hatta, Mohammad. (2002). *Memoir.* Jakarta: Panitia Penerbitan.
- ⁸ Nugroho Notosusanto. (1979). *Tentara PETA pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia. Hal: 11
- ⁹ Nugroho Notosusanto. (1979). *Tentara PETA pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia. Hal: 14.
- ¹⁰ Ken-Ichi Goto. (1998). *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia.* (terjemahan Hiroko Otsuka dkk) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal: 314—318.
- ¹¹ Ken-Ichi Goto. (1998).. *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia.* (terjemahan Hiroko Otsuka dkk) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal: 320—321.
- ¹² Ken-Ichi Goto. (1998). *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia.* (terjemahan Hiroko Otsuka dkk) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal: 327—328.
- ¹³ Ahmad Subardjo Djojoadisuryo. (1978). *Kesadaran Nasional Sebuah Otobiografi.* Jakarta: Penerbit PT Gunung Agung: hal 203-204
- ¹⁴ Ahmad Subardjo Djojoadisuryo. (1978). *Kesadaran Nasional Sebuah Otobiografi.* Jakarta: Penerbit PT Gunung Agung: hal 204-205
- ¹⁵ Ahmad Subardjo Djojoadisuryo. (1978). *Kesadaran Nasional Sebuah Otobiografi.* Jakarta: Penerbit PT Gunung Agung. hal:208.
- ¹⁶ Sukarno. (1963). *Di bawah Bendera Revolusi Jilid ke-2,* Panitia Penerbit. Hal: 237—243
- ¹⁷ Sukarno. (1989). *Indonesia Menggugat,* Jakarta: PT Gunung Agung. Hal :28
- ¹⁸ Yoshitada Murayama. (1998). “Pola Penetrasi Ekonomi Jepang ke Hindia Belanda Sebelum Perang”, (dalam Saya Shiraishi dan Shiraishi, *Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara,* Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal: 144
- ¹⁹ Yoshitada Murayama. (1998). “Pola Penetrasi Ekonomi Jepang ke Hindia Belanda Sebelum Perang”, (dalam Saya Shiraishi dan Shiraishi, *Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara,* Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal: 148
- ²⁰ Yoshitada Murayama. (1998). “Pola Penetrasi Ekonomi Jepang ke Hindia Belanda Sebelum Perang”, (dalam Saya Shiraishi dan Shiraishi, *Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara,* Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal: 163
- ²¹ Susanto Zuhdi. (2017). edisi kedua: 82.
- ²² Susanto Zuhdi. (2017). (ed.kedua). *Cilacap (1830—1942) Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa.* Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal: 83-84.
- ²³ Susanto Zuhdi. (2017). (ed.kedua). *Cilacap (1830—1942) Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa.* Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal: 138-139

*INDONESIA—JEPANG, 1900—1941 :
HUBUNGAN ANTARBANGSA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS*

BANZAI!
OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

Nino Oktorino

Pengantar

Penaklukan yang dilakukan Jepang atas Indonesia—wilayah yang masih dikenal sebagai Hindia Belanda itu—adalah bagian dari serangkaian operasi untuk menyingkirkan Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda; menguasai wilayah yang kaya sumber daya ekonominya; serta mengamankan garis pertahanan terluar dari apa yang diidamkan Tokyo sebagai “Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur.” Tulisan ini membahas secara singkat operasi militer yang dilakukan Jepang di Indonesia meliputi strategi perang, kekuatan, teknik, dan persenjataan dalam usaha mengalahkan Belanda dan sekutunya.

Negara Matahari Terbit

Sebelum tahun 1853, Jepang adalah sebuah negara tertutup di bawah pemerintahan militer yang disebut *shogun* (jenderal), yang memerintah Negeri Matahari Terbit itu sejak abad ke-13. Ketertutupan itu diakhiri ketika armada Amerika Serikat di bawah pimpinan Komodor Matthew Perry memaksa *shogun* untuk membuka perdagangan dengan dunia Barat atau menghadapi serangan Amerika. Pada mulanya, *shogun* menyerah pada tuntutan ini dan memberikan berbagai hak istimewa kepada kekuatan Barat. Namun, Jepang tidak menerima nasib malangnya tanpa perlawanan. Di bawah kepemimpinan Kaisar Mutsuhito, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kaisar Meiji, Jepang menyingkirkan kekuasaan *shogun* dan melakukan modernisasi dengan mempelajari cara-cara Barat dalam apa yang disebut sebagai “Restorasi Meiji”. Mereka mendirikan pengecoran meriam, pabrik pemintalan kapas serta pabrik-pabrik lain yang dirancang seperti pabrik di Barat. Jepang pun mengadakan wajib militer dengan mencontoh wajib militer Prusia, dan membentuk angkatan laut yang meniru angkatan laut Inggris.¹

Para penguasa baru itu juga memperkenalkan undang-undang dasar dan mendirikan parlemen. Namun, langkah-langkah ini tidak mendorong terwujudnya demokrasi. Sistem yang diperkenalkan hanya sekadar menggabungkan kebiasaan serta cita-cita Barat dan Timur. Para menteri memerintah atas nama Kaisar tetapi

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Bangkitnya kembali pemujaan kuno terhadap Kaisar menopang suatu rasa kebangsaan baru. Dan kekuasaan militer pemerintah pun memainkan peranan besar seperti sebelumnya.²

Keberhasilan modernisasi selama Restorasi Meiji bukan hanya menyebabkan Jepang berhasrat untuk menyaingi negara-negara Barat dalam teknologi tetapi juga dalam usaha memperluas daerah kekuasaan. Tetapi ternyata negara-negara Barat tidak ingin melihat adanya negara berkulit kuning memasuki “kelompok eksklusif” mereka dan ikut menikmati bagian yang ingin mereka amankan bagi diri sendiri.³ Ideologi dari nafsu ekspansi Jepang sebenarnya berasal dari ajaran kuno yang disebut *Hakko Ichi-u* (delapan benang di bawah satu atap). Intisari dari *Hakko Ichi-u* adalah pembentukan suatu kawasan yang didominasi oleh Jepang yang meliputi bagian-bagian besar dunia.⁴

Kebijakan ekspansi Jepang untuk memenuhi ajaran *Hakko Ichi-u*, dimulai sejak zaman pemerintahan Kaisar Meiji. Pada tahun 1894, Jepang menyerang Cina dan merampas Formosa (sekarang Taiwan). Kemudian, dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904–1905, Jepang merebut Sakhalin dan Port Arthur. Lima tahun kemudian, negara matahari terbit ini menganeksasi Korea. Daerah kekuasaan Jepang semakin meluas setelah Perang Dunia I berakhir. Jepang, yang berperang di pihak Sekutu, memperoleh sejumlah bekas wilayah jajahan Jerman di Cina maupun Samudra Pasifik. Namun, ambisi ekspansi Jepang tetap tidak terbendung.⁵

Bangsa Jepang menganggap bahwa perluasan wilayah yang diraihinya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu tidak cukup untuk meningkatkan pamor dan kedigdayaannya, maupun menyediakan pasar dan sumber daya yang memadai bagi industrinyayang semakin berkembang. Dibandingkan dengan kekayaan kemaharajaan bangsa-bangsa Barat, daerah jajahan Jepang masih terlalu kecil sekalipun telah maju secara industri, Jepang masih sebuah negara feodal, Kaisar dianggap dewa dan para pejuang adalah pahlawan, yang dipuja.⁶

Pada akhir dasawarsa 1920-an, ketika dunia dilanda Malaise,⁷ orang Jepang yang terpukul secara ekonomi termakan hasutan kaum militan sayap Kanan yang sangat dengan korupsi di pemerintahan, dekadensi westernisme, dan mengalahnya Jepang pada tekanan negara-negara Barat. Di bawah sejumlah perwira muda yang radikal, mereka berusaha “memurnikan” sistem Kaisar dan kembali ke jalan hidup bangsa Jepang yang lama dan tradisional. Revolusi yang dikhotbahkan kelompok sayap Kanan ini menyebabkan banyak terjadi pembunuhan politik. pada awal dasawarsa 1930 Jepang praktis telah berpaling dari demokrasi.⁸

Kelompok sayap Kanan Jepang mengidamkan pembentukan sebuah negara autarki, penghancuran komunisme, dan ekspansi Kekaisaran Jepang. Ekspansi sendiri akan memampukan Jepang memindahkan penduduknya yang sudah padat sekaligus memperoleh sumber daya alam baru, tambahan pasar bagi hasil produksinya, dan membantu memecahkan malaise secara nasional. Lebih dari itu, ekspansi semacam itu telah memiliki sasaran yang siap diterkam, yaitu Cina—raksasa Asia yang lemah.⁹ Pada tahun 1931, Jepang mencaplok Manchuria, sebuah daerah yang kaya batu bara dan besi yang amat diperlukan oleh industri. Pada tahun 1937, Jepang berhasil menguasai daerah pantai dan beberapa kota penting di Cina. Namun negara ini tidak pernah berhasil menaklukkan Cina karena pemerintahan Chiang Kai-shek menolak tawaran perdamaian di bawah dominasi Jepang dan dapat bertahan dengan bantuan ekonomi dan persenjataan tidak resmi dari Amerika Serikat.¹⁰

Jepang Mengincar Hindia Belanda

Ketika jelas diketahui bahwa Cina harus dikepung sebelum dapat dikalahkan, Angkatan Darat Jepang pun mengalihkan perhatiannya ke selatan. Pada tanggal 22 Desember 1938, Perdana Menteri Pangeran Konoye Fumimaro menyampaikan pidato yang memproklamasikan sebuah “Orde Baru di Asia Timur” dan menyatakan bahwa Jepang akan membantu bangsa-bangsa Asia untuk mengusir kekuatan imperialis Barat. Dua tahun kemudian, Menteri Luar Negeri Matsuoka Yosuke mengubah sebutan “Orde Baru” menjadi “Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur”. Pekikan “Asia untuk Asia” pun digemakan. Namun, keinginan bahwa “sepanjang orang Asia itu adalah orang Jepang” tentu saja tidak dijadikan bahan propaganda kekaisaran.¹²

Ambisi teritorial ini tentu saja menyebabkan Jepang terlibat konflik dengan kekuatan kolonial, khususnya Inggris dan Prancis. Berbagai rencana perang dibuat untuk menghadapi kedua negara ini, tetapi keadaan di Timur Jauh menjadi semakin genting saat Jepang mulai berbaris ke selatan untuk mengepung Cina. Gerak maju ke Indocina relatif berhasil, karena tidak meletuskan satu pun tembakan berkat tekanan Jerman Nazi, yang telah mengikat persekutuan dengan Jepang lewat Pakta Tiga Negara, terhadap Pemerintah Vichy¹³ Penguasaan Birma (sekarang Myanmar) berarti perang dengan Inggris, dan konflik seperti itu berarti serangan terhadap Malaya dan mengamankan Singapura. Untuk melakukannya, Jepang membutuhkan basis-basis di selatan Indocina. Namun, ketika mereka berhasil memperolehnya, Amerika Serikat melakukan intervensi dengan cara

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

melakukan embargo ekonomi dan membekukan aset Jepang di Amerika, dengan tujuan agar Tokyo menarik diri dari Indocina maupun daratan Cina. Ancaman utama Amerika bagi ambisi Jepang di Asia Tenggara datang dari kekuatan udara strategisnya di Clark Field, Luzon, meskipun posisi Amerika di Filipina juga membahayakan setiap gerakan Jepang ke Hindia Belanda.

Pembatasan dan embargo minyak yang diterapkan Amerika dan Belanda menjadikan cadangan minyak Jepang menyusut.¹⁴ Angkatan Darat Jepang, yang telah menghadapi perang berkepanjangan di Cina dan kemungkinan perang melawan Uni Soviet di Manchuria, membutuhkan bahan bakar bagi kendaraan dan pesawat terbangnya. Akan tetapi, kebutuhan Angkatan Darat lebih sedikit dibandingkan kebutuhan Angkatan Laut, yang pada tahun 1941 memberikan tekanan tambahan terhadap Angkatan Darat untuk mengamankan kebutuhan minyak bagi armadanya dengan merebut wilayah Selatan.¹⁵ Di Asia Tenggara, selain di Miri di Kalimantan jajahan Inggris, minyak dihasilkan di wilayah Hindia Belanda, yaitu di Tarakan, Balikpapan, bagian utara dan selatan Sumatra dan Jawa Timur. Ladang minyak terbesar terdapat di Palembang.¹⁶

Pada mulanya, Jepang berusaha menghimbau pemerintah kolonial di Hindia Belanda agar mengikuti tindakan Prancis di Indocina. Dalam hal ini, tindakan Jepang tersebut bukan hanya didasarkan pada perhitungan mengenai keuntungan untuk memperoleh Hindia Belanda dalam keadaan utuh dan tanpa pertumpahan darah, tetapi juga agar mereka dapat menerima negeri itu dengan administrasinya yang efisien tanpa kegoncangan apa pun juga. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sama dengan para pegawai pemerintahan Belanda yang berpengalaman. Akan tetapi, Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborg Stachower menolak imbauan Jepang itu. Bahkan, Batavia hanya bersedia mengirimkan setengah dari tuntutan ekonomi Jepang, terutama peningkatan ekspor minyak mentah. Itu pun hanya berdasarkan kontrak selama 6 bulan saja. Sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh Belanda sendiri segera membawa pengaruh besar pada nasib Hindia Belanda.¹⁷

Rencana Perang Jepang

Ada empat pilihan rencana perang yang dibuat oleh Jepang. Pertama, yang paling berisiko, menyerang langsung Hindia Belanda. Baik Angkatan Laut maupun Angkatan Darat Jepang tidak menyukainya. Rencana pilihan kedua itu, yang didukung oleh Angkatan Darat, ialah mempertimbangkan serangan ke Malaya, lalu menyeberang ke Sumatra dan Jawa, melaju ke utara menuju Kalimantan, dan

terakhir ke Filipina. Rencana ini kelihatannya memastikan penguasaan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dengan cepat sementara menghindari perang yang terlalu dini dengan Amerika Serikat. Angkatan Laut sendiri menginginkan gerakan sebaliknya: dimulai dari Filipina dan berakhir di Malaya, karena kepulauan itu mengancam garis komunikasi Jepang dengan Hindia Belanda. Rencana keempat, sebuah kompromi yang diambil pada bulan Agustus 1941, menggabungkan proposal kedua dan ketiga sebagai operasi yang dilancarkan secara bersamaan.¹⁸

Pada mulanya, sekitar bulan Juni atau Juli 1940, Jepang mengira bahwa mereka dapat menghadapi Inggris dan Belanda secara terpisah. Namun, sejak bulan Agustus tahun itu, mereka melihat bahwa, sementara Inggris dan Belanda tidak dapat ditangani secara terpisah, tetapi mereka masih bisa memisahkan Amerika Serikat dan Inggris. Tetapi, pada akhir tahun 1940 semakin jelas bagi Jepang bahwa Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda telah bersatu padu. Ternyata situasi telah berubah: Inggris berhasil memulihkan dirinya setelah bencana kekalahan pada musim panas 1940 sementara sebuah pendaratan Jerman di Inggris mustahil dilakukan. Amerika Serikat sendiri secara aktif telah mulai mendukung Inggris, Cina, dan Belanda. Lebih dari itu, ketiga negara itu mulai mengadakan pembahasan di Singapura untuk membendung gerak maju Jepang di Timur Jauh – wilayah yang sekarang lebih dikenal sebagai Asia Tenggara.¹⁹

Penghalang utama terhadap ekspansi Jepang ke selatan adalah Armada Pasifik Amerika yang berpangkalan di Pearl Harbor. Sekalipun seorang penentang perang, Laksamana Yamamoto Isoroku memandang bahwa Armada Pasifik Amerika dapat dilumpuhkan lewat sebuah pukulan mendadak agar Amerika tidak mampu melakukan intervensi terhadap ekspansi Jepang di Pasifik. Rencana perang terakhir yang dibuat Jepang sangat berani dan rumit. Serangan harus dilancarkan ke berbagai tempat secara bersamaan. Waktu sangat berharga; kerja sama sangat penting; prajurit yang terlatih dan tangguh diperlukan; dan data intelijen haruslah benar-benar memadai. Meskipun Jepang memiliki jumlah prajurit dan pesawat terbang yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pihak Sekutu, tetapi pasukan mereka benar-benar tangguh karena terlatih baik dan telah memiliki pengalaman perang di Cina.

Rencana Jepang mengikhtisarkan tiga tahap besar: sebuah “serangan melanting”; sebuah periode konsolidasi; dan sebuah tahap bertahan. Selama tahap pertama, kekuatan udara, laut, dan darat Jepang akan menyerang ke seantero Pasifik, Timur Jauh, dan Hindia Belanda untuk menghancurkan pasukan Sekutu dan merebut semua sasaran yang diincarnya. Pada tahap kedua, Jepang akan melanjutkan operasi-operasi serangannya di Birma, tetapi akan menghabiskan

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

sebagian besar waktu dan energinya untuk mengonsolidasikan dan mengamankan wilayah yang direbutnya. Pada tahap ketiga, pasukan Jepang akan mempertahankan wilayah kekuasaannya.²⁰

Perencanaan yang rinci hanya dibuat untuk tahap pertama, yang dibagi menjadi tiga bagian terpisah. Bagian pertamanya meliputi serangan ke Pearl Harbor, perebutan Thailand, dan pendaratan maupun serangan awal terhadap Malaya, Hong Kong, Filipina, Guam, Pulau Wake, dan Kepulauan Gilbert. Bagian dua berkonsentrasi pada perebutan Singapura, operasi-operasi di Hindia Belanda, perampasan Kepulauan Bismarck, dan perebutan awal lapangan-lapangan terbang Inggris di selatan Birma. Dalam bagian akhir dari tahap awal, pasukan Jepang akan merebut Jawa, menduduki Sumatra, dan melancarkan sebuah serangan besar-besaran ke Birma.²¹

Dalam rencana perang umum Jepang, serangan ke Hindia Belanda bergantung pada keberhasilan atau kegagalan serangan mendadak mereka ke Pearl Harbor. Operasi ini dirancang untuk menggunakan Filipina, Borneo jajahan Inggris, dan Malaya sebagai batu loncatan. Jadi, tidak seperti serangan ke Malaya dan Filipina yang dilancarkan secara mendadak, operasi di Hindia Belanda, yang dilancarkan setelah perebutan wilayah di sekelilingnya, harus dilancarkan dengan menghadapi pasukan Sekutu yang telah siap siaga. Karena pada saat itu Jawa diperkirakan akan memperoleh bantuan Amerika dan Inggris (dari Australia dan India), serta diperkuat oleh pasukan yang mundur dari Filipina dan Malaya, Jepang berisiko menderita banyak kehilangan dalam hal pesawat terbang, kapal, dan sebagainya.²²

Seluruh operasi membutuhkan kerja sama erat antara unit-unit darat, laut, dan udara. Karena itu, diperlukan serangan yang berulang kali untuk menghancurkan kekuatan udara musuh, diikuti oleh gerak maju sebuah konvoi, yang dikawal oleh kapal-kapal perang di bawah perlindungan udara, di mana setelah itu unit-unit darat, sesudah mendarat di pantai, segera menduduki dan memperlengkapi basis-basis udara. Setelah itu, basis-basis yang telah dipersiapkan tersebut didarati oleh unit-unit udara untuk melancarkan operasi-operasi udara (berikutnya). Sekalipun dikerahkan semaksimal mungkin, terbatasnya jumlah kapal angkut dan kapal perang yang dikerahkan untuk operasi-operasi di selatan memaksa kapal-kapal tersebut harus berlayar bolak balik dari utara ke selatan dan timur ke barat, sebab operasi direncanakan untuk mengangkut, dalam waktu singkat, unit-unit yang cukup besar—terlalu besar dibandingkan jumlah kapal yang tersedia. Karena itu, unit-unit yang dilibatkan harus bergerak seperti jarum jam.²³

Untuk memuluskan rencana invasinya, maka Jepang menggunakan jejaring intelijennya yang luas di Hindia Belanda, jaringan ini telah dibangunnya sejak akhir dasawarsa 1920-an. Dinas intelijen Jepang terutama memakai kedok perdagangan bagi aktivitas subversif mereka. Sebagai contoh, seorang wakil konsul Jepang bernama Takagi Naojiro berpura-pura menjadi pengusaha kentang di Surabaya guna menutup-nutupi kegiatannya untuk mengimpor senjata ilegal bagi kaum nasionalis Indonesia maupun kegiatan gelap lainnya.²⁴ Sebuah laporan yang diterima oleh Belanda menyebutkan bahwa dua orang perwira cadangan Jepang telah beroperasi dengan menyamar sebagai tukang cuci dengan harapan dapat menemukan dokumen-dokumen yang tertinggal dalam saku seragam tropis para perwira Belanda. Tentu saja ketika Jepang berhasil mendapatkan suatu konsesi perkayuan di dekat Balikpapan pada tahun 1933, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka jalur-jalur tanah hutan yang direncanakan dijadikan landasan pendaratan rahasia bagi pesawat terbang. Selain itu, mereka mendapat informasi mengenai hampir seluruh lapangan terbang darurat Belanda.²⁵

Kekuatan Pasukan Penyerbu

Sebelum pecahnya Perang Pasifik, lebih dari 180.000 orang prajurit Jepang telah terbunuh dalam peperangan di Cina. Sekitar 400.000 orang telah menderita sakit atau terluka. Sementara 23 divisi terlibat perang yang berlarut-larut melawan Cina, sembilan divisi Jepang lainnya harus dipersiapkan untuk menghadapi ancaman Uni Soviet. Sekalipun demikian, Jepang dapat memobilisasi sekitar 1.000.000 orang prajurit pada tahun 1940 untuk memulai petualangan militernya ke selatan.²⁶

Untuk menaklukkan seluruh wilayah Asia Tenggara, Hindia Belanda, Filipina, dan wilayah Pasifik Selatan, Satuan Darat Selatan pimpinan Jenderal Count Terauchi Hisaichi diberikan 11 divisi infanteri, 4 brigade tambahan, 9 resimen tank,²⁷ dan sekitar 700 pesawat terbang.²⁸ Totalnya, hanya sekitar 400.000 orang prajurit.²⁹ Karena luasnya wilayah yang harus ditaklukkan, Jepang sangat bergantung pada unsur pendudukan maupun ketidaksiapan dan kelemahan dari pasukan Sekutu. Selain itu, karena keterbatasan transportasi laut, Jepang akan mendaratkan terlebih dahulu pasukannya di Filipina, Hong Kong, Malaya, dan Guam sebelum mengangkut lagi pasukan yang akan ditugaskan untuk menaklukkan Hindia Belanda.³⁰

Tugas menaklukkan Hindia Belanda jatuh ke pundak Satuan Darat ke-16 pimpinan Letnan Jenderal Imamura Hitoshi dan Satuan Darat ke-25 pimpinan Jenderal Yamashita Tomoyuki. Satuan Darat ke-16 membawahi Divisi ke-2, yang

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

berpangkalan di Jepang, dan Grup Infanteri ke-56, yang berada di Palau. Mereka diberikan waktu 150 hari untuk menyelesaikan operasinya.³¹ Sementara itu, Satuan Darat ke-25, yang bermarkas besar di Pulau Hainan di lepas pantai Cina Selatan, memiliki unit-unit yang bertebaran di Cina dan Formosa. Di samping Malaya, mereka ditugaskan untuk merebut Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.³² Kedua satuan darat itu didukung oleh Grup Udara ke-3 Angkatan Darat yang berpangkalan di selatan Cina dan utara Indocina, yang membawahi lima resimen pesawat pemburu, empat resimen pesawat pembom ringan, empat resimen pesawat pembom berat, dan dua resimen pesawat pengintai.³³

Pada mulanya, Jepang hanya merencanakan pengerahan dua divisi, yaitu Divisi ke-2 dan Divisi ke-38 untuk menyerbu Hindia Belanda. Keduanya merupakan unit yang mempunyai pengalaman perang di Cina. Sebelum dilibatkan dalam penyerbuan ke Hindia Belanda, Divisi ke-2 juga sempat bertempur melawan Tentara Merah Soviet di Manchuria pada tahun 1939, sementara Divisi ke-38 ikut serta dalam perebutan Hong Kong pada hari-hari pertama Perang Pasifik.³⁴ Dalam perkembangannya, Jepang kemudian menambah satu divisi lagi untuk menyerbu Hindia Belanda, yaitu Divisi ke-48, sebuah divisi berpengalaman di Cina yang dikirimkan sesudah perebutan Manila.³⁵ Dua resimen tank, ke-2 dan ke-4, juga dikerahkan dalam penyerbuan ke Hindia. Keduanya diperlengkapi dengan 69 tank ringan Tipe 94 dan tank menengah Tipe 97 serta lima tank ringan M3 hasil rampasan dari pihak Sekutu.³⁶

Unit-unit *Tokubetsu Rikusentai* (Pasukan Khusus Pendaratan Angkatan Laut) ditugaskan di semua operasi untuk mengamankan sasaran tertentu, di mana beberapa di antaranya bertugas secara independen dari Angkatan Darat sementara yang lainnya dilibatkan dalam misi gabungan. Untuk menyerbu Hindia Belanda, Angkatan Laut Jepang menyediakan sekitar 20 pesawat pemburu dan sekitar 100 pesawat penyerang yang berpangkalan di darat dari Unit Udara ke-1 (Armada Udara ke-22).³⁷

Untuk penyerbuan ke Hindia Belanda, Jepang juga mengerahkan pasukan payungnya yang baru dan awalnya dinamakan *1001 Go Jikken Kenkyu* (Unit Riset Penelitian ke-1001).³⁸ Pada mulanya, pasukan yang dibentuk pada bulan November 1940 ini direncanakan hanya diterjunkan untuk merebut ladang-ladang minyak di Palembang. Namun, mereka kemudian juga diterjunkan di Manado dan Kupang.³⁹ Dengan demikian, Hindia Belanda menjadi ajang pertama perang yang diikuti oleh pasukan payung Jepang.

Selain pasukan tempur dan unit-unit pendukungnya, Satuan Darat ke-16 Jepang juga membawa sebuah kelompok jawatan propaganda di bawah Letnan

Kolonel Machida Keiji. Mereka bertugas untuk meng-*counter* propaganda lawan sekaligus menjatuhkan semangat mereka.⁴⁰ Di samping itu, sebuah staf administrasi yang akan menjalankan pemerintahan militer juga dibawa oleh Satuan Darat ke-16.⁴¹

Untuk operasi di selatan, Angkatan Laut Jepang membentuk sebuah Gugus Tugas Selatan. Semua operasi Jepang di Pasifik barat daya dikelola oleh Armada ke-2 di bawah Laksamana Madya Kondo Nobutake. Laksamana Takahashi Ibo memimpin Armada ke-3, yang kewenangannya juga meliputi Filipina, sementara Laksamana Madya Ozawa Jisaburo memimpin Gugus Ekspedisi Selatan, yang bergerak menuju Hindia Belanda. Adapun pembagian tugasnya adalah sebagai berikut.⁴²

1. Kekuatan Utama Gugus Tugas Selatan (Armada ke-2). Mereka akan mendukung operasi secara keseluruhan di Laut China Selatan dan mendukung penaklukan Hindia Belanda.
2. Unit Malaya (Armada Ekspedisi Selatan, yang diperkuat oleh sebuah unsur Armada Udara ke-11). Mereka bertugas mendukung operasi-operasi Angkatan Darat Jepang di Malaya, Kalimantan jajahan Inggris, dan Sumatra.
3. Unit Filipina (Hindia Belanda). Merupakan bagian Armada ke-3, selain membantu serangan ke Filipina, mereka ditugaskan merebut Manado, Kendari, dan Makassar dengan pasukan marinirnya, sementara membantu operasi-operasi Satuan Darat ke-16 di Jawa. Unit utamanya, setelah bergerak dari Filipina, akan pergi ke selatan menyusuri Sulawesi.

Jauh sebelum Perang Pasifik, Jepang telah berpengalaman dalam melancarkan perang amfibi. Operasi pendaratan gabungan beberapa kali dilancarkan oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut mereka di Cina. Doktrin gabungan operasi amfibi ini menyerukan perencanaan yang menyeluruh; pengintaian tempat pendaratan; rangkaian unit pendarat penyerang, cadangan, dan pendukung; pengulangan; tembakan dari laut dan dukungan udara; serta prosedur muslihat. Suplai dan perlengkapan dimuatkan untuk memungkinkan pendaratannya sesuai prioritas kebutuhan.⁴³

Biasanya, Jepang melancarkan pendaratan di bawah kegelapan malam, beberapa waktu sebelum fajar menyingsing, atau beberapa waktu sesudahnya (kebanyakan pendaratan yang dilakukan Sekutu dilancarkan setelah fajar hari). Hal ini menimbulkan masalah kontrol dan kekacauan di pantai, faktor-faktor yang meningkatkan unsur pendudukan dan perlindungan terhadap pasukan pendarat

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

dari serangan artileri dan udara. Jepang juga memiliki kebiasaan mendaratkan pasukan secara tersebar.⁴⁴

Sasaran operasi terhadap Hindia Belanda adalah mengalahkan musuh di wilayah itu, merebut basis-basis mereka, dan menduduki serta mengamankan daerah kunci yang kaya sumber daya alam tersebut. Sementara operasi di Filipina berlangsung, Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang, secara bersamaan, harus mendukung sebuah unsur dari Satuan Darat ke-16 untuk merebut Tarakan secepat mungkin. Kemudian, bergantung pada keadaan operasi di Filipina dan Malaya, mereka secara bergiliran akan merebut Balikpapan dan Banjarmasin, serta mengambil kesempatan selama dan setelah penyelesaian operasi itu untuk merebut Ambon dan Kupang, merebut basis-basis udara yang siap digunakan, dan mengamankan daerah yang kaya sumber daya alamnya.⁴⁵

Sementara itu, bersamaan waktunya dengan perebutan Tarakan, Angkatan Laut akan menduduki dan mengamankan Manado, Kendari, dan Makassar. Tarakan dan Ambon akan segera diambil alih oleh Angkatan Laut setelah sebagian besar operasi masing-masing di wilayah ini telah diselesaikan. Terpisah dari hal ini, sementara serangan ke Malaya berlangsung, unsur lain dari Satuan Darat ke-16 akan mengambil kesempatan untuk menduduki Pulau Bangka dan Palembang yang strategis, mempersiapkan basis udara untuk digunakan, dan mengamankan daerah penghasil sumber daya alam. Setelah menyingkirkan kekuatan udara lawan di Jawa sementara mempersiapkan basis-basis udara, pasukan utama Satuan Darat ke-16 dan Divisi ke-48 dari Filipina akan didaratkan di Pulau Jawa. Dalam rencana akhir Jepang, Divisi ke-48, yang diperlengkapi dengan kendaraan bermotor, ditugaskan untuk merebut Surabaya sementara Divisi ke-2 menaklukkan Batavia dan Bandung, sedangkan Divisi ke-38, yang berpengalaman dalam perang di kawasan berawa di selatan Cina, bertugas merebut ladang-ladang minyak di Palembang.⁴⁶ Apabila Selat Malaka telah dikuasai setelah pendudukan Singapura, sebuah unsur dari Satuan Darat ke-25 akan mendarat di Medan guna merebut daerah-daerah kunci di Aceh, terutama Pulau Sabang.⁴⁷

Persenjataan Pasukan Jepang

Ketika Perang Pasifik telah berkobar, maka riset dan pengembangan senjata dalam industri militer Jepang pun boleh dikatakan macet. Keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan kemampuan produksi, dan keterbatasan waktu memaksa Jepang mengandalkan senjata yang telah teruji dan telah digunakan, bahkan sekalipun banyak di antaranya sudah usang dan dianggap tidak memadai lagi.⁴⁸

1. Senjata Darat

Sekalipun Jepang merupakan sebuah negara industri baru, tetapi prajurit mereka diperlengkapi dan dipersenjatai dengan baik pada masa Perang Dunia II. Semua senjata konvensional seperti senapan, senapan mesin, mortir, meriam, granat, senjata antitank, dan sebagainya dimiliki. Selain itu, para komandan pasukan darat memiliki artileri mobilnya sendiri, yang dikenal sebagai “meriam infanteri”, yang dapat menjadi senjata pendukung jarak dekat yang sangat efektif, baik saat bertahan maupun menyerang.⁴⁹

Pengalaman tempur dalam perang di Cina mengindikasikan bahwa senapan kaliber 6,5 mm yang digunakan oleh kebanyakan unit infanteri Jepang, tidak memiliki kecepatan tembak dan bobot peluru yang memadai. Karena itu, perlahan-lahan senjata yang digantikan dengan senjata yang menggunakan peluru kaliber 7,7 mm—sekalipun proses ini belum selesai ketika Perang Pasifik berakhir.⁵⁰

Senjata perorangan prajurit Jepang yang paling umum adalah senapan Arisaka Tipe 38 kaliber 6,5 mm dan tipe 99 kaliber 7 mm. Ada dua jenis senapan tipe 99, di mana versi panjang (127 cm) digunakan oleh infanteri sementara versi pendek (112 cm) digunakan oleh prajurit kavaleri, zeni, dan unit khusus lainnya. Ada juga karaben Tipe 38 dan 44 kaliber 6,5 mm.⁵¹

Pistol standar yang digunakan anggota militer Jepang adalah Tipe 94 kaliber 8 mm. Namun, reputasinya sangat buruk: desain awalnya dianggap tidak masuk akal dalam beberapa hal, sosoknya ganjil, dan digunakan dengan buruk. Sekalipun pembuatan dan materialnya buruk, sehingga senjata ini sering kali tidak aman digunakan, pasukan Jepang tidak memiliki pilihan selain menggunakan pistol tersebut karena industri senjata negeri itu tidak dapat menghasilkan senjata yang lebih baik.⁵² Sebelum tahun 1939, Jepang mengimpor sejumlah kecil senjata genggam dari luar negeri, termasuk pistol semiotomatis FN/Browning dari Belgia; beberapa di antaranya dibeli secara pribadi oleh para perwira.⁵³ Pistol sendiri hanya diberikan kepada perwira atau prajurit artileri.

Senapan otomatis Jepang juga memiliki kualitas yang buruk dan kurang daya tembaknya. Nambu Tipe 15 dan Tipe 98, yang lebih buruk desainnya, masing-masing memiliki magasen berisi delapan dan enam butir peluru. Keduanya menembakkan peluru kaliber 8 mm yang kurang bertenaga.⁵⁴

Untuk menambah daya tembaknya, pasukan Jepang dipersenjatai senapan mesin ringan Nambu Tipe 96 (6,5 mm) dan Tipe 99 (7 mm). Kedua senapan mesin

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

ini diciptakan dari pengalaman perang di Manchuria dan Cina. Tipe 96 sendiri merupakan tiruan senapan mesin ZB vz. 26 buatan Ceko-Slovakia yang direbut Jepang dari pasukan Cina. Selain itu, senapan mesin usang Nambu Tipe 11 kaliber 6,5 mm buatan tahun 1922 juga masih dipakai oleh banyak unit Jepang. Biasanya, senapan mesin ringan Jepang dapat dipasangi bayonet. Namun, senapan mesin ringan Jepang sering kali macet saat melakukan pemberondongan sementara peluru kaliber 6,5 mm yang digunakan sebagian senapan mesinnya tidak memiliki jangkauan, daya tembak, dan penentrasi yang memadai.⁵⁵

Militer Jepang menggunakan tiga jenis granat. Tipe 91 memiliki waktu jeda ledakan selama 7–9 detik, Tipe 97 yang memiliki waktu jeda ledakan 4–5 detik, dan Tipe 99.⁵⁶ Untuk pertempuran jarak dekat, di tingkat peleton pasukan Jepang diperlengkapi dengan pelontar granat Tipe 89 kaliber 50 mm, yang dapat menembakkan bahan peledak maupun peluru suar. Selain itu, mereka juga masih menggunakan pelontar granat Tipe 10 buatan tahun 1921 yang dijuluki Sekutu sebagai “mortir lutut” karena plat dasarnya yang berbentuk kurva, sehingga diisukan senjata ini tidak dapat ditembakkan dari atas paha tanpa mematahkan kaki si penembak. Pasukan Jepang juga diperlengkapi dengan senapan berpelontar granat Tipe 100 buatan tahun 1940, yang dapat melontarkan peluru berdaya ledak tinggi Tipe 97.⁵⁷

Di tingkat kompi/batalion, pasukan Jepang diperlengkapi dengan senapan mesin berat Nambu Tipe 3 (6,5 mm) dan Tipe 92 (7,7 mm).⁵⁸ Mereka juga memiliki senapan antitank Tipe 97 kaliber 20 mm, yang dapat ditembakkan secara otomatis maupun semiotomatis serta sangat efektif menghadapi tank ringan maupun personel. Namun, karena sangat berat dan mahal, senjata ini sangat terbatas digunakan oleh pasukan Jepang. Selain itu, senapan antitank ini juga hanya efektif untuk menghadapi tank ringan Sekutu.⁵⁹

Artilleri di tingkat batalion diperlengkapi dengan meriam Tipe 92 kaliber 70 mm yang dapat dibongkar pasang. Sekalipun ukurannya kecil, meriam yang hanya memiliki jangkauan tembak sejauh 2,8 km ini membutuhkan 10 orang awak untuk membawa dan memasangnya kembali, sementara hanya lima orang awak untuk mengoperasikannya.⁶⁰ Di tingkat resimen, pasukan Jepang dipersenjatai dengan meriam Tipe 41 kaliber 75 mm yang memiliki bobot ringan, dapat dibongkar pasang, dan mempunyai jangkauan tembak sejauh 6,4 km.⁶¹ Meriam antitank standar Jepang adalah Tipe 94 kaliber 37 mm. Beberapa unit yang pernah bertempur di Cina juga menggunakan meriam Pak 35./36 kaliber 37 mm buatan Jerman yang mereka rampas dari pasukan Cina.⁶²

Artileri standar di tingkat divisi adalah meriam Tipe 38 kaliber 75 mm. Namun, senjata ini dianggap sudah usang karena hanya memiliki jangkauan 9,5 km dan hanya dapat menembakkan 10–12 peluru per menit untuk jangka waktu singkat.⁶³ Tiga meriam kaliber 75 mm lainnya dari Tipe 90, 94, dan 95 pun memiliki daya jangkau yang terbatas. Divisi-divisi dan brigade independen Jepang juga dipersenjatai dengan meriam Tipe 91 kaliber “100 mm” (sebetulnya berkaliber 105 mm).⁶⁴

Mortir yang digunakan Jepang memiliki kaliber 81, 90, dan 150 mm. Senjata ini digunakan di batalion mortir non-divisi.⁶⁵

Tank-tank Jepang boleh dikatakan sudah usang saat Perang Pasifik pecah. Dibuat pada pertengahan tahun 1930-an, tank-tank tersebut memiliki bobot ringan (Tipe 94 berbobot 15 ton sementara Tipe 95 hanya 10 ton) dan kecepatan maksimal 32–40 km per jam. Meriam 37 mm dan senapan mesin 7,7 mm yang digotong tank Tipe 94 dan 95 pun hanya dapat menghancurkan kubu-kubu sementara kecepatan tembak dan daya gempurnya bukanlah tandingan bagi tank Sekutu. Karena tipisnya lapisan baja kendaraan ini, tank Jepang dengan mudah dapat dihabisi oleh tembakan senapan mesin berat. Akibatnya, tank Jepang tidak banyak digunakan dalam pertempuran dan terutama ditugaskan dalam misi pengintaian, perlindungan, perhubungan, dan pengiriman perbekalan ke posisi-posisi pasukan terdepan.⁶⁶

Tank menengah Tipe 97 diperlengkapi dengan meriam berkaliber lebih tinggi, berupa sepucuk meriam 57 mm, dan dua pucuk senapan mesin kaliber 7,7 mm. Namun, meriam dan senapan mesinnya juga tidak efektif untuk menghadapi kendaraan lapis baja Sekutu. Seperti kebanyakan tank Jepang pada masa itu, Tipe 97 menggunakan mesin diesel daripada mesin berbasis bensin, yang bukan hanya meningkatkan jangkauan jarak tempuhnya tetapi mengurangi risiko kebakaran—ancaman yang sangat ditakuti oleh awak tank.⁶⁷

2. Senjata Udara

Jepang tidak memiliki angkatan udara terpisah. Kekuatan udara mereka merupakan bagian dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Selama penaklukan Hindia Belanda, Pasukan Udara Angkatan Lautlah—yang secara kuantitatif dan kualitas merupakan kekuatan udara Jepang yang paling penting—yang memainkan peranan penting dalam menghadapi kekuatan udara Sekutu maupun menggempur sasaran-sasaran militer dan strategis lawan. Dibentuk pada tahun 1912, jawatan ini memiliki sekitar 3.000 pesawat terbang pada saat pecahnya Perang Pasifik, di mana sekitar 1.400 di

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

antaranya merupakan pesawat terbang garis depan.⁶⁸ Kira-kira 700 pesawat terbang dikerahkan untuk mendukung serangan ke selatan.

Pada dasarnya, Angkatan Laut Jepang memiliki tiga jawatan udara, yaitu 1) pesawat terbang yang berpangkalan di darat; 2) pesawat terbang yang berpangkalan di kapal induk; dan 3) pesawat amfibi. Jawatan udara yang berpangkalan di darat terutama diperlengkapi dengan pesawat pembom menengah bermesin ganda Mitsubishi G3M “Nell” dan Mitsubishi G4M “Betty”. Kedua pesawat pembom itu dapat terbang lebih cepat daripada pesawat pemburu Sekutu mana pun yang bertugas di Hindia Belanda dan, yang mengejutkan lawan, dapat pula bertugas sebagai pesawat pembom torpedo. Kedua pesawat pembom inilah yang bertanggung jawab atas penenggelaman *Prince of Wales* dan *Repulse* di lepas pantai timur Malaysia pada tanggal 10 Desember 1941—dua kapal utama pertama yang ditenggelamkan oleh serangan udara saja pada saat perang. Sekalipun lapisan bajanya tipis sehingga rentan terhadap serangan udara lawan, kedua pesawat pembom ini hanya menghadapi sedikit perlawanan dari kekuatan udara Sekutu pada awal Perang Pasifik. Karena itu, mereka dapat memberikan dukungan bagi pasukan darat Jepang dan mencegat bantuan yang dikirimkan lewat laut bagi pasukan Sekutu yang terdesak di Asia Tenggara.⁶⁹ Selain sebagai pesawat pembom, “Nell” juga digunakan sebagai pesawat angkut (dijuluki sebagai “Tina”) dan patroli selama penyerbuan ke Hindia Belanda.

Di antara pesawat terbang yang berpangkalan di kapal induk, terdapat pesawat pembom tukik Aichi D3 “Val”. Sekalipun memiliki sosok kokoh, “Val” lamban, rapuh, dan kemampuan manuvernya rendah sehingga harus dikawal oleh pesawat pemburu untuk menjalankan misinya.⁷⁰ Pesawat ini biasanya membawa sebuah bom 250 kg dan dua bom 60 kg. Selama pertempuran di Hindia Belanda, pesawat-pesawat “Val” beroperasi dari kapal induk *Akagi*, *Soryu*, dan *Ryujo* yang bertugas memotong jalur hubungan laut antara Pulau Jawa dengan Australia dan India. Pesawat terbang Poros yang paling banyak menenggelamkan kapal Sekutu, selama beroperasi di Samudra Hindia inilah mereka memperoleh nama harum.⁷¹ Di antara kapal-kapal perang Sekutu yang ikut ditenggelamkan “Val” selama pertempuran di Hindia Belanda terdapat USS *Peary*,⁷² USS *Pope*,⁷³ dan USS *Edsall*.⁷⁴

Ketika Perang Pasifik pecah, Angkatan Laut Jepang memiliki Nakajima B5N “Kate”, pesawat pembom torpedo yang diangkut kapal induk termmodern di dunia pada saat itu. Diawaki oleh para pilot elite Angkatan Laut, pesawat yang dapat menggotong sebuah bom 800 kg atau 2 bom 250 kg atau enam bom 132 kg itu tercatat ikut menenggelamkan kapal perusak USS *Pope* selama Pertempuran Laut Jawa Kedua.⁷⁵

Mitsubishi A-6M Reisen, yang lebih dikenal dengan nama “Zero” atau “Navy-0”, merupakan salah satu pesawat pemburu legendaris dalam sejarah dan menjadi simbol kekuatan udara Jepang. Ketika pertama kali diuji coba pada tanggal 29 Juni 1940, “Zero” merupakan pesawat idaman para pilot pemburu. Memiliki kecepatan puncak 533 km per jam, “Zero” dianggap sebagai pesawat pemburu terunggul di dunia yang berpangkalan di kapal induk, karena kelincahan manuvernya serta jarak jangkauannya yang sangat luas. Kanon 20 mm yang ampuh di kedua sayapnya dan dua senapan mesin 7,7 mm di bagian hidungnya membuatnya menjadi mesin pembunuh yang ampuh. Namun, kecepatan dan kemampuan manuvernya yang hebat membuat pesawat tersebut nyaris tidak memiliki lapisan baja pelindung dan tanki bahan bakar yang tidak bisa menutup sendiri. Akan tetapi, perlindungan pilot tidak pernah menjadi kepedulian bagi orang Jepang sendiri.⁷⁶

Dalam operasi-operasi tempur awal, “Zero” memperoleh reputasi legendaris sebagai pesawat pemburu, di mana pesawat ini memiliki rasio kemenangan 12:1.⁷⁷ Akibatnya, beredar “aturan pertama” di antara para penerbang Sekutu: “*Jangan pernah berduel udara melawan Zero*”.⁷⁸ Seorang pilot pemburu Amerika yang bertugas di Lapangan Terbang Ngoro, Jawa Timur, mengeluh: “para bajingan itu seribu persen lebih baik kemampuan manuvernya dibandingkan kami.”⁷⁹

Sebuah versi awal “Zero” yang dijuluki “Zeke” oleh Sekutu juga dikerahkan selama Pertempuran di Hindia Belanda, terutama di wilayah barat. Namun, tidak seperti “Zero”, “Zeke” hanya dipersenjatai dengan tiga senapan mesin 7,7 mm, tidak cukup ampuh untuk menghadapi pesawat-pesawat terbang Sekutu yang memiliki lapisan baja tebal.⁸⁰ Kemampuan menggelandingnya juga rendah pada saat kecepatan tinggi sementara mesinnya cenderung bermasalah pada saat akselerasi negatif.⁸¹

Di Hindia Belanda, Jepang mengerahkan dua kapal pembawa pesawat amfibi, *Chitose* dan *Mizuho*. Kapal-kapal ini membawa pesawat amfibi seperti Aichi E13A “Jake” dan Mitsubishi F1M2 “Pete” (keduanya pesawat amfibi pengintai) dan menjadi basis bagi pesawat amfibi besar Kawanishi H6K “Mavis”. Pesawat amfibi “Pete”, yang dikembangkan dari desain Sikorsky S-42 dan dari rancangan Prancis,⁸² memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan banyak beraksi selama pertempuran di Hindia Belanda. Mereka berkali-kali bahkan digunakan sebagai pesawat pemburu pertahanan armada.⁸³ Sementara itu, “Mavis”—sebuah pesawat amfibi jarak jauh bermesin empat dan berekor ganda yang digunakan untuk berpatroli, misi-misi pengintaian dan pemboman jarak jauh serta mengangkut

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

pasukan—tercatat digunakan untuk membawa sebuah unit pasukan payung Jepang yang didaratkan di Danau Tondano, Sulawesi Utara.⁸⁴

Pesawat amfibi lainnya yang digunakan Angkatan Laut Jepang adalah Nakajima E8N “Dave”. Pesawat amfibi bermesin satu dan bersayap ganda ini dilontarkan dari kapal perang. Kadang kala, pesawat ini juga digunakan sebagai pembom tukik dan pengamat artileri. Pesawat inilah yang kerap kali memainkan peranan dalam menemukan kapal-kapal perang Sekutu dan mengarahkan tembakan kapal-kapal perang Jepang ke arah musuh, termasuk selama Pertempuran di Laut Jawa.⁸⁵

Jepang juga mengerahkan pesawat pengintai Mitsubishi Ki-15 dan C-5M “Babs”. Digunakan baik oleh Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Jepang, pesawat terbang ini memulai kariernya sebagai pesawat sipil cepat pembawa surat. Memiliki kecepatan maksimum 400 km/jam, “Babs” membawa sepucuk senapan mesin 7,7 mm dan sebuah bom 250 kg sehingga kerap kali digunakan juga sebagai pesawat penyerang ringan.⁸⁶

Pasukan Udara Angkatan Darat Jepang mengerahkan beberapa jenis pesawat terbang selama pertempuran di Hindia Belanda. Nakajima Ki-27 “Nate” yang gesit adalah pesawat pemburu utamanya. Pendahulu pesawat pemburu modern Jepang, “Nate” adalah sebuah pesawat terbang kecil, ringan, dan memiliki kemampuan manuver yang baik, dengan angka kecepatan menanjak yang luar biasa tinggi.⁸⁷ Dipersenjatai dengan dua senapan mesin 7,7 mm, “Nate” mampu terbang dengan kecepatan 470 km/jam.⁸⁸ Seperti pesawat terbang Jepang pada umumnya, kecepatan dan kemampuan manuvernya yang hebat membuat pesawat tersebut nyaris tidak memiliki lapisan baja pelindung dan tanki bahan bakar yang tidak bisa menutup sendiri, sehingga sangat rapuh oleh tembakan lawan.⁸⁹

Pesawat pemburu Angkatan Darat lainnya adalah Ki-43 “Oscar”. Sekalipun dalam banyak hal mengikuti jejak “Zero”, formula bobot ringan berkemampuan manuver tinggi kehilangan koherennya dalam desain pesawat ini. “Oscar” adalah pesawat pemburu teringan yang digunakan oleh negara besar dalam Perang Dunia II, di mana bobotnya hampir 400 kg lebih ringan dibandingkan “Zero”. Seperti “Zero”, pesawat tersebut dirancang untuk memaksimalkan kemampuan menanjak dan manuvernya. “Oscar” merupakan pesawat pemburu paling gesit selama perang, lebih hebat dibandingkan “Zero” dalam hal ini. Mudah dibawa bermanuver dan memiliki kecepatan menanjak yang hebat, “Oscar” merupakan musuh yang memusingkan. Seperti semua pesawat pemburu yang bertugas di Pasifik, “Oscar” sangat berbahaya apabila keadaan menguntungkan pilotnya.⁹⁰ Namun, keunggulan itu harus dibayar mahal karena mengorbankan kecepatan maupun kemampuan

senjatanya: “Oscar” lebih lambat 67 km dibandingkan “Zero” sementara hanya dipersenjatai senapan mesin kaliber 7,7 mm—tidak cukup ampuh untuk menembus lapisan baja pelindung pesawat terbang Sekutu.⁹¹

Untuk pesawat pembom, pasukan Udara Angkatan Darat Jepang mengandalkan Mitsubishi Ki-21 “Sally” dan Kawasaki Ki-48 “Lily”. “Sally”, yang memiliki kecepatan 432 km/jam dan mampu membawa satu ton bom, telah usang ketika dikerahkan pada awal Perang Pasifik. ‘Lily’ pun tidak lebih baik: lebih lambat dan dipersenjatai dengan buruk—tiga pucuk senapan mesin 7,7 mm sebagai alat pertahanan diri dan muatan bom sebanyak 800 kg.⁹² Pesawat pengintai Mitsubishi Ki-46 “Dinah” juga memainkan peranan penting dalam operasi di Hindia Belanda, di mana mereka nyaris tidak terganggu oleh ancaman udara Sekutu,⁹³

3. Senjata Laut

Menjelang penyerbuan ke Jawa, Jepang memiliki kekuatan laut yang lebih besar dibandingkan Sekutu untuk mendukung pendaratan pasukannya. Di antaranya terdapat kapal-kapal tempur *Hiei*, *Kirishima*, *Kongō*, dan *Haruna* maupun kapal-kapal penjelajah berat *Maya*, *Takao*, *Atago*, *Myoko*, *Haguro*, *Nachi*, *Tone*, *Chikuma*, dan *Ashigara*. Kapal-kapal ini didukung oleh sejumlah kapal penjelajah kecil, kapal perusak, kapal selam, dan kapal-kapal perang lainnya. Selain itu, ketika serangan ke Jawa akhirnya dilancarkan, Unit Malaya memiliki cukup banyak kapal untuk dialihkan guna mendukung serangan tersebut, termasuk kapal-kapal penjelajah berat *Kumano*, *Suzuya*, *Mikuma*, dan *Mogami*.⁹⁴ Selain itu, Gugus Tugas Kapal Induk pimpinan Laksamana Madya Nagumo Chuichi, yang terdiri atas empat dari enam kapal induk yang menyerang Pearl Harbor (*Akagi*, *Kaga*, *Hiryu*, dan *Soryu*) dikerahkan ke Samudra Hindia untuk memutuskan hubungan antara Pulau Jawa dengan India maupun Australia.⁹⁵

Salah satu senjata andalan dan paling berbahaya dari armada Angkatan Laut Jepang yang patut dicatat adalah torpedo Tipe 93 “Tombak Panjang”. Dianggap sebagai torpedo terbaik pada zamannya, memiliki diameter 61 cm dan panjang yang tidak lazim, yaitu 900 cm, torpedo ini membawa hulu ledak 490 kg—yang terbesar dari senjata serupa. Namun, yang paling dikagumi dari Tipe 93 adalah jarak tembaknya. Dengan kecepatan setinggi 48 knot, torpedo itu dapat menjangkau sasaran sejauh 2.000 m; sedangkan apabila dipasang lambat dengan kecepatan 36 knot, “Tombak Panjang” dapat menghantam mangsanya hingga jarak 40.000 m! Ditenagai oleh oksigen, torpedo ini tidak meninggalkan buih di air dan hanya sedikit terlihat di permukaan air. Jepang berusaha keras menutupi

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

keberadaan torpedo ini hingga daya hancurnya mengguncang angkatan laut Sekutu pada awal Perang Pasifik.⁹⁶

Peralatan perang terakhir yang sangat diandalkan Jepang adalah kapal angkut dan kapal pendarat pasukan. Kebanyakan kapal angkut merupakan kapal barang atau penumpang sipil yang dimiliterisasikan. Karena keterbatasan kapal transportasi, bahkan ketika armada kapal barang Jepang masih berada dalam kekuatan penuh, para prajurit harus berdesak-desakan di atas kapal—tiga orang dalam ruang seluas 1 x 1,8 m selama satu minggu di bawah suhu 37,7° C, sementara air dijatah!⁹⁷ Untuk mendarat di pantai, pasukan Jepang biasanya menggunakan dua jenis perahu pendarat. Yang pertama adalah perahu pendarat “Daihatsu” yang memiliki panjang 14,6 meter dan berbobot 10,5 knot. Perahu berkecepatan 8 knot ini mampu membawa muatan seberat 10 ton, termasuk sebuah tank kecil, truk, meriam atau prajurit.⁹⁸ Lebih besar darinya adalah “Toku Daihatsu”. Perahu pendarat sepanjang 17,6 meter yang berkecepatan 9 knot ini mampu membawa sebuah tank menengah atau dua tank berbobot 8 ton.⁹⁹

Men Behind The Gun

Dalam masa perang prajurit Jepang biasanya digambarkan sebagai orang bermata sipit, bergigi tonggos, berperut kuning, mengenakan pembalut kaki atau anak Nippon yang selalu berteriak “banzai”. Mereka dibenci karena dianggap suka berkhianat dan kejam.¹⁰⁰ Namun, mereka pun sangat ditakuti sebagai prajurit infanteri ringan yang sangat berdisiplin, setia kepada tugasnya, dan siap bertempur hingga titik darah penghabisan daripada menyerah. Reputasi ini sendiri merupakan hasil dari pengaruh sosial budayanya maupun pelatihan militer.

Tidak seperti musuh dari dunia Barat, prajurit Jepang dibesarkan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi “Jalan Sang Pejuang” (*Bushido*) dan menghormati para samurai—orang-orang yang mengabdikan sebagai pendekar, prajurit, dan polisi di bawah para *shogun*. Kaisar Meiji memang telah menghapus kelas samurai, tetapi tradisi pria yang membawa senjata sebagai lambang jabatan tidak mati. Para samurai yang telah dilucuti hak istimewanya bergabung dengan militer Jepang, yang menanamkan tradisi disiplin dirinya yang sangat keras, kesetiaan yang tak tergoyahkan, dan kegagahberanian. Bahkan setelah mengambil alih nilai-nilai baru dari Eropa, nilai-nilai lama tetap mengilhami “Jalan Sang Pejuang” dalam militer Jepang dan tradisi samurai tetap tertanam di dalam hati mereka.

Perwira dan prajurit Jepang pertama-tama dan bahkan selalu adalah seorang pejuang. Jiwa pejuang membuat orang Jepang gagah berani dan siap mati dengan sedikit dorongan dari Kaisar maupun perwiranya. Hal inilah yang membuatnya bertempur hanya dengan mengandalkan jiwa dan raga dan secara sembrono menghadapi mesin perang yang mematikan.¹⁰¹ Sekalipun di tahap perang berikutnya prajurit Jepang menemukan bahwa para individu pejuang tidak dapat mengalahkan tentara, mereka menjadi prajurit infanteri yang bertempur dengan lihai di semua medan tempur di Asia-Pasifik. Sebegitu baiknya penampilan prajurit infanteri Jepang, sehingga mereka diyakini sebagai ahli perang hutan yang telah lama dilatih keras. Kenyataannya sama sekali tidaklah demikian. Prajurit Jepang terutama dilatih di bawah cuaca dingin di wilayah luas Manchuria dan Siberia, karena Komando Tertinggi Jepang menganggap bahwa perang darat utama akan pecah di sana. Lebih banyak prajurit Jepang yang menderita di hutan tropis yang lembab dibandingkan orang Amerika yang dibesarkan di wilayah panas Amerika Serikat. Namun, karena kehidupannya sebagai petani di Jepang, para prajurit Kaisar lebih mampu menahan penderitaan dan kehidupan keras di wilayah tropis yang terkucil dan panas.¹⁰²

Kehidupan petani yang keras juga membuat mereka terbiasa dengan aturan dan disiplin yang keras. Disiplin adalah prioritas utama. Selama pelatihannya, setiap sikap yang dianggap kurang disiplin akan dihukum oleh atasannya dengan cara dipukuli. Seperti dikatakan oleh seorang calon prajurit, “para calon prajurit tidak diperlakukan sebagai manusia”, sementara rekannya menambahkan: “Latihan itu menjadikan kami sebagai manusia ternak—robot-robot yang menurut tanpa berpikir.”¹⁰³ Dalam militer Jepang, disiplin bersifat tajam ke bawah: para perwira senior menampar perwira junior, perwira junior memukul bintang, dan seterusnya hingga ke prajurit rendahan, yang karena tidak memiliki bawahan untuk dihukum, sering kali melampiaskan kemurkaannya kepada para tawanan perang yang malang.¹⁰⁴

Kehormatan tertinggi bagi mereka adalah mati demi Kaisar, sehingga prajurit yang menyerah dipandang menodai dirinya sendiri maupun keluarganya, yang akan merasa dipermalukan dan kehilangan muka sebagai akibatnya. Ada banyak kejadian di mana pasukan Jepang yang berada dalam keadaan tanpa harapan bertempur hingga prajurit terakhir, bahkan membunuh rekannya yang terluka agar terhindar dari penangkapan yang memalukan. “Bertempurlah mati-matian,” demikian prajurit Jepang diperintahkan. “Jika kau takut mati, maka kau akan mati di medan laga. Apabila kau tidak takut mati, kau tidak akan mati. Dalam

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

keadaan apa pun, janganlah menjadi desertir atau tawanan perang. Apabila keadaanmu tidak tertolong lagi, bunuh dirilah secara terhormat.”¹⁰⁵

Begitu kuatnya rasa malu untuk menyerah yang tertanam dalam diri prajurit Jepang sehingga hanya beberapa ribu orang yang berhasil ditawan oleh Sekutu selama perang—kebanyakan mereka ditangkap dalam keadaan terluka atau tidak berdaya. Pada gilirannya, orang Jepang pun memandang hina prajurit musuh yang tertawan. Sebagai hukuman atas “kepengecutan mereka”, bukanlah hal yang aneh kalau pasukan Jepang membunuh tawanan Cina yang tertangkap dengan berbagai cara selama Perang Cina-Jepang.¹⁰⁶ Sementara itu, sekalipun di sana sini terjadi juga banyak terjadi aksi pembantaian terhadap prajurit kulit putih selama Perang Pasifik, perlakuan buruk terhadap tawanan Sekutu yang lazim dilakukan oleh prajurit Jepang adalah memberikan mereka makanan yang minim, menjadikan mereka pekerja budak, dan memperlakukan para tawanan dengan brutal.

Pada dasawarsa 1930-an, militerisme diterapkan dalam masyarakat Jepang. Banyak sekolah mengajarkan latihan militer kepada para murid. Sebagai contoh, sekolah-sekolah dasar mengajar anak-anak laki-laki berlatih militer dengan senjata kayu, sementara anak yang lebih tua diajarkan menggunakan senjata asli. “Kehormatan terbesar,” demikian yang diajarkan kepada mereka, “adalah pulang dalam keadaan mati.” Ada juga sekolah-sekolah berbasis pendidikan militer, di mana anak-anak dikirimkan secara langsung dari sekolah biasa pada usia 14–15 tahun. Perguruan tinggi juga memiliki pelatihan militer.¹⁰⁷ Menurut sebuah Buku Pegangan yang diterbitkan oleh Departemen Perang Amerika Serikat pada tahun 1944 tentang Pasukan Militer Jepang, “Di Jepang, indoktrinasi dimulai sejak bayi.”¹⁰⁸

Dibandingkan dengan prajurit Eropa, rata-rata prajurit Jepang bertubuh kecil, sekitar 155–160 cm. Sekalipun orang Jepang memiliki reputasi cepat dan cekatan, mereka cenderung terbelakang. Namun, karena keturunan petani, mereka tangguh dan bertubuh sehat, serta terbiasa bekerja keras.¹⁰⁹ Latihan militer mereka menekankan ketangguhan fisik dan *seishin* (tekad baja), yang dianggap dapat mengatasi keunggulan perlengkapan perang lawan.¹¹⁰ Seperti dikatakan oleh seorang pemimpin, “Suatu angkatan perang tidaklah bergantung pada meriam dan kapal melainkan terutama pada rasa patriotisme.”¹¹¹

Ketika Perang Pasifik pecah, rata-rata prajurit Jepang jauh lebih terlatih dan agresif jika dibandingkan lawannya. Lebih dari itu, mereka telah memiliki pengalaman perang di Cina. Hal ini sangat menentukan bagi petualangan militer baru yang dimulai oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941, ketika mereka

melancarkan serangan mendadak dan serentak terhadap kedudukan Sekutu di Timur Jauh.

Operasi Militer

Wilayah pertama Hindia Belanda yang jatuh ke tangan Jepang adalah Kepulauan Tambelan di Selat Karimata. Dikuasainya kepulauan ini pada tanggal 27 Desember 1941 menyebabkan Jepang dapat menguasai perairan antara Kalimantan, Malaya, dan Sumatra.¹¹² Sebuah serangan bercabang lima kemudian dilancarkan pada tanggal 11 Januari 1942, yang pertama-tama diarahkan ke wilayah Kalimantan jajahan Inggris untuk merebut ladang minyak di Brunei dan lapangan-lapangan terbang yang berguna untuk mengamankan lambung pasukan Jepang yang beroperasi di Malaya. Sekalipun tidak mendapatkan banyak perlawanan di darat, pesawat-pesawat terbang dan kapal-kapal selam Belanda berhasil menenggelamkan beberapa kapal Jepang, termasuk dua kapal perusak.¹¹³

Dalam operasi militernya di Hindia Belanda, pada tahap awal Jepang melancarkan serangan udara untuk menetralkan daerah-daerah kunci dan menguasai udara. Setelah itu, baru pendaratan dilakukan untuk merebut lapangan-lapangan udara yang vital dan berbagai titik penting. Kemudian, sebuah payung udara baru dibentuk guna memampukan pasukan dan pesawat terbang pelindungnya melancarkan gerakan lompat katak dalam operasi-operasi lanjutan.

Biasanya, reaksi awal Inggris dan Belanda terhadap serangan yang dilancarkan ujung tombak Satuan Darat ke-16 Jepang adalah mengerahkan kekuatan udaranya yang lemah untuk mengganggu setiap pendaratan Jepang. Untuk mendukungnya, sebuah kekuatan laut yang cukup kuat dari sisa-sisa angkatan laut Sekutu di kawasan tersebut akan mencoba sebisa mungkin menghancurkan pasukan pendaratan, sementara kapal-kapal selamnya menghadang konvoi-konvoi pendaratan. Akhirnya, Sekutu bergantung pada pasukan daratnya yang beraneka ragam susunan dan kemampuannya untuk menghalau pendaratan atau, apabila mereka gagal melakukannya, menghancurkan lapangan-lapangan terbang yang vital maupun fasilitas-fasilitas minyak yang besar sebelum menyerah.

Setelah sasaran awalnya di Kalimantan jajahan Inggris, Malaya, dan Filipina berhasil direbut, para ahli strategi Jepang memutuskan melancarkan sebuah serangan bercabang tiga ke selatan guna merebut ladang-ladang minyak di Hindia Belanda. Apabila berhasil, rencana ini juga akan memutuskan garis komunikasi dari Australia ke Filipina dan Singapura sehingga pasukan Sekutu di

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

wilayah itu dapat dikucilkan dan dihancurkan. Seluruh operasi itu mengarah ke sasaran akhir: Jawa.

Jepang mengerahkan tiga pasukan besar untuk menyerang Hindia. Pasukan Timur menyerbu dari Filipina selatan di Jolo dan Davao, merebut Sulawesi, Ambon, dan Timor untuk melindungi lambung Pasukan Tengah dan memotong bala bantuan Sekutu lewat udara dengan merebut lapangan terbang di Kupang. Pasukan Tengah menyerang dari basis yang sama ke bagian timur Kalimantan jajahan Belanda untuk merebut lapangan terbang dan ladang minyak di Tarakan maupun Balikpapan serta lapangan terbang di Banjarmasin. Gerakan kedua pasukan ini saling mendukung. Sementara itu, Pasukan Barat, yang dikumpulkan di Teluk Camranh (Indocina) dan di Malaya, kemudian menyerang Palembang di Sumatra Selatan serta merebut tempat penyulingan dan lapangan terbang besar di daerah itu. Jawa, pulau utama di Hindia Belanda, kemudian diserang dari arah barat, utara, dan timur.¹¹⁴

Pada tanggal 11 Januari, Satuan Darat ke-16 memulai serangannya. Detasemen Sakaguchi dan Pasukan Khusus Pendaratan Angkatan Laut ke-2 Kure mendarat di Tarakan setelah garnisun kecil Belanda setempat membumihanguskan ladang-ladang minyak.¹¹⁵ Pada tanggal 17, Jepang menggunakan lapangan terbang Tarakan sebagai sebuah basis terdepan,¹¹⁶ dan seminggu kemudian Detasemen Sakaguchi merebut Balikpapan, hanya untuk menemukan bahwa garnisun musuh sekali lagi telah menghancurkan ladang-ladang minyak. Kali ini, serangan balasan laut dan udara Sekutu sangat berhasil: sebuah kapal selam Belanda berhasil menenggelamkan sebuah kapal angkut; sebuah pesawat pembom Belanda menenggelamkan kapal angkut lainnya; sementara empat kapal perusak Amerika menenggelamkan empat kapal lagi dalam sebuah serangan meriam dan torpedo. Sekalipun demikian, Jepang berhasil menggulung pasukan Belanda di daerah itu dengan mudah, dan pada tanggal 28 dapat mengoperasikan kelompok-kelompok pesawat terbangnya dari lapangan terbang Balikpapan.¹¹⁷

Pasukan Timur bergerak ke Kendari. Pada tanggal 11 Januari, Pasukan Khusus Pendaratan Gabungan Angkatan Laut Sasebo mendarat di dekat Manado dan Kema di Sulawesi Utara, sementara menerjunkan 519 orang prajurit payung di lapangan terbang Manado dan pangkalan pesawat amfibi Tasuka. Setelah lapangan terbang di Manado jatuh ke tangan mereka, pada tanggal 24 pesawat-pesawat terbang Jepang mulai beroperasi di sana. Jatuhnya Manado membuat komunikasi dengan Filipina terputus, kecuali dengan menggunakan pesawat terbang jarak jauh dan kapal selam.¹¹⁸ Pasukan Sasebo melanjutkan serangan dengan merebut Kendari pada tanggal 24 Januari, memampukan Jepang mengoperasikan basis

udara terbaik di Hindia, yang dapat menjangkau jalur komunikasi dari Australia ke Jawa.¹¹⁹ Untuk melindungi perolehan barunya, Jepang mengirimkan sebuah resimen dari Divisi ke-38 dan Pasukan Khusus Pendaratan Angkatan Laut ke-1 Kure untuk merebut Ambon pada tanggal 31 Januari, yang jatuh ke tangan mereka empat hari kemudian.¹²⁰

Jepang melanjutkan gerakannya pada bulan Februari, mendesak maju semakin dekat ke Jawa. Pasukan Timur mengirimkan Pasukan Pendaratan Gabungan Sasebo ke Makassar pada tanggal 9,¹²¹ sementara Resimen ke-228 dikirimkan ke Timor dari Ambon pada tanggal 20 Februari, bersama pasukan payung, yang setelah dikumpulkan di Kendari, diterjunkan di lapangan terbang Kupang.¹²² Hanya penenggelaman sebuah kapal perusak Jepang oleh sebuah kapal selam Amerika dan perlawanan pasukan Australia, yang segera menjadi gerilyawan, yang mengusik kemenangan Jepang.¹²³ Sementara itu, Pasukan Tengah mengirimkan sebuah batalion dari Detasemen Sakaguchi untuk merebut Banjarmasin, yang jatuh ke tangan mereka pada tanggal 10 Februari.¹²⁴

Di Sumatra, Pasukan Barat mengalami pertempuran yang sengit. Pada tanggal 14, 260 orang prajurit payung dari Malaya diterjunkan di lapangan terbang utama dekat Palembang, sementara lebih dari 100 orang lainnya diterjunkan untuk merebut tempat-tempat penyulingan minyak di dekatnya. Dalam pertempuran sengit yang mengikutinya, pasukan Sekutu menembakkan meriam-meriam penangkis serangan udaranya ke arah pasukan payung untuk menghalau mereka. Pasukan Jepang, yang hanya bersenjatakan granat dan senjata kecil, menderita kerugian besar. Pasukan payung merebut sebuah pengilangan sebelum dihancurkan, tetapi pasukan Belanda dapat meledakkan fasilitas kedua. Baru pada malam tanggal 15 Februari, setelah pasukan dari sebuah resimen infanteri tiba dengan barkas setelah mendarat di muara Sungai Musi pascapenyerbuan ke Pulau Bangka, akhirnya Palembang jatuh.¹²⁵

Pada tanggal 18 Februari, Jepang menyerbu Bali dan memotong garis komunikasi Sekutu dengan Australia. Keesokan harinya, Jepang membom Darwin, dan nasib Jawa pun telah ditentukan. Pada tanggal 25 Februari, ABDACOM—komando militer gabungan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia yang mempertahankan wilayah yang disebut sebagai Rintang Malaya¹²⁶—dibubarkan karena Inggris lebih memilih mempertahankan Birma yang vital bagi wilayah jajahannya yang berharga di India sementara Amerika Serikat mengirimkan bala bantuannya ke Australia, yang diharapkan dapat dijadikan basis utama Sekutu untuk memukul balik Jepang di kawasan Pasifik. Orang Belanda, dengan sejumlah sisa-sisa unit-unit Sekutu yang telah berantakan, ditinggalkan untuk

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

mempertahankan Pulau Jawa.¹²⁷ Ketika Marsekal Sir Archibald Wavell, bekas panglima ABDACOM, meninggalkan Jawa, ia memperkirakan bahwa serangan terakhir Jepang ke Jawa akan dilancarkan pada akhir bulan itu.¹²⁸

Jepang melancarkan sebuah serangan bercabang dua terhadap Jawa. Di sebelah timur, Divisi ke-48 dan Detasemen Sakaguchi akan mendarat di dekat Surabaya dan merebut basis angkatan laut Belanda di sana, membersihkan wilayah pantai, dan merebut pelabuhan Cilacap di pantai selatan. Di sebelah barat, Divisi ke-2 yang masih segar dan Resimen Infanteri ke-229 akan mendarat di kedua sisi Batavia, merebut ibu kota Hindia dan pelabuhannya, lalu bergerak ke pedalaman Jawa untuk merebut Bandung. Untuk mendukung operasi itu, Jepang diperkirakan memiliki sekitar 400 hingga 500 pesawat pemburu dan 300 hingga 400 pesawat pembom maupun seluruh armada pimpinan Laksamana Madya Kondo Nobutake. Para penyerbu berhadapan dengan sekitar 25.000 orang prajurit regular KNIL, 40.000 orang milisi, sebuah unit kecil campuran Inggris yang disebut *Blackforce* (terdiri atas tiga *batalion* Australia, 25 tank ringan, dan beberapa meriam Amerika), tidak lebih dari 100 buah pesawat terbang, dan sebuah armada kecil Sekutu yang terdiri atas delapan kapal penjelajah, 12 kapal perusak, dan 32 kapal selam.¹²⁹

Sebuah upaya Sekutu untuk menghadang pasukan penyerbu Jepang berakhir dalam dua pertempuran sengit di perairan Pulau Jawa. Dalam Pertempuran Laut Jawa, yang berlangsung pada waktu sore hingga malam hari tanggal 27 Februari, lima kapal penjelajah dan sembilan kapal perusak Sekutu di bawah Laksamana Madya Karel W.F.M. Doorman dari Angkatan Laut Belanda, berupaya menyergap kapal-kapal angkut Jepang yang berlayar ke Jawa. Dalam tiga pertempuran terpisah, Jepang menghancurkan armada Doorman dengan kerugian yang minim di pihaknya. Pesawat terbang maupun torpedo jarak jauhnya menjadi senjata andalan Jepang. Ketika pertempuran itu usai, Doorman tenggelam bersama kapal benderanya, kapal penjelajah *De Ruyter*. Sebuah kapal penjelajah dan sebuah kapal perusak Belanda juga ikut tenggelam bersama dua kapal perusak Inggris, sementara kapal-kapal yang selamat kocar kacir di Laut Jawa. Semuanya akhirnya dihancurkan oleh Jepang. Dalam sebuah pertempuran yang mengikutinya, yaitu Pertempuran di Selat Sunda, kapal penjelajah USS *Houston* milik Amerika dan HMAS *Perth* dari Australia bertemu dengan kapal-kapal angkut Jepang yang sedang mendaratkan pasukan di pantai Merak pada tanggal 28 Februari. Kedua kapal Sekutu itu berhasil menenggelamkan dua kapal angkut Jepang dan merusak beberapa kapal lainnya dalam pertempuran jarak dekat sebelum akhirnya ditenggelamkan oleh kapal-kapal pengawal Jepang yang terdiri atas tiga kapal penjelajah dan sembilan kapal perusak.¹³⁰

Pendaratan dimulai pada malam tanggal 28 Februari, dan dalam waktu satu minggu Jepang telah menaklukkan Pulau Jawa. Di sebelah timur, Surabaya jatuh pada tanggal 8 Maret, sementara Cilacap diduduki pada tanggal 7. Hanya ada sedikit perlawanan karena Belanda memusatkan sebagian besar pasukannya di sebelah barat Jawa untuk melindungi Batavia, Bandung, dan lapangan-lapangan terbang di daerah itu. Namun, bahkan berhadapan dengan pasukan utama Belanda pun Jepang benar-benar meraih keberhasilan dan merebut Batavia pada tanggal 5 Maret serta mengepung Bandung dua hari kemudian. Panglima Belanda, Letnan Jenderal Hein ter Poorten, menyerah bersama seluruh pasukannya pada tanggal 8 Maret. Ia tidak memerintahkan pasukannya melancarkan perang gerilya karena tidak mempercayai kesetiaan pasukan bumiputra maupun untuk menghindari ancaman hukuman mati di tempat bagi prajurit yang tertangkap apabila mereka menjadi gerilyawan.¹³¹ Selain itu, orang Belanda, yang masih trauma dengan serangan bom yang menghancurkan terhadap kota Rotterdam pada bulan Mei 1940,¹³² tidak menginginkan hal serupa terjadi terhadap kota Bandung yang pada saat itu dipenuhi oleh para pengungsi sipil.¹³³

Penutup

Kemenangan besar militer Jepang atas armada Sekutu di Hindia Belanda memperlihatkan betapa kuatnya armada kekaisaran tersebut pada bulan Maret 1942. Perencanaan yang rumit, pelaksanaan, dan koordinasi pasukannya luar biasa hebat. Para prajurit, pelaut, dan penerbang Jepang melakukan hal yang kelihatannya mustahil dalam waktu yang luar biasa singkatnya. Dalam pertempuran, mereka memecundangi kekuatan laut dan udara Sekutu untuk memastikan hasil dari pertempuran darat yang kemudian berlangsung. Apa yang terjadi bukanlah keberuntungan, tetapi bahwa mereka sangat profesional! Mereka berhasil mengungguli Sekutu, baik dalam perencanaan perang, kepemimpinan, dan bahkan pula dalam kemampuan bertempur. Begitulah Perang Pasifik berhasil dimenangkan Jepang. Mereka membuat perang seakan-akan hal yang sangat sederhana: kemenangan adalah milik mereka, sedangkan Sekutu hanya berkuat dalam kekalahan.

Kekalahan Belanda di tangan Jepang tidaklah mengherankan apabila dilihat latar belakang, strategi, dan persenjataan KNIL—pasukan militer kolonial yang menjadi tulang punggung kekuasaan Belanda di Indonesia. KNIL ini terdiri atas para prajurit bumiputra yang bergabung untuk memperoleh nafkah daripada demi ide-ide kebangsaan ataupun demi Sri Ratu dan negara. Tugas utama KNIL adalah

BANZAI!

OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dari fakta ini, tampaklah betapa KNIL tidak dipersiapkan untuk berperang melawan penyerbu dari luar. Mereka tidak lebih dari sekadar tentara polisi yang tidak pernah sungguh-sungguh diorganisasi, diperlengkapi, dipersenjatai, dan dilatih untuk berperang. Maka, tidaklah mengherankan jika pasukan KNIL kemudian tidak mampu berbuat banyak dalam membendung penyerbuan Jepang.¹³⁴ Ketika Belanda kemudian berusaha memodernisasi KNIL dengan meningkatkan anggaran pertahanannya di Hindia Belanda hingga 80 persen, mereka terkendala oleh keengganan Amerika maupun Inggris untuk menjual senjata dan perlengkapan militer karena diperlukan bagi pasukan sendiri. Akibatnya, sekalipun di atas kertas Belanda memiliki 122.600 orang prajurit, tetapi kebanyakan tidak terlatih dan tidak pula dapat diandalkan kesetiannya. Sementara itu sebagian besar dari ke-275 pesawat terbang dan armada laut pendukungnya sudah usung pula.¹³⁵

Menyadari kerentanan pasukannya yang sedang berada dalam tahap reorganisasi ini, Belanda sangat mengandalkan dan berharap semoga benteng pertahanan Inggris di Singapura dan Amerika di Filipina dapat menahan ancaman serangan Jepang ke Hindia Belanda. Tetapi sayang, Sekutu lebih memprioritaskan pertahanan terhadap ancaman Jerman Nazi, sebagaimana dengan strategi "*Germany First*" yang dicanangkan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat dan Perdana Menteri Winston S. Churchill dari Inggris.¹³⁶

Terlepas dari berbagai kekurangan Sekutu, secara militer tentara Jepang pada tahun 1941 hingga awal 1942 boleh dikatakan sebuah mesin pembunuh yang menakutkan, yang sangat menekankan pertempuran satu lawan satu, serangan dengan bayonet, pertempuran malam, dan keagresifan untuk menjalankan tugasnya. Pasukan ini menimbulkan kekacauan di antara pasukan kolonial Belanda dan Inggris, karena kelompok kedua ini tidak memiliki kemampuan tempur dan dedikasi terhadap tugas yang serupa seperti yang dimiliki oleh pasukan Jepang. Kurangnya daya gempur pasukan Jepang—sebagaimana dilihat dari usangnya senjata mereka—bukanlah sebuah faktor yang penting, karena pasukan kolonial sendiri tidak memiliki persenjataan dan daya gempur yang baik. Namun, dihadapkan dengan sebuah tentara yang memiliki daya gempur yang lebih ampuh seperti Tentara Merah atau Marinir AS, unit-unit Jepang dimusnahkan. Mereka memang lebih superior saat menghadapi pasukan Asia atau pasukan kolonial, tetapi lebih inferior dalam menghadapi pasukan Barat.

Kemenangan militer Jepang sendiri sangat mengesankan bagi bangsa Indonesia, terutama ketika pasukan Jepang secara sengaja mempermalukan orang Belanda di hadapan penduduk bumiputera. Bangsa kulit putih yang tidak

terkalahkan dan telah menjajah bumi Nusantara sekian lama itu kini telah dikalahkan oleh pasukan kate berkulit kuning.

Pada bulan April 1942, wilayah Kekaisaran Jepang membengkak. Armadanya boleh dikatakan tidak tersentuh dan moril militer maupun penduduk sipilnyapun meroket karena kemenangan yang terus-menerus. Terpengaruh oleh penampilan buruk Amerika dan sekutu-sekutunya yang kelihatan lemah pada awal Perang Pasifik, orang Jepang menjadi angkuh dan melebih-lebihkan kemampuan ofensifnya. Mereka kemudian berusaha melakukan ekspansi lebih ke timur, yang membuat pasukannya tersebar serta mengundang masalah yang tidak terpecahkan akibat keterbatasan ekonomi dan kekuatan militer Jepang.

Sebelum pecahnya Perang Pasifik, Laksamana Yamamoto telah meramalkan, "Apabila kita diperintahkan memerangi Amerika Serikat, kita mungkin dapat meraih sebuah kemenangan dengan mudah dan mempertahankannya selama enam bulan atau satu tahun. Namun, pada tahun kedua Amerika akan meningkatkan kekuatannya dan akan menjadi sangat sulit bagi kita untuk berperang demi meraih kemenangan akhir."¹³⁷ Kekhawatiran Yamamoto segera menjadi kenyataan dan datang lebih cepat daripada perkiraannya: hanya sekitar tiga bulan setelah menyerahnya Hindia Belanda, ekspansi Jepang telah dihentikan oleh Amerika Serikat dalam pertempuran di Midway dan Guadalcanal. Setelah itu, kemaharajaan yang berhasil diperoleh Jepang pada awal Perang Pasifik secara perlahan-lahan menyusut ketika pihak Sekutu yang dimotori oleh Amerika Serikat melakukan serangan balik menuju jantung Negara Matahari Terbit itu.

Hindia Belanda sendiri, yang kini telah disebut Indonesia, ternyata tidak mampu mencukupi kebutuhan Jepang akan sumber mineral guna menghidupkan mesin perang dan industrinya. Instalasi-instalasi minyak yang dirusak oleh Belanda ternyata memerlukan waktu yang lebih lama dari perkiraan Jepang untuk diperbaiki, dan penyedotan bahan mentahnya mengalami kendala karena Jepang kekurangan insinyur yang terampil maupun peralatan. Namun, yang lebih parah, Jepang kekurangan sarana transportasi laut. Inilah kelemahan utama Jepang, sesuatu yang mengagetkan karena mereka, seperti Inggris, adalah sebuah negara kepulauan yang tergantung pada impor bahan mentah. Tanpa armada kapal dagang yang memadai, sangat sulit bagi Jepang untuk bertahan hidup dalam perang. Apalagi ketika Amerika melancarkan perang kapal selam tidak terbatas terhadap mereka, yang membuat Jepang kehilangan lebih dari 1.150.000 ton—dari 5.296.000 ton—kapal dagang hanya pada tahun pertama perang.¹³⁸

Sekalipun demikian, selama sisa Perang Pasifik sendiri hanya ada sedikit perlawanan terhadap kekuasaan Jepang di Indonesia: pasukan Sparrow (terdiri atas

BANZAI!
OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

pasukan Australia dan KNIL) terus bertempur di Timor hingga akhirnya dievakuasi pada awal tahun 1943; kapal-kapal selam Amerika segera berkeliaran di perairan Indonesia; dan akhirnya, pesawat-pesawat pembom jarak jauh Amerika menyerang Balikpapan pada akhir tahun 1944 dalam sebuah serangan berani mati.¹³⁹ Dengan kekecualian aksi-aksi ini, Indonesia secara keseluruhan tetap menjadi sebuah surga bagi Jepang yang tidak tersentuh peperangan hingga berakhirnya Perang Dunia II.

Catatan Akhir

¹ Nino Oktorino. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 23–24.

² *Ibid*, hlm. 24.

³ Paul Kennedy (1972). *Pacific Onslaught: 7th Dec. 1941/7th Feb. 1943*. New York: Ballantine Books. hlm. 9.

⁴ Oktorino (3), *Op.cit.*, hlm. 24.

⁵ *Ibid*, hlm. 25.

⁶ Kennedy, *Op.cit.*, hlm. 9–10.

⁷ Depresi Besar yang melanda dunia setelah jatuhnya harga saham di Wall Street.

⁸ John H. Bradley dan Jack W. Dice. (1989). *The Second World War: Asia and The Pacific*. Wayne, NJ: Avery Publishing Group Inc., , hlm. 4.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Bill Yenne. (2014). *The Imperial Japanese Army: The Invincible Years, 1941–42*. Oxford: Osprey Publishing, Ltd., 2014, hlm. 74

¹² *Ibid*.

¹³ Pemerintahan boneka di bawah Marsekal Philip Petain yang berpusat di Vichy dan menguasai zona Prancis yang tidak diduduki Jerman pasca-penyerahan Prancis pada musim panas 1940.

¹⁴ Jepang mengimpor hampir 88 persen kebutuhan minyak buminya, di mana sekitar 80 persen berasal dari Amerika Serikat. Selama beberapa tahun terakhir menjelang pecahnya Perang Pasifik, mereka menimbun minyak sebanyak mungkin, dan pada tanggal 31 Maret 1941 tercatat mengimpor 22.850.000 barel minyak mentah dan 15.100.000 barel minyak olahan. Jumlah ini hanya cukup untuk berperang selama satu tahun. Lihat Morison, Samuel E. "How and Why Japan Prepared for World War", dalam *Reader's Digest* (peny.). (1971). *Illustrated Story of World War II*. New York: The Reader's Digest Association, Inc. hlm. 106.

¹⁵ Bradley, *Op.cit.* hlm. 10.

¹⁶ The War History Office of the National Defense College of Japan. 2015. *The Invasion of the Dutch East Indies*. Leiden: Leiden University Press, hlm. 4.

¹⁷ Mengenai rincian upaya Jepang untuk menguasai Hindia Belanda lewat tekanan diplomatik, lihat Oktorino (3), *Op.cit.*, hlm. 30–34.

¹⁸ Bradley, *Op.cit.*, hlm. 10.

¹⁹ The War History Office. *Op.cit.*, hlm. 18–19.

²⁰ Bradley, *Op.cit.*, hlm. 10.

²¹ *Ibid*.

²² The War History Office, *Op.cit.*, hlm. 6–7.

²³ *Ibid*, hlm. 6.

²⁴ Oktorino (3), *Op.cit.*, hlm. 36.

- ²⁵ Richard Deacon. (1986). *Menyingkap Dinas Rahasia Jepang Kempei Tai*. terj. Tim USA. Jakarta: PT Upaya Swadaya Aksara. hlm., 274.
- ²⁶ Gordon L. Rottman. (2005). *Japanese Army in World War II: Conquest of The Pacific, 1941-42*. Oxford: Osprey Publishing Ltd. hlm. 8.
- ²⁷ Bradley, *Op.cit.*, hlm. 11.
- ²⁸ Rottman *Op.cit.*, hlm. 13
- ²⁹ *Ibid.*
- ³⁰ *Ibid.*
- ³¹ *Ibid*, hlm. 14.
- ³² *Ibid.*
- ³³ *Ibid.*
- ³⁴ Rottman, *Op.cit.*, hlm.17.
- ³⁵ The War History Office. *Op.cit.*, hlm. 22.
- ³⁶ Rottman, *Op.cit.*, hlm. 38.
- ³⁷ Surat-menyurat dengan Don Kehr, Jr., 30 Desember 2008.
- ³⁸ Gordon L. Rottman dan Akira Takizawa. (2005). *Japanese Paratroop Forces of World War II*. Oxford: Osprey Publishing Ltd. hlm. 6.
- ³⁹ *Ibid*, hlm. 20–27.
- ⁴⁰ The War History Office. *Op.cit.*, hlm. 101. Di antara anggota unit propaganda ini terdapat Shimizu Hitoshi, yang kemudian mendirikan Gerakan Tiga A.
- ⁴¹ *Ibid*, hlm. 102.
- ⁴² Nino Oktorino. (2018). *Hancurnya Armada Sekutu: Kisah Pertempuran di Laut Jawa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hlm. 30–31.
- ⁴³ Rottman, *Op.cit.*, hlm. 20.
- ⁴⁴ *Ibid*, hlm. 21.
- ⁴⁵ The War History Office. *Op.cit.*, hlm. 46.
- ⁴⁶ *Ibid*, hlm. 46–47.
- ⁴⁷ *Ibid*, hlm. 47.
- ⁴⁸ Rotmann, *Op.cit.*, hlm. 90.
- ⁴⁹ Roy Dilley. (1970) *Japanese Army Uniform and Equipment, 1939–1945*. Edgware, Middlesex; Almark Publication, 1970, hlm. 34.
- ⁵⁰ *Ibid.*
- ⁵¹ The War History Office. *Op.cit.*, hlm. 45.
- ⁵² Chris Bishop. (1998). *The Encyclopedia of Weapons of World War II*. London: Barnes & Noble, Inc.. hlm. 234.
- ⁵³ Gary Nila dan Robert A. Rolfe. (2006). *Japanese Special Naval Landing Forces Uniforms and Equipment 1932–45*. Oxford: Osprey Publishing. hlm. 39.
- ⁵⁴ The War History Office. *Op.cit.*, hlm. .45.
- ⁵⁵ Bishop, *Op.cit.*, hlm. 238–239.
- ⁵⁶ Nila, *Op.cit.*, hlm. 41.
- ⁵⁷ The War History Office. *Op.cit.*, 46–47.
- ⁵⁸ *Ibid*, hlm. 47–48.
- ⁵⁹ Bishop, *Op.cit.*, hlm. 210.
- ⁶⁰ *Ibid*, hlm. 201.
- ⁶¹ The War History Office. *Op.cit.*, hlm. 48.
- ⁶² *Ibid.*

BANZAI!
OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

- ⁶³ Bishop, *Op.cit.*, hlm. 142.
- ⁶⁴ *Ibid*, hlm. 49–50.
- ⁶⁵ *Ibid*, hlm. 50.
- ⁶⁶ US Military Intelligence Service. (1994). *Japanese Tanks and Tank Tactic*. Washington, D.C.: United States Government Printing Office. hlm. 34–49.
- ⁶⁷ Bishop, *Op.cit.*, hlm. 19.
- ⁶⁸ René J. Francillon. (1970). *Japanese Aircraft of The Pacific War*. London: Putnam and Company. hlm. 37 dan 41.
- ⁶⁹ *Ibid*, hlm. 381.
- ⁷⁰ Navy Department, ONI 232 S, *Japanese Military Aircraft*. Washington, D.C.: Office of The Chief of Naval Operations, 1943, diakses dari <http://www.ibiblio.org/hyperwar/USN/ref/ONI/ONI-232/index.html>, 3 Juli 2018.
- ⁷¹ *Ibid*, hlm. 273–274.
- ⁷² David Brown. (1990). *Warship Losses of World War Two*. London: Arms and Armour. hlm. 60–125.
- ⁷³ Nino Oktorino. (2018). *Hancurnya Armada Sekutu: Kisah Pertempuran di Laut Jawa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hlm. 100–101.
- ⁷⁴ *Ibid*, 102–103.
- ⁷⁵ *Ibid*, hlm. 101.
- ⁷⁶ Cox, *Op.cit.*, hlm. 22.
- ⁷⁷ Oktorino (3), *Op.cit.*, hlm. 142.
- ⁷⁸ Cox, *Op.cit.*, hlm. 216.
- ⁷⁹ *Ibid*.
- ⁸⁰ Navy Department, *Op.cit.*
- ⁸¹ *Ibid*.
- ⁸² *Ibid*.
- ⁸³ Lihat antara lain Cox, *Op.cit.*
- ⁸⁴ Nino Oktorino. (2018). *Hancurnya KNIL Minahasa: Kisah Terlupakan Palagan Manado 1942*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 64.
- ⁸⁵ Oktorino (1), *Op.cit.*, hlm. 86.
- ⁸⁶ Francillon, *Op.cit.*, hlm. 149–154.
- ⁸⁷ Navy Department, *Op.cit.*
- ⁸⁸ Francillon, *Op.cit.*, hlm. 203.
- ⁸⁹ Navy Department, *Op.cit.*
- ⁹⁰ Eric M. Bergerud. (2001). *Fire in The Sky: The Air War in The South Pacific*. Oxford: Westview Press. hlm. 219.
- ⁹¹ *Ibid*, hlm. 221.
- ⁹² Francillon, *Op.cit.*, hlm. 161–162.
- ⁹³ *Ibid*, hlm. 171-172.
- ⁹⁴ Oktorino (1), *Op.cit.*, hlm. 31.
- ⁹⁵ Cox, *Op.cit.*, hlm. 219.
- ⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 18-19.
- ⁹⁷ Oktorino (1), *Op.cit.*, hlm. 125.

- ⁹⁸ War Department Technical Manual Tm-E 30-480. (1994). *Handbook On Japanese Military Forces*. Washington, D.C.: United States Government Printing Office. hlm. 326–330.
- ⁹⁹ Spencer C. Tucker (peny.). (2012). *World War II at Sea: An Eyclopedia*. Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC. hlm. 444.
- ¹⁰⁰ Bradley, *Op.cit.*, hlm. 7.
- ¹⁰¹ *Ibid.*
- ¹⁰² *Ibid.*, hlm. 7–8.
- ¹⁰³ Parish, H. Carroll, dan Koichi Kawana. (1986). *Jepang Tersulut Perang*, terj. A. Widymartaya. Jakarta: PT Tira Pustaka. hlm. 125.
- ¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 77. Tampilan sendiri adalah bentuk ringan dari hukuman fisik dalam militer Jepang. Saburo Sakai, seorang ace pilot Angkatan Laut Jepang, menceritakan bagaimana bokongnya dihajar keras-keras dengan pentung kayu besar sebanyak 40 kali sebagai tindak pendisiplinan; di waktu lain, apabila seorang peserta latihan militer melakukan kesalahan maka semua rekan sekompinya ditampar satu kali oleh perwira instruktur atau bawahannya. Lihat Parish, *Op.cit.*, hlm. 128.
- ¹⁰⁵ Dilley, *Op.cit.*, hlm. 11–12.
- ¹⁰⁶ Kebencian terhadap orang Cina sendiri diajarkan sejak dini kepada anak-anak Jepang oleh rezim militer Jepang. Ketika seorang anak sekolah di Honshu utara menangis tersedu-sedu saat diperintahkan menyayat seekor katak, gurunya menampar kepalanya dengan keras dan menghardiknya: “Mengapa engkau menangis seekor katak hina? Bila engkau besar kelak, engkau harus membunuh 100 atau 200 orang Cina.” Parish, *Op.cit.*, hlm. 123. Tidaklah mengherankan apabila pengajaran kekerasan seperti itu kemudian mendorong berbagai aksi pembantaian terhadap penduduk sipil maupun tawanan perang seperti dalam peristiwa “Rape of Nanking” selama perang di Cina maupun kejahatan perang lainnya selama Perang Pasifik
- ¹⁰⁷ Walter Zapotoczny Jr., “The Road to Nanking”, diakses dari <http://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/the-road-to-nanking/>, 5 Juli 2018.
- ¹⁰⁸ War Department Technical Manual Tm-E 30-480. (1944). *Handbook On Japanese Military Forces*. Washington, D.C.: United States Government Printing Office. hlm. 5.
- ¹⁰⁹ Dilley, *Op.cit.*, hlm. 7.
- ¹¹⁰ Rottman, *Op.cit.*, hlm. 19.
- ¹¹¹ Parish, *Op.cit.*, hlm. 40.
- ¹¹² Oktorino (3), *Op.cit.*, hlm. 89.
- ¹¹³ *Ibid.*, hlm. 70 dan 90.
- ¹¹⁴ Kennedy, *Op.cit.*, hlm. 63.
- ¹¹⁵ The War History Office. *Op.cit.*, hlm. 176–178.
- ¹¹⁶ Oktorino (3), *Op.cit.*, hlm. 73.
- ¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 94–103.
- ¹¹⁸ Untuk mengetahui rincian tentang pertempuran di Sulawesi Utara, lihat Oktorino (2), *Op.cit.*
- ¹¹⁹ Oktorino (3), *Op.cit.*, hlm. 114.
- ¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 115–120.
- ¹²¹ The War History Office. *Op.cit.*, hlm. 373.
- ¹²² Rottman dan Takizawa, *Op.cit.*, hlm. 25–26.
- ¹²³ Bradley, *Op.cit.*, hlm. 86.

BANZAI!
OPERASI MILITER JEPANG UNTUK MENGUASAI INDONESIA

¹²⁴ The War History Office. *Op.cit.*, hlm. 373.

¹²⁵ Bradley, *Op.cit.*, hlm. 86.

¹²⁶ Rintangan Malaya adalah wilayah pertahanan Sekutu yang meliputi Semenanjung Malaya, Sumatra, Jawa, dan kepulauan yang memanjang ke timur hingga barat laut Australia.

¹²⁷ Kennedy, *Op.cit.*, hlm. 67.

¹²⁸ Oktorino (3), *Op.cit.*, hlm. 154.

¹²⁹ Bradley, *Op.cit.*, hlm. 87.

¹³⁰ Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pertempuran di Laut Jawa, lihat Oktorino (1), *Op.cit.*

¹³¹ Salah satu kekejaman Jepang yang terkenal terhadap para prajurit Sekutu yang menolak menyerah setelah penyerahan umum Tentara Hindia Belanda di Jawa adalah apa yang dikenal sebagai “Pembantaian Keranjang Babi.” Sekitar dua ratus orang prajurit Sekutu yang tertangkap setelah bersembunyi di pegunungan di sekitar Malang pada bulan April 1942 dipaksa masuk bergencet-gencetan di dalam kandang-kandang bambu untuk menangkap babi hutan dan diangkut dengan gerbong terbuka di bawah sengatan matahari yang terik ke kawasan pantai. Setengah mati karena menderita kehausan dan kejang, para tawanan dipindahkan ke kapal-kapal dan dicampakkan yang dipenuhi ikan hiu di lepas pantai Surabaya. Lihat antara lain Oktorino (3), *Op.cit.*, hlm. 217–218.

¹³² Pemboman Rotterdam, yang dilancarkan oleh Angkatan Udara Jerman pada tanggal 14 Mei 1940, meluluhlantakkan kota pelabuhan Belanda itu. Sekalipun sebenarnya hanya menewaskan sekitar 800 orang, bukan 30.000 orang seperti yang digembar-gemborkan oleh propaganda Sekutu pada masa itu, pemboman Rotterdam dianggap sebagai salah satu contoh awal dari strategi teror dari udara untuk mematahkan perlawanan musuh dan berhasil memaksa Belanda menyerah hanya lima hari setelah serangan Hitler. Mengenai kisah pemboman ini, silakan lihat Nino Oktorino. (2016). *Not A Bridge Too Far: Kisah Penaklukan Belanda oleh Pasukan Payung Jerman, 10–14 Mei 1940*. Jakarta: Gaco Books.

¹³³ Oktorino (3). *Op.cit.*, hlm. 206.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 75–81.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 82–85.

¹³⁶ Bradley, *Op.cit.*, hlm. 101.

¹³⁷ Kennedy, *Op.cit.*, hlm. 152.

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 156–159.

¹³⁹ Bradley, *Op.cit.*, hlm. 88.

**MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG**

Aminudin T.H. Siregar

Dalam historiografi seni rupa Indonesia, dinamika seni yang terjadi di zaman Jepang hanyalah “periode transisi” kalau tidak dipandang sebelah mata. Miskinnya kajian dan publikasi mengenai seni pada masa ini membuat perkembangan seni setelah pendirian Persagi (Persatuan Ahli-ahli Gambar Indonesia) 1938 ini seakan kurang penting dalam membentuk karakter seniman dan karya seni rupa yang mereka hasilkan. Selain seni rupa, di masa yang penuh gejolak ini muncul fenomena kebudayaan yang menarik. Misalnya hubungan antara produksi visual (iklan, karikatur, gambar, poster, fotografi) dan propaganda. Padahal hanya dalam tempo yang relatif singkat Pemerintah Militer Jepang di Jawa sesungguhnya berhasil meluruskan arah yang pernah ditempuh pelukis-pelukis Persagi, yaitu menemukan “seni lukis Indonesia”. Sepanjang Maret 1942 – 17 Agustus 1945 melalui pameran, pelatihan, dan fasilitas kerja, Jepang telah membangkitkan kepercayaan diri seniman. Medan seni maju pesat dibandingkan masa sebelumnya dalam merumuskan identitas seni rupa Indonesia yang bercorak Timur sekaligus “berbobot Asia”.

Tulisan ini hanyalah sebuah pengantar untuk mengarungi kerumitan dinamika zaman yang pernah dinilai kritikus seni Trisno Sumardjo sekedar, “sebuah intermezzo dalam sejarah seni rupa Indonesia”.

Beberapa Kelemahan Historiografi Seni Rupa

Buku *Sejarah Seni Rupa Indonesia* terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (1979) tidak menyinggung-nyinggung sama sekali signifikansi periode Jepang. Absennya “periode” ini tentu layak dipertanyakan mengingat buku resmi itu adalah buku induk yang diterbitkan negara untuk pendidikan seni rupa. Buku lainnya seperti *Indonesian Modern Art and Beyond* karangan Jim Supangkat (1997) hanya mengulas secara ringkas situasi seni pada zaman itu. Supangkat misalnya mengatakan:

In 1943, Keimin Bunka Shidoso (the Cultural centre) with its facilities for artistic activities, was established. The painters of

**MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG**

Indonesia used the institutions to train new, young talent, while introducing Indonesian paintings to public at large. Painting, which was undergoing changes (with the emergence of Indonesian modernism) immediately, experienced a new type of observation based on totally different point of view.¹

Kritikus dan akademikus seni Sanento Yuliman (1976) dalam *Seni Lukis Indonesia Baru: Sebuah Pengantar*, mengklasifikasi zaman Jepang ke dalam “masa kedua” (1940-1960) secukupnya. Sanento menilai bahwa pada zaman itu, pelukis-pelukis Indonesia berhadapan dengan keadaan baru. Dengan mengutip pimpinan tertinggi *Keimin Bunka Shidosho* (1943), Sanento mengungkapkan:

Pemerintah militer Jepang dalam usaha “membangunkan kebudayaan Timur” untuk “memajukan bangsa Asia Timur Raya” memandang perlu untuk mengerahkan para budayawan dan seniman untuk “mencapai kemenangan terakhir dalam peperangan. Maka pada tahun 1945² didirikanlah *Keimin Bunka Shidosho* (Pusat Kebudayaan) yang menyediakan sarana untuk kegiatan kesenian. Para pelukis Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih diri dan melatih bakat-bakat muda, sekaligus untuk memperkenalkan seni lukis baru kepada masyarakat luas.³



Berita Pameran Kartono Yudhokusumo.
Sumber: Koleksi Aminudin Siregar

Meskipun kurang berhasil menggambarkan dinamika medan seni, pembahasan cukup luas muncul dalam buku *Perjalanan Seni Rupa Indonesia (1990-1991)*. Kusnadi, misalnya, mengakui bahwa, “arti jaman yang hanya sependek tiga setengah tahun saja itu ternyata penting. Baik sebagai penempatan semangat bangsa dalam menyongsong kemerdekaan yang tidak boleh sampai tertunda-tunda lagi, maupun berperan sebagai pemusatan usaha di bidang kesenian pada umumnya yang bertekad mendorong pertumbuhannya sebagai keseluruhannya.”⁴ Berbeda dengan publikasi tersebut sebelumnya, di buku itu Kusnadi sekurangnya menyinggung sedikit peran POETERA, selain Keimin Bunka Shidosho. Ia juga membahas aktivitas seniman terutama Affandi dan kemunculan bintang baru: Kartono Yudhokusumo. Sementara publikasi-publikasi lainnya belum menawarkan gambaran yang utuh.

Gambaran Umum: Kebutuhan Propaganda

Untuk melancarkan pelaksanaan kebijakan mereka di wilayah pendudukan Jawa, pemerintahan militer Jepang memberikan perhatian besar kepada upaya-upaya “menyita perhatian rakyat” (*minshin ha’aku*) dan “mengindoktrinasi dan menjinakkan mereka” (*senbu kōsaku*). Mereka perlu memobilisasi seluruh elemen masyarakat dan mendorong mentalitas rakyat Indonesia agar berjalan seiring dengan ideologi Jepang membangun “lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya” (*the Greater East Asia co-prosperity sphere* atau *dai-to-a-kyoeiken*). Mereka membayangkan bahwa orang Indonesia harus sepenuhnya diarahkan ke dalam tingkah laku dan pola pikir Jepang. Program propaganda dirumuskan sedemikian rupa sehingga efektif mengindoktrinasi rakyat. Bisa dikatakan bahwa sejak awal pendudukan, propaganda merupakan salah satu kewajiban pokok yang paling penting bagi pemerintahan militer.⁵ Oleh karena itu, tidak sulit dibayangkan bila kemudian di dalam tubuh pemerintahan militer tersebut terdapat sebuah grup yang kelak diproyeksikan sebagai pengurus organ propaganda. Keberadaan *Propaganda Groups/Corps*⁶ di dalam *16th Division Imperial Japanese Army (IJA)*⁷ menunjukkan bahwa Jepang sebenarnya telah merancang persiapan program propagandanya di Indonesia.

Propaganda Groups/Corps (Sendenhan) atau *Culture Corps* memiliki 11 perwira, sekitar 100 prajurit dan 87 intelektual — *bunka jin* atau *culture men* yang terkena wajib militer (*conscripted intellectuals*). Sumber lain menyebut nama grup ini dengan “Tatakau Bunka-butai” (*Fighting Culture Corps*). Grup ini dipimpin oleh Kolonel Machida Keiji dengan anggota antara lain Ohya Soichi (kritikus-intelektual),

*MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG*

Tomizawa Uio (pelukis), Iida Nobuo (komponis), Ohki Atsuo (penyair), Yokoyama Ryuichi (kartunis), Kouno Takashi (seniman-desainer), Abe Tomoji (penulis), Matsui Suisesi (narator film), Kitaharu Takeo (kartunis), Ono Saseo (kartunis), Hinatsu Eitaro (sutradara film), dan Kurata Fumindo (sutradara film). Beberapa di antara mereka kemudian memiliki posisi penting dalam kepengurusan *Keimin Bunka Shidosho*, terutama Ohya Soichi sebagai penanggung jawabnya.⁸ Sejumlah nama lain dikabarkan pulang ke negerinya. Kendati menjadi bagian dari militer, jajaran nama-nama itu berusaha menjalankan organisasi secara independen. Dengan cerdas, mereka mengedepankan idealisme, aspirasi, dan aturan sendiri yang sedikit banyak berbeda dengan garis kebijakan administrasi militer Jepang.⁹



Film propaganda Pedang Sakura dan Keris Melati.
Sumber: Koleksi Aminudin Siregar

Pemerintah militer Jepang menyadari pentingnya menjalin kerjasama dengan penduduk lokal. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah menguasai perusahaan film Belanda, yaitu *Multifilm Batavia* di Jawa, dan mengisi program-programnya sesuai dengan kepentingan propaganda mereka. *Djawa Eiga Kosha* berdiri pada 1 Oktober 1942 dan mulai memproduksi film-film propaganda.¹⁰ Film-film yang menggambarkan suasana perang — seraya menonjolkan keperkasaan pasukan Jepang melawan Amerika — sangat disukai oleh penduduk Jawa, terutama menggelar tontonan ke pelosok-pelosok desa. Jepang juga memandang bahwa seni rupa, sastra, drama, serta bentuk-bentuk kesenian lainnya perlu dilibatkan untuk memperkokoh indoktrinasi.¹¹

Pada April 1942 pihak militer Jepang membentuk *Sendenbu*, sebuah departemen independen terpisah dari Seksi Penerangan militer IJA - yang lebih bertanggung jawab atas informasi yang menyangkut operasi militer. Sementara *Sendenbu* mengurus masalah sipil. Pihak militer Jepang sebenarnya tidak terlalu mempercayai kalangan sipil untuk mengendalikan *Sendenbu*. Itulah alasan mengapa kemudian *Sendenbu* selalu diketuai oleh tentara. Pada awalnya, *Sendenbu* tidak hanya bertindak sebagai kantor administratif, melainkan juga secara langsung menjalankan operasi propaganda. Ketika struktur pemerintahan militer perlahan berjalan semakin rumit, sejumlah biro khusus yang bertanggung jawab atas bidang propaganda yang berbeda-beda dibentuk sebagai badan-badan di luar departemen dari *Sendenbu*, dan operasi propaganda dipercayakan kepada mereka.¹² *Sendenbu* memiliki tiga seksi, yaitu seksi administrasi, seksi berita dan pers, serta seksi propaganda. Orang sipil hanya mengetuai seksi propaganda. Selain itu dibentuk *extra-department* di dalam tubuh *Sendenbu* yang bekerja di lapangan propaganda lainnya. Program propaganda melalui seni-budaya segera disusun secara sistematis. Di bawah kendali *Sendenbu*, jaringan propaganda ini kelak meluas ke kota-kota besar: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya sebagai “unit operasi distrik”. Setiap unit meliputi 3 – 4 keresidenan. Unit Jakarta, misalnya, menjangkau Banten, Bogor dan Kotamadya Jakarta.

Sekitar setahun setelah Jepang menduduki Jawa, empat tokoh politik Indonesia terkemuka, yakni Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Mas Mansoer membentuk Poetera (Poesat Tenaga Rakjat).¹³ Organisasi ini terbagi ke dalam sejumlah seksi seperti pendidikan, propaganda, kebudayaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan umumnya adalah menggalang kekuatan rakyat bersama Jepang untuk memenangi perang Asia Timur Raya (*dai toa no senso*). Seksi kebudayaan dipimpin oleh Soewandhi dengan wakil S. Sudjojono dan dibantu antara lain oleh Affandi, Hendra Gunawan, dan Henk

*MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG*

Ngantung. Di bawah seksi inilah, S. Sudjojono sempat menggelar program pameran pameran tunggal karya Affandi, Basuki Abdullah, Kartono Yudokusumo, dan Nyoman Ngendon.

Poetera sangat berhati-hati dalam menentukan langkah di setiap kesempatan yang mereka diperoleh untuk mencapai tujuan sendiri. Akan tetapi, meskipun dibentuk oleh tokoh pergerakan dari kalangan Indonesia dan menyimpan agenda tersendiri bagi kepentingan Indonesia, Poetera — yang pembentukannya didukung secara finansial oleh militer Jepang — sebenarnya tidak bisa melepaskan diri dari strategi besar propaganda yang bertumpu pada konsep kemakmuran imperium Asia Timur Raya (konsep yang dikembangkan semasa Era Showa oleh pemerintah dan militer Jepang di bawah Kerajaan Jepang yang mencerminkan hasrat akan kemandirian blok Asia yang dipimpin oleh Jepang dan terbebas dari kekuatan bangsa Barat). Manifestasi agenda Jepang ini terbukti melalui salah satu pameran Poetera bertema “Memenangkan Perang Asia Timur Raya”. Pameran yang mendahului keinginan Jepang ini berhasil digelar di pasar malam Rakoentengi Jakarta pada 8 Desember 1942.¹⁴

Pada mulanya, tak lebih dari sebulan setelah menduduki Jawa, pihak militer Jepang mengumpulkan seniman di Jakarta. Maksudnya adalah mengaktifkan kembali keterlibatan seniman dalam propaganda pembangunan “masyarakat baru Indonesia” di bawah pemerintahan Jepang. Seniman-seniman Indonesia, khususnya mereka yang sebelumnya tergabung ke dalam Persagi dan dibubarkan, tidak menyia-nyiaikan ajakan ini. Di mata mereka ajakan tersebut merupakan peluang untuk membina perkembangan seni rupa di tanah air. Dari hasil pertemuan tersebut, Jepang menyatakan niatnya untuk mengadakan pameran dengan tema kemenangan perang. Namun, di luar dugaan, seniman-seniman Indonesia justru berhasil mendahului rencana Jepang. Mereka mendesak Soekarno agar pameran “Memenangkan Perang Asia Timur Raya” berhasil diselenggarakan.

Kesuksesan pameran Poetera segera meramaikan medan seni rupa Indonesia karena memunculkan nama-nama baru. Sementara pihak Jepang memantau dinamika ini secara seksama. Tak lama, mereka kemudian menggelar sayembara dengan tujuan menghitung seberapa besar kuantitas maupun kekuatan seniman-seniman Indonesia. Tentu saja, Jepang memiliki agenda tersendiri dengan menggiatkan tema-tema yang bersemangat perang; mempropagandakan pembangunan rakyat; menebalkan itikad kerjasama suci antara Indonesia-Jepang; serta penggalan semangat ketimuran dalam karya-karya seni lukis Indonesia.



Poster Poetera tentang kesehatan. Sumber: Koleksi Aminudin Siregar

*MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG*

Pada April 1943, bagian penerangan (*Sendenbu*) kembali mengumpulkan seniman-seniman Indonesia. Pertemuan kali ini membicarakan strategi yang ampuh untuk meningkatkan semangat perjuangan. Seniman diharapkan mampu memberikan penerangan kepada masyarakat luas. Maka, hasil penting pertemuan itu adalah pembentukan sebuah suatu pusat kebudayaan atau yang belakangan dikenal sebagai *Keimin Bunka Shidosho*. Belakangan, setelah Poetera dibubarkan Jepang pada 1 Maret 1944¹⁵, Basuki Abdullah, Affandi dan S. Sudjojono bergabung ke dalam *Keimin Bunka Shidosho* sebagai pendidik.¹⁶ Di sini S. Sudjojono kembali mengambil peran yang tidak kecil dalam pembentukan corak seniman-seniman muda dengan moto “mencari corak persatuan Indonesia” - yang tidak berbeda dengan moto Persagi sebelumnya di zaman kolonial Belanda.

Ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas, sepanjang kiprahnya, baik Poetera maupun *Keimin Bunka Shidosho* sama-sama melakukan pembinaan seni yang sangat penting bagi perkembangan seni rupa Indonesia. Dari segi kuantitas, kedua organisasi ini berhasil melahirkan sekian banyak nama baru. Jika dicermati dari aspek kualitas, keduanya mampu menanamkan corak ketimuran sebagai identitas seni lukis Indonesia. Kendati demikian, pada batas-batas tertentu, antara Poetera dan *Keimin Bunka Shidosho* tetap memiliki perbedaan paham.

Tidak seperti *Keimin Bunka Shidosho*, Poetera senantiasa mengambil jarak dari tema-tema propaganda seperti: menanam kapas, kebaktian romusha, semangat perajurit, semangat menabung yang gencar dimaklumkan Jepang. Sementara *Keimin Bunka Shidosho* cenderung mengambil sikap politik pada sisi sebaliknya. Hal yang menarik untuk dilihat, sekalipun memiliki agenda propaganda, sejumlah seniman Jepang yang duduk jajaran pengurus *Keimin Bunka Shidosho* justru berusaha menjaga kemurnian seni agar tidak tersubordinasi ke dalam propaganda. Pihak *Keimin Bunka Shidosho* selalu mempertahankan keseimbangan antara ‘muatan artistik’ dan ‘hiburan’ dengan ‘sloganistik’. Dalam praktiknya di lapangan, antar kedua organisasi ini mengalami kesukaran dalam menetapkan batas antara *seni propaganda* dan *seni untuk seni*. Satu hal yang nyata, baik Poetera dan *Keimin Bunka Shidosho*, keduanya sama-sama mengagendakan “propaganda”.

Potensi visual dalam karya seni rupa membuatnya ditempatkan sebagai salah satu instrumen propaganda. Namun demikian, di mata Jepang, media propaganda yang paling efektif dan mudah dimengerti masyarakat umum adalah film, seni pertunjukkan, musik dan *kamishibai*, dibandingkan misalnya dengan tulisan pada majalah ataupun surat kabar. Propaganda melalui tulisan (sastra) dan

seni rupa (lukisan) dipandang hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat terdidik di perkotaan. Sementara mayoritas masyarakat lebih banyak tinggal di pelosok-pelosok kampung dan mereka belum bisa baca-tulis. Maka menjadi sangat masuk akal apabila film terlebih dahulu dikembangkan oleh Jepang sebagai media untuk mempropagandakan kepentingan mereka.

Atmosfir kehidupan masyarakat Indonesia di masa kependudukan Jepang tidak bisa dilepaskan dari propaganda, intervensi, kontrol yang ketat, indoktrinasi mental, dengan menetapkan Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan administratif Jepang. Dalam berbagai bentuknya, operasi propaganda itu menyebar ke pelbagai pelosok masyarakat di tanah air. Jepang terlihat bersikeras meneladankan moral, ketaatan, kesopanan, keibuan, rajin, giat bekerja dan ketekunan. Merujuk agenda Mayor Achida – ketua organ propaganda Jepang *Sendenbu* di Indonesia periode Oktober 1943-Maret 1945, garis besar proganda Jepang secara berkala dapat dilihat sebagai berikut:

- 1942:** The Purpose of the Greater East Asian War
The Idea of Greater East Asian Co-Prosperity Sphere
“Asia is One”
3 A Movement:
- 1943:** The Idea of Greater East Asian Co-Prosperity Sphere
Promotion of increased food production
Paddy delivery
Recruitment of *Romusha*
Gathering all power of inhabitants and friendship among them
Strengthening war power
Defence of Java
- 1944:** Permeation of Military Administration
Reliance of inhabitants upon Japan
Great east Asia Conference
Promoting of increased food production
Sparing and saving
Recruitment of *Romusha*
Entertainment for Japanese and inhabitants
- 1945:** Defence of Fatherland
Prevention from spies
Entertainment for Japanese and local inhabitants
Promotion of the fighting spirit of the Japanese¹⁷

MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG

Keimin Bunka Shodosho

Keimin Bunka Shodosho berdiri pada 1 April 1943 dan berkantor pusat Jl. Noordwijk No.39 Jakarta dengan penanggung jawab Ohya Souichi. *Keimin* memiliki divisi-divisi di kota Bandung, Malang, Semarang dan Surabaya. Ke depan, Jepang merencanakan mendirikan divisi-divisi di setiap propinsi Indonesia. Dalam historiografi seni rupa Indonesia, organisasi ini lebih dikenal dengan nama “Pusat Kebudayaan”, meskipun sebenarnya mengandung arti per-kata sebagai berikut: *keimin* = pencerahan untuk semua orang; *bunka* = budaya dan *shidosho* = tempat untuk pengajaran; pusat; sentral. Sesuai maknanya, *Keimin Bunka Shodosho* didirikan untuk *mencerahkan, mendidik* rakyat di bidang kesenian dan kebudayaan. Salah satu alasan resmi yang melatari pembentukan lembaga ini berpangkal dari asumsi bahwa selama lebih dari 300 tahun, selain tidak pernah memberikan peluang pada orang Indonesia dalam kesenian, pemerintah Belanda dinilai gagal mengembangkan dan memajukan seni-budaya Indonesia untuk menemukan akar kebudayaan Timurnya.

Tujuan jangka panjang *Keimin Bunka Shodosho* tak lepas dari cita-cita pembangunan Asia Timur Raya. Sekalipun berada di luar *Sendenbu*¹⁸, namun jika dilihat dari posisinya, *Keimin Bunka Shodosho* sebenarnya adalah organisasi penyokong yang berada di bawah kendali *Sendenbu*. Setelah beberapa organisasi propaganda dibentuk, *Sendenbu* sendiri tidak lagi menjadi pengarah langsung aktivitas propaganda karena lebih bertugas memproduksi rencana-rencana dan material propaganda.¹⁹ Soichi Ohya, salah seorang pengurus bagian film dalam sambutan pendirian *Keimin Bunka Shodosho* mengatakan:

Usaha Pusat Kebudayaan memimpin kebudayaan umum yang maksudnya untuk meninggikan derajat penduduk, terutama bermaksud untuk memelihara kesenian klasik dan kesenian-kesenian asli Indonesia, dan disampingnya badan itu akan berusaha pula menanam dan menyebarkan kesenian dan kebudayaan Nippon. Selain daripada itu, dimaksudkan juga untuk mendidik dan melatih para ahli kesenian di segala lapangan, serta menghargai dan menghadiahi pekerjaan ahli-ahli kesenian yang utama. Pun diusahakan agar mereka dapat diutus ke Nippon.²⁰

Sebelum *Keimin Bunka Shodosho* berdiri, Takashi Kohno yang belakangan memimpin di *Bagian Seni Lukis dan Ukiran*, berencana menyukseskan program *Seni*

dan Perang, yaitu: seni untuk propaganda dan seni untuk seni. Ia berpandangan perlu didirikan sekolah seni untuk masyarakat Indonesia dan terutama mendidik pelukis-pelukis yang sudah menunjukkan bakatnya. Di matanya, pelukis-pelukis Indonesia masih setingkat “pembantu pelukis” – status yang pada zaman Belanda populer dan sangat dibanggakan pelukis Indonesia yang membantu pelukis Belanda. Di sinilah letak masalahnya. Menurut Kohno, pihak Belanda tidak pernah memberikan kesempatan dan mendorong pelukis Indonesia untuk mengembangkan dirinya. Seperti semangat Soichi Ohya, di majalah *Djawa Baroe*, Takashi Kohno berpendapat:

Jika ditilik keadaan kesenian lukisan dan ukiran di Indonesia pada masa ini maka terdapat banyaklah kekurangan yang boleh juga dipandang sebagai akibat politik penjajahan Belanda dahulu...Pengaruh Barat yang dikatakan sudah meresap masuk tidak begitu benar, karena dalam tekniknyanya belum meresap. Seni lukis/ukir di Indonesia sebagai kertas putih yang belum dipimpin oleh bangsa Belanda. Maka ahli kesenian Indonesia harus membentuk dasar kesenian lukisan dan ukiran yang sehat dalam arti rohani yang didasarkan pada kesadaran ahli kesenian yang baru; paham dunia baru, ialah yang didasarkan susunan baru untuk dijadikan salah satu sayap dan usaha Pusat Kebudayaan dengan mengharapkan tenaga praktek yang akan dikembangkan oleh ahli lukisan dan ukiran Indonesia.²¹

*MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG*

Struktur organisasi *Keimin Bunka Shidosho* secara sederhana dapat dilihat sebagai berikut:



Setiap seksi memiliki pengawas (*supervisor*), ketua dan anggota. Pengawas umumnya berasal dari seniman Jepang dan beberapa di antaranya seniman Indonesia sekaligus mengetuai departemen. Berikut ini adalah susunan setiap seksi beserta nama-nama pengurusnya:²²

Seksi Sastra	Seksi Seni Rupa	Seksi Musik	Seksi Teater
Pengawas	Pengawas	Pengawas	Pengawas
Rintaro Takeda	Takashi Kono	Nobuo Iida	Kiyoo Yasuda
Momosuke Yoshida	Saseo Ono		Bunjin Kurata
	Sei Yamamoto	Ketua	Etaro Hinatsu
Ketua	Agus Djaya	Utoyo	
Armin Pane	Otto Djaya		Ketua
	Basuki Resobowo	Anggota	Winarno
	Subanto	Cornel Simanjuntak	
	Kartono Yudokusumo	Kusbini	
	Popo Iskandar		
	Kusnadi		
	Ketua		
	Agus Djaya ²³		

Setiap seksi dalam struktur *Keimin Bunka Shidosho* memiliki rincian tugas tersendiri. Adapun tugas dan fungsi dalam struktur “seksi seni rupa” antara lain: bertanggung jawab memamerkan lukisan dan fotografi, mencerahkan masyarakat, dan melakukan riset yang menekankan kemajuan kesenian Timur dan seni pramodern. Selain memiliki dua studio sebagai tempat mengasah kemampuan seni rupa dan desain, seksi ini direncanakan mengadakan program ceramah bulanan; menerbitkan surat kabar, majalah dan mengadakan siaran; memenuhi penghargaan pemimpin militer; dan menggelar pameran keliling di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya. Di luar itu ada peraturan yang mengharuskan setiap seniman di Jawa mendaftarkan dalam kompetisi dalam pameran berkala yang digelar dua kali dalam setahun. Seksi ini juga akan menghimbau siapa saja yang berusia di bawah 20 tahun untuk bergabung dan dilatih di studio 2; studio 1 diisi oleh seniman senior. Pada masa itu terdapat 45 orang yang berlatih di studio 2. *Keimin Bunka Shidosho* menerbitkan majalah tahunan *Keboedajaan Timur* pimpinan Sanusi Pane.

Sejak berdiri, *Keimin Bunka Shidosho* menggelar sejumlah pameran. Berikut catatan yang diperoleh dari berbagai sumber:²⁴

*MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG*

Waktu	Pameran
29 April-9 Mei 1943	Pameran pertama <i>Keimin Bunka Shidosho</i> dengan tema “Kehidupan Djawa Baroe”.
27 Mei-2 Juni 1943	Pameran keliling seni rupa Djawa Baroe dimulai dari Surabaya lalu ke Malang dan Solo.
7-13 Juli 1943	Pameran Sin Sui Ito.
22 Juli-13 Agustus 1943	Pameran seni rupa <i>Djawa Baroe</i> di Bandung.
20 November 1943	Pameran Meijisetsu di <i>Keimin Bunka Shidosho</i> . Pelukis Subanto Suriosubandrio (<i>Saiko Sikikan prize</i>), GA. Soekirno (<i>Sendenbuco prize</i>), Agus Djaya (<i>Gunseikan prize</i>), Barli (<i>Djawa Sinbun prize</i>) dan Otto Djaya (<i>Asia Raya prize</i>) mendapat hadiah.
April 1944	Pameran keliling kota-kota besar mulai dari Jakarta.
20-27 Juli 1944	Pameran Ishikawa Shigehiko di Jakarta bertema <i>Hari Peringatan Laut</i> .
3-12 November 1944	Pameran seni rupa <i>Djawa Baroe</i> ke-4. Para pelukis di antaranya adalah S. Toetoer, Soebanto Soerjo Soerbandrio dan Soehargo Gembira.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

Desember 1944

Pameran Otto Djaya bertema “Semangat Keprajuritan” di Jakarta.

8 Februari 1944

Pameran Surono dan Basuki Resobowo bertema “Pekerja”.

17 April 1944

Pameran Tadasi Yamamoto, Yosisoka Ken dan Saseo Ono di Jakarta.

29 April-10 Mei 1945

Pameran Jawa *Baroe ke-5* menampilkan pelukis R. Sumartono, Karyono, R. Goenadi dan Obon bertema, “Keyakinan Remaja, Kebaktian Romusha” dan “Pemandangan Kampung”.



Sketsa Saseo Ono di koran *Asia Raja*. Sumber: Asia Raja

**MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG**

Sumber utama untuk melihat bagaimana gambaran propaganda seni lukis pada masa ini antara lain bisa ditemukan di sejumlah surat kabar dan majalah seperti *Asia Raja*, *Tjahaja*, *Djawa Baroe*, *Pandji Poestaka*, dan *Keboedajaan Timoer*. Repro lukisan Otto Djaya muncul beberapa kali di surat kabar *Asia Raja*. Di masa ini Otto Djaya sering melukis dengan tema serdadu selain gambaran tentang seni pertunjukkan dan tema kerja bakti. Begitu pula Subanto Suriosubandrio. Sementara Hendra Gunawan dari *Keimin Bunka Shidosho* cabang Bandung misalnya melukis propaganda dengan menyadur seruan Sukarno: "Jikalau Liong Barongsai Tiongkok bekerja bersama-sama dengan Gajah Putih dari Siam dengan Lembu Nandi dari India dengan Sphinx dari Mesir dengan Banteng dari Indonesia dan disinari oleh sinarnya Matahari Dai Nippon yang gilang gemilang niscaya hancur leburlah tiap-tiap imperealisme dari muka bumi." Surat kabar *Asia Raja* mengabarkan bahwa lukisan Hendra itu menghias ruang kantor Djawa Hokokai.²⁵ Laporan dari surat kabar yang sama juga memberitakan Basuki Abdullah yang menghadiahkan lukisan potret yang dipersembahkan khusus kepada Saiko Sikikan.



Berita Basuki Abdullah melukis Saiko Sikikan.
Sumber: Koleksi Aminudin Siregar

Pameran *Meijisetsu* adalah peringatan *Hari Budaya (Bunka No Hi)* kerajaan Jepang. *Keimin Bunka Shidosho* memilih 66 lukisan dari 300-an lukisan yang masuk dan menetapkan 5 pemenang. Lukisan Subanto Suriosubandrio *Jam 12 Di Sawah* (1943) yang memenangkan penghargaan tertinggi *Saiko Sikikan* memperlihatkan seorang petani mereguk air dari sebotol kendi di tengah hari yang panas terik. Seorang ibu dengan pakaian compang-camping menunduk seakan

memberi hormat kepada suaminya yang bekerja keras. Sementara anaknya melihat sang ayah dengan penuh rasa takjub. Di belakang mereka terhampar sawah kering yang siap digarap. Pemerintah Jepang memprogandakan kerja keras, setia kepada suami, patriotisme kepada tanah air yang diperlihatkan oleh lukisan tersebut. Dengan gambar pohon kapas, G.A. Sukirno, secara gamblang mempropagandakan tanam kapas. Dalam karyanya yang diberi penghargaan kedua tertinggi ini, Sukirno menulis: *Bapa Tani, Bapa Tani Tanamlah Kapas...Pemerintah Membantu*. Agus Djaya tampil dengan lukisan yang mengambil latar kisah pewayangan. Sementara Barli memenangkan hadiah ke-4 dengan lukisan berjudul *Ibu Djoeni* yang memantulkan ketabahan, ketegaran dan kelembutan sang ibu – yang juga menjadi salah satu sasaran propaganda Jepang untuk masyarakat.



Sukarno melihat lukisan Saiko Sikikan. Sumber: Koleksi Aminudin Siregar

*MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG*



Lukisan R.M. Subanto yang diserahkan kepada salah satu ksatrian di Jakarta dengan perantara Djawa Hokoo Kai Chuoo Honbuchoo Padoeka toean Ir. Soekarno.

Sumber: Koleksi Aminudin Siregar

Bulan November 1944, *Keimin Bunka Shidosho* menggelar 76 lukisan dalam pameran *Djawa Baroe ke-4* yang diikuti pelukis antara lain S. Toetoer, Subanto Suriosubandrio, dan Soehargo Gembira. Isi lukisan-lukisan mereka secara implisit menyiarkan kepentingan propaganda Pemerintah Jepang. Lukisan Suriosubandrio terdiri dari barisan prajurit muda. Sementara Soehargo Gembira menampilkan 2 pemusik tradisional dengan latar kerumunan orang. Pameran *Djawa Baroe ke-5* pada April-Mei 1945 yang menampilkan pelukis-pelukis muda memperlihatkan bagaimana kuatnya propaganda Jepang. Lukisan-lukisan R. Sumartono, Karyono, R. Goenadi dan Obon ini bertema romusha, pemandangan kampung yang asri, ras cinta pada tanah air di kalangan pemuda, dan kesiapan petani bekerja keras.

Besar kemungkinan *Keimin Bunka Shidosho* membubarkan diri menjelang Perang Dunia II berakhir. Pada 6 dan 9 Agustus 1945 Amerika Serikat meluncurkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Enam hari kemudian, yakni 15 Agustus, Jepang mengaku kalah dari Sekutu. Pihak Indonesia dari kalangan pemuda melihat peristiwa itu sebagai peluang. Dua hari kemudian, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekalipun pada akhir 1944 Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia — sejak diumumkan oleh Perdana Menteri Koiso pada 7 September 1944 di Tokyo.²⁶ Sejak 1945 hingga Desember 1949 Indonesia terlibat dalam beberapa peperangan dan perundingan dengan Belanda. Seniman-seniman terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan pada masa yang disebut sebagai zaman revolusi fisik itu.

Dampak Zaman Jepang

Lalu apa pengaruh, dampak, dan kontribusi signifikan dari pemerintah militer Jepang, khususnya melalui *Keimin Bunka Shidosho* bagi seni rupa Indonesia?

Seniman dan kritikus seni Indonesia berselisih pendapat mengenai hal ini. Sebagian beranggapan bahwa Jepang berhasil meningkatkan perkembangan seni rupa di tanah air sebagaimana terbukti dari meningkatnya jumlah seniman yang muncul pada masa itu dan terbukanya kesempatan berpameran sehingga memungkinkan terbangunnya hubungan nyata antara seni dan masyarakat. Jepang juga dinilai berhasil menawarkan penghargaan berupa uang melalui sayembara serta penyediaan alat-alat melukis.

Sejumlah kritikus lainnya menyangkal peran dan kontribusi Jepang mengingat masa kependudukannya yang sangat singkat, yaitu 3,5 tahun. Dalam masa sesingkat itu — yang disebut taraf *intermezzo* oleh Trisno Sumardjo — Jepang

*MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG*

dinilai tidak cukup membuahkan hasil maksimal, baik dari segi mutu (estetik) maupun pengaruhnya dalam aspek kerohanian. Ditengarai pula bahwa pada zaman Jepang seni di Indonesia tidak mempunyai pegangan dan pijakan yang kokoh:

Tarf *intermezzo* dimasukkan oleh penduduk balatentara Jepang selama tiga-setengah tahun (1941-1945). Meskipun Pemerintah Jepang banyak mengedepankan para seniman kita untuk keperluan propaganda yang tentunya tidak jujur, dan meskipun ada pergaulan antara pelukis-pelukis modern kedua bangsa, namun waktu sependek itu sudah tentu tak ada pengaruh keruhaniannya. Tapi penyelenggaraan seni rupa yang dilakukan secara sistematis itu mempercepat berkembangnya tenaga-tenaga yang pada zaman Persagi telah nampak usahanya, ialah: Otto Djaya, Affandi, Basuki Resobowo, Hendra Gunawan, Kusnadi, Barli, Sudjana Kerton, Mochtar Apin, Baharudin Marasutan, Harjadi.S, Sularko, Moh.Hadi, Nyoman Ngendon, Henk Ngantung, Kartono, dan lain-lain.²⁷

Sasaran kritik dari pengamat seni terhadap masa ini dialamatkan kepada motif propaganda yang melayani kepentingan politik perang Jepang. Sastrawan M. Balfas turut mengamati kontribusi pemerintah Jepang semasa menduduki Indonesia. Dengan membandingkan zaman Jepang dengan zaman Belanda, Balfas menyitir simpati Jepang dalam bentuk kesempatan dan penghargaan yang tinggi di bidang seni:

Baru dengan masuknya tentara Jepang pelukis-pelukis itu mendapat kesempatan dan penghargaan. Dengan maksud kurang baik Jepang telah menggabungkan seluruh seniman Indonesia dalam satu badan Pusat Kebudayaan. Tetapi walaupun demikian, tidak dapat disangkal bahwa ia telah mendatangkan kebaikan bagi seni lukis Indonesia. Kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang telah digunakan sebanyak-banyaknya oleh Sudjojono yang mendapat *atelier (studio, aths.)*, di mana ia dengan leluasa dapat mendidik muridnya telah berhasil menjaga kemerdekaan. Bantuan material Jepang telah membawa kebaikan. Pelukis-pelukis yang tadinya tidak dikenal masyarakat sekarang sering mengadakan *steleng (pameran, aths.)*. Dengan begini orang mulai berkenalan dengan barang-barang yang baru dalam seni lukis. Berbagai-bagai aliran baru tampak dalam steleng: Naturalisme, Impresionisme, Ekspresionisme... Sampai masa itu Sudjojono kelihatan masih menguasai keadaan."²⁸

Suromo, mantan anggota Persagi, salah seorang yang turut memelopori kehadiran teknik cukilan kayu di Indonesia, menyiarkan kelebihan Jepang:

Zaman itu buat seni lukis Indonesia lebih menguntungkan dari merugikan. Apalagi kalau dibandingkan dengan jaman Belanda. Jepang mempergunakan kesenian sebagai alat untuk melaksanakan cita-citanya. Di kota-kota yang penting-penting didirikan badan “Pusat Kebudayaan”. Badan ini melayani segala kepentingan kesenian. Diadakan sanggar (studio) model (obyek untuk digambar). Diusahakan eksposisi set tempat-tempat atau dikelilingkan ke kota-kota besar, yaitu pada hari besar resmi Jepang. Juga diadakan kesempatan untuk bereksposisi perseorangan atau gabungan (kolektif) dari golongan Indonesia, Tionghoa atau Jepang. Pada lahirnya (*uiterlijk*) dunia seni rupa Indonesia kelihatan sibuk. Orang Jepang tangkas dan pandai untuk mempengaruhi kesenian Indonesia agar dapat dibuat alat untuk kepentingannya sendiri.²⁹

Jepang disebut-sebut berhasil menyentuh ego para seniman. Bila pada zaman Belanda eksistensi individu seniman Indonesia disangkal, sebaliknya pada zaman Jepang serta-merta eksistensi tersebut dihargai dan fasilitas yang menguntungkan pelukis Indonesia pun dibangun. Basuki Abdullah – yang pada masa ini pernah melukis Panglima Perang Angkatan Darat ke-16 Jenderal Imamura – turut memberikan kesaksian:

Dalam zaman baru ini kesenian mendapat penghargaan yang meningkat jauh lebih tinggi dari pada zaman yang sudah lampau. Berhubungan dengan itu, bukan saja banyak dipertunjukkan pelbagai kesenian, melainkan banyak pula ditulis orang karangan-karangan tentang seni, di antara tentang seni lukis. Semua itu berkat perhatian dan penghargaan dari pihak Pemerintah kepada seni umumnya dan seni lukis khususnya. Sudah barang tentu sikap Pemerintah sebaik itu kami – kaum seniman – junjung tinggi dengan penuh rasa terimakasih.³⁰

S. Sudjojono memuji keterbukaan pikiran dan jiwa pelukis-pelukis Jepang yang bekerja di *Keimin Bunka Shidosho*. Dalam situasi dan kondisi saat itu, bagaimanapun sikap netral yang diperlihatkan mereka sangat dibutuhkan:

*MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG*

Saya sendiri tahu bagaimana pandangan pelukis-pelukis Nippon sebagai Kohno, Yasioka, Yamamoto, dan Ono yang memegang pimpinan pada waktu itu dan bekerja bersama-sama dengan pelukis-pelukis Indonesia terkemuka, tentang seni lukis. Mereka tetap sehat, tak kena pengaruh ini dan itu dan tetap seniman yang berjiwa baru. Meskipun mereka dari akademi Nippon, watak mereka tak sempit bercorak akademi dan tetap mempunyai pandangan merdeka. Hanya jiwa yang merdeka dan jiwa yang berpengalaman luas bisa mengerti ciptaan mereka.³¹

Belakangan pada 1974, S. Sudjojono menuliskan pengalamannya sebagai wakil Poetera di bidang kebudayaan³²: “Kedatangan Jepang akhirnya menghentikan aktivitas Persagi, tetapi anggotanya menyebar ke mana-mana.”³³ Menurutnya, Jepang sangat lihai memanfaatkan seni lukis sebagai alat propaganda. Benturan keras di antara dua kepentingan (kubu Indonesia dan Jepang) mampu dinetralkan:

Pelukis-pelukis Jepang yang datang kemari sebagai militer dan sebagai penasihat dalam bidang seni lukis, untung bukan sejenis pelukis-pelukis “Mooi Indie”, akan tetapi pelukis yang mengerti keindahan tiang bambu, kurungan burung atau keindahan corong pabrik dan pekerja galangan kapal. Watak mereka terbukti berkali-kali juga watak yang membantu aspirasi bangsa kita. Mereka tahu sebagai seniman, bahwa tiap seniman harus punya kebebasan untuk menolak sesuatu yang dia tidak cocok dan bertentangan dengan rasa artistiknya. Dari itu dalam rapat-rapat pelukis atau di PUTERA atau di *Keimin Bunka Shidosho*. Atau rapat-rapat juri dalam suatu persiapan eksposisi, kalau saya umpamanya menolak suatu ide, maka mereka tidak jarang mencocokinya atau paling sedikit netral.³⁴

Pada 1943 Poetera memamerkan lukisan Affandi. Salah satu lukisannya yang mencekam publik berjudul *Tiga Pengemis*. Pihak militer Jepang tidak menyukai lukisan tersebut dan menyensornya dari ruang pameran. S. Sudjojono menyatakan, “Keindahan yang jelek ini dianggap oleh pemerintah Jepang sebagai hambatan jalannya mesin pembangunan Asia Timur Raya. Kita pertahankan lukisan bagus ini tetapi dilarang. Kita kalah, meskipun benar.”³⁵ Sementara pada masa-masa ini S. Sudjojono sendiri menghasilkan lukisan *Sayang Aku Bukan Anjing* (1944) yang memiliki makna simbolis berlapis. Selain lukisan itu, lukisan *Jungkatan* yang menggambarkan wanita sedang menyisir juga dikerjakan pada masa yang sama. S. Sudjojono mengakui bahwa di zaman Jepang ia tidak begitu banyak melukis.³⁶

Seperti yang telah dikatakan, berbeda dengan Belanda, Jepang berjasa besar memperkenalkan pelukis-pelukis di masyarakat, khususnya nama-nama baru yang bermunculan melalui 23 kali pameran sepanjang 1943-1945. Sebagai perbandingan, di sini bisa disebutkan bahwa, sejauh yang tercatat oleh Persagi, pembinaan oleh pemerintah kolonial Belanda hanya menyelenggarakan 3 pameran dalam 4 tahun.³⁷ Nama-nama pelukis yang pada waktu itu mulai dikenal oleh masyarakat antara lain Sudjojono, Affandi, Agus Djaya. Otto Djaya, Hendra, Basuki Resobowo, Emiria Sunassa, Henk Ngantung, Mochtar Apin, Sundoro, Trubus, Kerton, Baharuddin, dan Sudarso.³⁸ Selain nama-nama itu, tercatat pula Dullah, Rusli, Karyono, Sri Murtono, Trubus, Hendra Gunawan, Kusnadi, Karyono, Barli, E. Supit, Soemitro, Subarko, Sudibio, Sudarsono, Sumartono, Subanto, I Nyoman Ngendon, Ilyas, dan D. Wikartaatmadja.³⁹

Jika kita ikuti polemik kebudayaan sejak dekade 1930-an yang dirintis oleh Pujangga Baru maupun seruan mencari nasionalisme seni lukis oleh Persagi, kiranya bisa dilihat bahwa sampai zaman Jepang tema Barat-Timur masih gencar dibicarakan. Jepang tak henti-hentinya menanamkan kepercayaan seniman Indonesia terhadap kebesaran budaya Timur. Dengan amat sadar, Jepang sungguh-sungguh memperhitungkan faktor kebudayaan ini, selain politik dan militer. Jepang berpendirian bahwa bangsa-bangsa Asia Timur harus diyakinkan bahwa mereka sesungguhnya satu, yaitu memiliki satu corak kebudayaan, yakni kebudayaan Timur – yang sedang diancam oleh kebudayaan Barat.⁴⁰ Jepang menyikapi problematika tersebut dengan menerapkannya melalui pameran dan sayembara seni lukis. Ketika pameran pertama yang digelar oleh *Keimin Bunka Shidosho* dengan tema *Kehidupan Djawa Baroe*, organisasi ini memberikan hadiah kepada pelukis wanita Emiria Sunasa. Sejumlah kalangan menganggap pameran ini berhasil meyakinkan orang akan pentingnya identitas Timur dalam seni lukis. Ketua Umum *Keimin Bunka Shidosho* Sanusi Pane memberikan dukungan:

Pelukis-pelukis kita mencoba mencapai dasar dan corak Timur. Pada umumnya benar, bahwa mereka itu berbuat demikian dari lingkungan yang sangat dipengaruhi Barat. Hal itu dapat dibandingkan misalnya dengan ahli adat Indonesia yang memandang adat dengan kacamata ahli Eropa atau ahli bahasa Indonesia yang memandang bahasa Indonesia dari jurusan bahasa-bahasa Eropa. Kewajiban pelukis Indonesia berpindah sesungguhnya dari lingkungan itu masuk ke lingkungan Indonesia dan Timur. Langkah mereka ke arah itu sudah jauh kelihatannya dalam pertunjukan tsb.⁴¹

*MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG*

Akan tetapi, terdapat pandangan yang justru menilai bahwa lukisan-lukisan dalam pameran tersebut masih bernuansa Barat. Soemarno Soetoesoendoro, pengamat seni yang selalu kritis terhadap pencapaian seni lukis Indonesia, memberikan penilaiannya yang tajam:

....yang patut disayangkan ialah bahwa pelukis-pelukis kita, karena meminjam cara dan alat-alat dari Barat itu, mereka dalam lukisan-lukisannya sangat dipengaruhi oleh aliran seni lukis Barat, hingga dalam lukisan-lukisan mereka tak mengandung jiwa, rasa, dan semangat ketimuran. Bahkan dalam waktu pemerintah Belanda, kelihatannya pelukis-pelukis kita memang sengaja membuang jiwa, rasa, dan semangat ketimuran tadi, dalam lukisan-lukisan mereka.⁴²

Claire Holt memperkuat argumen tersebut. Pengaruh kesenian Jepang sendiri tidak menancap terlalu kuat. Di balik retorika “corak Timur” yang dicanangkan di mana-mana, para seniman sebenarnya cenderung menoleh ke Barat:

*It was during the Japanese occupation that Western music and painting acquired an enthusiastic following....in contrast there is little clearly identifiable Japanese influence discernible in modern Indonesia art.*⁴³

Upaya membebaskan diri dari estetika Barat dan komitmen dalam menemukan itu mendapat puncaknya dalam pernyataan Agus Djaya yang ketika itu gencar menghimbau agar pelukis-pelukis jangan memandangi ke arah Barat, sebab Barat sendiri, menurut Agus, sedang mencari kesenian baru dengan memandangi ke Timur sebagaimana yang tampak pada van Gogh, Cezanne, Gauguin, Debussy, Mallarme.⁴⁴ Namun, apakah program “kembali ke Timur” ini berhasil? Keinginan Jepang untuk membebaskan Indonesia dari pengaruh Barat sebenarnya melahirkan paradoks. Generasi muda dari lingkungan intelektual, bagaimanapun, telah mengalami Westernisasi selama bertahun-tahun. Mereka lebih suka berdiam diri dan mengkompensasikan diri karena tiadanya fasilitas pendidikan. Walhasil, mereka akhirnya belajar sendiri dan mendidik diri sendiri. Hasil yang paling kentara adalah bangkitnya antusiasme terhadap musik dan lukisan Barat.⁴⁵

Terlepas dari hal tersebut, lukisan-lukisan Emiria Sunasa, Sudjojono, Soekirno, dan Agus Djaja dalam pameran *Kehidupan Djawa Baroe* nyatanya mendapat sambutan positif. Emiria Sunasa mengambil pokok patung-patung primitif di Indonesia dan dikatakan menimbulkan “perasaan purbakala”; Sudjojono disebut-sebut “mencapai norma-norma Indonesia”; Soekirno menyelami dimensi wayang, menggunakan warna-warna primitif, suasana kala dan candi-candi raksasa dari pewayangan. Agus Djaja, yang mengambil pokok-pokok dan stilasi dari patung-patung dan relief-relief candi dipandang mampu “membangkitkan rasa ketimuran”. Inilah, agaknya, yang dimaksud oleh Sanusi Pane ketika dia mengatakan bahwa “langkah mereka sudah jauh kelihatannya” ke arah “lingkungan Indonesia dan Timur”. Karya-karya para pelukis tersebut menyambungkan kembali “seni modern Indonesia” dengan masa lalunya.

Apabila kita mengamatinya dari arah yang lain, kontribusi terbesar Jepang terhadap seniman Indonesia adalah semakin menguatnya kesadaran berorganisasi seni-budaya yang terstruktur; tumbuhnya kesadaran baru akan fungsi propaganda dalam seni; dan bangkitnya pemahaman terkait eksistensi (status sosial) seni dan seniman di tengah masyarakat. Tentu saja, warisan kesadaran berorganisasi yang inklusif dan partisipatif itu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kultural Jepang yang militeristik. Kenyataan ini bertolak belakang dengan kebijakan kultural pada zaman Belanda yang seakan-akan hanya berlaku untuk kepentingan di kalangan mereka sendiri – misalnya dengan institusi Batavia Kunstkring.

Sebagai organ militer, *Keimin Bunka Shidosho* telah memberikan pengalaman berorganisasi yang konstruktif. Pengalaman ini, bagaimanapun, menimbulkan bekas yang mendalam dan berpengaruh kuat bagi kesuburan organisasi atau perkumpulan seniman di masa-masa selanjutnya. Misalnya, pada 20 Oktober 1945, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuk *Pusat Tenaga Pelukis Indonesia* (PTPI) atas inisiatif Djajengasmoro dan sejumlah pelukis. Organisasi ini memiliki tugas propaganda: “PTPI akan berjuang dengan cat, pensil dan kertas bersama-sama peluru dan kata-kata diplomasi mengusir sisa-sisa penjajah dari Indonesia.”⁴⁶ PTPI dikabarkan membuat banyak poster propaganda dengan bantuan Kementerian Penerangan dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pola organisasi PTPI adalah versi lain dari *Keimin Bunka Sidhosho*.⁴⁷ Sementara itu, di Bandung, pada tahun yang sama, juga dibentuk *Pelukis Front*⁴⁸ yang bertugas mendokumentasikan peperangan. Berdirinya *Seniman Indonesia Muda* (SIM, 1946) menyusul *Pelukis Rakyat* (1948) dan menjamurnya sanggar-sanggar maupun organisasi seniman yang bermunculan hingga dekade 1960-an seperti *Lembaga Kebudayaan Rakyat* (Lekra, berdiri 1950) dan *Lembaga Seniman Budayawan*

*MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG*

Indonesia (Lesbumi, berdiri 1962) tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pengalaman masa sebelumnya.

Catatan Akhir

¹ Jim Supangkat. (1997). *Indonesian Modern Art and Beyond*. Jakarta: The Indonesian Fine Arts Foundation, hal.44.

² Perhatikan angka tahun 1945 yang dijadikan tahun pendirian *Keimin Bunka Shidosho*. Saya ingin sekali menduga penyebab kekeliruan ini hanyalah karena salah ketik belaka sebab Sanento Yuliman dikenal sebagai kritikus seni rupa Indonesia yang sangat teliti.

³ Sanento Yuliman. (1976). *ibid.* hal.11.

⁴ Kusnadi. (1990-1991). Seni Lukis Zaman Pendudukan Jepang dan Awal Republik dalam Mochtar Kusumaatmadja (ed.), *Perjalanan Seni Rupa Indonesia: Dari Zaman Prasejarah Hingga Masa Kini..* Jakarta: Panitia Pameran KIAS. hal. 83.

⁵ Aiko Kurasawa. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945..* Jakarta: Grasindo. hal. 229.

⁶ Mitsuo Nakamura. (1970). *General Imamura And The Early Period of Japanese Occupation*, Jurnal *Indonesia* Vol.10. Ithaca: Southeast Asia Program Publication Cornell University. hal. 2.

⁷ Pada masa itu Indonesia terbagi ke dalam 3 wilayah: Jawa di bawah *The 16th Army IJA*; Sumatera di bawah *the 25th Army*; dan Celebes (Sulawesi), Borneo (Kalimantan), *West New Guinea* (Papua Barat) di bawah Angkatan Laut Jepang.

⁸ Informasi ini saya peroleh dari Matsuura Jin-kurator Fukuoka Asian Art Museum (FAAM) yang menginformasikan seluk-beluk keberadaan grup propaganda ini.

⁹ Mitsuo Nakamura, *ibid.*, (1970), hal. 9. Diskusi-diskusi awal yang dilakukan oleh grup propaganda ini menggambarkan kendala yang mereka hadapi. Selain kendala komunikasi-mengingat hanya sedikit penguasaan bahasa Indonesia – Jepang berhadapan dengan propaganda dari pihak Belanda yang menjelek-jelekkan invasi mereka di Jawa. Dari diskusi tersebut, diputuskan untuk menetapkan penggunaan bahasa Melayu dalam propaganda. Jepang kemudian memberikan banyak rangsangan untuk pengembangan dan penggunaan bahasa Indonesia. Lihat W. F. Wertheim. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi*. (Yogyakarta: Tiara Wacana. hal. 247.

¹⁰ Untuk tinjauan lebih jauh, lihat Aiko Kurasawa, *ibid.*, hal. 66-68 dan Okada Hidenori, *Probin a Void in Documentary Film History: The Rise and Fall of Nippon Eigasha Jakarta Studio* di <http://www.yidff.jp/>, diunduh pada Januari 2008.

¹¹ *Djawa Eiga Kosha* kemudian pindah ke *Keimin Bunka Shisosho*.

¹² Aiko Kurasawa, *ibid.* (1993), hal.229-230.

¹³ Ada berbagai cara dalam mencermati perihal berdirinya Poetera. Beberapa sumber menyebut tahun 1942 dan sumber lain mengatakan bahwa Poetera diresmikan pada 1 Maret 1943. Lihat majalah *Djawa Baroe*, No.5, 1 Maret 1943. Namun, dalam *Djawa Baroe*, No.1, 1 Januari 1943 ditulis tanggal 8 Desember 1942, bertepatan dengan perayaan setahun perang Asia Timur Raya dan pameran Poetera yang pertama, lihat juga Noerhadi Soedarno, POETERA (Poesat Tenaga Rakjat), (Jakarta: Tintamas, 1982), hal.12. Soedarno menyebutkan bahwa POETERA – ketika itu masih bernama Panitia Badan Persiapan Gerakan Baru - berdiri guna menyambut peringatan satu tahun pemboman Teluk Mutiara Hawaii. Dalam pengantar cetak ulang majalah *Djawa Baroe*, Aiko Kurasawa menyebutkan bahwa Poetera didirikan pada 9 Maret 1943 bertepatan dengan genapnya setahun pendudukan Jepang di Jawa (*Shin Jawa Sai*) – dengan menyerahnya Belanda pada tanggal yang sama. Dalam pidatonya pada 1 Maret 1943, Sukarno mengatakan bahwa gerakan rakyat yang bernama “Gerakan Pusat Tenaga Rakyat” ini akan diresmikan pada 9 Maret 1943. Lihat petikan pidato Sukarno dalam Soedarno, *ibid.*, hal. 13.

*MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG*

¹⁴ Imam Boechori Zainuddin. (1966). *Latar Belakang Sejarah Pembinaan dan Perkembangan Seni Lukis Indonesia Modern (1935-1950)*. ITB: Skripsi Sarjana. hal. 36.

¹⁵ Poetera diganti menjadi *Jawa Hokokai* atau Himpunan Kebaktian Rakyat yang dipimpin oleh pihak militer Jepang dengan Soekarno sebagai penasihat.

¹⁶ Menurut Ajip Rosidi keluarnya S. Sudjojono dari Poetera disebabkan oleh pertikaian pendapat dengan Bung Karno sehubungan dengan rencana pameran Basuki Abdullah. Lihat Ajip Rosidi. (1977). *Pelukis S. Sudjojono*. Jakarta: Pustaka Jaya. hal. 31.

¹⁷ Aiko Kurasawa, *Propaganda Media on Java Under The Japanese 1942-1945*, Journal Indonesia Vol.44, (Ithaca: Southeast Asia Program Publication Cornell University, 1987), hal. 92.

¹⁸ Majalah *Djawa Baroe*, No.3.Th.2603. Lihat juga *Djawa Baroe*, No.6.Th 2603

¹⁹ Aiko Kurasawa, *ibid.*, (1987), hal.61.

²⁰ Dipetik dari A.D. Pirous. (2003). *Melukis itu Menulis: Kumpulan Tulisan A.D.Pirous Tentang Seni Rupa dan Kebudayaan*. Bandung: Yayasan Serambi Pirous dan Penerbit ITB. hal. 4

²¹ A.D.Pirous, *ibid.*, 2003. hal. 4-5.

²² Susunan itu dipetik dari *Jawa Nentan*, almanak pemerintah militer Jepang yang terbit pada awal 1944 dan dicetak ulang pada 1973. Berdasarkan sumber yang lain, dalam susunan pengurus *Keimin Bunka Shidosho*, khususnya dalam seksi seni rupa, terdapat nama yang berbeda-beda. Hal ini membuat banyak kerancuan dan sangat membingungkan. Disebutkan, misalnya, bahwa Agus Djaya adalah ketua *Keimin Bunka Shidosho*. Lihat Hilda Soemantri (ed.). (1998). *Indonesian Heritage: Visual Art*. Singapore: Archipelago Press. hal. 52. Adapun Imam Boechori menulis bahwa R. M. Subanto Suryasubandrio adalah pemimpin organisasi dari bangsa Indonesia dan Setioso berperan sebagai ketua yang dibantu oleh Emiria Sunassa, Sukirno, Moch. Saleh, S. Tuter, Surono, Abdul Salam, dan Sastradiwiry. Lihat Imam Boechori Zainuddin, *ibid.*, hal. 44. Nama-nama itu kiranya adalah anggota pemeliharaan seni rupa yang dibentuk oleh *Keimin Bunka Shidosho* pada 26 Desember 1943. Selain itu ditemukan sejumlah perbedaan pada pembagian seksi. Sumber lain menuliskan "departemen seni pertunjukan" (*performing arts*) yang terdiri atas teater, tari, dan film. Lihat Aiko Kurasawa, *ibid.*, (1987), hal.61.

²³ Dari sumber lain susunan pengurus di Bagian Seni Rupa terdiri atas Kohno – Ono – Yasioka – Yamamoto (Pimpinan Utama); R.M. Subanto Suryobandrio (Pimpinan); Setioso, emiria Sunnasa, G.A.Sukirno, Mohamad Saleh, S. Tuter, Surono, Abdul Salam – Sastradiwirdja (Pembantu). Bandingkan dengan susunan pengurus Bagian Seni Rupa ini dalam majalah *Kebudayaan Timur*, No.2, *Keimin Bunka Shidosho*, 26 Desember 2603. Dipetik dari A. D. Pirous, *ibid.*, 2003, hal.5.

²⁴ Disarikan dari majalah *Djawa Baroe* edisi 1 Januari 1943 sampai dengan edisi terakhir 1 Agustus 1945. Tentu saja, mengingat masih terdapatnya surat kabar yang terbit pada masa itu seperti *Asia Raya* (Jakarta), *Tjahaja* (Bandung), *Sinar Matahari* (Jogjakarta), *Soera Asia* (Surabaya), dan sebagainya, kelengkapan data pameran bisa disempurnakan di kemudian hari. Lihat juga Imam Boechori Zainuddin, *ibid.*, hal. 46-47. Kegiatan pameran *Keimin Bunka Shidosho* memperlihatkan prestasi tinggi sebagaimana yang terbukti dari 14 kali pameran lukisan untuk Jakarta saja. Majalah *Pandji Poestaka*, misalnya, melaporkan salah satu pameran terbesar dalam peringatan hari lahir Kaisar Jepang (*Tenno Heika: Tencho-setsu*) di Gedung Pusat Kebudayaan, Jakarta yang diikuti 60 pelukis muda. Pemerintah Jepang membeli 9 lukisan untuk diikutsertakan dalam pameran keliling Asia Timur Raya. Diberitakan

pula bahwa pameran ini mencatat jumlah kunjungan tertinggi, yaitu 11.000 orang dalam sepuluh hari. Lihat A.D. Pirous, *ibid.*, 2003, hal.5-6.

²⁵ Lihat Asia Raja, 22 September 1944.

²⁶ Majalah *Djawa Baroe*. (15 September 1944). No.18.

²⁷ Trisno Sumardjo. (1956). *Kedudukan Seni Rupa Kita* dalam Zaini (ed), *Almanak Seni 1957*. Jakarta: Badan Musyawarah Kebudayaan nasional. hal. 127-128. Lihat juga kecaman Chairil Anwar dalam Aoh.K. Hadimadja, *Beberapa Paham Angkatan 45*, (Jakarta: Tinta mas, 1952), hal.34.

²⁸ M. Balfas. (1951). *Seni Lukis Indonesia Baru*, Majalah Kebudayaan 'Indonesia' No.4, TH.II April. hal 5. Bandingkan pernyataan M. Balfas atas kepemimpinan S. Sudjojono ini dengan keberpihakan Kusnadi terhadap Affandi. Menurut Kusnadi, "Seorang tokoh utama dari periode pendudukan Jepang ini adalah Affandi." Lihat Kusnadi, *Seni Lukis Zaman Pendudukan Jepang* dalam Mochtar Kusuma Atmadja,dkk., *Perjalanan Seni Rupa Indonesia: Dari Pra-Sejarah hingga Masa Kini*. (1990-1991). Jakarta: Panitia Pameran KIAS. hal. 85.

²⁹ Suromo. (Mei-Juli 1949). *Timbul dan Tumbuhnya Seni Lukis Indonesia (II)*, Mimbar Indonesia.

³⁰ Basuki Abdullah. (29 April 1943). *Sepatah Kata untuk Pelukis-pelukis Kita*, surat kabar *Asia Raya*.

³¹ A.D. Pirous, *ibid.*,

³² Di bidang kebudayaan lembaga ini dipimpin oleh Soewandhi dari Taman Siswa dan S. Sudjojono sebagai wakil. Sumber ini diperoleh dari Imam Boechori (1966) dan S. Sudjojono (1974) sendiri. Informasi berbeda kita temukan dalam Kusnadi (1991) dengan menyebutkan bahwa ketua Poetera di bidang kebudayaan adalah S. Sudjojono. Jauh sebelum Kusnadi menuliskan hal tersebut, sejarawan Amerika, Claire Holt (1967) juga menetapkan hal yang sama: S. Sudjojono adalah ketua seksi kebudayaan. Lihat Claire Holt. (2000). *Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia*, (Bandung: Seni Masyarakat Pertunjukan Indonesia. MSPI). hal.287.

³³ S. Sudjojono. (Desember 1974). *Pengalaman Saya Pada zaman Jepang dan Di Zaman Revolusi*, dalam *Budaja Djaja* No.79, Thn.VII. hal.717.

³⁴ Sudjojono, *ibid.*, (1974). Sementara itu, Claire Holt (2000:285) memperkuat gambaran tersebut. Menurutnya, "...apa yang pelukis butuhkan kemudian, sebagai kritik yang konstruktif, adalah dorongan serta pengakuan akan potensi mereka. Dorongan ini datang pada masa pendudukan Jepang, yang meskipun sukar, adalah masa yang paling menggairahkan bagi para seniman. Terguncang dari kebiasaan-kebiasaan kolonial Belanda, mereka diperlakukan dengan kelembutan serta pertimbangan oleh Jepang."

³⁵ *ibid.* Dengan mengutip sebuah laporan di harian terbitan Belanda ("Indonesie Schilders: Affandi", *Het Inzicht*, No.29, 3 Agustus 1956), meskipun tidak menunjukkan rincian lukisan, Claire Holt (2000:286) memperkirakan larangan Jepang terhadap lukisan Affandi disebabkan oleh perkara *romusha*. Tubuh-tubuh yang kurus dalam lukisan Affandi tidak disukai oleh pemerintahan fasis Jepang.

³⁶ Ajip Rosidi. (1977). *Pelukis S. Sudjojono*, (Jakarta: Pustaka Jaya: 1977), hal.34

³⁷ Imam Boechori, *ibid.*, (1966), hal. 48.

³⁸ M. Balfas, *ibid.*, (1951), hal.5.

³⁹ Imam, Boechori, *ibid.*, hal.48.

⁴⁰ Sanento Yuliman. (1968). *Beberapa Masalah dalam Kritik Seni Rupa Indonesia* (Bandung: Skripsi Sarjana Jurusan Seni Rupa-ITB. hal. 130.

*MENEMUKAN IDENTITAS MELALUI PROPAGANDA
SENI RUPA INDONESIA DI ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG*

⁴¹ Sanusi Pane, *Seni Eropa Siap Berkembang, Soera Asia*, 22 Mei 2603.

⁴² Soemarno Soetoesoendoero. (19 Juni 2603). *Peloekis Kita Mentjari Hoeboengan dengan Tjorak Ketimoeran Sedjati*, Asia Raya.

⁴³ Claire Holt. (1967). *Art in Indonesia: Continuites and Change*. New York: Cornell Univ Press. hal. 198-199.

⁴⁴ Agoes Djaja. (1968). *Seni Roepa dan Bangsa, Soera Asia*, 26 Mei 2603 dalam Sanento Yuliman, *ibid.*

⁴⁵ Lebih jauh bisa dilihat dalam W.F. Wertheim, *ibid.*. (1999). hal. 246-247.

⁴⁶ Lihat *Perjuangan PTPI, Revolusi Pemuda*, 25 Desember 1945. PTPI dikabarkan membuat banyak poster propaganda dengan bantuan Kementrian Penerangan dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

⁴⁷ Sanento Yuliman. (1968). *Beberapa Masalah dalam Kritik Seni Lukis di Indonesia*. Bandung: Skripsi Sarjana Jurusan Seni Rupa-ITB.

⁴⁸ Antara lain Hendra Gunawan, Affandi, dan Sudjana Kerton.

**DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI
(1942-1945)**

Didi Kwartanada

Pengantar

Menyambut enam bulan kemenangan balatentara Dai Nippon di Jawa, *Gunseikan* [Kepala Staf Pemerintahan Militer] Tentara ke-16 Mayjen Okazaki Seizaburo (gambar 1) dengan bangga menulis pada September 1942, ".....Nippon sebagai Pemimpin Asia **bermaksud menghapuskan segala perbedaan dulu antara golongan-golongan dan bangsa-bangsa**".¹ Pernyataan *Gunseikan* Okazaki ini sangat menarik. Tetapi yang dimaksud dengan "*menghapuskan segala perbedaan dulu antara golongan-golongan dan bangsa-bangsa*"?



Mayjen Okazaki Seizaburo

Sumber: Jacob Zwaan, *Nederlands-Indië 1940-1946: Japans Intermezzo*

Sumber: Den Haag: Omniboek, t.t., h. 26.

Jepang pasti sudah tahu bahwa masyarakat Hindia Belanda mengalami segregasi rasial yang kokoh hasil ciptaan pemerintah kolonial, mulai dari status hukum antara berbagai kelompok rasial ("Eropa" [*Europeanen*]- "Timur Asing" [*Vreemde Oosterlingen*] dan "Pribumi" [*Inlander*]), hingga fasilitas pendidikan

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

berbasis etnik, yang diatur menurut garis rasial. *Statement* resmi pemerintah Jepang tadi terkesan pongah dan menganggap enteng isu keberagaman di tengah masyarakat yang terpecah-pecah ke dalam berbagai golongan yang didasarkan atas garis rasial dan warna kulit. Dalam perkembangannya, selama kurun waktu singkat tiga setengah tahun masa kekuasaannya, Tentara ke XVI Jepang melakukan "eksperimen" atas isu keberagaman di Jawa.

Tulisan ini mencoba melihat bagaimana kebijakan Jepang terhadap keberagaman di Jawa, dalam hal ini studi kasus etnik Tionghoa, yang merupakan elemen terbesar dari lapisan tengah ("Timur Asing") dan secara historis berposisi sebagai minoritas perantara di tengah-tengah masyarakat kolonial. Penulis mencoba melihat apa yang dilakukan Jepang ini dalam konteks panjang kebijakan *divide et impera* kolonial Belanda sejak awal abad XX yang mengkotak-kotakkan berbagai elemen masyarakat. Mengapa etnik Tionghoa sulit diterima kelompok mayoritas Pribumi dan begitupun sebaliknya. Bagaimana Jepang mengelola segregasi *made in colonial* ini, dan apa solusi yang mereka coba lakukan? Bagaimana hasil "eksperimen" ala Nippon tadi? Apakah ia mampu meng-*counter* kebijakan rezim sebelumnya, atau justru, karena tidak ada pilihan lain, melanjutkan, atau bahkan memperkuat sekat-sekat rasial yang sudah ada? Sebagai penutup, penulis mencoba mengevaluasi dampak kebijakan Jepang itu pada periode awal revolusi fisik, khususnya pada relasi antara minoritas Tionghoa *vis a vis* golongan Pribumi, yang kini bukan lagi kaula jajahan, namun sudah memiliki pemerintahannya sendiri.

Golongan Tionghoa Sebagai "Manusia Dagang" dan "Minoritas Perantara"

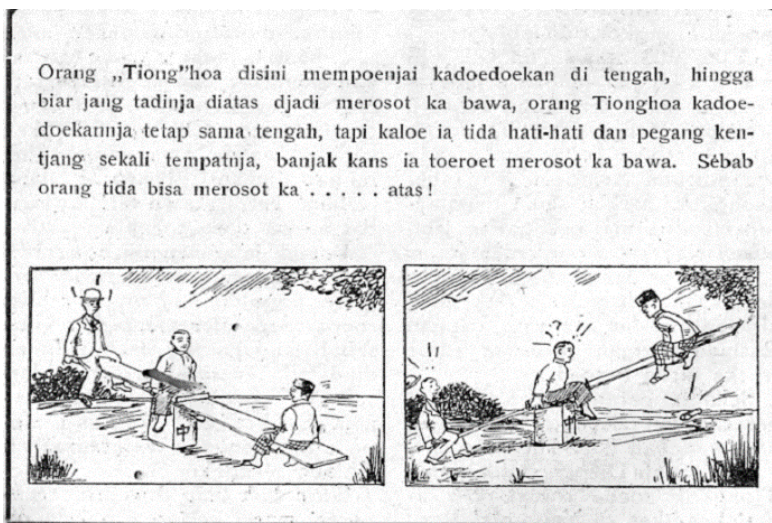
Historiografi nasionalistik Indonesia memberikan stigma atas golongan Tionghoa sebagai "binatang ekonomi" yang oportunistis, tidak memiliki loyalitas politik dan hanya memikirkan diri sendiri.² Pluralitas di kalangan etnis Tionghoa³ pun banyak diabaikan dan mereka lebih banyak dipandang sebagai kelompok homogen berlabel: "WNI keturunan Cina".

Sejarawan Twang Peck yang berpendapat bahwa berbagai kajian atas etnik Tionghoa lebih banyak dilakukan dari sudut pandang politik, tanpa mencoba memahami karakter dasar mereka sebagai "manusia dagang" (pinyin: 商人 *shāngren*) dengan berbagai karakter khasnya.⁴ Maka pandangan terhadap mereka akan terjebak pada bias penilaian hitam-putih: "loyal-tidak loyal"; "membraur-tidak membraur", "patriot-pengkhianat". Pandangan bipolar yang stereotipik seperti ini akhirnya membawa hambatan bagi proses *nation-building*, karena stigmatisasi

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

seperti ini condong dilestarikan, tanpa adanya suatu usaha untuk melihat dari dalam (*view from within*) kelompok Tionghoa itu sendiri.

Dari dahulu golongan Tionghoa dimanfaatkan sebagai “perantara” ataupun “mesin pencetak uang”, baik oleh raja-raja maupun oleh penguasa kolonial. Sejak zaman pra-kolonial orang Tionghoa sudah bekerja pada raja-raja kerajaan maritim, misalnya sebagai *syahbandar*. Sultan Hamengku Buwono I menugaskan orang Tionghoa untuk menarik pajak demi mengisi kas Kasultanan Yogyakarta yang baru saja didirikannya.⁵ Kolonial Belanda yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, melihat bahwa Tionghoa bisa menjadi “perantara” mereka dengan golongan pribumi. Maka Belanda menjual berbagai macam *pacht* (hak pengelolaan) bagi jalan tol, candu, rumah gadai, kepada pengusaha Tionghoa. Para pengusaha tersebut berani membeli *pacht* dengan harga tinggi, karena mereka tahu bahwa keuntungan yang didapatkan akan berlipat ganda. Dengan dukungan penguasa, para *pachter* tersebut memeras rakyat dan menjadi sangat kaya karenanya. Akhirnya golongan Tionghoa diposisikan menjadi minoritas perantara yang kedudukan ekonominya cukup mapan, namun secara politis dibenci oleh rakyat.



Golongan Tionghoa sebagai "minoritas perantara" yang berada di tengah.

Sumber: *Java Critic*, 10 Desember 1948, h. 10

Kedudukan sebagai perantara inilah yang memang diinginkan oleh penguasa, yakni Tionghoa sebagai “perisai” atau “kambing hitam”, yang diposisikan di tengah, disaat terjadi konflik menentang penguasa atau saat terjadi kevakuman

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

pemerintahan (lihat gambar 2). Pola ini muncul berkali-kali dalam sejarah Indonesia.⁶ Dapat disebutkan contoh antara lain: kekalahan Belanda dan kedatangan Jepang (Maret 1942); kekalahan Jepang dan revolusi kemerdekaan (1945-1950); Peraturan Pemerintah (PP) No.10/1959; jatuhnya Presiden Sukarno (1966); Peristiwa Malari (1974); Peristiwa Solo-Semarang (1980), Tanjung Priok (1984); Rengasdengklok (1997), Makassar (September 1997), dan Huru-hara Mei 1998.

Dalam ilmu sosial, posisi “tengah” seperti golongan Tionghoa ini dikenal sebagai konsep “minoritas perantara” (*middlemen minority*).⁷ Berikut ini adalah uraian detil mengenai “minoritas perantara”:

“...Dalam masyarakat-masyarakat multietnik, kadang terdapat kelompok-kelompok etnik tertentu yang menduduki status perantara [*middle status*] di antara kelompok dominan yang berada di puncak hirarki etnik dan kelompok subordinat yang berada di bawah. Kelompok tersebut disebut “minoritas perantara” [*middlemen minorities*]...Minoritas perantara sering berfungsi sebagai mediator antara kelompok dominan dan kelompok etnik subordinat. Mereka biasanya menduduki ceruk perantara [*intermediate niche*] dalam sistem ekonomi. . .Mereka memainkan berbagai peran dalam mata pencaharian selaku pedagang, pemilik toko, pembunga uang [Jawa: *mindring*] dan profesional independen. Dengan demikian minoritas perantara melayani baik kelompok dominan dan subordinat. Mereka melakukan tugas-tugas ekonomis yang bagi mereka yang berada di puncak (elit) dianggap sebagai hal yang dibenci atau kurang bermartabat . . .Sehubungan dengan posisi ekonomi perantara mereka, kelompok ini sangat rentan [*vulnerable*] terhadap permusuhan dari luar kelompok etniknya, baik yang muncul dari kelompok dominan maupun subordinat. Pada masa-masa tegang, mereka adalah . . .kambing hitam alami [*natural scapegoat*] . Mereka secara jumlah maupun secara politis tidak berdaya dan oleh karena itu harus memohon perlindungan kepada kelompok dominan, yang akan memberikannya sejauh peran ekonomis mereka masih dibutuhkan”.⁸

Dari uraian di atas, masalah jaminan keamanan nampak amat penting bagi golongan “minoritas perantara” karena posisi mereka yang secara politis lemah. Oleh karena itu loyalitas total sukar sekali diharapkan dari kaum “minoritas perantara”. Loyalitas akan mereka berikan kepada siapapun yang bisa menjamin keselamatan mereka. Ironisnya, seperti terbukti pada zaman Jepang, apabila

musuh mampu memberikan jaminan keamanan, mereka pun tidak segan-segan mengalihkan loyalitasnya kepada sang musuh!

Tanpa memahami hakekat etnik Tionghoa selaku “minoritas perantara”, orang akan dengan mudah menuding dan menyalahkan mereka, sebagai “oportunis”. Sebagai contoh, Abu Hanifah, seorang tokoh Nasionalis-Islam menulis sebagai berikut:

“...sebagian besar Tionghoa di Indonesia benar-benar tidak mempunyai loyalitas [*had no sense of loyalty*]. Pada zaman Belanda mereka bersikap pro-Belanda. Pada saat Jepang menjadi tuan, mereka berkawan dengan Jepang. Kemudian datanglah revolusi dan mereka bersikap baik kepada kita...Akhirnya yang bisa dikatakan hanyalah bahwa mereka ini adalah “kaum oportunis yang tidak bisa diperbaiki” [*incorrigible opportunists*].⁹

Pandangan serupa dengan Hanifah cukup populer di kalangan umum, yang condong melihat keberadaan Tionghoa secara hitam-putih (pahlawan atau pengkhianat), tanpa memahami hakekat mereka sebagai “manusia dagang” atau “minoritas perantara”, yang muncul sebagai produk kolonial. Golongan perantara ini akan selalu merasa terancam dari pihak di luar kelompoknya (*out-group hostility*), maka siapapun yang bisa memberi jaminan keamanan dan stabilitas, dialah yang akan mereka ikuti. Tidak ada pilihan lain yang tersedia, karena ini adalah masalah “*survival*” dan tidak bisa ditafsirkan secara simplistik berdasarkan prasangka hitam-putih (loyal-tidak loyal). Tidaklah mengherankan, bahwa posisi golongan Tionghoa akan selalu “serba salah”, bagaikan buah simalakama, seperti yang dilukiskan dengan bagus oleh seorang peneliti dari Australia, Charles Coppel berikut ini

“...Orang Tionghoa itu ibarat makan buah simalakama bila memikirkan kegiatan politik. Jika mereka terlibat dalam kalangan oposisi, mereka dicap subversif. Apabila mereka mendukung penguasa waktu itu, mereka dicap oportunis. Dan jika mereka menjauhi diri dari politik, mereka juga oportunis sebab mereka itu dikatakan hanya berminat mencari untung belaka”.¹⁰

Etnonasionalisme vs Nasionalisme Modern

Abad XX dibuka dengan kehadiran organisasi modern Tionghoa yang pertama, yakni Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) di Batavia. Setahun kemudian, THHK Batavia mendirikan sekolah dengan kurikulum modern ala Jepang. Sekolah ini begitu

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

mengesankan, sehingga komunitas Tionghoa dari berbagai daerah di Indonesia pun ingin memiliki sekolah ala THHK Batavia.¹¹ Kesuksesan THHK ini mengilhami kaum intelektual dari golongan Bumiputera. Abdul Rivai, dokter dan wartawan terkemuka di awal abad XX, memberikan perhatian yang sangat besar pada gerakan “kemajuan” di kalangan Tionghoa. Melalui *Bintang Hindia*, majalah bergambar pertama di Indonesia yang disponsori pemerintah kolonial serta sangat berpengaruh, Rivai berulang kali memuji persatuan golongan Tionghoa di dalam mengejar “kemajuan” untuk bisa menyamai orang Eropa.¹²

Kelahiran organisasi modern Bumiputera yang pertama, Boedi Oetomo (BO) di tahun 1908 juga terkait erat dengan THHK.¹³ Dokumen sejarah sezaman pun menunjukkan bahwa pengaruh THHK sudah meluas di kalangan Bumiputera, bahkan sebelum lahirnya BO. Dewasa ini bermunculan bukti bahwa imbas kemajuan di kalangan THHK juga berdampak pada komunitas Arab asal Hadramaut. Peneliti asal Australia, Natalie Mobini-Kesheh dengan jelas dan tegas menyebutkan bukti-bukti pengaruh THHK pada kemajuan komunitas Arab. Ini nampak dari kasus *Jamiat Khair*, perkumpulan modern pertama dari komunitas Hadrami yang didirikan di Batavia tahun 1905:

“...Pendiri Jamiat Khair mengetahui THHK dan kemungkinan menggunakannya sebagai model. *Pertama*, hal ini terlihat jelas dalam pers Arab di tahun 1920-an bahwa orang-orang Hadrami dengan cermat menyadari perkembangan masyarakat Cina dan seringkali menggunakan orang-orang Cina sebagai tolok ukur bagi tingkat kemajuan mereka... *Kedua*, mantan guru Jamiat Khair, Muhammad al-Hashimi yang berasal dari Tunisia, menegaskan pentingnya teladan orang-orang Cina bagi orang-orang Hadrami dalam sebuah wawancara yang diterbitkan surat kabar Mesir di tahun 1929. *Ketiga*, bahwa pada tahun 1914 ketika anggota Jamiat Khair terpecah untuk membentuk organisasi rival Al-Irsyad, mereka mengambil dasar konstitusi organisasi baru dari THHK”.¹⁴

Persatuan golongan Tionghoa yang mampu mengatasi berbagai perbedaan dan mempromosikan gerakan “kemajuan” melalui THHK rupanya dikagumi dan menjadi panutan berbagai kelompok etnik di Hindia Belanda di awal abad XX.

Kelahiran THHK; Jamiat Khair dan Boedi Oetomo, yang bercirikan eksklusivisme, menorehkan haluan etno nasionalisme dari berbagai kelompok etnik di dekade pertama abad XX. Kelahiran Sarekat Islam (SI) di tahun 1911 semakin

memperkuat sekat rasial tadi. Apalagi, SI antara lain didirikan untuk mengatasi persaingan ekonomi antara golongan Bumiputera dengan Tionghoa. Maka sepanjang tahun 1911-1913 banyak terjadi konflik berdarah antara Tionghoa-Bumiputera, dan puncaknya terjadi di tahun 1918 di Kudus.¹⁵

Derasnya aliran etnonasionalisme, ternyata, tidak bisa mencegah menetasnya embrio "keindonesiaan". Tanggal 25 Desember 1912, seorang Indo Belanda, EFE Douwes Dekker bersama dua sahabatnya, dr Tjipto Mangoenkoesomo dan Soewardi Soerjaningrat mencoba mendobrak belenggu etnonasionalisme dengan mendirikan partai multikultural-egaliter pertama dalam sejarah Indonesia, *Indische Partij* (IP). Perkumpulan ini "terbuka buat semua golongan bangsa (bangsa Indonesia, bangsa Eropa yang terus tinggal di sini, Belanda Peranakan, Peranakan Tionghoa dan sebagainya) yang merasa dirinya seorang 'Indiër' [orang Hindia], tidak mengingat tingkatan kelas, laki-laki atau perempuan". Oleh karena mencita-citakan "Hindia" merdeka dan bersemboyan "Hindia buat Orang Hindia", maka pemerintah Belanda membubarkan IP di bulan Maret 1913 dan ketiga pendirinya dibuang ke Belanda.¹⁶

Setelah IP, kebanyakan organisasi politik besar Bumiputera hanya menerima anggota dari kalangan sendiri saja.¹⁷ Perkecualian adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). PKI yang didirikan di tahun 1920 sebagai partai komunis pertama di Asia berusaha menarik anggota dari kalangan Tionghoa, namun upaya ini tidak begitu berhasil. Sesuai meletusnya pemberontakan PKI di tahun 1927, dari 823 aktivis partai yang dibuang ke Boven Digoel di Papua, terdapat 8 orang Tionghoa.¹⁸ Gerindo yang didirikan di tahun 1937 oleh sekelompok nasionalis Bumiputera beraliran kiri, dalam kongresnya di Palembang dua tahun kemudian, mendukung masuknya kaum peranakan Tionghoa dan Arab. Ketua Gerindo, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa "makin banyak kaum peranakan yang ingin bergabung dengan gerakan nasionalis Indonesia, dan karenanya untuk mereka pintu harus dibuka".¹⁹

Kasus berbeda muncul di dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Sukarno dan kawan-kawan di bulan Juli 1927. Golongan Asia nonbumiputera hanya bisa diterima menjadi "anggota luar biasa". Seorang peranakan Tionghoa di Palembang, Kwee Tjing Hong berinisiatif membentuk cabang PNI setempat. Rapat pembentukan diselenggarakan di rumahnya, bahkan ia juga hendak mendirikan satu cabang lagi di Bangka. Ketika pemimpin PNI ditahan, ia pun ikut dimasukkan ke dalam penjara. Betapapun kuat dedikasinya, namun Kwee harus menerima kenyataan pahit, bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menjadi anggota penuh PNI. Maka dengan sedih ditinggalkannya partai itu.

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

Penolakan peranan untuk menjadi anggota penuh juga membuat dr Tjipto Mangoenkoesoemo selaku anggota panitia persiapan untuk juga hengkang dari PNI.

20

Seiring dengan penolakan yang diberikan oleh nasionalis Bumiputera, mayoritas golongan Tionghoa tidak tertarik pada nasionalisme Indonesia. Hingga tahun 1932, mereka terbagi dalam dua kelompok besar.²¹ Pertama adalah apa yang disebut sebagai “Aliran Sin Po”, yang dinamai sesuai dengan satu surat kabar kenamaan berbahasa Melayu/Tionghoa yang berafiliasi ke Tiongkok. Aliran ini mendukung konsep “sekali Tionghoa tetap Tionghoa”. Walaupun demikian, seperti akan kita lihat nanti, mereka tidak segan-segan membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam semangat “Pan Asia”.²² Kedua adalah “aliran Chung Hua Hui (CHH)”, yang didirikan untuk mengisi perwakilan Tionghoa di *Volksraad* (Dewan Rakyat). Aliran ini mendukung kolonialisme Belanda dan menganggap diri mereka sebagai “*Trouwe onderdanen van Hare Majesteit de Koningin*” (Kawula Sri Ratu Belanda yang setia).

Di bulan September 1932, sekelompok pemuda peranan Tionghoa yang menyadari bahwa mereka adalah “orang Indonesia,” mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) Di Surabaya. Tokoh utamanya adalah Liem Koen Hian (1896-1952), seorang wartawan kelahiran Banjarmasin yang berpena tajam dari harian *Sin Tit Po* (lihat gambar 3).

Aliran PTI ini bisa disimpulkan dalam pernyataan: “Lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia dan mati dikubur juga di Indonesia”. Pernyataan ini sekaligus mengakui Indonesia sebagai tanah air satu-satunya. PTI juga dengan tegas menekankan ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.²³ Aliran politik peranan Tionghoa ketiga, alias yang paling bungsu ini nantinya banyak menemui halangan, bukan hanya dari penjajah, namun juga dari sesama Tionghoa dan juga nasionalis Bumiputera.

Munculnya PTI sebagai aliran politik ketiga di kalangan peranan Tionghoa tadi menegaskan bahwa kelompok “Timur Asing” yang satu ini begitu heterogen dan terpecah.²⁴ Mengutip Mary Somers Heidhues,



Liem Koen Hian
Sumber: Domain publik

"...Didorong oleh pemerintah kolonial untuk berpikir bahwa mereka terpisah dari mayoritas orang Indonesia, didorong oleh pemerintah Tiongkok supaya berpikir sebagai warga Tiongkok, dan dipengaruhi secara historis oleh pengalaman yang berlainan, pada akhirnya komunitas-komunitas Tionghoa di Indonesia tidak pernah bisa bersatu".²⁵

Golongan Tionghoa dan Perang Tiongkok-Jepang (1937-1942)

Konflik Tiongkok-Jepang yang memanas mendapatkan perhatian yang besar dari golongan Tionghoa di Indonesia.²⁶ Agresi Jepang ke Tiongkok semakin agresif dengan terjadinya "Insiden Jembatan Marco Polo" (Juli 1937) sekaligus menandai bermulanya Perang Tiongkok-Jepang II (1937-1945). Perbedaan pendapat dikalangan elite pimpinan Kuomintang soal penyelesaian konflik dengan Jepang membawa perpecahan antara kubu Presiden Chiang Kai-shek dengan saingan terdekatnya, Wang Ching-wei. Chiang yang berkedudukan di Chungking memilih melanjutkan perlawanan bersenjata, namun Wang memilih negosiasi damai dengan Jepang. Di bulan Maret 1940 Wang resmi menjadi kepala "negara boneka" Jepang, yang disebut rezim "Pemerintah Nasional Baru" yang berkedudukan di Nanking.

Senjata utama yang digunakan oleh kaum Tionghoa Perantauan melawan Jepang adalah pemboikotan barang-barang Jepang, namun usaha ini relatif hanya sedikit membawa hasil. Secara umum, kaum totok—khususnya etnis Kwangtung (Kanton) bersikap lebih patriotis daripada kaum peranakan. Golongan Kanton kebanyakan adalah pekerja kelas bawah dan 40% di antara mereka adalah kaum totok (kelahiran Tiongkok). Kelompok ini cukup dominan dalam bidang jurnalisme dan pendidikan, maka tidaklah mengherankan bahwa mereka amat peka terhadap perkembangan politik di Tiongkok. Di daerah-daerah konsentrasi kaum Kanton, seperti di Pontianak (Kalimantan) dan Tanjung Balai (Sumatra) semangat patriotisme terhadap Tiongkok amat tinggi.²⁷

Dalam menyebarkan ide-ide anti-Jepang, pers Tionghoa—baik yang berbahasa Melayu ataupun Tionghoa—memegang peranan penting. Pemerintah Hindia Belanda yang merasa bahwa konflik bilateral tersebut bukan urusannya, karena itu berusaha memegang teguh asas netralitas, sehingga mereka mengawasi dengan ketat tulisan-tulisan dalam pers Tionghoa yang bernada anti Jepang.²⁸ Dari tahun 1938 hingga awal 1940 tercatat sekitar 20 pembredelan terhadap koran Tionghoa dan Melayu-Tionghoa.²⁹ Sedemikian menganggunya tulisan-tulisan anti-Jepang di media massa Tionghoa, sehingga pada Konferensi Bilateral Hindia

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

Belanda-Jepang di tahun 1940, delegasi Jepang minta kepada Pemerintah Hindia Belanda supaya melakukan kontrol yang lebih ketat mengenai peliputan atas perang di Tiongkok.³⁰

Menyusul berbagai seruan di surat kabar akan perlunya pengiriman bantuan dana ke Tiongkok, maka di bulan Agustus 1937 didirikan *Tjin Tjai Hwee* (Fonds Amal Tiongkok) Batavia dibawah pimpinan Tjung See Gan (1885-1965), seorang pengusaha besar dan tokoh penting Partai Nasionalis Tiongkok (*Kuomintang*).³¹ Inisiatif Batavia ini segera diikuti oleh daerah-daerah lain dan bermunculanlah beragam *Tjin Tjai Hwee* lokal dengan berbagai variasinya.³² Fonds Amal Tiongkok ini merupakan bagian dari Badan Amal Tiongkok se-Asia Tenggara yang diketuai oleh Tan Kah Kee dari Singapura.³³ Adapun total jumlah uang yang dikumpulkan *Tjin Tjai Hwee* dari berbagai daerah selama periode 1937-1941 dapat dilihat pada tabel 1.

**Jumlah Uang yang dikumpulkan oleh *Tjin Tjai Hwee* (1937-1941)
(dalam Gulden)**

Kota	Total	Kota	Total
Batavia	4,512,446	Cirebon	353,365
Surabaya	1,763,562	Surakarta	219,510
Palembang	1,043,788	Lampung	211,502
Bandung	1,014,111	Yogyakarta	148,000

Sumber: Mingguan *Sin Po*, 14 Feb. 1942 (*Sinthjia Nummer*), tanpa nomor halaman.

Pengumpulan dana bagi Tiongkok melibatkan banyak pihak dan dilakukan dengan berbagai cara, yang kadang amat kreatif. Anak-anak sekolah di Yogyakarta, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (khususnya sekolah Tionghoa) hingga Sekolah Lanjutan Atas banyak terlibat dalam upaya mencari dana. Tidak jarang mereka bergerak hingga ke luar kota (misalnya Klaten) dengan naik sepeda.³⁴ Menariknya, tidak hanya anak-anak dari sekolah Tionghoa, tetapi juga mereka yang belajar di sekolah Belanda, ikut berperan aktif. Uang sumbangan diteruskan ke Palang Merah Tiongkok yang diketuai Ny. Sun Yat Sen (Soong Chingling). Bagi mereka yang bersungguh-sungguh, akan mendapat surat penghargaan yang ditandatangani oleh Madame Sun, yang tentunya akan merupakan kebanggaan bagi yang bisa memperolehnya.³⁵

Kekerasan Pada Saat Pendaratan Jepang (Maret 1942)

Saat-saat ketika *“law and order”* absen, adalah periode yang mengerikan bagi *middleman minority*. Periode Jepang memberikan banyak contoh, bagaimana *“jaminan keamanan”* bisa mengalihkan loyalitas *middleman minority*, bahkan terhadap musuh besarnya sekalipun, selama mereka mampu menyediakan keamanan. Pada saat-saat kedatangan balatentara Jepang (Maret 1942), aparat keamanan kolonial tiba-tiba menghilang (bandingkan dengan Jakarta, Mei 1998), mereposisi Tionghoa dari *middlemen minority* menjadi *defenseless minority* (minoritas tanpa perlindungan).

Aksi kekerasan terhadap Tionghoa muncul dalam berbagai manifestasi, antara lain: perampokan, pembunuhan. Namun ada juga kekerasan dalam bentuk lain, yakni *“sunat paksa”* yang terjadi di berbagai daerah: Kudus,³⁶ pantai utara Jawa Tengah,³⁷ Jombang,³⁸ Kediri.³⁹ Duapuluh orang Tionghoa totok asal Shantung yang sedang mengungsi lewat Bekasi dilaporkan telah ditangkap dan disunat secara paksa.⁴⁰ Frans Hüsken memberikan ilustrasi yang cukup detil mengenai sunat paksa di daerah Jawa Tengah bagian utara. Pada tanggal 1-2 Maret 1942 rumah dan toko Tionghoa di Juwana, Pati dan Tayu dirampok dan dihancurkan. Akan tetapi penghancuran tersebut bukanlah akhir dari ketegangan yang berlangsung. Rupanya aksi-aksi itu digerakkan oleh pesantren di daerah Kajen dan para santri di Tayu, Ngagel dan Dukuhseti. Bersama-sama mereka mendirikan suatu badan perjuangan yang dinamai *“Gerakan Islamiyah”* atau *“Anshor”* yang bertujuan lebih jauh dari sekedar penghancuran properti milik Tionghoa. Di hari-hari awal Maret mereka *“..menyeret beberapa pemilik toko Tionghoa ke Kajen, dimana mereka dipaksa untuk masuk Islam, dan sebagai tandanya mereka disunat ditempat dengan pisau-pisau tumpul”*.⁴¹ Di luar Jawa aksi sunat berlangsung dalam skala yang lebih hebat, namun dengan alasan yang berbeda. Dimotivasi oleh rasa takut, lelaki dewasa Tionghoa di daerah Kandangan (Kalimantan Selatan) melakukan *“gerakan sunat sukarela”* dengan alasan supaya tidak diganggu Jepang.⁴²

Pada saat yang sama dilaporkan pula terjadinya perkosaan wanita Tionghoa, misalnya di Bekasi (50 orang) dan di pantai utara Jawa Tengah.⁴³ Selain itu juga terdapat penyanderaan yang dilakukan oleh gerombolan perampok. Di Bekasi sekitar 1,000 orang Tionghoa dikurung didalam klenteng oleh lebih dari 10,000 orang Indonesia. Di awal Mei diberitakan bahwa *Kenpeitai* (polisi rahasia Jepang) melakukan operasi penyelamatan atas Tionghoa Tangerang yang disandera para perampok dan sekaligus menumpasnya.⁴⁴ Hal ini berarti para perampok masih bergentayangan dalam dua bulan pertama pendudukan.

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

Puncak kekerasan adalah terbunuhnya orang-orang Tionghoa di masa vakum tersebut. Bekasi yang merupakan daerah tanah partikelir (milik tuan tanah Tionghoa) mengalami aksi anti Tionghoa yang cukup hebat. Beberapa pemimpin Tionghoa, tuan tanah dan kaki tangannya tewas dibunuh di daerah ini. Di Karesidenan Pekalongan, daerah yang nuansa keislamannya cukup kuat, dilaporkan 22 orang Tionghoa dibunuh. Dari Jombang dilaporkan beberapa pemilik toko ikut dibunuh. Di Pidi (Aceh) beberapa orang Tionghoa tewas dibunuh, termasuk seorang pimpinan golongan Tionghoa.⁴⁵ Di Jawa Barat orang Tionghoa “membeli keamanan” dengan jalan yang cukup ironis, yakni membayar perampok untuk menjaga harta bendanya dari penjarahan massa.⁴⁶

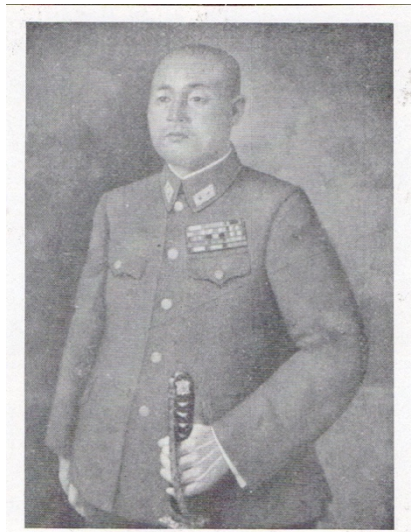
Aksi kekerasan lainnya dilakukan oleh segolongan nasionalis, yang menganggap Jepang sebagai “pembebas”. Di berbagai daerah (Solo, Magelang, Semarang, Yogyakarta, dll) mereka membentuk “komite penyambutan”. Terkadang mereka juga menjadi penunjuk jalan dan pemandu tentara Jepang. Di banyak tempat komite tersebut memilih nama “Komite Nasional”. Untuk mendapatkan informasi, berbagai komite tersebut juga memiliki “seksi intelejen”-nya masing-masing. Oleh karena orang Tionghoa dianggap dekat dengan Belanda, juga dianggap pro-Tiongkok (yang sedang berperang dengan Jepang), maka komite-komite tersebut melaporkan orang-orang Tionghoa kepada Jepang.⁴⁷

Di saat-saat tegang tersebut, balatentara Jepang dengan cepat dan tegas membasmi segala bentuk gangguan “kamtibmas” tanpa pandang bulu. Mereka pun segera membubarkan berbagai macam “Komite Nasional” (sehingga mengecewakan sebagian kaum nasionalis) dan mereka menghilang sejak April 1942. Sebenarnya tindakan Jepang tersebut bukan ditujukan untuk melindungi Tionghoa *per se*, namun demi melancarkan jalannya roda pemerintahan, khususnya perekonomian. Di mata orang Tionghoa, tentara Jepang—yang sebelumnya dianggap “musuh besar” karena menginjak-injak Tiongkok—kini secara ironis dianggap sebagai “pelindung”. Di pihak lain, sekarang mereka lebih melihat orang Indonesia sebagai “ancaman” daripada balatentara Jepang.⁴⁸ Seorang jurnalis peranakan menulis di tahun 1947: “...*Waktu Djepang baroe sadja dateng, orang Tionghoa dapet djaoe lebi banjak soesa dari fihak Indonesia dari pada fihak Djepang*”.⁴⁹ Disini terlihat jelas, bahwa “minoritas perantara” akan bekerjasama dengan penguasa atau siapapun yang mampu menawarkan rasa aman.

Kebijakan Imamura untuk Golongan Tionghoa

Kebijakan Jepang untuk pemerintahan di daerah-daerah Selatan baru diputuskan beberapa saat sebelum penyerbuan Pearl Harbor, tepatnya pada Konferensi Penghubung (*Liaison Conference*), 20 November 1941. Adapun kebijakan umum mengenai golongan Tionghoa adalah sebagai berikut: “Penduduk Tionghoa akan dibujuk untuk menyeberang dari rezim Chiang Kai-shek dan untuk bekerjasama serta bersekutu dengan kebijakan kita.”⁵⁰ Adapun penerapan kebijakan ini diserahkan kepada komandan militer setempat. Selain itu, Jepang membagi Hindia Belanda menjadi tiga daerah yurisdiksi: Sumatera di bawah kekuasaan Tentara Angkatan Darat ke XXV, Jawa dan Madura dibawah Tentara ke XVI, dan pulau-pulau lainnya berada dibawah kekuasaan Angkatan Laut (*Kaigun*).

Berbeda dengan yang dikhawatirkan banyak orang Tionghoa sebelumnya, ternyata di Jawa tidak terjadi penyembelihan massal orang-orang Tionghoa seperti yang dilakukan di Singapura.⁵¹ Letnan Jenderal Imamura Hitoshi (1886-1968), sebagai panglima balatentara ke-16 berpikir cukup logis dan strategis (lihat gambar 4).⁵²



Letjen Imamura Hitoshi

Sumber: Jacob Zwaan, *Nederlands-Indië 1940-1946: Japans Intermezzo*

Sumber: Den Haag: Omniboek, t.t., h. 71.

Sebelumnya prajurit ini pernah bertugas di Tiongkok Selatan (1937-1938), daerah di mana kebanyakan orang Tionghoa dari Indonesia berasal. Secara jujur

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

Imamura mengaku terkesan dengan dukungan rakyat Tiongkok (termasuk kaum perempuannya) terhadap tentara *Kuomintang* dalam perang melawan agresi Jepang, sehingga dia meragukan keabsahan operasi militer Jepang di sana. Sangat mungkin pengalamannya bertugas di Tiongkok banyak memberikan masukan langsung padanya akan watak orang-orang Tionghoa.⁵³ Apabila orang-orang Tionghoa diperlakukan secara keras, maka justru mereka akan mengadakan perlawanan yang sangat sengit, seperti di Tiongkok.

Di tengah banyaknya kritik dari rekan-rekannya di daerah lain, Imamura dikenal menjalankan kebijaksanaan "lunak" di Jawa, yang dinilai menyimpang dari rencana dasar yang telah digariskan di Tokyo. Kebijakan "lunak" ini berbentuk memberikan prioritas dengan segera kepada pembangunan kembali bidang ekonomi, dan mengembalikan kehidupan sipil yang normal dengan memanfaatkan keahlian orang-orang Tionghoa.⁵⁴ Desakan dari Tokyo dan Singapura agar Imamura membatasi kegiatan organisasi ekonomi orang-orang Tionghoa tidak dipedulikannya. Dalam pemikiran Imamura, pembatasan semacam itu pasti akan menghentikan arus mengalirnya barang-barang secara normal, termasuk bahan-bahan kebutuhan perang.⁵⁵ Dengan demikian suatu kebijaksanaan "tangan besi" tidak diperlukan di Jawa. *"Mereka yang mengeritik administrasi di Jawa tidak mengetahui realitas yang sebenarnya disini"*, demikian tulisnya.⁵⁶ Selain itu, kebijakan Imamura tidaklah bertentangan dengan kebijakan pokok tanggal 20 November 1941. Dengan keputusan Imamura ini, kebijaksanaan Jepang terhadap Tionghoa di Jawa tergolong "lunak" dibandingkan dengan di daerah lain seperti Kalimantan, Singapura dan Malaya.

Pengaruh Kekerasan dan Aksi Kaum Nasionalis Lokal

Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan berbagai pihak terhadap golongan Tionghoa pada masa peralihan agaknya merupakan hal yang justru di luar perkiraan orang Tionghoa sendiri. Jika selama ini orang Tionghoa memandang kemungkinan datangnya bahaya adalah dari utara (Jepang), dengan tidak disangka, bahaya yang lebih besar justru datang dari sekelilingnya sendiri (dalam negeri). Selama ini orang Tionghoa merasa bahwa hubungannya dengan golongan pribumi cukup "harmonis", namun kenyataannya tidak semulus itu.⁵⁷

Ada beberapa pendapat mengapa terjadi perampokan toko dan pabrik Tionghoa. Satu sumber mengatakan bahwa perampokan dipancing oleh tentara Belanda yang mengundurkan diri sambil merampok. Pendapat lain mengatakan bahwa tentara Jepang mendorong rakyat untuk merampok toko-toko Tionghoa.⁵⁸

Kaum bandit pun juga memanfaatkan situasi kekosongan *law and order*. Sebenarnya Jepang sendiri tidak suka dengan perbuatan kekerasan dan provokasi terhadap Tionghoa tersebut. Maka salah satu tugas awal *Kenpeitai* adalah memulihkan keamanan dan ketertiban, antara lain menumpas gerombolan perampok.⁵⁹ Sikap Jepang terhadap aksi kriminal itu tampak dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada peringatan enam bulan pertama pendudukan

"...Tatkala Balatentara Nippon baru-baru masuk di negeri ini ...maka pada beberapa tempat terjadilah perampokan dan kejahatan oleh penduduk, terutama ditujukan kepada penduduk bangsa Tionghoa. Pemerintah sangat merasa kecewa atas kejadian itu. Kita mengerti juga, bahwa diantara mereka yang berbuat demikian, ada juga yang melakukan perbuatan tersebut, dengan maksud membantu Balatentara Dai Nippon. Kebodohan seperti ini sekali-kali *tidak boleh dianggap sebagai bantuan, malah adalah berbahaya bagi keamanan dan ketenteraman negeri*. Oleh sebab itu balatentara telah mengambil tindakan yang keras terhadap mereka itu semuanya... Bangsa Tionghoa hendaklah sabar dan jangan menaruh dendam terhadap kejadian atas diri mereka."⁶⁰

Aksi-aksi kekerasan: pembunuhan, perkosaan dan perampokan, serta tindakan kaum nasionalis di dalam melaporkan orang-orang Tionghoa yang bersikap "*anti Nippon*" telah menyulut rasa saling curiga dan mempertajam antagonisme rasial. Aksi provokasi tersebut lahir dari perbedaan sudut pandang dan keyakinan tentang peran Jepang diantara orang Tionghoa dan kaum nasionalis. Di pihak lain, tindakan Jepang memulihkan keamanan Jawa secara kilat, telah memberikan kesan yang mendalam pada orang-orang Tionghoa. Akibat yang muncul kini, orang Tionghoa mulai berpikir, bukan Jepang yang pertama-tama harus ditakuti, tetapi orang Indonesia. Di pihak lain, terdapat kebijaksanaan "lunak" Jendral Imamura. Faktor-faktor tersebut membuat golongan Tionghoa tidak berkeberatan untuk "bekerja sama" dengan Jepang.⁶¹

Selain faktor-faktor diatas ada satu hal lain yang menjadi pendorong terjadinya kerjasama dengan Jepang, ialah hasrat untuk tetap bisa *survive* (bertahan hidup). Bagi golongan "minoritas perantara" tidak tersedia banyak pilihan kecuali mengikuti apa yang dikatakan sang penguasa. Kenyataan bahwa golongan Tionghoa hanyalah suatu golongan minoritas di tengah mayoritas yang relatif menganggap Jepang sebagai pembebas, membuat mereka tidak bisa berbuat banyak, apalagi hendak memberikan perlawanan.

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

Pola seperti ini bagaikan lingkaran setan, sampai kapanpun akan tetap berjalan, selama syarat-syarat tertentu belum terpenuhi atau munculnya situasi yang sama sekali baru.

Eksperimen dengan Keberagaman

Mengawali kebijakan rasialnya, Jepang pertama-tama mencoba menggabungkan berbagai kelompok etnik di awal masa pendudukan ke dalam "Pergerakan A.A.A" atau biasa disingkat "Tiga A". Organisasi ini didirikan pada 29 Maret 1942--hanya beberapa hari setelah kapitulasi resmi Hindia Belanda--oleh Shimizu Hitoshi, seorang anggota Barisan Propaganda (*Sendenbu*) yang berpengaruh. Adapun tokoh Indonesia yang diangkat menjadi pimpinan adalah Mr. Samsedin. Sarjana hukum kelahiran Sukabumi ini sebelumnya adalah tokoh Partai Indonesia Raya (Parindra) yang juga pernah menjabat wakil walikota Bogor.⁶² Adapun perkumpulan ini disebut "Tiga A" dengan mengacu pada motonya, yakni: "Nippon Pemimpin Asia", "Nippon Pelindung Asia" dan "Nippon Cahaya Asia" (lihat gambar 5).

Tidak banyak sumber tertulis mengenai 3A ini, namun di Perpustakaan Jakarta ditemukan satu dokumen bertajuk "Instruksi-Instruksi" dari Poetjoek Pimpinan Pergerakan Tiga A, yang bertitangsa 18 Juni 1942 dengan tertanda Mr. R. Samsedin. Dokumen ini menginstruksikan berdirinya cabang-cabang pergerakan Tiga A di tingkat Kabupaten dan Kawedanan dengan didahului oleh rapat persiapan. Lebih lanjut diserukan agar *"jang perloe dioendang boeat menghadiri rapat itoe jalah orang-orang Indonesia, Tionghoa, Arab dan India jang terkemoeka, teristimewa orang2 jang soedah pernah doedoek didalam sesoeatoe pengeroes tjabang dari soeatoe perkoempoelan dan tidak tertjatjat namanja, baik perkoempoelan politiek, ekonomi atau sosial, baik perkoempoelan agama ataupoen perkoempoelan pemoeda"*.⁶³ Adapun terkait pucuk pimpinan, disebutkan bahwa *"...Didalam Pimpinan ini haroes ada wakil2 dari pihak Tionghoa, Arab dan India, sebagai Pembantoe2. Kalo di sesoatoe tjabang terdapat banjak bangsa Tionghoa, Arab atau India, maka dibawah Pimpinan jang Tertinggi ini masing2 golongan mengadakan soesoennanja sendiri2, jaitoe golongan Indonesia, Tionghoa, Arab dan India."*⁶⁴

Dengan beragam alasan, orang Tionghoa, Arab dan Indo Eropa segera menyambut gerakan tersebut dengan antusias. Beberapa laporan pers kontemporer menyebutkan bahwa Jepang meminta orang Tionghoa untuk ikut

serta mempropagandakan Tiga A. Dilaporkan pada April 1942 di Batavia telah terbentuk Komite Pergerakan 'Tiga A' untuk golongan Tionghoa. Di Surakarta wakil pimpinan Tiga A dijabat oleh seorang pengusaha terkemuka Tionghoa.⁶⁵ Namun sebaliknya golongan Indonesia tidak mau menerima bergabungnya orang-orang keturunan asing tersebut ke dalam Tiga A.⁶⁶

Bila dilihat, gerakan Tiga A bersifat "utopis", berusaha menyatukan berbagai elemen yang di masa sebelumnya sulit dilakukan, maka tidaklah mengherankan bila perkumpulan tersebut kandas dalam waktu yang singkat. Rupanya segregasi rasial yang telah diciptakan kolonialisme Belanda tidak mungkin dicairkan dalam waktu singkat. Belajar dari pengalaman Tiga A, Jepang tidak punya pilihan lain kecuali menyatukan setiap golongan etnik dalam wadah tersendiri, namun tindakannya justru memperkuat identitas rasial masing-masing golongan di atas.



Poster gerakan "Tiga A"

Sumber: Peter Post et al. (ed.), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War*

Sumber: eiden: Brill, 2010), tanpa nomor halaman.

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

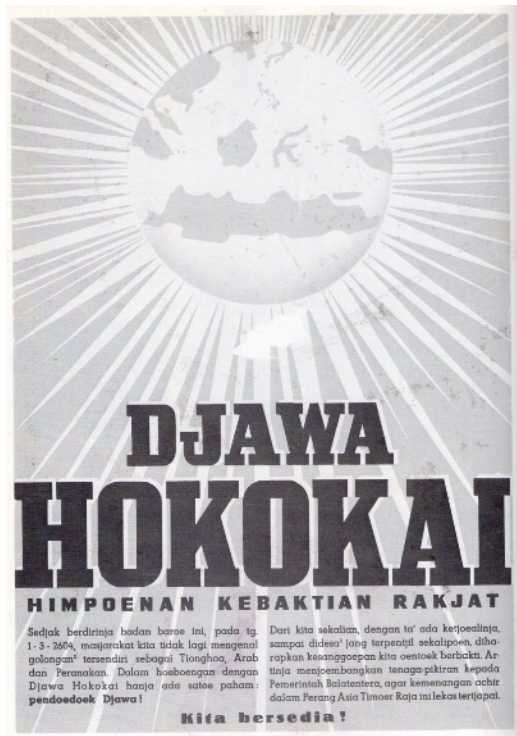
Belajar dari kasus Tiga A, maka Jepang menyusun satu organisasi baru yang lebih sesuai dengan harapan kaum nasionalis, namun di pihak lain juga mampu menunjang kepentingan-kepentingannya. Maka dibentuklah Pusat Tenaga Rakyat, yang biasa disingkat dengan "Putera" pada Maret 1943. Versi Indonesia dari organisasi ini berbeda dengan nama aslinya dalam bahasa Jepang "*Jawa minshū sōryoku keshū undō*" (Gerakan bagi Mobilisasi Total Rakyat Jawa).⁶⁷ Adapun pucuk pimpinannya biasa disebut dengan "Empat Serangkai", yakni Ir. Sukarno (dijuluki "Pemimpin Besar"), Drs. Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara serta K.H. Mas Mansoer. Perlu dicatat, bahwa Putera bukan organisasi massa, karena tidak diijinkan merekrut anggota dan perbedaan penting dari Tiga A adalah, organisasi ini diperuntukkan bagi golongan pribumi saja. Untuk golongan Tionghoa dan etnik minoritas keturunan asing lainnya didirikan perkumpulan masing-masing. Dalam aktivitasnya, selain memiliki berbagai departemen --mulai dari Kesejahteraan, Olah Raga, Kebudayaan dan Perempuan-- Putera juga melakukan beragam aktivitas guna memperkuat ekonomi kerakyatan, misalnya mengajarkan pembuatan komoditas bernilai jual, seperti sabun. Putera juga mengadakan penjualan barang-barang murah, misalnya beras.⁶⁸

Di tengah ketatnya peraturan Putera, misalnya tidak boleh merekrut anggota, namun kaum nasionalis, khususnya Sukarno, melihat adanya peluang emas yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan kebangsaan. Jepang mengizinkan Sukarno selaku "Pemimpin Besar Putera" untuk berkeliling ke berbagai wilayah di Jawa untuk berpidato, di depan sebanyak 50,000 hingga 100,000 audiens. Jepang juga menyediakan "fasilitas" transportasi dan corong radio bagi bakal presiden pertama Republik Indonesia tersebut.⁶⁹

Antusiasme rakyat dalam menyambut Putera serta kaum nasionalis yang memanfaatkannya untuk mencapai tujuan mereka, telah menjadikan Jepang khawatir atas organisasi bentukannya ini. Untuk itu Putera dibubarkan dan diganti dengan Jawa Hokokai (biasa disingkat Hokokai) yang didirikan 1 Maret 1944 (lihat gambar 6). Maksud didirikannya Hokokai ini ialah membentuk suatu organisasi di belakang garis pertempuran yang berdasarkan pada "persaudaraan segala bangsa" di tanah Jawa dengan semangat "kebaktian". Maka nama Indonesia perkumpulan ini adalah "Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa". Namun tujuan sebenarnya Jepang adalah memaksimalkan mobilisasi berbagai bentuk sumber daya dan dana dari masyarakat, mengingat posisinya yang sudah terdesak di berbagai front pertempuran. Keanggotaan Hokokai terbuka untuk "segala bangsa", mulai dari Pribumi, Tionghoa, Arab dan Indo Eropa.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

Aktivitas "persatuan segala bangsa" yang dilakukan Hokokai banyak dilaporkan dalam pers kontemporer, misalnya kasus Kasultanan Yogyakarta. Pada Maret 1944 Ir Sukarno datang ke sana untuk memimpin rapat Jawa Hokokai, yang dihadiri juga oleh tokoh-tokoh Tionghoa, India dan Indo Eropa. Pada Januari 1945 dilakukan 'pekerjaan sukarela Hokoai' yang diikuti berbagai kelompok etnik selama tujuh minggu. Dari 9,500 peserta, 1,100 diantaranya dari kalangan Tionghoa, Arab, India dan Indo Eropa. Panitia dari berbagai elemen masyarakat juga mengadakan "Pasar Malam Menyambut Indonesia Merdeka" pada Oktober 1944. Ketika "Barisan Pelopor" (*Suishintai*) dibentuk sebagai "onderbouw" Hokokai, para pengurus wilayah Yogyakarta dijabat juga oleh tokoh-tokoh Tionghoa, Indo Eropa, India dan Arab.⁷⁰



Poster propaganda Jawa Hokokai

Sumber: Jacob Zwaan, *Nederlands-Indië 1940-1946: Japans Intermezzo*

Sumber: Den Haag: Omniboek, t.t., h. 192.

Ada hal yang menarik terkait keanggotaan etnik Arab di dalam Hokokai. Berbeda dari etnik minoritas lainnya, buku resmi Hokokai menyatakan bahwa bagi

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

mereka diberikan hak dan diperlakukan sebagai bangsa Indonesia, bukan keturunan asing. Hal ini barangkali terkait dengan situasi peperangan yang berbalik arah, maka Jepang memerlukan dukungan umat Islam sehingga perlu merangkul keturunan Arab. Bahkan di bulan Agustus 1944 dinyatakan dengan resmi oleh Jepang, bahwa golongan Arab di Jawa "akan diperlakukan sebagai bangsa Indonesia". Namun anehnya, ketika dikeluarkan peraturan baru bagi calon anggota Hokokai di awal 1945, di sana dinyatakan bahwa bagi golongan Arab diperlakukan peraturan seperti golongan Tionghoa.⁷¹ Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa Jepang tidak memiliki pegangan yang jelas terkait keberagaman. Bahkan lebih jauh lagi bisa dilihat, bahwa lahirnya Hokokai ini, dalam beberapa aspek, sebetulnya Jepang juga membangkitkan "Pergerakan Tiga A" yang sudah mati beberapa waktu sebelumnya.

Organisasi Bagi Etnik Tionghoa

Untuk memudahkan pengawasan atas golongan Tionghoa, di masing-masing wilayahnya, balatentara Jepang menyatukan berbagai macam organisasi Tionghoa ke dalam satu organisasi tunggal yang dinamakan *Kakyô Sôkai* (Mandarin: *Hua Ch'iao Chung Hui*/huaqiao zhonghui 华侨中会, selanjutnya disingkat HCCH), yang berarti "Persatuan Tionghoa Perantauan". Inilah pertama kalinya, dan barangkali satu-satunya dalam sejarah, orang-orang Tionghoa bisa "bersatu" ke dalam satu wadah tunggal. Adapun tanggal pendirian HCCH bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. HCCH Yogyakarta, misalnya didirikan pada tanggal 7 Juli 1942.⁷² Untuk menghubungkan *Kakyô Han* -- kantor pemerintah militer Jepang yang bertugas mengawasi etnik Tionghoa--dengan berbagai HCCH di berbagai wilayah, maka didirikanlah HCCH Pusat di Jakarta pada Agustus 1943, dibawah pimpinan Oey Tiang Tjoei.⁷³

Penggabungan atau peleburan seperti ini merupakan salah satu ciri politik negara fasis. Dalam ilmu politik diketahui bahwa pemerintah fasis selalu diasosiasikan dengan apa yang disebut dengan "korporatisme", yakni suatu sistem perwakilan kepentingan, di mana berbagai kesatuan dari unsur-unsur pokok diorganisasikan dalam sejumlah kategori tunggal yang bersifat wajib, tidak kompetitif, diperintah secara hirarkis dan dibedakan secara fungsional, yang diakui dan diijinkan (jika tidak diciptakan) oleh negara. Dengan kata lain, hanyalah satu badan yang diberi hak untuk berbicara bagi suatu kategori unsur tertentu. Untuk itu penguasa menciptakan organisasi-organisasi yang "diakui secara resmi" dan

"sah secara hukum".⁷⁴ Dengan demikian, dalam konteks masyarakat Tionghoa, hanyalah HCCH satu-satunya yang diberi wewenang untuk "mewakili" mereka. Untuk golongan minoritas asing lain didirikanlah *Arabujin Shidô linkai* (*Panitia Bangsa Arab* atau *Panitia Peranakan Arab*) untuk golongan Arab, *Indian Independence League* untuk golongan India dan *Konketsu Jûmin linkai* (*Kantor Oeroesan Peranakan*) untuk orang-orang Indo Eropa.

Dalam HCCH. golongan *peranakan* dan *totok* dikumpulkan menjadi satu dalam wadah tunggal, suatu hal yang tidak pernah bisa terwujud pada masa sebelumnya. Adanya suatu "organisasi induk" bagi seluruh komunitas Tionghoa, tanpa memandang latar belakang *peranakan-totok* atau identitas lainnya, telah lama menjadi impian para pemuka Tionghoa tertentu.⁷⁵ Ironisnya, di bawah paksaan Jepang, barulah impian itu dapat terwujud. Inilah salah satu paradoks yang muncul pada golongan Tionghoa pada zaman Jepang. Seorang propagandis HCCH Yogyakarta mengomentari arti berdirinya organisasi tunggal tersebut:

"...karena cita-citanya pemerintah Bala Tentara Dai Nippon menghendaki persatuan dari sesama bangsa Asia, maka tidak kita heran jika wujudnya perkumpulan Tionghoa pada waktu ini *tidak bersifat "baba untuk baba" atau "Tionghoa totok guna Tionghoa totok"*. Hanya semua perkumpulan disini sudah menjadi satu, yaitu HCCH. Suatu pusat perkumpulan Tionghoa yang bukan cuma hendak *mempersatukan tenaga Tionghoa* semata-mata, akan tetapi juga merupakan pusat tenaga Tionghoa yang senantiasa bersedia mempersembahkan tenaga persatuan dan tenaga kepandaian dari golongan Tionghoa untuk membantu Bala Tentara Dai Nippon menyempurnakan Asia Raya..."⁷⁶

Demikianlah tindakan Jepang dalam mendirikan berbagai badan menurut kelompok etnis, yang sekaligus memperkuat identitas kelompok berdasarkan ikatan-ikatan primordial. Tindakan ini secara langsung semakin menjauhkan masing-masing kelompok minoritas keturunan asing tadi dari golongan Indonesia

Pada hakekatnya HCCH adalah suatu organisasi induk atau "organisasi payung" (*umbrella organization*)⁷⁷ yang menampung segala aspek kegiatan dalam komunitas Tionghoa lokal. Tentu saja orang-orang yang bertugas disini memikul beban berat, karena mereka harus siap menyuarakan apa yang diinginkan Jepang serta memobilisasikan dana dari komunitas Tionghoa untuk keperluan perang, dalam bentuk emas berlian, besi tua, atau uang. Twang Peck-yang telah mendokumentasikan dengan baik berbagai macam "sumbangan" etnik Tionghoa untuk jalannya peperangan, termasuk menyumbang pembelian beberapa pesawat

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

terbang.⁷⁸ Di saat kekalahan nampak jelas, balatentara Jepang memerintahkan pengumpulan permata dan barang-barang berharga lainnya sejak Desember 1944. Menurut penelitian Twang, "dari kampanye pengumpulan [perhiasan] di berbagai wilayah Asia Tenggara, jumlah yang dikumpulkan di Jawa adalah yang tertinggi di seluruh wilayah ini dan berjumlah total lebih dari 30 juta gulden".⁷⁹ Jumlah yang fantastis ini terkumpul dari golongan Indonesia dan Tionghoa.

Ada satu hal yang belum banyak diketahui, bahwa golongan Tionghoa juga memberikan sumbangan yang cukup besar untuk biaya operasional berbagai kesatuan militer Indonesia, seperti Tentara PETA (Pembela Tanah Air)⁸⁰ dan *Heiho* (Pasukan Pembantu Prajurit Jepang). Golongan Tionghoa juga menyumbang keluarga anggota organisasi kemiliteran, *rô musha* (pekerja paksa), bahkan juga membantu organisasi Islam serta surat kabar terbesar, *Asia Raya*.⁸¹ Tugas lain yang kontroversial untuk HCCH, adalah menyediakan "wanita penghibur" (*jûgûn ianfu*) guna pemuas nafsu serdadu Jepang.⁸² Keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam perekrutan wanita penghibur untuk Jepang di Blitar, telah menyebabkan terbunuhnya beberapa orang Tionghoa dalam pemberontakan batalyon PETA yang legendaris di bulan Februari 1944.⁸³ Berbagai macam eksploitasi material dan non-material tersebut menunjukkan, bahwa posisi sebagai "minoritas perantara" yang tergantung kepada sang penguasa tidak menyisakan banyak pilihan, kecuali menuruti apa yang diperintahkan oleh sang tuan. Harga yang harus dibayar cukup mahal, dan dipihak lain malahan menambah besar kebencian atas mereka dari golongan mayoritas.

Propaganda Jepang untuk Menarik Simpati Tionghoa

Seiring dengan makin "patuhnya" golongan Tionghoa, maka mereka tidak dianggap sebagai "musuh" Nippon lagi, termasuk oleh *Kenpeitai*. Dalam pandangan Jepang, berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh golongan Tionghoa (khususnya sumbangan materi) tanpa banyak bicara (karena terpaksa), dapat dipandang sebagai bukti "kepatuhan" mereka. Dalam suatu rapat HCCH di awal tahun 1944 yang dihadiri oleh pembesar Jepang, seorang pembesar *sendenbu* (propaganda) Yogyakarta menyatakan:

"...Sejak Dai Nippon mendarat di Jawa, *Bangsa Tionghoa selalu membantu Dai Nippon*. Bantuan itu supaya diteruskan dengan bersatu bekerja bersama-sama dengan bangsa Indonesia dan balatentara, baik di lapangan

ekonomi, pertanian maupun lain-lain, guna melekaskan hancurnya Inggris dan Amerika."⁸⁴

Sebagai balasan akan "bantuan" tadi, maka atas "kemurahan hati Nippon", diambil langkah-langkah untuk mengambil hati golongan Tionghoa, yakni (i) kesempatan yang mem-perbolehkan orang Tionghoa mempunyai "wakil" di *Chûo Shanghi In* (Dewan Pertimbangan Pusat); (ii) Penghapusan surat jalan; (iii) Kesempatan untuk memasuki *Jawa Hôkôkai* (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa) (iv) mulai tanggal 1 Mei 1944 golongan Tionghoa yang genap berumur 17 tahun dibebaskan dari kewajiban membayar uang pendaftaran, sedangkan yang belum membayar lunas masih harus membayar dengan mencicil dengan aturan yang lebih gampang.⁸⁵

Dibangkitkannya Aktivitas Budaya Tionghoa

Dalam kerangka politik resinifikasi yang dijalankannya, Jepang menghidupkan kembali berbagai bentuk budaya Tionghoa, yang sekaligus dimaksudkan supaya mengundang simpati dari golongan Tionghoa.

Pertama-tama yang berusaha dihantam adalah "budaya Belanda", yang dituduh telah membius orang-orang peranakan.⁸⁶ Berbagai bentuk kesenian Tionghoa, yang selama ini dianaktirikan oleh kaum peranakan, kini seolah mendapatkan angin. Misalnya di Yogyakarta, musik tradisional Tionghoa --yang dimainkan grup "*Tjing Kwang*" pimpinan Yap Djie Siang-- diijinkan untuk dimainkan di radio milik pemerintah (*hôsôyoku*), padahal di zaman Belanda tidak ada kesempatan seperti itu.⁸⁷ Dalam analisis seorang propagandis HCCH, pada zaman Belanda, para pemuda Tionghoa telah di-ninabobo-kan oleh lagu-lagu dari Barat. Dengan adanya kesempatan grup musik Tionghoa tampil di radio pemerintah, diharapkan para pemuda Tionghoa Yogyakarta menjadi sadar bahwa lagu-lagu Tionghoa modern tidak jelek, bahkan tidak kalah mutunya dengan lagu-lagu Barat. Akhirnya diharapkan langkah grup "*Tjing Kwang*" akan diikuti grup-grup musik Tionghoa lainnya.⁸⁸

DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)



Poster propaganda Jepang bagi golongan Tionghoa.
Sumber: Peter Post et al. (ed.), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War*
Sumber: Leiden: Brill, 2010, tanpa nomor halaman.

Suatu upaya lain yang cukup spektakuler, adalah dinaikkannya status hari besar Tionghoa. Hari raya memperingati tahun baru Imlek 2494⁸⁹ dijadikan hari besar sekaligus hari libur,⁹⁰ suatu hal yang belum pernah terjadi pada masa Hindia Belanda. Bahkan dalam menyambut hari raya Tionghoa tersebut koran-koran tidak terbit.⁹¹ Lebih hebatnya lagi, seluruh penduduk Yogyakarta diminta untuk mengibarkan bendera Jepang (*kokki*) pada hari tersebut.⁹² Bagi golongan Tionghoa sendiri walaupun perayaan acara Imlek tersebut tidak ada bedanya dengan zaman Belanda, tetapi disebutkan adanya "suasana batin" yang terasa lain. Pada zaman Belanda Imlek tidak dijadikan hari libur resmi, yang menandakan tidak ada perhatian Belanda terhadap arti penting Imlek tersebut. Keputusan Dai Nippon untuk meliburkan pada hari raya Imlek menurut seorang propagandis HCCH Yogyakarta memberi arti "...*bangsa Tionghoa sudah dikembalikan pada tempatnya,*

pada adat istiadatnya dan tidak dibiarkan merusak atau menelantarkan apa yang terjadi tinggalan leluhurnya".⁹³ Akan tetapi diingatkan pula bahwa perayaan tersebut jangan dilakukan dengan keramaian atau kesenangan lahiriah, karena saat itu balatentara Nippon sedang berperang untuk membebaskan bangsa Asia – termasuk Tionghoa-- dari penindasan Imperialisme Barat. Untuk itu diucapkanlah terimakasih pada balatentara Dai Nippon pada perayaan "*tahun baru Imlek pertama dalam suasana baru*" tersebut.⁹⁴

Acara kesenian tradisional Tionghoa berupa arak-arakan *barongsai* (atau juga disebut *liang-liong*) sering sekali ditampilkan dalam acara-acara resmi, misalnya pada saat kedatangan pembesar Jepang. Dalam acara peringatan setahun pecahnya perang Pasifik (hari raya *Ko A Sai*), arak-arakan besar liang-liong adalah satu di antara para peserta pawai yang sangat meriah.⁹⁵ Kembali arak-arakan *liang-liong* ikut tampil dalam acara setahun pendudukan Jepang di Jawa (Maret 1943).⁹⁶ Demikian juga film-film dari "Tionghoa baru" (rezim Wang Ching-wei) yang merupakan "sekutu" Jepang, banyak di-putar di bioskop-bioskop. Bentuk lain "kebangkitan" budaya Tionghoa adalah dalam wujud digiatkannya penggunaan bahasa Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, kursus-kursus, dalam penulisan nama diri, dll. Mereka yang masih menggunakan bahasa Belanda dicap sebagai seorang yang masih berjiwa "*keblandaan*".⁹⁷ Sungguh merupakan hal yang ironis sekaligus kontroversial, bahwa fasisme Jepang --selaku bekas musuh besar orang Tionghoa-- malah bertindak sebagai pihak yang membangkitkan kembali aktivitas budaya Tionghoa, yang telah lama ditinggalkan para pelakunya di Jawa.

Generasi Baru: Anak-anak Berpendidikan Sekolah Tionghoa

Seiring dengan datangnya Jepang, semua sekolah ditutup oleh Jepang. Anak-anak Tionghoa, baik yang bersekolah di sekolah Belanda (HCS) maupun Tionghoa (THHK atau sekolah swasta Tionghoa lainnya), sempat mengalami kevakuman pendidikan. Anak-anak Tionghoa sebenarnya diperbolehkan masuk sekolah rakyat, asalkan masih tersedia tempat,⁹⁸ namun biasanya hanya sedikit saja bangku kosong yang tersisa.⁹⁹ Sayang sekali, tidak banyak kajian mengenai sekolah Tionghoa pada zaman Jepang.¹⁰⁰ Berikut ini disajikan kasus Yogyakarta, yang data-datanya terekam dengan baik dalam dokumen, sehingga bisa menggambarkan makin populernya sekolah Tionghoa.

Menurut satu versi, pembukaan Sekolah untuk anak-anak Tionghoa Yogyakarta berasal dari inisiatif seorang guru sekolah Tionghoa, yang merasa

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

prihatin atas kondisi yang menimpa anak-anak Tionghoa yang tidak bisa mendapatkan pendidikan.¹⁰¹ Dia mempunyai ide untuk membuka lagi sekolah Tionghoa di Yogyakarta dan mendatangi berbagai macam kantor Jepang. Rupanya untuk merealisasikan ide tersebut cukup sulit dan menemui banyak hambatan. Setelah lebih kurang enam bulan, barulah ijin pembukaan sekolah tersebut bisa keluar disertai dengan beberapa syarat: (i) Tiap pagi sekolah harus mengibarkan bendera kebangsaan Jepang *Hinomaru* dan menghormatinya (dengan jalan membungkukkan badan) (ii) bersedia mengajarkan dan menyanyikan lagu-lagu Jepang, termasuk *Kimigayo* (lagu kebangsaan Jepang) (iii) pelajaran bahasa Tionghoa yang diajarkan harus disertai dengan pelajaran bahasa Jepang (iv) melakukan senam ala Jepang (*taiso*).

Adapun kondisi pendidikan dasar Tionghoa antara tahun 1942 dan 1945 di beberapa wilayah Jawa dapat dilihat dalam tabel 2. Sayang data yang bisa diperoleh kurang memuaskan, namun nampak bahwa jumlah siswa di sekolah dasar Tionghoa mengalami peningkatan yang pesat.

Sekolah Dasar Tionghoa di Beberapa Wilayah Jawa (1942-1944)

Tanggal	Lokasi	Sekolah Tionghoa			Catatan
		Sekolah	Murid	Guru	
Oktober 1942	Bandung	4	± 1,450	78	Pada pertengahan 1943, keempat sekolah ini memiliki ± 1,700 murid dan ± 96 guru
Maret 1943	Jakarta	--	7,995	--	
Juli 1943	Kasultanan Yogyakarta	6	1,782	44	
Awal 1944	Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran	16	--	--	

Sumber: Didi Kwartanada, 'The Road to Resinicification: Education for the Chinese during the Japanese Occupation', dalam Peter Post et al. (eds), *Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War* (Leiden: E.J. Brill), h. 333.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

姓名: 陳梅香 Nama: Tan Hey Siang		學號: 34. Nomer sekolah: 34.					
學業狀況: Kepandaitan:		學年平均: 55 Bidji setaheon: 55 名次 43					
科目 Peladjaran	每週 節數 Kali se Minggu	分節 數 kali x 100	分節 數 kali x 100	分節 數 kali x 100	分節 數 kali x 100	分節 數 kali x 100	分節 數 kali x 100
		bidji	bidji	bidji	bidji	bidji	bidji
日語 Bahasa Nippon	2	58	116	60	120	65	130
華語 B-bara Tionghoa	4	40	160	50	200	50	200
巫語 Bahasa Melajoe	2	65	130	35	70	35	70
算術 Icoengan	4	56	224	50	200	50	200
自然 Ilmoe Alam							
衛生 Fesehatan							
公民 Tingkah lakoe	2	70	140	60	120	60	120
唱歌 Menjanji	3	65	195	54	162	65	195
圖畫 Menggambar	2	56	112	65	130	65	130

Rapor siswa sekolah dasar Tionghoa di Magelang pada masa pendudukan Jepang.

Sumber: Koleksi pribadi Didi Kwartanada

Ternyata ada beberapa orang tua murid eks Sekolah Belanda-Tionghoa (HCS) yang tidak mau memasukkan anaknya ke dalam sekolah Tionghoa. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain akan menyulitkan sang anak dan barangkali rasa kurang senang (selaku peranakan yang berorientasi ke Barat) bila anaknya akan diberi pelajaran ala Tionghoa. Tentu saja para orang tua peranakan tersebut tidak ingin anaknya hanya menganggur saja, dan sebagai alternatif dicarikan kesibukan bagi anak-anaknya, dalam hal ini berbagai jenis kursus. Maka bermunculanlah berbagai macam kursus di Yogyakarta. misalnya seorang pengajar les privat musik mengalami "boom" murid pada zaman Jepang. Murid yang datang tidak hanya berasal dari Yogyakarta saja, namun juga dari kota-kota sekitarnya seperti Magelang dan Purworejo.¹⁰² Ada juga yang mengikuti les pada guru-guru Indo (yang tidak diinternir Jepang) dalam mata pelajaran yang tidak dilarang penguasa.¹⁰³

Untuk pendidikan sekolah menengah agaknya tidak banyak anak muda Tionghoa yang masuk ke sekolah negeri. Mereka baru boleh menjadi siswa apabila ada bangku sekolah yang kosong. Padahal saat itu minat umum untuk melanjutkan sekolah ke bangku sekolah lanjutan cukup tinggi. Pembatasan jumlah murid tersebut tampak misalnya dari statistik jumlah siswa di *Sekolah Menengah Tinggi* (SMT) Yogyakarta (kini menjadi SMAN III *Padmanaba* Yogyakarta). Pada angkatan

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

1942-1944 hanya terdapat 1 siswa Tionghoa (0,26%) dari total 377 siswa. Pada angkatan 1944-1947 terdapat hanya dua Tionghoa (0,31%) dari total 636 siswa.¹⁰⁴

Jepang mewajibkan orang-orang Tionghoa minimal bisa menuliskan namanya dalam huruf Tionghoa. Tampaknya hal itu hanya sepele, namun bagi kaum peranakan yang sama sekali tidak pernah belajar bahasa yang sulit tersebut, bisa membawa banyak kesulitan.¹⁰⁵ Maka tidak heran bila pada awal pendudukan Jepang, kursus bahasa *Kuo Yu* (Mandarin) berkembang dengan pesat.¹⁰⁶ Pesertanya mulai dari anak-anak *drop-out* sekolah Belanda hingga ke bapak-bapak, ibu-ibu dan orang lanjut usia.

Dengan demikian, otomatis pada zaman Jepang tidak banyak anak Tionghoa yang duduk di bangku pendidikan formal, kecuali di Sekolah Rakyat Tionghoa saja. Ada satu hal yang harus dikatakan tentang pendidikan anak-anak Tionghoa di Yogyakarta (dan juga di seluruh Jawa!) dalam periode Jepang, yakni kemenangan kaum totok yang selalu mengidam-idamkan semua anak Tionghoa menerima pendidikan Tionghoa, bukannya pendidikan Barat. "Mimpi lama" kaum totok atas anak-anak peranakan yang tidak pernah bisa direalisasikan dalam zaman Belanda kini menjadi kenyataan. Mulailah muncul satu generasi baru anak-anak peranakan berpendidikan sekolah Tionghoa.¹⁰⁷ Sekolah Tionghoa tampil menjadi daya tarik bagi murid-murid peranakan hingga tahun 1966, saat sekolah Tionghoa dibubarkan oleh Orde Baru

Kesatuan Semi Militer: *Tokubetsu Kakyō Keibōtai*

Ketika suasana peperangan mulai menunjukkan arah yang berbalik, Jepang mulai berpikir untuk melibatkan etnik Tionghoa dalam pembelaan Jawa.¹⁰⁸ Beberapa kesatuan semi-militer juga menerima anggota Tionghoa (misalnya *Keibōdan*) namun hanya satu unit yang khusus diperuntukkan bagi Tionghoa, yaitu *Tokubetsu Kakyō Keibōtai*, yang biasa disingkat *Keibōtai*.

Proses kelahiran *Keibōtai* cukup misterius, karena tidak diumumkan secara transparan (misalnya dalam berita resmi pemerintah, *Kan Po*), seperti berbagai kesatuan-kesatuan pribumi lainnya (*Seinendan*, *Keibōdan* dan PETA). Satu-satunya pengumuman berasal dari Markas Besar Balatentara tertanggal 17 November 1944.¹⁰⁹ Struktur organisasinya tidak pernah diungkapkan secara jelas dalam dokumen dan tidak semua perwira Jepang setuju dengan kesatuan ini, misalnya Letnan Yanagawa Motoshige (yang sering dijuluki "Bapak Tentara PETA").¹¹⁰ Di pihak lain, kalangan pribumi melihat dengan rasa tidak senang dan curiga pada kesatuan ini, "...*mengapa Jepang melibatkan orang-orang Tionghoa dalam*

pembelaan tanah Jawa? Toh kami bisa membela tanah air kami sendiri," demikian kira-kira reaksi mereka.¹¹¹

Reaksi di kalangan Tionghoa sendiri terpecah dua. Ada yang menyambut dengan antusias karena mereka masih trauma dengan huru-hara awal Maret 1942. Dengan bergabung sebagai anggota *Keibôtai*, seandainya nanti pecah huru-hara lagi, mereka bisa mengantisipasinya, karena sudah pernah mengikuti dasar-dasar kemiliteran.¹¹² Akan tetapi ada pula yang berpikir sebaliknya, dengan kekhawatiran kesatuan ini justru akan menjadi ajang "adu domba" antara mereka dengan pihak pribumi.¹¹³ Mendengar keluhan-keluhan demikian, *Gunseikan* (Panglima Balatentara Jepang) yang sudah merasa terlanjur, membiarkan saja kesatuan-kesatuan yang sudah ada dan tidak mau mendorong program ini lebih lanjut.¹¹⁴



Latihan *Keibotai* di Tangerang

Sumber: Jacob Zwaan, *Nederlands-Indië 1940-1946: Japans Intermezzo*

Sumber: Den Haag: Omniboek, t.t., h. 208.

Pada akhir bulan Oktober 1944 diumumkan telah dibentuk satu kesatuan *Jawa Kakyô Tokubetsu Keibôtai* (pasukan Tionghoa pembantu polisi istimewa se-Jawa) yang meliputi Jawa dan Madura.¹¹⁵ Mereka dilatih dalam suatu asrama di Tangerang (lihat gambar 9), yang disebut *Tangerang Chuô Keibôdan Seinen*

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

Kunreshô.¹¹⁶ Agaknya orang-orang yang ikut dalam pelatihan tersebut diarahkan untuk menjadi pimpinan atau komandan (*taichô*) kesatuan *Keibôtai* di daerahnya masing-masing yang akan segera dibentuk. Dalam berbagai pidato pejabat Jepang dan tulisan para propagandis HCCH, disebutkan bahwa dibentuknya *keibôtai* adalah sebagai manifestasi "*keinsyafan penduduk Tionghoa untuk membela tanah Jawa dengan sungguh-sungguh*."¹¹⁷ Menurut satu sumber Jepang, jumlah total *Keibôtai* 71 kesatuan dengan 12.185 anggota.¹¹⁸

Seperti sudah disebutkan di atas, *keibôtai* akhirnya malah menjadi persoalan bagi banyak pihak. Walaupun sebagian orang Tionghoa menyambut dengan antusias, keberadaannya dicurigai oleh golongan Indonesia, bahkan oleh sebagian orang Tionghoa sendiri. Lebih-lebih kemudian markas besar tentara Jepang (*gunseikanbu*) mendapatkan kesan bahwa orang-orang Tionghoa tidak bisa dipercaya dalam urusan pertahanan,¹¹⁹ maka mereka tidak mau mendorong program ini lebih lanjut. Namun ketika pendudukan Jepang berakhir, *keibôtai* ikut serta menjalankan peran aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kalangan komunitas Tionghoa lokal, misalnya di Yogyakarta. Di Kediri, di beberapa tempat di Jawa Timur, juga di Losarang (Jawa Barat) mantan anggota *keibôtai* aktif memberikan latihan kemiliteran pada laskar-laskar Indonesia.¹²⁰

Founding Fathers: Tokoh Tionghoa di dalam Badan-badan Pertimbangan

Seiring dengan "patuhnya" golongan Tionghoa, maka sejak pertengahan 1943 penguasa Jepang mendirikan beberapa pertimbangan, yang didalamnya terdapat beberapa orang Tionghoa, seperti bisa dilihat dalam tabel 3.

**Anggota-anggota Tionghoa dan Minoritas Lain dalam Berbagai
Badan Bentukan Jepang (1943-1945)**

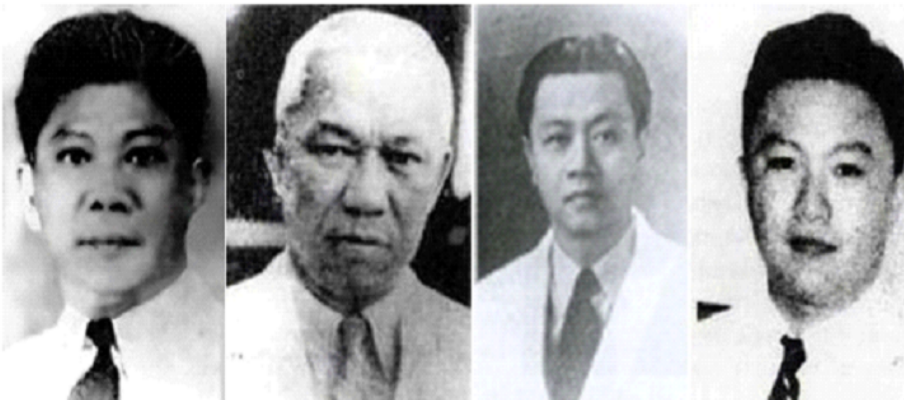
No	Nama Badan	Jml. Anggota	Nama Anggota Tionghoa/ Daerah Asal	Nama Anggota Minoritas Lain
1	Chuo Sangi In (Badan Penasehat Pusat)	40	Liem Thwan Tik (Surabaya) Oey Tiang Tjoei (Jakarta) Oei Tjong Hauw (Semarang) Yap Tjwan Bing (Bandung)	A.R.Baswedan (Arab) P.F.Dahler (Indo)

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

2	B.P.U.P.K. (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan)	70	Liem Koen Hian (Jakarta) Oei Tjong Hauw (Semarang) Oey Tiang Tjoei (Jakarta) Tan Eng Hoa (Surabaya)	A.R.Baswedan (Arab) P.F.Dahler (Indo)
3	P.P.K.I. (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)	21	Yap Tjwan Bing (Bandung)	---

Sumber: Benedict Anderson, *Some Aspects of Indonesian Politics Under the Japanese Occupation, 1944-1945* (Ithaca: Cornell University, 1961), h. 10, 18, 63.

Di sini penulis akan menyoroti secara khusus soal BPUPK dan PPKI. Terkait BPUPK (lihat gambar 10), paling tidak, dua orang diantara keempat tokoh Tionghoa itu telah memberikan kontribusinya bagi Bangsa dan Republik Indonesia.



Anggota BPUPK dari etnis Tionghoa (ki-ka):
Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw dan Tan Eng Hoa.
Sumber: Domain publik

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

Pertama adalah **Liem Koen Hian**. Sudah banyak diketahui, bahwa dibanding dengan ketiga rekannya yang lain, ia bersuara paling keras agar golongan peranakan Tionghoa di dalam negara Republik Indonesia yang akan lahir nanti, secara otomatis dijadikan warga negara. Dalam sidang kedua, rapat besar tanggal 11 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr K.R.T.Radjiman Wedyodiningrat, Liem mendapat kesempatan berpidato mengenai soal warganegara. Diserukannya bahwa:

.....pemuka-pemuka dari bangsa Tionghoa di Malang dan di Surabaya telah meminta kepada saya, agar disampaikan kepada Badan Penyelidik, supaya di waktu mengadakan Undang-undang Dasar Indonesia, *biar ditetapkan saja, bahwa semua orang Tionghoa menjadi warga Indonesia*. Juga di Bandung, Tuan Ketua, telah dinyatakan pikiran-pikiran begitu, meskipun tidak dengan terus terang... Maka saya berbicara sedikit panjang lagi untuk menyampaikan permintaan dari beberapa anggota tadi itu, dan saya mengharap, agar jikalau nanti panitia yang akan merancang Undang-undang Dasar Indonesia Merdeka sampai pada pasal tentang warga Indonesia, suka kiranya memperhatikan permintaan tadi. ¹²¹

Namun rupanya tidak hanya itu saja kontribusi Liem. Pada tanggal 19 Juli 2013, Wikrama Iryans Abidin, Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat berhasil meraih gelar doktor bidang Ilmu Hukum, setelah mempertahankan disertasi berjudul "Perlindungan Konstitusional Kemerdekaan Pers: Absennya Jaminan UUD 1945 Terhadap Kemerdekaan Pers Indonesia pada Sebelum dan Sesudah Reformasi." pada sidang terbuka Senat UI di Auditorium Djokosutono Kampus Fakultas Hukum UI Depok.¹²² Berdasarkan hasil studinya, Wikrama menuturkan, perjuangan jaminan konstitusional kemerdekaan pers di Indonesia dimulai sejak 15 Juli 1945 ketika Liem Koen Hian mengusulkan perlunya jaminan kemerdekaan pers dicantumkan dalam Rancangan UUD BPUPK. Usul itu didukung Mohammad Hatta agar Pers punya kekuatan mengawasi penguasa dan warga negara tidak takut menyampaikan kritik pada penguasa. Tapi usul Liem Koen Hian ditolak Soepomo dkk dengan alasan gagasan tersebut terkait paham individualisme yang melahirkan liberalisme-kapitalisme-kolonialisme, sedangkan paham yang dianut bangsa Indonesia adalah paham kolektif-kekeluargaan.¹²³ Tidak tertutup kemungkinan di sini bahwa Liem merupakan seorang pionir dalam hal kemerdekaan pers Indonesia?

Hal lain yang perlu dicatat dari Liem Koen Hian dalam BPUPK adalah rasa marah dan kecewanya, ketika

...membicarakan Konstitusi [UUD 1945, DK], diputuskan bahwa hanya orang etnis Indonesia saja yang akan langsung menjadi warganegara Indonesia, sedangkan lainnya akan 'dikukuhkan sebagai warganegara dengan hukum'. Setelah hal ini diputuskan, Liem Koen Hian, seorang Cina Peranakan, mengundurkan diri sebagai anggota Panitia [BPUPKI]. Tanggal 16 Juli, ia menyerahkan sepucuk surat permohonan pengunduran diri kepada Sekretariat Panitia, dengan mengatakan: "Sekarang, karena saya bukan seorang asli Indonesia, saya merasa tidak pantas untuk menjadi anggota panitia ini".¹²⁴

Kedua adalah mengenai **MR Tan Eng Hoa**. Mingguan *Gatra* 29 Agustus 2012, menurunkan "Edisi Khusus Hari Kemerdekaan: Tokoh Lintas Agama Perumus Indonesia", yang menampilkan tulisan Sujud Dwi Pratisto berjudul "Tan Eng Hoa: Pengusul Pasal Kebebasan Berserikat". Dalam buku *Risalah Sidang BPUPKI* yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara disebutkan Tan Eng Hoa masuk menjadi anggota Panitia Perancang Undang-undang Dasar. Sebagai ahli hukum, ia banyak memberi kontribusi dalam penyusunan pasal-pasal undang-undang dasar. Ia memberi usul yang kemudian menjadi cikal bakal Pasal 28 UUD 1945.

Seperti diutarakan anggota BPUPKI, Soepomo, dalam sidang 14 Juli 1945. Soepomo dalam sidang itu mengatakan bahwa *Tan Eng Hoa mengusulkan ayat 3 Pasal 27, yakni: "Hukum yang menetapkan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan sebagainya" dijadikan sebagai pasal tersendiri. Dari usulan Tan Eng Hoa ini, tercipta Pasal 28 UUD 1945 yang kini dikenal sebagai pasal kebebasan berserikat.*

Selain itu, dalam buku *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*, yang disusun A.B.Kusuma (2004: 183), sosok Tan Eng Hoa disebutkan sebagai anggota BPUPKI yang mendukung ide republik menjadi bentuk negara.¹²⁵

Rupanya seperti halnya Liem Koen Hian, Tan telah memberikan kontribusinya terkait hal kebebasan berserikat, yang tentu saja amat diperlukan di dalam negara demokrasi.

Di samping mereka berdua, masih ada Drs. Yap Tjwan Bing sebagai satu-satunya minoritas keturunan asing sebagai anggota PPKI yang ikut mengesahkan UUD 1945 (lihat gambar 11). Di masa reformasi, nama Yap kembali diingat, bahkan diabadikan sebagai nama jalan di Kampung Jagalan (Jebres) di kota kelahirannya. Pemerintah Kota Solo –melalui Peraturan Wali Kota– menyetujui penamaan salah satu jalan dengan menggunakan nama Yap Tjwan Bing. Peresmian dilakukan saat perayaan Imlek di Balaikota. Ketika meresmikan jalan tersebut pada 22 Februari

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

2008, Wali Kota Solo Joko Widodo mengatakan: “Dengan momentum perayaan Imlek 2559 ini, Pemkot Solo memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk tokoh nasional Yap Tjwan Bing sebagai nama salah satu jalan di Solo.”¹²⁶



Yap Tjwan Bing di dalam sidang PPKI (persis duduk di seberang Sukarno)
Sumber: Domain publik

Jelas nampak di sini, bahwa tokoh-tokoh peranakan Tionghoa di BPUPKI pun ikut secara langsung memberikan kontribusi pemikiran mereka. Dalam kerangka yang luas, dua sejarawan Universitas Indonesia, Prof. Susanto Zuhdi dan DR. Mohammad Iskandar, mengklaim bahwa seluruh anggota BPUPK berhak disebut sebagai *the founding fathers*.

Pengangkatan para anggota BPUPKI diumumkan pada 29 April 1945 berikut isi wacana sidang-sidangnya yang memiliki arti sejarah yang khas dalam proses pembentukan embrio Indonesia merdeka. *Sesungguhnya semua anggota BPUPKI yang 60 orang—kemudian ditambah 6 orang— itulah yang berhak disebut sebagai “bapak pendiri bangsa” (the founding fathers). Mereka ini adalah the founding fathers karena dalam arti sebenarnya mereka inilah yang dianggap sebagai the men who made Indonesia merdeka.* Dalam pengertian ini *the founding fathers* tidak sendirian, tetapi jamak, termasuk pejuang kemerdekaan dalam arti umum. Akan tetapi, lebih dari itu, *the founding fathers* secara khusus mengacu pada para pemimpin yang terlibat langsung dalam meletakkan kerangka dasar bagi kelahiran sebuah negara-bangsa. Mereka berada pada kisaran

sejarah yang maha penting. Dalam hal ini mereka sebagai arsitek bangunan Indonesia merdeka saat kemerdekaan belum dicapai. Lebih khusus lagi ialah mereka yang terkait langsung dengan penyusunan konstitusi (UUD) sebuah *nation state* (negara-bangsa) Indonesia. Dalam kepastakaan sejarah Amerika Serikat, dikenal nama besar, seperti James Madison dan Thomas Jefferson.

Dalam konteks sejarah Indonesia semua pemimpin yang duduk dalam kepanitiaan BPUPKI/PPKI beberapa bulan sebelum kejatuhan Jepang atau menjelang proklamasi tanpa kecuali adalah bapak bangsa. Semuanya berjumlah 66 orang....

....tokoh-tokoh Indonesia yang diangkat sebagai anggota BPUPKI, tanpa kecuali, adalah *the founding fathers* dalam arti formal. *Meskipun tidak sedikit jumlah tokoh-tokoh sezaman yang juga berjasa bagi pembentukan Indonesia merdeka, karena kebetulan sejarah dan sebagian lain karena ketokohan mereka pada masa itu, mereka menjadi pembuat sejarah yang dikenal dengan sebutan the founding fathers*.¹²⁷

Jadi tidak diragukan lagi, bahwa selaku anggota BPUPK, Liem Koen Hian, Oei Tjong Hauw, Oey Tiang Tjoei dan MR Tan Eng Hoa ikut masuk sebagai "*Founding Fathers*" (Para Bapak Pendiri Bangsa), yang sekaligus juga mengukuhkan fakta bahwa etnik Tionghoa pun juga merupakan *stake holder* Republik Indonesia semenjak ia masih dalam kandungan.¹²⁸

Tenggelamnya Matahari Terbit: Kekalahan Jepang

Menyusul kekalahan Jepang, di kalangan Tionghoa terjadi pergolakan internal, yaitu aksi pembalasan terhadap mereka yang dianggap sebagai "pengkhianat" karena dianggap "berkolaborasi" dengan Jepang. Muncullah kini sebutan "hankan" (bahasa Mandarin: hanjian 漢奸, yang berarti pengkhianat bangsa Han/Tionghoa).¹²⁹ Yang termasuk kategori hankan adalah mereka yang mempunyai sangkut paut langsung dengan Jepang, misalnya mereka yang bekerja di Kenpeitai, HCCH atau Kakyô Han (Kantor Urusan Tionghoa).¹³⁰ Para pemuda Tionghoa (khususnya golongan totok) yang mengaku bergerak di bawah tanah dan bersikap anti Jepang telah menyusun barisan bernama San Tsing Toan (kadang disebut juga San Min Chu I Tsing Nien Thoan, berarti: Pemuda San Min Chu I), yang berafiliasi dengan Partai Nasionalis Tiongkok (KMT). Mereka menyusun "daftar

DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)

hitam" yang berisi nama-nama orang Tionghoa yang mereka pandang sebagai hankan.¹³¹

Di kota-kota dengan jumlah penduduk Tionghoa totok cukup besar, bermunculan aksi-aksi untuk menindak orang-orang yang dicurigai sebagai *hankan*. Tony Wen (jurubahasa di *Kakyô Han*) melarikan diri dari Jakarta ke Solo.¹³² Pemimpin HCCH Solo, Ong Siang Tjoen, untuk sementara pindah ke Semarang.¹³³ Di Malang, begitu terdengar adanya usaha untuk membalas dendam pada pihak yang dituduh sebagai *hankan*, sekelompok pemuda berusaha mencegah dengan cara mengoreksi ulang "daftar hitam" yang telah disusun. Untungnya para pemuda *San Min Chu I* tadi bersedia menerima koreksi tersebut. Dengan demikian di Malang bisa dicegah penganiayaan fisik pada tokoh-tokoh HCCH.¹³⁴ Di Singkawang (Kalimantan Barat), ratusan pemuda Tionghoa bergabung dalam "*Anti-Nippon Society*" dan melakukan pengadilan jalanan pada mereka yang dituduh sebagai *hankan*.¹³⁵ Aksi di Yogyakarta dilakukan oleh orang-orang totok yang fanatik, dan dimotori dari Jakarta.¹³⁶ Rencana mereka untuk menyerbu gedung HCCH bisa digagalkan pemuda peranakan. Dengan demikian pertumpahan darah bisa terhindar, walaupun tidak berarti perasaan antipati orang-orang totok itu otomatis bisa padam. Selain itu ada juga staf HCCH Yogyakarta yang merasa tidak nyaman dan terpaksa "mengalah" pergi ke kota lain, misalnya ke Jakarta, dengan maksud supaya tidak begitu dikenali.

Suasana menyusul kekalahan Jepang menjadi "panas", orang-orang berlomba ingin mengutuk segala sesuatu yang berbau Jepang, termasuk HCCH, seperti dilukiskan dengan bagus dalam kutipan berikut ini:

"...pada masa setelah Jepang menakluk. Ketika itu mendadak muncul segala *strebers* [orang-orang gila hormat, DK], segala *avonturiers* [kaum petualang, DK], yang di zaman bahaya bersembunyi di kolong bale [tempat tidur, DK]. Banyak orang bergembar-gembor memaki pemimpin-pemimpin *Kakyô Sôkai* sebagai kaum pengkhianat, bangsa kaum *han-kan* [Mandarin: pengkhianat, DK] yang mau mereka tuntutan, sedang diwaktu *Kakyô Sôkai* masih berdiri mereka tidak berani tampil kemuka, karena takut berurusan dengan *Kenpei* [polisi rahasia Jepang, DK]. Kita tidak sangkal, bahwa ada juga diantaranya orang-orang yang jadi pengurusnya *Kakyô Sôkai* sudah gunakan kedudukannya buat mengisi kantongnya sendiri, tetapi sebaliknya juga tidak kurang jumlahnya pemimpin Tionghoa yang telah korbankan segala-galanya dan bekerja sebagai pengurus *Hua Chiao Chung Hui* melulu hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan penduduk dan masyarakat bangsa kita. Mereka adalah pemimpin-pemimpin sejati. Mereka berlainan kualitas dan kaliber dari

orang-orang yang mengaku jadi pemimpin dan tumbuh sebagai jamur dimusim hujan kalau kelihatan suasana bersih dan aman! Tetapi *strebers* dan segala *avonturiers* ini laksana kilat pula cepatnya menyembunyikan diri, bila merasa bahwa ada bahaya atau resiko didepan mata. Padahal dulunya mereka begitu tidak malu berani memaki-maki orang lain menjadi pengkhianat serta penjual bangsa".¹³⁷

Tidak dipungkiri, begitu banyak orang Tionghoa yang di zaman Jepang tidak berani menampakkan dirinya, namun ketika zaman tersebut berakhir, mereka bermunculan sambil berlomba-lomba mengutuk apa yang telah dilakukan para pemimpin dari masa tersebut. Akan tetapi, dibandingkan dengan keadaan di negara tetangga (Malaya dan Filipina),¹³⁸ nasib para bekas pemimpin HCCH di Indonesia relatif jauh lebih baik. Sejauh yang diketahui, hanyalah satu orang bekas pimpinan HCCH yang dibunuh oleh barisan pemuda totok militan (Pemuda *San Min Chu I*).¹³⁹

Berbagai Macam Aksi Kekerasan di Masa Revolusi

Di berbagai daerah, kekerasan anti Tionghoa yang pernah muncul pada masa kedatangan Jepang, berulang lagi pada saat kalahnya Jepang. Pada saat itu terjadi kevakuman kekuasaan, di pihak lain Negara Republik Indonesia belum mampu menegakkan hukum melawan berbagai kelompok bersenjata yang muncul di mana-mana. Terulanglah kembali aksi-aksi kekerasan seperti perampokan, penculikan, pembunuhan, perkosaan dan sunat paksa atas golongan Tionghoa.¹⁴⁰

Mengapakah menyusul kekalahan Jepang di berbagai daerah tadi muncul kekerasan anti-Tionghoa? Apakah eksperimen atas keberagaman atau manajemen konflik yang dijalankan Jepang harus bertanggungjawab atas segala kerusuhan berdarah tadi? Sarjana politik Amerika, Willard Elsbree menolak pendapat ini.¹⁴¹ Tidak bisa dibantah, kata Elsbree, bahwa ada beberapa kebijakan Jepang yang mendorong orang Indonesia untuk membalas dendam pada Tionghoa. Perbedaan kepentingan antara kaum nasionalis Indonesia di satu pihak dengan sifat anti-Jepang golongan Tionghoa seringkali menimbulkan konflik di antara keduanya. Akan tetapi, tekanan yang muncul diantara Indonesia-Tionghoa barulah menjadi serius dengan pecahnya konflik Indonesia melawan Belanda.¹⁴²

Di pihak lain, seorang tokoh nasionalis Indonesia, Sutan Syahrir, secara terang-terangan menyalahkan Jepang atas terjadinya segala bentuk antagonisme rasial menyusul kapitulasi Jepang:

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

“...Kebencian yang tambah lama tambah besar terhadap Jepang diputarkan oleh Jepang dengan agitasi dan propagandanya terhadap ...orang Tionghoa, ..dan selanjutnya tak dapat kita pungkiri, bahwa propaganda dan agitasi Jepang itu banyak pengaruhnya dan berhasil juga baginya...Kegiatan jiwanya [pemuda, DK] terutama terlihat sebagai kebencian kepada bangsa-bangsa asing, yang sebenarnya ditunjukkan Jepang untuk dimusuhi, bangsa Sekutu, bangsa Belanda, bangsa Indo (bangsa kita sendiri), Ambon, Manado, kedua-duanya bangsa kita sendiri, Tionghoa, pangreh praja. Maksudnya tak lain, seluruh dunia boleh dibenci asalkan jangan membenci Jepang”.¹⁴³¹⁴⁴

Pendapat Syahrir ini pun ada benarnya. Ternyata Jepang menanamkan perasaan anti-Tionghoa pada golongan Indonesia, misalnya melalui lagu-lagu propaganda seperti di bawah ini (dalam bahasa Jawa), dimana orang Tionghoa disejajarkan dengan Belanda sebagai “musuh”:

*Cina Landa Musuhku
Nippon gundhul Kancaku
Ayo maju perang
Gebug Amerika Inggris¹⁴⁵*

Penulis secara pribadi lebih memilih pendapat Elsbree. Kebijakan Jepang tidaklah bisa dijadikan “kambing hitam” atas antagonisme rasial yang terjadi. Kondisi-kondisi lokal yang sudah tercipta sebelum kedatangan Jepang, hubungan sosial antar etnis, ketegangan di dalam masyarakat, pola distribusi ekonomi, semuanya harus ikut pula dipertimbangkan. Memang benar, bahwa di beberapa daerah kehadiran Jepang telah mempercepat pecahnya konflik antar berbagai golongan dan kepentingan yang telah terpendam sejak zaman Belanda. Apalagi kejatuhan Jepang diikuti dengan pecahnya suatu revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Keberagaman laksana pisau bermata dua jika tidak dikelola dengan baik. Ia bisa menjadi modal satu bangsa untuk semakin maju, di mana satu elemen melakukan penyerbukan silangbudaya dengan elemen lainnya. Namun jika satu elemen merasa lebih unggul daripada elemen lainnya, dapat dipastikan hal itu akan berdampak negatif bagi kelangsungan satu bangsa. Sejarah telah mengajarkannya, sekarang terserah kita.***

Yogyakarta, 21 Juli 2018

Catatan Akhir

- ¹ Okazaki Seizaburo, "Menjamboet Hari Peringatan Enam Boelan", dalam *Nomor Istimewa Asia Raja* (Djakarta: Asia Raja, 2602 [1942]), tanpa nomor halaman.
- ² Didi Kwartanada, "Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945", dalam Lembaga Studi Realino (ed.), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa* (Yogyakarta: Kanisius-LSR, 1996), h. 24-25.
- ³ Pluralitas dalam masyarakat Tionghoa misalnya berdasarkan: orientasi kultural (peranakan-totok), daerah asal (Tionghoa Medan, Tionghoa Jawa, dll), kelompok dialek (Hokkien, Hakka, Teochiu, dll) ataupun agama (Kristen, Katolik, Konghucu, Islam, dll).
- ⁴ Twang Peck-yang, *The Chinese Business Élite in Indonesia and the Transition to Independence 1940-1950* (Kuala Lumpur: Oxford, 1998), h. 3.
- ⁵ Peter Carey, "Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central Java, 1755-1825", *Indonesia*, 37, April 1984, h. 19.
- ⁶ Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (Jakarta: Elkasa, 2002), h. 611.
- ⁷ Istilah "middleman minority" pertama kali dipakai oleh sosiolog AS Howard P. Becker (1940). Ada beberapa istilah lain yang dipakai misalnya "Trading Minorities" (sosiolog Belanda W.F. Wertheim), "Minorities in the Middle" (Walter P. Zenner). Untuk kajian lebih lanjut lihat kajian Walter P. Zenner, *Minorities in the Middle: A Cross-Cultural Analysis*. (New York: SUNY Press. 1991).
- ⁸ Dikutip dari Martin N. Marger, *Race and Ethnic Relations: American and Global Perspectives*. Edisi Kedua (Belmont: Wadsworth, 1994), h. 51-52. Terjemahan bebas dari penulis.
- ⁹ Abu Hanifah, *Tales of a Revolution* (Sydney: Angus and Robertson, 1972), h. 253. Terjemahan bebas dari penulis
- ¹⁰ Charles A.Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), h. 53.
- ¹¹ Untuk sejarah perkembangan THHK, lihat Lea Williams, *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movement in Indonesia 1900-1916* (Glencoe: Free Press, 1960).
- ¹² Abdoel Rivai, "Pengadjaran Bangsa Tjina di Tanah Hindia", *Bintang Hindia*, no 22 (IV), 1 Maret 1907, h. 280.
- ¹³ Goenawan Mangoenkoesoemo, "Lahirnya Boedi Oetomo", dalam Pitut Soeharto dan A. Zainul Ihsan (ed), *Cahaya di Kegelapan. Capita Selecta Kedua* (Jakarta: Jayasakti, 1981), h.29.
- ¹⁴ Mobini-Kesheh, *Hadrami Awakening: Kebangkitan Hadhrami di Indonesia*, Penerjemah Ita Mutiara dan Andri (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 43-44
- ¹⁵ Kajian mendetil tentang SI bisa didapatkan dalam APE Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta: Grafiti Pers, 1982). Untuk konflik 1918 lihat Masyhuri, *Bakar Pecinan!: Konflik Pribumi vs. Cina di Kudus Tahun 1918* (Jakarta: Pensil 324, 2006).
- ¹⁶ A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* Cetakan ke-13 (Jakarta: Dian Rakyat 1994), h. 13-14
- ¹⁷ Periksa Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*. Terjemahan Ny Wilandari Supardan (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), h. 7-16.
- ¹⁸ Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, h.10.
- ¹⁹ Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, h. 15.
- ²⁰ Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, h.11-12.
- ²¹ Bagian ini disarikan dari Siauw Giok Tjhan, *Renungan Seorang Patriot Indonesia*. Editor Siauw Tiong Djin (Jakarta: Sinergi Indonesia, 2010), h. 44-45. Lihat juga Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, h. 45-52.

DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)

²² Pemimpin Redaksi *Sin Po*, Kwee Kek Beng, menulis dalam otobiografinya, bahwa Bung Karno di akhir dekade 1920an mendatangi *Sin Po* dan mengharapkan dukungan atas satu majalah yang hendak diterbitkannya. Disebutkan Kwee, bahwa Bung Karno “ingin sekali rapatkan perhubungan dengan bangsa kita [Tionghoa] dan dengan Tiongkok”. Sehubungan dengan *Sin Po* ini, patut diingat bahwa lagu Indonesia Raya dimasyarakatkan pertama kali dalam majalah mingguan *Sin Po* (edisi 10 November 1928), karena W.R. Supratman waktu itu bekerja di media tersebut. Kwee Kek Beng, *Doea Poeloe Lima Taon Sebagai Wartawan* (Batavia: Kuo, 1947), h.35-36; lihat juga *Memoar Ang Yan Goan: Tokoh Pers Tionghoa yang Peduli Pembangunan Bangsa Indonesia*. Penerjemah Tan Beng Hok (Jakarta: Hasta Mitra/Yayasan Nabil, 2009), h.50. Kedekatan pers Melayu-Tionghoa dengan kaum nasionalis Bumiputera menyebabkan Saeroen, pemimpin redaksi “Pemandangan” Batavia, menulis pada tahun 1934, “Dirataken, soerat-soerat kabar Tionghoa jang terbit di Indonesia ini, tida ada jang menentang pergerakan bangsa saja, Indonesiërs”. Lihat Saeroen, “Apa jang Toean Saeroen njataken”, dalam *Mata-Hari* nomor perdana, 1934, tanpa nomor halaman.

²³ Siauw Giok Tjhan, *Renungan Seorang Patriot Indonesia*, h.45; Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, h.52-54.

²⁴ Sebetulnya masih ada satu lagi kelompok Tionghoa yang ikut aktif berjuang dalam masa Pergerakan Nasional, yakni kaum Tionghoa Muslim. Salah satu tokoh utamanya adalah Oey Tjeng Hien (1905-1988), yang kemudian berganti nama menjadi Abdul Karim. Dia adalah salah satu pendiri Muhammadiyah di Bengkulu dan kemudian diangkat menjadi pimpinannya yang pertama. Lihat otobiografinya, H. Abdul Karim (Oey Tjeng Hien), *Mengabdi Agama, Nusa dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno* (Jakarta: Gunung Agung, 1982). Menariknya di tahun 1930-an banyak bermunculan gerakan Muslim Tionghoa, yang muncul diluar Jawa. Di Sulawesi, Ong Kie Ho (kelahiran Toli-toli) mendirikan *Partai Islam*. Penguasa takut akan aktivitasnya dan dia dibuang ke Jawa tahun 1932. Di Medan tahun 1936, seorang Tionghoa totok, Yap A Siong dengan beberapa kawannya mendirikan *Partai Islam Tionghoa*. Di tahun 1933 di Makassar berdirilah *Partai Tionghoa Islam Indonesia* (PITII). Setahun kemudian PITII mendirikan suatu “Sekolah Melayu” dan di tahun 1936 menerbitkan media bernama “*Wasilah*”, Denys Lombard dan Claudine Salmon, “Islam and Chineseness”, dalam Alijah Gordon (ed.), *The Propagation of Islam in the Indonesian-Malay Archipelago* (Kuala Lumpur: Malaysia Sociological Research Institute, 2001), h.198.

²⁵ Mary Somers Heidhues, “Bystanders, Participants, Victims: The Chinese in Java and West Kalimantan, 1945-46”, *makalah pada Konperensi NIOD*, Amsterdam, 29 April 2003, h.1-2. (terjemahan bebas). Terimakasih kepada Ibu Mary Somers untuk ijin mengutip tulisan tersebut.

²⁶ Mengenai reaksi golongan Tionghoa di Hindia Belanda terhadap Perang Tiongkok-Jepang II, lihat Yoji Akashi, *The Nanyang Chinese National Salvation Movement, 1937-1941* (Lawrence: University of Kansas, 1970); Ken’ichi Goto, *Returning to Asia: Japan-Indonesia Relations, 1930s-1942* (Tokyo: Ryukei Shosha, 1997), bab 13; Peter Post, “Chinese Business Networks and Japanese Capital in South East Asia, 1880-1940”, dalam Rajeswary Ampalavanar Brown (ed), *Chinese Business Enterprise in Asia* (London: Routledge, 1995), bab 9.

²⁷ Mengenai patriotisme orang Kanton, lihat Akashi, *Nanyang Chinese*, h. 33; Peter Post, “Chinese Business”, h. 288.

²⁸ Kwee Kek Beng, *Doea Poeloe Lima Taon*. h. 45, 50, 63, 68-69

²⁹ Elsbeth Locher-Scholten, “European Images of Japan and Indonesian Nationalism Before 1942”, dalam J. van Goor (ed.), *The Indonesian Revolution* (Utrecht: HES, 1986), h. 23.

- ³⁰ H.J.van Mook, *Netherlands Indies and Japan* (London: G. Allen & Unwin, 1944), h. 25-26.
- ³¹ Tjung lahir di Fujian, Tiongkok tahun 1885 dan bermigrasi ke Indonesia saat berumur 20 tahun. Karirnya cepat meroket dan di tahun 1917 mendirikan Pabrik Tekstil Tjoan Bie. Tjung tercatat sebagai salah satu importir tekstil serta pedagang grosir yang terbesar. Beberapa kali dia terpilih sebagai Presiden Kamar Dagang Tionghoa Batavia. Puncak karirnya adalah sebagai salah satu wakil Tionghoa Perantauan dalam Parlemen Tiongkok sebelum PD II. Leo Suryadinata, *Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches*. Edisi Ketiga (Singapore: ISEAS, 1995), h. 212-13.
- ³² Akashi, *Nanyang Chinese.*, h. 34.
- ³³ Untuk laporan mengenai aktifitas Badan Amal Tionghoa di berbagai daerah di Hindia Belanda, lihat Akashi, *Nanyang Chinese.*, 33-42, 84-88; A.H.C. Ward et al (ed), *The Memoirs of Tan Kah Kee*. (Singapore: Singapore University Press, 1994), h.113-115.
- ³⁴ Wawancara Woo Shu Fe (Yogyakarta), 24 Juli 1993.
- ³⁵ Didi Kwartanada, 'Competition, Patriotism and Collaboration: The Chinese Businessmen of Yogyakarta Between the 1930s-1945', *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol.33, no.2 (Juni 2002), h. 269.
- ³⁶ G.Pakpahan, *1261 Hari dibawah Matahari Terbit* (Jakarta: Marintan Jaya, 1979), h. 39.
- ³⁷ Lawrence Yoder, *Tunas Kecil: Sejarah Gereja Kristen Muria Indonesia* (Semarang: Komisi Literatur Sinode GMKI, 1980), h. 120-122.
- ³⁸ Elly Touwen-Bouwisma, "The Indonesian Nationalists and the Japanese 'Liberation' of Indonesia: Visions and Reactions", *Journal of Southeast Asian Studies* 27, 1, Maret 1996: 10. Disebutkan di sini bahwa penyunatan paksa dilakukan oleh anggota Nahdatul Ulama (NU).
- ³⁹ Suharyo Padmodiwiryo, *Memoir Haryo Kecil Volume 1* (Jakarta: Obor, 1995), h. 12.
- ⁴⁰ Twang, *The Chinese Business*, h. 106 catt. 28
- ⁴¹ Frans Hüsken, "Islam and Collective Action: Rural Violence in North Central Java in 1942", dalam Dick Kooiman, Otto van den Muijzenberg dan Peter van der Veer (ed), *Conversion, Competition and Conflict: Essays on the Role of Religion in Asia* (Amsterdam: Free University Press, 1984), h.143.
- ⁴² Soemarno Sosroatmodjo, *Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya* (Jakarta: Gunung Agung, 1981), h. 249.
- ⁴³ Twang, *The Chinese Business*. h. 106; Yoder, *Tunas Kecil.*, h.122.
- ⁴⁴ Twang, *The Chinese Business*, h. 106.
- ⁴⁵ Lihat berturut-turut, Pakpahan, *1261 Hari*, Twang, *The Chinese Business*. h. 73, 106 catt.28; Robert Cribb, *Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution 1945-1949* (Honolulu: UP of Hawaii, 1991), h. 39; Touwen-Bouwisma, "The Indonesian Nationalists"; A.J.Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan* ('s Gravenhage: Van Hoeve, 1949), h. 146.
- ⁴⁶ Twang, *The Chinese Business*, h. 71.
- ⁴⁷ Sumber terbaik untuk topik ini adalah Touwen-Bouwisma, "The Indonesian Nationalists".
- ⁴⁸ Tan Po Goan, "Chinese Problems in Indonesia", *The Voice of Free Indonesia*, 1 November 1946, h. 21.
- ⁴⁹ Kwee Kek Beng, *Doea Poeloe Lima Taon* , h. 78.
- ⁵⁰ Nishijima Shigetada et al, *Japanese Military Administration in Indonesia* (Washington: Joint Publication Research Centre, 1968), h. 107.
- ⁵¹ Pada bulan Februari 1942, tentara Jepang yang baru saja menduduki Singapura melakukan "operasi pembersihan" (dalam bahasa Hokkien disebut "sook ching"). Taksiran Barat

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

menyebut angka 5,000 korban sedangkan laporan *Kenpeitai* menyebutkan 6,000. Sumber-sumber Tionghoa menaksir jauh lebih tinggi, 30-40,000 orang korban. Lihat Cheah Boon Keng, "The Social Impact of the Japanese Occupation of Malaya (1942-1945)", dalam Alfred McCoy (ed), *Southeast Asia Under Japanese Occupation* (New Haven: Yale, 1980), h. 119 catt 6.

⁵² Pada bagian ini penulis terutama tergantung pada tulisan Mitsuo Nakamura, "Jenderal Imamura dan Periode Awal Pendudukan Jepang", dalam Akira Nagazumi (ed.), *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Yayasan Obor, 1988), h. 1-37.

⁵³ Nakamura, "Jenderal Imamura", h. 11.

⁵⁴ Nakamura, "Jenderal Imamura", h. 14,

⁵⁵ Nakamura, "Jenderal Imamura", h. 15.

⁵⁶ Nakamura, "Jenderal Imamura", h. 17.

⁵⁷ Bandingkan dengan Twang, *The Chinese Business*, h. 72.

⁵⁸ Tsung-rong Yang, "A Short History of Anti-Chinese Riots", dalam Michael R. Godley & Grayson J. Lloyd (ed), *Perspectives on the Chinese Indonesians* (Adelaide: Crawford House, 2001), h. 45.

⁵⁹ *The Kenpeitai in Java and Sumatra: Selections from the Authentic History of the Kenpeitai, by the National Federation of Kenpeitai Veterans' Associations*; Diterjemahkan oleh Barbara Gifford Shimer & Guy Hobbs (Ithaca: Cornell MIP, 1986), h. 23, 25.

⁶⁰ "Tentang Penjoesoenan Masjarakat Baroe di Poelau Djawa (Keterangan dari Pemerintah Gunseikanbu di Djakarta), *Kan Po*, 2 (I), 10 September 2602 (1942): 8 (ejaan disempurnakan dan cetak miring dari penulis).

⁶¹ Meluasnya kesediaan untuk "bekerja sama" tersebut bukan berarti tidak terdapat perlawanan dari golongan Tionghoa. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa kelompok perlawanan bersenjata Tionghoa di Jawa pada awal pendudukan, yang mayoritasnya berhubungan dengan pemerintah Chiang kai-shek di Tiongkok. Beberapa orang Tionghoa juga bergabung dengan kelompok-kelompok bawah tanah Belanda sebagai pribadi. Namun perlawanan tersebut tidak banyak memperoleh dukungan dari golongan Tionghoa dan dalam waktu singkat kelompok-kelompok tersebut bisa digulung oleh Jepang.

⁶² Gunseikanbu (ed.), *Orang-orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), h. 462.

⁶³ Mr. R. Samsedin, "Poetjoek Pimpinan Pergerakan Tiga A: Instroeksi-Instroeksi", Gambir Barat 2, Djakarta, tertanggal 18 Djoeni 2602, hlm. 1. Koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta.

⁶⁴ Mr. R. Samsedin. "Poetjoek Pimpinan", hlm. 2

⁶⁵ Didi Kwartanada, "Kolaborasi dan Resinifikasi: Komunitas Cina Kota Yogyakarta pada Jaman Jepang", naskah belum diterbitkan, h. 269, 287-288.

⁶⁶ Mary F. Somers, "Peranakan Chinese Politics in Indonesia", *PhD Thesis*, Cornell University, 1965 106;

⁶⁷ G.J. Pratt, "The Japanese Occupation in Indonesia: The Role of Putera in the Development of Indonesian Nationalism", Thesis Honours Department of History, Monash Universty, 1974, h..5

⁶⁸ Kwartanada, "Kolanorasi dan Resinifikasi", h. 290-291.

⁶⁹ Pratt, "The Japanese Occupation", h.3.

⁷⁰ Kwartanada, "Kolanorasi dan Resinifikasi", h. 294-295.

⁷¹ Kwartanada, "Kolanorasi dan Resinifikasi", h. 291-292.

⁷² *Sinar Matahari*, 31-7-2603 (1943), h. 3

⁷³ *Asia Raya*, 17-7-2603 (1943)

⁷⁴ Douglas A. Chalmers, "Corporatism and Comparative Politics", dalam Howard J. Wiarda (ed.), *New Directions in Comparative Politics* (Boulder: Westview, 1985), h. 56-79, khususnya h.58-60.

⁷⁵ Tjeng Tik Kie, "Satoe Tahoen dibawah Perlindoengan Nippon", *Sinar Matahari*, 5-3-2603 (1943).

⁷⁶ The Tjiang Oei, "Hua Chiao Chung Hui", *SM*, 15-1-2603 (ejaan disempurnakan dan cetak miring dari penulis).

⁷⁷ Mary Somers-Heidhues, *Southeast Asia's Chinese Minorities* (Melbourne: Longman, 1974), h. 48, 54-55;

⁷⁸ Tionghoa Jakarta menyumbang f.566,000; Malang menyumbang f.202,786. Di akhir November 1943 dilaporkan adanya lima pesawat seharga beberapa juta gulden telah dibeli dengan dana pesawat terbang yang terkumpul, Twang, *Chinese Business*, h. 76.

⁷⁹ Twang, *Chinese Business*, h. 76.

⁸⁰ Di Karesidenan Priangan terkumpul f. 140.000; Semarang f.35,000; Banten 31,000, Twang, *Chinese Business*, h.77.

⁸¹ Twang, *Chinese Business*, h. 77, 107.

⁸² Oei Tjoe Tat, *Memoar Oei Tjoe Tat* (Jakarta: Hasta Mitra, 1995), h. 46

⁸³ Lihat Ben Anderson, *Some Aspects of Indonesian Politics Under the Japanese Occupation* (Ithaca: Cornell MIP, 1961), h. 46-47

⁸⁴ Dikutip dari *Sinar Matahari*, 11-1-2604 (ejaan disempurnakan dan cetak miring dari penulis).

⁸⁵ *Sinar Matahari*, 13-5-2604 (1944).

⁸⁶ Lihat misalnya Tjeng Tik Kie, "Kenang-kenangan Tahoen 2603 (II)", *Sinar Matahari*, 17-2-2603.

⁸⁷ Tjeng Tik Kie, "Siaran Lagoe-lagoe dan Moesik Tionghoa dalam Radio", *Sinar Matahari*, 15-2-2603.

⁸⁸ Tjeng Tik Kie, "Siaran Lagoe-lagoe". Acara musik modern Tionghoa "Tjing Kwang" disiarkan malam hari pukul 22.30, *Sinar Matahari*, 11-3-2603. Pada pertengahan tahun 1943, tercantum juga nama grup musik yang dipimpin oleh Phang Khin Cheong.

⁸⁹ Di masa Reformasi, perayaan Imlek banyak dijadikan "komoditas politik". Mulanya Presiden Gus Dur memutuskan Imlek menjadi hari libur fakultatif dan akhirnya oleh Presiden Megawati dijadikan hari libur nasional sejak 2003.

⁹⁰ Hari libur tadi ditetapkan dengan *Osamu Seirei* (Undang-undang) no. 26 (tanggal 1-8-2602), lihat Gunseikantu (ed.), *Boekoe Pengoempoelan Oendang-oendang* (Djakarta: Balai Poestaka, 2604), h. 23

⁹¹ Misalnya surat kabar *Sinar Matahari* (Yogyakarta), *SM*, 4-2-2603.

⁹² *Sinar Matahari*, 5-2-2603.

⁹³ Tjeng Tik Kie, "Tahoen Baru Imlek Pertama dalam Suasana Baroe", *Sinar Matahari*, 4-2-2603 (ejaan disempurnakan)

⁹⁴ Diringkas dari Tjeng Tik Kie, "Tahoen Baru Imlek".

⁹⁵ *Sinar Matahari*, 7-12-2602.

⁹⁶ *Sinar Matahari*, 4-3-2602

⁹⁷ Tjeng Tik Kie, "Kenang-kenangan Tahoen 2603 (I)", *Sinar Matahari*, 16-2-2603.

⁹⁸ *Asia Raya*, 4-8-2602, h. 3.

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

⁹⁹ Willard Elsbree, *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist Movement 1940-1945* (Cambridge: Harvard, 1953), h. 131.

¹⁰⁰ Lihat misalnya Didi Kwartanada, 'The Road to Resinification: Education for the Chinese during the Japanese Occupation', dalam Peter Post et al. (eds), *Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War* (Leiden: E.J. Brill), h. 327-333.

¹⁰¹ Bagian ini berdasarkan wawancara dengan Woo Shu Fe (Yogyakarta), 24-9-1993.

¹⁰² Wawancara Tan Thiam Kwie, 17-4-1992.

¹⁰³ Wawancara Liem Liang Djing, 30-8-1993.

¹⁰⁴ Data diolah dari *Lima Puluh Tahun Padmanaba* (Yogyakarta: Padmanaba, 1992), h. 8-11.

¹⁰⁵ Liem Thian Joe, "Nama-nama Tionghoa di Djaman Pantjaroba", *Jade*, 1, 1948: 9-15.

¹⁰⁶ Bagian berikut ini terutama didasarkan atas wawancara dengan Liem Liang Kioe dan Eddy Liem, 6-5-1995, yang ditambah dengan sumber lain. Pada zaman Jepang berbagai kursus bahasa tumbuh menjamur, selain kursus *Kuo Yu* di atas, kursus bahasa Jepang juga banyak sekali ditemui.

¹⁰⁷ Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China: A Study of Perceptions and Policies*. Edisi Revisi. (Singapore: Marshall Cavendish, 2005), h 134-35.

¹⁰⁸ Deskripsi pada bagian berikut ini penulis susun dari arsip-arsip Nederlands Instituut voor Oorlogdocumentatie (NIOD) Amsterdam, "Verklaring Kapt. Tsuchiya Kiso" (1947), *NIOD-IC-1640* no. 30.; h.3, "Mizuta Shigetoshi Interrogation", *H.O. NEFIS, confidential* (14-3-1946), h. 3, 5

¹⁰⁹ "Pengoemoeman Balatentara: Tentang Memperkoeat Pembelaan Tanah Djawa Dengan Pendoedoek Tionghoa", *Kan Po* 55 (III), 25 November 1944, h. 21-22.

¹¹⁰ Joyce C. Lebra, *Tentara Gemblengan Jepang*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), h.107.

¹¹¹ Tsuchiya "Verklaring", h., 4.

¹¹² Tsuchiya "Verklaring", h., 4.

¹¹³ Siauw Giok Tjhan, *Lima Jaman: Perwujudan Integrasi Wajar* (Amsterdam: Teratai, 1981), h.74.

¹¹⁴ Tsuchiya "Verklaring", h., 4.

¹¹⁵ *Sinar Matahari*, 28-10-2604.

¹¹⁶ *Sinar Matahari*, 16-11-2604.

¹¹⁷ *Sinar Matahari*, 27-10-2604.

¹¹⁸ The Headquarters of the 16th Army Java, "EXPLANATIONS REGARDING ALL KINDS OF ARMED BODIES" (t.t), NIOD 10-041640 no.7, h. 9

¹¹⁹ ,Tsuchiya "Verklaring", h. 3.

¹²⁰ Wawancara The Djan Liong, 5-3-1994.

¹²¹ Saafroedin Bahar; Nannie Hudawati Sinaga dan Ananda B. Kusuma (ed), 1998, *Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*. Edisi ke-4. (Jakarta: Sekretariat Negara), h. 191-192 (cetak miring dari penulis).

¹²² Bertindak sebagai promotor Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dengan ko-promotor Prof.Dr. Satya Arinanto, SH., MH. Para penguji terdiri atas Prof.Dr. Bagir Manan, SH.,MCL., Prof.Dr. Adnan Buyung Nasution, SH., Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH., Prof.Dr. Rosa Agustina, SH.,MH., Prof.Dr. Sasa Djuarsa MA., Dr. Todung Mulya Lubis, SH.,LLM dan Dr. Jufrina SH., MA. Mayoritas adalah nama-nama yang dihormati dalam dunia hukum di Indonesia. Dikutip dari <http://www.ui.ac.id/id/news/archive/6686>

¹²³ Dikutip dari <http://www.sayangi.com/politik1/read/2564/wikrama-i-abidin-uud-45->

[belum-lindungi-kemerdekaan-pers](http://www.ui.ac.id/id/news/archive/6686). Lihat juga <http://www.ui.ac.id/id/news/archive/6686>

¹²⁴ Aiko Kurasawa Inomata, "Persiapan Kemerdekaan pada Hari-hari Terakhir Pendudukan Jepang", dalam Taufik Abdullah (ed), *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama-Program Studi Asia Tenggara), h. 130-131. Kurasawa Inomata (h. 131) menambahkan "Saya tidak tahu apakah pengunduran diri ini diterima atau tidak".

¹²⁵ Sujud Dwi Pratisto, "Tan Eng Hoa: Pengusul Pasal Kebebasan Berserikat" *Gatra* 29 Agustus, "Edisi Khusus Hari Kemerdekaan: Tokoh Lintas Agama Perumus Indonesia", h. 110-112 (cetak miring dari penulis).

¹²⁶ Leo Suryadinata, "Yap Tjwan Bing" dalam Leo Suryadinata dan Didi Kwartanada (ed), *Tionghoa dalam Keindonesiaan Jilid 3* (Jakarta: Yayasan Nabil, 2016).

¹²⁷ Susanto Zuhdi dan Mohammad Iskandar, " 'Janji Kemerdekaan' Jepang dan Perencanaan Negara dan Bangsa", dalam Mestika Zed dan Mukhlis PaEni (ed.), *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 6. Perang dan Revolusi*. (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2012). Editor Umum Taufik Abdullah dan A.B. Lopian, h. 93-94 (cetak miring dari penulis).

¹²⁸ Namun sayang sekali, tokoh-tokoh peranakan Tionghoa di dalam BPUPK masih "digelapkan" dalam sejarah resmi Indonesia, lihat Didi Kwartanada, Penghapusan Nama Tokoh Tionghoa dalam Sejarah", *Kolom Detik.com*, 4 Februari 2014, tersedia di link <http://news.detik.com/read/2014/02/04/182716/2487284/103/penghapusan-nama-tokoh-tionghoa-dalam-sejarah?9922022>

¹²⁹ R.Hardjono, "Komuniti Tionghoa Jogjakarta", *Skripsi Sardjana Sedjarah*, Jogjakarta: IKIP Sanata Dharma, 1970, h. 52

¹³⁰ Anehnya, mereka yang dulu terlibat bisnis dengan Jepang nampaknya tidak ikut "diganyang".

¹³¹ Siau, *Lima Jaman*, h. 74.

¹³² Wawancara, Woo Shu Fe, 24-7-1993.

¹³³ Oei Tjoe Tat, *Memoar.*, h. 52.

¹³⁴ Lihat Siau, *Lima Jaman*, h. 74.

¹³⁵ Heidhues, "Bystanders", h. 21

¹³⁶ Bahan tentang Yogyakarta diambil dari R. Hardjono, "Komuniti Tionghoa", h. 52, wawancara dengan The Djan Liong, 5-3-1994; wawancara Lie Djin Han, 28-4-1993.

¹³⁷ Anonim, "Dibawah Pengaruh Semangat Baroe", *New Light Magazine* 6(1),5-4-1948: 3-4 (ejaan disempurnakan).

¹³⁸ Di Filipina, dua orang tokoh utama organisasi Tionghoa zaman Jepang (*Philippine Chinese Association*) berhasil dibunuh gerilya, periksa Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia* (Singapore: Oxford University Press, 1965), h.553. Di Malaya, gerilyawan komunis giat melakukan pembunuhan ratusan informan maupun "kolaborator" Tionghoa, lihat Mamoru Shinozaki, *Syonan: My Story, The Japanese Occupation of Singapore*. (Singapore: Asia Pacific, 1975), h. 83-84. Menyusul kekalahan Jepang di Singapura, mereka yang dulunya berhubungan dekat dengan orang Jepang, baik sebagai informan, karyawan Jepang atau gundik orang Jepang, dikejar-kejar gerilyawan Tionghoa komunis. Banyak diantara orang-orang itu yang terpaksa melarikan diri ke Hongkong atau minta perlindungan polisi, Shinozaki, *Syonan*, h. 96-97.

¹³⁹ Orang tersebut bernama Fan Siau Sak (tidak jelas dari daerah mana), Twang, *Chinese Business.*, h. 110 catt. 133.

¹⁴⁰ Dokumentasi yang baik tentang kekerasan bisa dilihat dalam karya klasik Purcell, *Chinese*, h. 473-80. Mary Somers-Heidhues adalah sarjana yang banyak meneliti periode revolusi,

*DINAMIKA DALAM KEBERAGAMAN:
JEPANG, ETNIK TIONGHOA DAN PRIBUMI (1942-1945)*

lihat karya-karyanya yang sudah disebut diatas. Lihat juga Twang, *Chinese Business*. dan Edwin Yang, "A Short History, ", h. 41-54.

¹⁴¹ Disarikan dari Willard H. Elsbree, *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist Movements, 1940 to 1945* (New York: Russel & Russel, 1955), h. 145.

¹⁴² Lihat "Pengoemoeman dari Kementerian Negara Oeroesan Peranakan" dan "Pidato J.M.Perdana Menteri pada Tg. 8/9/1947", dalam *Negara Republik Mendjamin Golongan Tionghoa*. Siaran Kilat. (Jogjakarta: Kementerian Penerangan, 1947), h. 12-13, 19.

¹⁴³

¹⁴⁴ Sjahrir, *Perdjoeangan Kita* (t.p, c.1945), h. 3-4 (ejaan disempurnakan dan cetak miring dari penulis).

¹⁴⁵ J.B.Sudarmanta, *Tengara Orde Baru: Kisah Harry Tjan Silalahi* (Jakarta: Gunung Agung, 2004), h. 34. Arti lagu tersebut adalah: *Cina Belanda Musuhku/Nippon gundul sahabatku/ayu maju berperang/gebug Amerika-Inggris*. Pada saat penelitian di suatu desa di Bantul, Yogyakarta (2001), penulis mendengar lagu ini dinyanyikan oleh seorang Kakek yang mempelajari lagu itu pada masa Jepang.

**ISLAM DAN DAI NIPPON:
RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA
(1942-1945)**

Jajat Burhanudin

“Dengan jalan menciptakan Islam yang bersifat Asia sejati, tercapailah pula persaudaraan Nippon dan Indonesia yang lebih dalam”¹. Inilah ungkapan seorang tokoh Muslim terkemuka yang juga seorang tokoh pimpinan Muhammadiyah, Kiyai Haji Mas Mansyur (1896-1946), seperti dikutip Kanzo Tsoetsoemi dalam tulisannya di majalah yang dirancang sebagai media propaganda Jepang. Sebagaimana akan dijelaskan dalam artikel ini, sejumlah tokoh Muslim di era pendudukan Jepang (1942-1945) terlibat dalam upaya perumusan argumen intelektual untuk keputusannya menerima dan bekerjasama dengan pemerintah kolonial baru di bumi Indonesia. Kutipan di atas adalah salah contoh penting dari suatu proses bagaimana suatu pemikiran mengemuka untuk menjawab kenyataan sosiologis-politik yang tengah dihadapi.

Masa pendudukan Jepang dalam sejarah Indonesia tidak hanya ditandai oleh kebijakan pemerintah Dai Nippon untuk menguasai denyut nadi kehidupan keagamaan Muslim, sebagaimana bisa dilihat misalnya pada karya klasik Harry J. Benda (1985)² dan van Nieuwenhuijze (1958: 109-60), serta kajian komprehensif lebih belakangan oleh Aiko Kurasawa (1988)³—untuk hanya mencatat tiga dari beberapa kajian tentang Islam masa pendudukan Jepang, yang memang relatif sedikit dibanding kajian Islam masa kolonial Belanda.⁴ Namun, ini yang menjadi inti argumen artikel era ini juga diwarnai oleh kegairahan baru secara intelektual untuk menemukan persamaan atau titik temu antara Islam dan Jepang. Banyak karya lahir pada masa tersebut, terutama melalui media massa, yang sengaja diketengahkan sebagai bentuk jawaban dan juga sekaligus pola keterlibatan tokoh intelektual Muslim dalam suasana baru yang tercipta menyusul kehadiran Jepang.

Dalam kaitan ini, pemerintah militer Jepang dipercaya memberi harapan baru bagi khususnya Muslim Indonesia, bukan tak mungkin mereka akan diberi kesempatan untuk terlibat dalam urusan-urusan politik dan kenegaraan; sesuatu yang sulit diperoleh pada masa kolonial Belanda sebelumnya. Suasana inilah mendorong mereka yang terlibat dalam pergerakan, baik di bidang politik maupun keagamaan, untuk merumuskan pemikiran di sekitar isu tentang Islam dan Dai Nippon. *Soeara MIAI*, *terbitan MIAI* (Majlis Islam ‘Ala Indonesia), *Soeara Moeslimin*

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

Indonesia oleh Masjoemi (Madlis Sjoera Moeslimin Indonesia), dan juga *Djawa Baroe* yang diterbitkan pemerintah Jepang, pembahasan artikel ini difokuskan pada apa yang mereka (tokoh-tokoh Muslim) suarakan dan perbuat; suatu proses yang—dalam istilah historiografi post-linguistik⁵—sebagai perbuatan dan penciptaan makna secara praktikal. Hal ini diekspresikan dalam wujud inisiatif mereka untuk merumuskan kembali nilai-nilai (Islam), prioritas dan juga perilaku dalam terma-terma yang berakar dalam konteks sosio-historis saat itu.

Warisan Belanda

Beberapa dasawarsa sebelum tentara Jepang mendarat, Islam Indonesia telah mengalami perubahan mendasar sejak pemberlakuan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda di awal abad ke-20. Perubahan tersebut ditandai terutama dengan berdirinya lembaga-lembaga modern yang menjadi arena baru perjuangan umat Muslim, di bidang sosio-keagamaan dan politik, di tengah perubahan yang berlangsung di masyarakat. Selain berdirinya Sarekat Islam (SI [1911]), Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (NU [1926]), lembaga Islam yang relevan untuk konteks kajian ini adalah MIAI (Majlis Islam 'Ala Indonesia). Berdiri pada 21 September 1937, MIAI dirancang sebagai federasi organisasi-organisasi Islam Indonesia saat itu, khususnya yang telah disebut di atas, guna mengatasi pertentangan dan konflik yang kerap mengemuka akibat perbedaan dalam beberapa masalah keagamaan. Sebagaimana akan dijelaskan berikut ini, sejauh terkait dengan isu-isu keislaman, MIAI inilah yang pertama kali menjalin hubungan dekat dengan tentara pendudukan Jepang.

MIAI adalah hasil dari proses panjang untuk menekan perbedaan seraya mengedepankan sikap kompromi untuk bersatu dalam satu wadah organisasi. Pembentukan MIAI ini, yang berlangsung di Surabaya, terjadi atas inisiatif beberapa tokoh utama dari organisasi Islam, yakni KH. Mas Mansyur (Muhammadiyah), KH. Wahab Chasbullah serta KH. Muhammad Dahlan (NU) dan W. Wondoamiseno (SI). Dengan dihadiri sejumlah organisasi lain, termasuk yang berskala lokal, rapat pembentukan MIAI menyepakati, selain Wondoamiseno sebagai sekretaris, kedudukan federasi sebagai “tempat permusyawaratan, suatu badan perwakilan yang terdiri dari wakil-wakil atau utusan-utusan dari beberapa perhimpunan-perhimpunan yang berdasar agama Islam di seluruh Indonesia”. Selain itu, juga disepakati bahwa federasi bertujuan “untuk membicarakan dan memutuskan soal-soal yang dipandang penting bagi kemaslahatan umat dan

agama Islam, yang keputusannya itu harus dipegang teguh dan dilakukan bersama-sama".⁶

Lepas dari beberapa persoalan terkait statusnya sebagai federasi, MIAI adalah lembaga yang secara tegas mewakili seluruh organisasi Islam. Meskipun besar kemungkinan ada usaha pemerintah Jepang, seperti dicatat Benda (1985: 143-144), untuk mengganti MIAI, hal tersebut tidak bisa dieksekusi karena kekuatan riil secara sosial-politik dan keagamaan dari keberadaan MIAI. Bahkan, sebagaimana dicatat surat kabar *Asia Raya* (8 Mei 1942), kontak dan pertemuan berlangsung antara pihak Jepang dan MIAI pada bulan Mei 1942, dua bulan setelah tentara Jepang mendarat di Jawa (1 Maret 1942) yang menghasilkan satu program bersama untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi politik Jepang. Pada 7 Mei 1942, pimpinan MIAI Wondoamiseno, bersama dengan KH. Mas Mansoer dan seorang Arab Fachruddin al-Hariri, mendatangi Kolonel Horie Chozo untuk membicarakan masalah Islam di Indonesia. Dari pertemuan itu, ketiga tokoh Muslim tersebut mendampingi Kolonel Horie, dan juga Haji Inada setuju untuk berkunjung ke pusat-pusat Islam di Jawa. Selain diajak ke sebuah pesantren di Surakarta, rombongan kemudian berlanjut ke Surabaya di mana sebuah pertemuan dengan massa Muslim dalam jumlah sangat besar diselenggarakan. Di pertemuan inilah Horie diperkenalkan Wondoamiseno dengan umat Islam di Jawa.⁷

Hal ini tentu saja tidak mengherankan. Sejak sebelum masa pendudukan, Jepang telah menjalin kontak dengan MIAI, ketika organisasi federasi ini mengirim delegasi atas undangan Jepang untuk menghadiri Pameran Islam di Tokyo dan Osaka, dan disusul Konferensi Dunia Muslim, pada November 1939.⁸ Memang, seperti dicatat Yasuko⁹, delegasi MIAI merasa kaget dan tidak senang melihat bendera merah putih terpasang di pameran, padahal itu masih dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda, dan karenanya mereka akhirnya memutuskan tidak datang ke acara Konferensi Dunia Muslim. Meski demikian, jelas bahwa MIAI saat itu adalah satu-satunya organisasi Islam yang merespon undangan Jepang, tidak seperti Muhammadiyah yang bersikap menolak dengan sejumlah alasan yang tampaknya karena kehati-hatiannya atas sikap Jepang yang menyelenggarakan acara terkait dengan isu keislaman.¹⁰

Atas dasar itu, MIAI kemudian berusaha tampil sebagai pihak mewakili Muslim Indonesia di hadapan pemerintah pendudukan Jepang. Usaha untuk mendapatkan simpati dan dukungan Jepang terus dilakukan MIAI, dengan Wondoamiseno sebagai pemimpin organisasi berperan sangat sentral melakukan diplomasi guna meyakinkan pemerintah Jepang untuk bekerjasama dengan MIAI untuk isu-isu keislaman. Mengacu pada sumber arsip berisi surat-surat oleh

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

Wondoamiseno, yang diyakini dibuat pada Agustus 1942, Yasuko (1997: 81-80) memberi suatu gambaran cukup detail mengenai usulan pemikiran dan juga pendekatan Wondoamiseno terkait masalah Islam terhadap pemerintah pendudukan Jepang, sebagaimana tertuang dalam dokumen draft “Rencana: Pendjelasan Permohonan MIAI”. Selain menegaskan akar kuat MIAI dalam organisasi massa Islam di seluruh Jawa, Wondoamiseno juga menengahkan usulan pemikiran yang dalam beberapa segi tertentu setara dengan manajemen masalah-masalah keagamaan yang dijalankan Kantor Urusan Agama (Shūmubu).

Dalam hal ini, Wondoamiseno pada beberapa aspek tertentu berhasil. Pemerintah Jepang memang sempat melakukan sejumlah upaya untuk menjalin hubungan dengan massa Muslim dengan mendirikan komite untuk Persiapan Persatoean Oemat Islam di bawah Abikusno Tjokrosujoso (dari PSII) sebagai ketua (van Nieuwenhuijze 1958: 136-9). Namun, setelah diselenggarakan pertemuan dengan menghadirkan tiga puluh pemimpin organisasi massa Islam pada September 1942, di bawah naungan proyek propaganda Jepang “3A”, tidak ada organisasi baru yang berdiri sebagai hasil pertemuan tersebut. Hal yang terjadi justru memutuskan untuk mempertahankan MIAI sebagai organisasi yang mewakili Muslim Indonesia dan menunjuk Wondoamiseno sebagai ketua. Selain itu, pertemuan atau konferensi tersebut juga memutuskan untuk memindahkan markas besar MIAI dari Surabaya ke pusat pemerintahan militer di Batavia (Benda 1985: 146-147).

Demikianlah, sejak akhir 1942 Wondoamiseno dengan MIAI yang baru saja disahkan oleh tentara pendudukan Jepang mulai bergerak dengan pertama-tama membentuk kepengurusan organisasi. Dalam hal ini, organisasi-organisasi Islam terkemuka memang terwakili. Mr. Kasman Singodimedjo dan Farid Ma’ruf (Muhammadiyah), juga Machfud Siddiq dan Wachid Hasjim (NU), menjadi anggota di barisan eksekutif. Sementara di Badan Penasehat, KH. Mas Mansoer (Muhammadiyah) menjadi ketua, dengan KH. Wahid Hasjim (NU), Achmad Soekati (al-Irshad), Hamka dan Sayyid Ali al-Habsyi (komunitas Arab Kwitang) duduk sebagai anggota (*Asia Raya*, 16 November 1942). Hanya saja, Wondoamiseno mengangkat Harsono Tjokroaminoto (PSII) menjadi sekretaris di badan eksekutif, satu posisi yang sangat menentukan dalam roda organisasi, sehingga kesan dan persepsi bahwa kebijakan MIAI lebih banyak ditentukan oleh kelompok PSII tidak bisa dihindari (Benda 1985: 147).

Namun demikian, lepas dari hal tersebut diatas—yang di kemudian hari menjadi masalah tersendiri bagi MIAI—Wondoamiseno dengan kepengurusan MIAI yang baru kemudian berusaha tampil dengan program-program untuk memperoleh

kepercayaan tentara pendudukan Jepang. Di samping isu-isu praktis, banyak pemikiran mengemuka terkait isu Islam dan Dai Nippon dan Asia Timur secara umum. Hal itu terekam dalam majalah *Soeara MIAI* yang terbit sejak Januari 1943. Sebagai organ resmi organisasi, *Soeara MIAI* memuat banyak tulisan dari berbagai tokoh Muslim yang menyuarakan pemikiran Islam terkait isu-isu aktual, di samping tentu saja agenda dan program MIAI. Selain *Soeara MIAI*, majalah lain yang kerap memuat ekspresi intelektual Muslim adalah *Djawa Baroe*,¹¹ sebuah majalah yang memang dirancang sebagai media resmi tentara pendudukan Jepang.¹² Tulisan-tulisan di dua majalah ini muncul sebagai respon intelektual Muslim Indonesia terhadap kondisi dan dinamika sosial-politik yang berlangsung. Dan itulah yang akan dibahas di bagian berikut ini.

Suasana Zaman dan Harapan Baru

Pendudukan Jepang menandai satu babak penting dalam sejarah Indonesia. Di samping mengakhiri penjajahan Belanda, pendudukan Jepang dalam konteks Islam sekaligus bermakna lahirnya era baru yang sarat dengan semangat dan harapan bisa memperoleh kebebasan untuk terlibat dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Kebijakan Jepang yang menghormati agama menjadi satu alasan penting di balik munculnya semangat di atas. Dalam kerangka itulah, *Soeara MIAI* dalam edisi perdananya (Januari 1943) dengan tegas menyuarakan semangat baru dan kesiapannya bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selain menjelaskan secara rinci tujuan MIAI, inti pemikiran ketuanya Wondoamiseno,¹³ *Soeara MIAI* pada saat yang sama menekankan bahwa implementasi tujuan-tujuan yang dicanangkan mensyaratkan kerjasama dan bimbingan Jepang untuk kepentingan Asia Timur Raya.

Untuk itu, Wondoamiseno dengan MIAI mengetengahkan satu program pembangunan Baitul Mal. Dalam salah satu edisi *Soeara MIAI* (28 Juni 1943), Wondoamiseno menulis sebuah komentar atas pidato Perdana Menteri Tejo. Dia menyambut dengan sangat baik niat Perdana Menteri (dalam pidato di depan rakyat Nippon di Tokyo tanggal 16 Juni) untuk memberi “hak keleluasaan bagi rakyat mencampuri urusan tatanegara”. Maka, selain berterima kasih, dia juga menegaskan rencana MIAI dengan program Baitul Mal, berikut semboyan MIA, “jangan banyak bicara, tetapi bekerjalah”. Dia juga menulis bahwa “sejak dating Balatentara Dai-Nippon menduduki tanah Jawa, MIAI selalu tetap berdiri tegak di belakangnya bersiap bekerja bersama-sama membantu sekuat tenaganya”.

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

Sebagaimana diketahui (Benda 1985: 178-183), Baitul Mal menjadi satu gerakan utama MIAI, setelah aspirasi lain terkait pembangunan masjid agung dan universitas ditolak Jepang. Hal penting untuk dicatat di sini adalah bahwa gagasan Baitul Mal memang diarahkan untuk menarik pihak Jepang agar percaya dan bersedia bekerjasama dengan MIAI. Ada satu persepsi di kalangan pengurus utama MIAI bahwa Jepang masih berusaha menjalin hubungan langsung dengan komunitas ulama, yang dipercaya memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat. Dan ini memang terbukti, seperti akan ditunjukkan nanti. Namun, lepas dari itu, poin penting untuk ditegaskan di sini adalah bahwa tujuan Baitul Mal dinyatakan Wondoamiseno dalam ungkapan berikut ini:

“Insy Allah ta’ala, dengan berkat adanya Baitul Mal yang suci dan murni itu, apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tertib dan sempurna, maka dapatlah dibanggakan akan menjadi salah satunya jembatan untuk membangkitkan semangat baru dalam kalangan masyarakat di seluruh Jawa dan Madura, ialah masyarakat yang berdarah-daging Islam, yang selaras dengan keadaan dan perubahan zaman, menuju ‘Jawa Baru’ yang mulia dan sempurna”.

Selain itu semua, kehadiran tentara pendudukan Jepang di Indonesia juga mendorong suatu gairah intelektual di kalangan tokoh pemikir Muslim, yang berusaha melahirkan rumusan pemikiran yang terkait dengan isu-isu aktual yang berkembang saat itu. Satu poin penting dalam konteks ini adalah tentang kenyataan bahwa Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Sejauh bacaan terhadap dua majalah yang telah disebut di atas, *Soeara MIAI* dan *Djawa Baroe*, tampak bahwa tokoh-tokoh Muslim Indonesia saat itu, teristimewa yang tergabung dalam MIAI, umumnya melihat kehadiran tentara pendudukan Jepang sebagai pembawa harapan baru dalam suasana zaman yang juga baru. Dalam hal ini, Jepang dilihat sebagai kekuatan pembebas dari penjajahan Barat dan sekaligus menandai kebangkitan Timur, baik dalam kerangka budaya atau peradaban maupun dalam pengertian geopolitik.

Hal ini terefleksikan antara lain dalam sejumlah tulisan di *Soeara MIAI*. Pada edisi nomor 15 (1 Agustus 1943), *Soeara MIAI* menerbitkan satu artikel anonim berjudul “Alim Oelama Menghadapi Pendidikan Ra’jat”. Dalam artikel tersebut, tampak bahwa kehadiran tentara Jepang dilihat sebagai satu babak baru yang ditandai sikap terbuka dan apresiatif oleh pemerintahan Jepang terhadap keberadaan ulama dan Muslim Indonesia secara umum. Pada saat yang sama, artikel tersebut memberi gambaran kontras dengan masa kolonialisme Belanda, di

mana “dengan tipu muslihatnya Belanda, kedudukan alim ulama kita dibuat sedemikian rupa sehingga agama Islam menjadi haknya segolongan orang yang terbatas”.

Lebih jauh lagi, artikel tersebut menilai penjajahan Belanda bertanggungjawab atas munculnya persepsi dan sikap yang memandang rendah, “mencemoohkan”, keberadaan ulama Indonesia. Padahal, lanjut penulis artikel, ulama telah berkontribusi sangat besar bagi upaya menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Saat ada gerakan protest dari masyarakat, ulama menjadi tameng; sementara itu mereka juga kerap menjadi peluru pada saat ketika Belanda perlu meredakan gejolak yang terjadi. Karena itu, mengikuti artikel itu, tidak heran jika di zaman yang lalu (masa kolonial Belanda) “agama Islam itu disegani bahkan dibenci oleh golongan bangsa kita yang terpelet mentah-mentah kepada Belanda itu”. Akibatnya, tidak mengherankan kalau agama Islam “dicemoohkan ‘murid-murid Belanda’, karena sang gurunya sendiri bersikap mencemoohkan juga”.

Atas dasar itu, kehadiran tentara pendudukan Jepang dimaknai secara positif, sebagai satu kekuatan yang telah memberi kesempatan yang terbuka bagi ulama untuk melaksanakan kewajiban mereka mendidik generasi muda Muslim untuk menyambut zaman baru di bawah tentara pendudukan Jepang. Senada dengan itu, tulisan KH. Mas Mansoer di *Djawa Baroe* (edisi Maret 1943) penting dicatat di sini. Dia menulis bahwa tentara Dai-Nippon sudah membebaskan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di Asia dari imperialisme Barat di bawah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, baginya, sudah sepantasnya kalau putra-putri Indonesia menyatakan perasaan terima kasihnya kepada Balatentara Dai Nippon.

Senada dengan artikel di atas, edisi lain *Soeara MIAI* (15 Agustus 1943) juga memuat satu tulisan oleh Salam A. Yahya yang berjudul “Islam di Zaman Belanda”. Sebagaimana bisa diduga, artikel ini juga melihat zaman Belanda sebagai penuh paradoks dan bahkan kebohongan. Selama ini, demikian Salam menulis, pemerintah Belanda mengklaim sebagai pemerintah yang adil, menghormati tiap-tiap agama, dan memberi kesempatan penganutnya berusaha memajukan dan memperbaiki keadaan umatnya masing-masing. “Itu semua dusta belaka”. Pengakuan Belanda tersebut, lanjutnya, hanya dijadikan alat untuk menjalankan tipu muslihatnya guna memecah belah dan melemahkan pendirian umat Islam Indonesia”.

Salam Yahya berargumen bahwa kontrol pemerintah di bidang pendidikan menjadi satu poin penting dari kebijakan Belanda yang berimplikasi serius bagi kondisi masyarakat yang dinilainya hanya berorientasi agama dan berpikiran sempit. Meski tidak secara eksplisit, bisa diasumsikan bahwa penulis dalam hal ini

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

mengacu pada kebijakan Ordonansi Guru pada 1905, dan kemudian diperkuat pada 1925, yang mewajibkan guru-guru agama untuk melaporkan segala aspek terkait proses pembelajaran yang dilakukannya kepada pemerintah Belanda (Suminto 1985: 49). Salam menulis bahwa “sebelum mengajar, mereka harus diperiksa oleh kantor Urusan Agama Islam di bawah pemerintah yang tidak beragama Islam”. Hal inilah, menurut Salam, yang membuat pendidikan Islam hanya terfokus pada masalah agama, yang kemudian melahirkan satu sikap keagamaan yang terbatas dan sempit, bahkan tidak lagi sensitif terhadap kondisi sosial-politik kaum Muslim Indonesia. Dia menggambarkan dunia pendidikan zaman Belanda sebagai “hanya mengenai kepentingan diri sendiri saja, karena mereka guru-guru itu tidak diberikan ijin oleh pemerintah untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama yang luas atau ilmu masyarakat dalam lingkungan umat Islam”.

Oleh karena itu, seraya menggambarkan pemerintah Belanda sebagai “sifat bangsa Yahudi” dan karenanya “Tuhan yang Maha Mengetahui menunjukkan kemurkaannya” dengan dikalahkan tentara pendudukan Jepang, Salam Yahyamenyambut kehadiran tentara Jepang dengan penuh harapan bagi masa depan Muslim sehingga bisa keluar dari keadaan yang sangat tidak menguntungkan dan telah bertanggungjawab membuat mereka (kaum Muslim) bersikap tertutup dan berpikiran sempit. Salam menulis, “alhamdulillah pada masa pancaroba ini sebagian besar umat Islam Indonesia telah sadar dan insaf dari kesalahannya dan mulai insaf pula bahwa kewajiban kita sebagai umat Islam bukan hanya memperbanyak putaran tasbih, tapi kita umat Islam harus berjuang dengan segenap tenaga kita”. Lebih penting lagi, penulis artikel juga sangat menekankan pentingnya kaum Muslim membantu dan bekerjasama dengan pemerintah Jepang yang kini berkuasa di Indonesia.

Respon positif terhadap pendudukan tentara Jepang juga bisa terdapat dalam tulisan Mohd. Isa Anshary (1916-1969), seorang aktifis politik berlatarbelakang organisasi pembaharuan Islam Persis (Persatuan Islam) yang kemudian (pada 1950-an) menjadi politisi di parlemen dari partai Masyumi (Majlis Syuro Muslim Indonesia). Di salah satu edisi *Soeara MIAI* (1 Agustus 1943), Isha Anshary menulis satu artikel berjudul “Timoer Soember Hikmat”, sebagai salah satu kontribusi pemikirannya terkait isu Islam dan Jepang.¹⁴ Sebagaimana tampak dari judulnya, respon positif Isa Anshari terhadap Jepang diketengahkan dalam bingkai peradaban, di mana Jepang mewakili apa yang disebutnya sebagai peradaban Timur, yang diharapkan bisa mengganti peradaban Barat dengan sejumlah persoalannya.

Dalam artikel ini, istilah “sumber hikmat” mengacu pada kondisi dan perjalanan sejarah belahan dunia yang didefinisikan sebagai Timur—meliputi wilayah Mesir dan Persia di bagian barat Asia dan Afrika dan India dan Tiongkok di Asia selatan dan timur. Di wilayah tersebut, ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hikmat dan filsafat, sudah berkembang lama, jauh sebelum ilmu tersebut berkembang di Barat yang berakar di Yunani. Karena itu, menurut Isa Anshary, tokoh filsafat Yunani terkemuka yang terkenal hingga kini (Sokrates, Plato dan Aristoteles) lebih tepat disebut sebagai “yang terkemuka (bukan yang mula-mula) dalam ilmu pengetahuan”. Dunia Timur menjadi asal mula atau akar-akar dari ilmu pengetahuan, yang kemudian di masa modern berkembang di dunia Barat. Hanya saja, setelah sekian lama berada di bawah dominasi politik-ekonomi dan budaya Barat, jejak-jejak ilmu pengetahuan di dunia Timur tersebut relatif tidak banyak diketahui publik.

Berdasarkan data-data terkait perkembangan ilmu pengetahuan di Timur, Isa Anshary menekankan peran sentral yang disandang dunia Timur dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Dia mencatat bahwa Asia Timur adalah “guru dan pelita kepada Eropa Barat”, yang berfungsi memberi dasar-dasar keilmuan yang kemudian tumbuh dan berkembang di Barat. Hal ini adalah “kenyataan riwayat yang tak dapat disangkal”, yang selama ini kerap dilupakan akibat dominasi dan hegemoni Barat di dunia dewasa ini. Usaha melawan lupa inilah yang menjadi titik perhatian Isa Anshary dalam artikelnya ini. Dia mendorong perlunya satu kesadaran baru di kalangan bangsa Indonesia bahwa dunia Timur—di mana Indonesia menjadi bagian darinya—memiliki akar historis yang kuat dalam ilmu pengetahuan. Dia bahkan menulis bahwa “sewaktu umat dan benua Barat masih tenggelam dalam lembah jahat-kegelapan, kebodohan dan kebiadaban, umat dan benua Asia Timur telah naik ke atas menara kemajuan dan peradaban”. Untuk itu, baginya, kebangkitan Timur di bidang ilmu pengetahuan dan peradaban memperoleh pijakan historis-sosiologis sangat kuat.

Lebih dari itu, Isa Anshary menilai bahwa peradaban Timur bisa menjadi alternatif dari peradaban Barat yang tidak mengenal aspek ruhani (spiritual), sehingga melahirkan persoalan dan krisis kemanusiaan. Penekanan berlebihan pada aspek logika, pada dimensi rasional dari kehidupan manusia, telah membuat peradaban Barat gagal melahirkan ilmu pengetahuan yang menghargai nilai-nilai spiritual-keagamaan. Akibatnya, materialisme menjadi kecenderungan umum di kalangan masyarakat Barat, yang kemudian melahirkan sikap pemujaan berlebihan pada aspek duniawi. Dia mencatat di sinilah letak perbedaan budaya dan peradaban (pekerti) Timur, yang digambarkan “tidak mementingkan rupa dan

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

suara”, tidak mementingkan unsur bendawi dan duniawi. Hal itu berbeda secara signifikan dari budaya dan peradaban atau peragai Barat yang disebutnya sebagai “heboh-keedanan dengan bentuk dan kulit yang ada di luar”, yang tidak mengenal atau kekurangan dimensi ruhani.

Dalam konteks ini, naiknya Jepang sebagai pemimpin Asia Timur Raya dilihat sebagai wujud dari kebangkitan peradaban Timur yang berbenturan dengan peradaban Barat. Hal ini tentu sejalan dengan konteks politik saat itu, di mana pendudukan Jepang di negara-negara Asia berarti pengusiran kolonialisme Barat yang telah berkuasa di kawasan tersebut. Dalam kaitan ini, Isa Anshary mengakui perlunya mendukung dan bekerjasama dengan tentara pendudukan Jepang, sebagai pemimpin dari upaya kebangkitan peradaban Timur melawan peradaban Barat. Dia menulis:

“Berabad-abad matahari Timur memancarkan cahayanya yang cerlang cemerlang, cahayanya yang menghidupkan semesta alam ruhani umat manusia. Berabad-abad Timur memberi cahaya kepada Barat, sebagai pelita yang memberikan sinar ke seluruh dunia Barat. Maka berkah hikmah Timur, karena Cahaya Asia menerangi benua Eropa, maka majulah Negara Barat itu dalam medan penghidupan”. Karena itu, “kebangunan Timur sekarang ini, yang perjuangannya menentang Barat dipimpin Dai-Nippon, adalah satu solusi akbar yang akan mengubah letaknya kemanusiaan dan Adab”.

Masih terkait isu peradaban ini, pernyataan seorang tokoh terkemuka Muhammadiyah, yang sekaligus menjadi ketua Badan Penasehat MIAI, KH. Mas Mansoer, penting dicatat di sini. Mengacu pada pemikirannya yang tertuang melalui sebuah wawancara untuk majalah *Djawa Baroe* (3 Februari 1943), dia memandang bahwa dunia Timur tidak hanya tempat subur bagi lahirnya apa yang disebut sebagai peradaban Timur, tapi juga bagi agama-agama terkemuka di dunia. “Baik Islam maupun Buddha atau Keristen semuanya lahir di benua Asia. Di antaranya hanya Keristenlah yang lalu berjenbang ke dunia Barat. Tetapi Islam dan Buddha mengalirkan ke dunia Asia”, demikian KH. Mas Mansoer berujar. Dengan demikian, agama menjadi satu unsur penting dalam kebangkitan Asia Timur, yang saat itu menjadi wacana utama pendudukan Jepang khususnya di Indonesia. Agama memiliki posisi dan makna strategis dalam proses-proses sosial-politik yang dilakukan Jepang.

Dalam kerangka itulah, KH. Mas Mansoer mengetengahkan satu pemikiran yang berusaha menghimpun berbagai agama di Indonesia, dan di Asia

secara umum, ke dalam satu forum dialog (permoesjawaratan) guna menarik mereka (agama-agama) menjadi satu pilar penting bagi usaha Jepang memimpin Asia Timur Raya. Dalam kaitan ini, KH. Mas Mansoer berujar bahwa, seperti halnya Shinto, Buddha dan juga Keristen, “yang menjadi dasar agama Islam ialah mempercayai Tuhan jang satu-satunya itu, dan dengan jalan itu semua manusia beroleh bahagia mendekati Tuhan dengan langsung. Keinginan kami jang sangat, ialah sedapat-dapatnya lekas diadakan permusyawaratan tentang agama di seluruh benua Asia, agar segala agama disesuaikan dengan cita-cita Asia”.

Menggugat Politik Islam Belanda

Tumbuhnya pemikiran Islam sebagaimana dijelaskan di atas tidak lepas dari kebijakan politik kolonial Jepang, yang berbeda secara signifikan dari cara pemerintah penjajahan Belanda menangani isu-isu terkait Islam dan kaum Muslim. Muslim Indonesia saat itu umumnya melihat masa Belanda sebagai tidak ramah terhadap posisi kaum Muslim, dan karenanya telah membuat mereka terpinggirkan dari arena politik Indonesia. Atas dasar itu, Muslim Indonesia menyambut baik kehadiran tentara pendudukan Jepang, menggambarkannya sebagai pembawa harapan dan suasana baru di bumi Indonesia. Harapan lahirnya kebangkitan Indonesia, sebagai bagian dari kebangkitan Asia Timur Raya, menjadi satu isu penting dalam wacana intelektual Islam yang berkembang saat itu.

Perlu ditegaskan bahwa pandangan negatif Muslim Indonesia atas politik Islam Belanda memang sangat beralasan. Sebagaimana akan dijelaskan di bawah, pemerintah kolonial Belanda melihat Islam sebagai satu ancaman serius terhadap sistem dan keteraturan sosial-politik yang hendak dibangun di Hindia Belanda. Gerakan protest dan perlawanan yang berlangsung dalam sejarah Indonesia, yang sebagian dipimpin para ulama (Kartodirdjo 1966; Laffan 2003: 39-43), menjadi satu alasan penting di balik lahirnya ketakutan atas ancaman Islam dan akhirnya dirumuskannya kebijakan Belanda yang sangat tidak bersahabat terhadap Islam dan kaum Muslim. Hal ini terutama terefeksikan dalam pemikiran Snouck Hurgronje, tokoh intelektual di balik kebijakan Islam pemerintah kolonial Belanda. Untuk itu, beberapa poin utama pemikiran Snouck Hurgronje akan dijelaskan berikut ini.

Keterlibatan Snouck dalam Islam dan Muslim Indonesia bermula ketika dia diangkat sebagai seorang sarjana untuk memonitor kehidupan Muslim Indonesia, dan Asia Tenggara, yang bermukim di Mekah, yang kemudian dikenal sebagai “komunitas Jawi”. Setelah tinggal beberapa lama di sana (1884-5), Snouck

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

Hurgronje berusaha memahami Islam dengan cara yang lebih komprehensif, yang mengklarifikasi cara pandang pemerintah Belanda yang secara simplistik menghubungkan Islam dengan fanatisisme dan menganggap Mekah sebagai pusat konspirasi internasional dari gerakan anti-pemerintah “kafir”. Snouck Hurgronje pada beberapa hal tertentu mengafirmasi cara pandang pemerintah di atas, tapi secara spesifik menunjuk kelompok pan-Islamisme dan kaum fanatik lokal dalam bentuk tarekat (Snouck Hurgronje 1931: 290). Dia berargumen bahwa kelompok-kelompok Islam inilah yang sedianya menjadi dasar atau alasan ketakutan Belanda terhadap Islam. Kelompok Muslim ini menerjemahkan Islam ke dalam doktrin dan gerakan politik (Benda 1973: 85).¹⁵

Atas dasar itu, Snouck Hurgronje dengan tegas merekomendasikan kepada pemerintah Belanda untuk mengambil tindakan militer jika perlu, dalam rangka membatasi ruang gerak pertumbuhan Islam politik di Hindia Belanda. Dengan demikian, meski mendukung kebijakan yang netral terhadap kehidupan keagamaan umat Muslim, dia tidak mentoleransi tumbuhnya bentuk Islam politik. Sementara mereka yang bermukim di Mekah justru menunjukkan watak damai dari Islam dan Muslim di Hindia Belanda. Dalam karyaynya berdasarkan penelitian selama di Mekah, Snouck Hurgronje (1931: 291) menulis, “para haji, pengikut tarekat mistis, sarjana agama di Mekkah bukanlah orang-orang yang berbahaya, fanatik, dan seterusnya; namun demikian ketiganya secara bersama-sama merepresentasikan jaringan intelektual Hindia-Timur dengan kota-kota besar Islam, dan dengan begitu memiliki kebenaran lebih dari sekadar pengamatan yang dangkal pihak pemerintahan Eropa”.

Namun demikian, aspek penting lain dari pemikiran Snouck Hurgronje, , adalah fakta bahwa dia merumuskan pemikirannya berangkat dari sebuah gagasan pokok tentang tingkat signifikansi Islam dalam kehidupan penganutnya dan cara yang ditempuh dan dikembangkan mereka dalam sebuah sistem budaya tertentu (Drewes 1957: 4). Dalam konteks ini, dia sampai pada kesimpulan tentang—dan kemudian dielaborasi lebih jauh oleh van Vollenhoven (1928)—peran penting dari apa yang dia istilahkan *adat-recht* (hukum adat). Didefinisikan sebagai “kebiasaan, cara, aturan, tatakrama, dan kesopanan” (Jaspan 1965: 252), adat menjadi elemen yang berperan penting dalam kehidupan Muslim Hindia Belanda, berbeda dan bahkan lebih daripada ajaran hukum Islam, tidak sebagaimana diasumsikan para sarjana pendahulunya di Delft, Keijzer dan van den Berg (Boland dan Farjon 1983: 20). Dengan demikian, Islam dan adat adalah dua entitas yang berbeda dan bahkan kerap kali bertentangan satu sama lain.

Penekanan Snouck Hurgronje pada adat, di samping ajaran Islam, dalam kehidupan umat Muslim bisa dilihat antara lain dari hasil studinya tentang masyarakat Aceh, di mana semangat jihad sangat mengakar. Seperti di Jawa, Snouck Hurgronje menemukan fakta bahwa sedemikian kecil doktrin Islam yang diperoleh orang Aceh selama belajar di Mekkah mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka di tanah air. Hal ini membawa Snouck Hurgronje berkesimpulan tentang supremasi adat atas syariah. Di Aceh, wilayah di mana “doktrin jihad tertanam kuat selama beberapa abad dibanding di daerah lain di Nusantara” (Snouck Hurgronje 1906: II, 351), Islam hanya memiliki pengaruh minimal dalam regulasi masalah-masalah sosial dan politik masyarakat. Baginya, meski ulama dalam “dididik dengan doktrin bahwa adat (hukum adat) dan *hukom* (hukum agama) dapat duduk secara berdampingan dalam sebuah negara Muhammad yang baik”, “tetapi dalam praktiknya sebagian besar kehidupan mereka diatur menurut *adat*, dan hanya sebagian kecil yang diatur oleh *hukom*” (Snouck Hurgronje 1906 [I]: 14). Oleh karena itu, Islam tidak pernah dan tidak akan pernah bisa menacapkan pengaruhnya dalam pengaturan kehidupan umat Muslim.

Berdasarkan pemikiran di atas, Snouck Hurgronje mengarahkan kegiatan intelektualnya dalam kerangka proyek kolonial Belanda terhadap Islam dan Muslim di Hindia Belanda. Dan hal ini kemudian semakin menguat ketika dia diangkat sebagai Penasihat Urusan Masyarakat Pribumi dan Arab untuk pemerintah kolonial Belanda (1889-1906), yang dilembagakan dalam Kantoor voor Inlandsche en Arabische Zaken (Suminto 1985: 99-114). Di samping menjadi satu isu penting dalam studi para orientalis tentang Islam di Asia Tenggara (Roff 1985: 10), hubungan Islam-adat di atas memiliki dampak politik sangat kuat. Proyek kolonial terhadap Islam di Hindia Belanda, di mana Snouck Hurgronje sangat terlibat di dalamnya, didasarkan pada keberadaan dua entitas yang diasumsikan terpisah dalam kehidupan Muslim. Dan Snouck Hurgronje kemudian merekomendasikan kepada pemerintah kolonial untuk menggandeng kelompok adat (kelompok *uleebalang* untuk konteks Aceh), memberi mereka penghargaan sehingga bersedia menerima kekuasaan Belanda. Terhadap ulama, yang berbasis di pesantren dan *dayah* di Aceh, dia berpendirian bahwa peperangan harus dilakukan untuk memukul mundur mereka ke daerah-daerah terpencil di pedalaman (Wertheim 1972: 324). Rekomendasi Snouck Hurgronje memperoleh dukungan yang luas, termasuk dalam penaklukan Aceh di bawah komando van Heutsz.

Berdasarkan keberhasilannya menangani masalah masyarakat Aceh dan Jawa, Snouck Hurgronje menyusun kebijakan yang berusaha menarik elite-elite pribumi, pemuka-pemuka adat, untuk memihak Belanda. Hal ini juga didasarkan

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

pada pendapatnya tentang sifat dasar adat yang bisa berubah (Snouck Hurgronje 1906 [I]: 10), sehingga para pemuka adat dalam jangka panjang akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru yang diperkenalkan oleh Belanda. Dalam kaitan ini, pengalaman penghulu di Jawa dan *uleebalang* di Aceh menjadi fondasi bagi proyek kolonial terhadap Islam yang diusulkan Snouck Hurgronje. Baik *uleebalang* maupun penghulu menikmati kehidupan di bawah pemerintahan Belanda, yang diharapkan akan diikuti masyarakat Hindia Belanda lainnya—tunduk dan setia di bawah pemerintah kolonial Belanda. Snouck Hurgronje membangun visinya tentang Hindia Belanda masa depan sebagai “Indonesia yang terbaratkan”, yang mengambil bentuknya secara tegas dalam kebijakan Politik Etis pada awal abad ke-20.

Snouck Hurgronje juga memusatkan perhatiannya pada upaya emansipasi kaum aristokrasi Hindia Belanda, khususnya elit Muslim semisal penghulu, dari apa yang dia lihat sebagai “sampah abad pertengahan yang telah menyeret Islam dalam kemuduran untuk waktu yang sangat lama” (Snouck Hurgronje 1915: 79). Snouck Hurgronje berharap bahwa Muslim Hindia Belanda mampu beradaptasi dengan ide-ide baru yang berasal dari tradisi liberalisme Barat abad ke-19 (Benda 1972: 85). Karenanya, Snouck Hurgronje menjadikan kelas aristokrat sebagai kelompok pertama yang harus ditarik ke dalam pusaran kolonial. Patronase Snouck Hurgronje terhadap kelompok aristokrasi ini mencerminkan visinya atas koeksistensi Belanda-Hindia yang hidup berdampingan di masa depan. Dalam rangkaian ceramah yang disampaikan pada Akademi Studi Administrasi Hindia Belanda (The Dutch East Indian Academy of Administrative Studies) di Leiden pada 1911, Snouck Hurgronje mempromosikan kebijakan etis “asosiasi”, berharap dari mereka yang telah termansipasikan akan lahir Hindia Belanda sebagai bagian spiritual dari Belanda: “lahirnya sebuah negara Belanda, yang terdiri dari dua negara yang secara geografis berjauhan tetapi secara spiritual satu kesatuan, salah satunya di Eropa Barat dan yang lainnya di Asia Tenggara” (Snouck Hurgronje 1915: 79).

Kebijakan Belanda inilah, yang lebih berpihak kepada kaum aristokrasi, yang menjadi sasaran kritik dan bahkan gugatan tokoh Muslim, teristimewa kaum ulama sebagai pimpinan dari kelompok santri. Mereka melihat kebijakan politik Belanda di atas berimplikasi sangat serius bagi terciptanya satu kondisi sosial di mana kelompok-kelompok masyarakat yang ada hidup dalam perselisihan dan pertentangan satu sama lain. Hal ini antara lain terekspresikan dalam tulisan seorang tokoh NU, Wachid Hasjim. Putera dari tokoh ulama terkemuka KH. Hasjim Asj’ari ini menulis sebuah artikel berjudul berjudul “Melenjapkan Jang Kolot”

dalam *Soera Moeslimin* (1 Juni 1944), berasal dari pidatonya pada pertemuan antara Masjoemi (organisasi Muslim baru menggantikan MIAI, yang akan dibahas nanti) dengan penghulu di Jawa. Dia menulis seperti berikut ini:

“Kita dulu di zaman Belanda hidup berselisih-selisihan antara satu golongan dengan golongan lain. Antara golongan penghulu, golongan ulama, golongan pangreh praja, golongan nasional, dan lain-lainnya. Kita telah mengalami pahitnya akibat yang ditimbulkan perselisihan-perselisihan itu. Kita telah merasakan kerugiannya nusa dan bangsa karena akibatnya diadu-dombakan Belanda dulu itu”.

Bagi kaum ulama, dan kelompok santri secara umum, pemerintah kolonial Belanda jelas telah menempatkan mereka pada posisi yang terpinggirkan dari arus utama dalam wacana sosial-politik dan intelektual yang dibangunnya yang berorientasi Barat modern. Maka bisa dipahami jika kelompok santri tampil sebagai yang terdepan menyuarakan pandangan kritis dan bahkan mengecam kebijakan kolonial Belanda, sebagai “sisa-sisa zaman yang tidak enak itu [yang] harus kita buang jauh-jauh”. Tidak ada satu agenda dari pihak Belanda untuk memberi kesempatan bagi kaum santri menduduki posisi penting di pemerintahan, kecuali mereka yang dinilai sudah teremansipasi dari apa yang disebutnya “sampah abad pertengahan” dan sebaliknya berpegang teguh pada nilai-nilai Barat modern. Wachid Hasjim dalam kaitan ini memandang kebijakan Belanda telah membuat golongan Islam “berada dalam keadaan yang tidak sempurna”, sehingga akibatnya “kebanyakan dari golongan keislaman tidak dapat bekerja guna kemajuan keislaman menurut mestinya”, yakni menjalankan amar makruf dan nahi munkar (menganjurkan perkara kebaikan dan melarang perbuatan salah).

Karena itu, dengan latar belakang seperti telah dijelaskan, kehadiran tentara pendudukan Jepang menjadi satu kekuatan yang mengakhiri kebijakan diskriminatif tersebut. Dan Jepang memang tidak memiliki agenda sistematis seperti halnya Belanda yang berusaha menarik kaum aristokrat ke pusaran kolonial, dengan argumen seperti telah dikemukakan di atas. Tentara pendudukan Jepang bersikap lebih terbuka terhadap berbagai kelompok sosial yang ada saat itu, termasuk kelompok Muslim yang selama masa kolonial Belanda terpinggirkan. Bagi pemerintah Jepang, ulama adalah pemimpin yang memiliki ikatan dan pengaruh yang kuat di tengah massa Muslim. Mereka dipadang sebagai pihak yang memiliki kemampuan memobilisasi massa, dan pada saat yang sama melakukan kontrol, atas kaum Muslim Indonesia (Kurasawa 1988: 380-4). Hal ini sesuai dengan kepentingan Jepang untuk memperoleh sumberdaya manusia guna memenangkan

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

perang Asia Timur Raya. Sikap ini berbeda dari pemerintah Belanda yang memandang massa dalam perspektif hubungan tradisional *patron-client*, di mana mereka dipercaya akan dengan sendirinya mengikuti langkah tuannya untuk sama-sama berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda.

Dengan demikian, selain sangat diapresiasi karena sikapnya yang ramah terhadap Islam, kehadiran tentara Jepang juga dipercaya akan membebaskan Muslim Indonesia dari suasana di bawah pola kebijakan Belanda yang “mengadudomba”. Selain itu, Jepang juga tampak telah mendorong kaum Muslim untuk ikut terlibat dalam “memajukan agama Islam” atas bimbingan pemerintah pendudukan. Hal itulah yang menjadi substansi dari kutipan di bawah ini dari tulisan Wachid Hasjim yang telah disebut di atas:

“Sekarang keadaan telah bertukar. Pemerintah Belanda yang netral agama itu telah berganti dengan pemerintah Balatentara yang berulang-ulang menunjukkan sikapnya menghormati dan menghargai agama Islam. Maka kita sekalian, selain dari harus bergembira dan bersyukur mendengarkan sikap demikian, pun harus berbuat menunjukkan kesanggupan dan kecakapan kita memimpin umat Islam dan memajukan agama Islam”.

“Bersatulah Tuan-tuan seerat-eratnya. Dan bekerjalah di belakang pemerintah, memajukan umat Islam dan keislaman. Mudah-mudahan di dalam perjuangan Asia Timur Raya ini, Allah memberikan taufik dan hidayah hingga kemenangan akhir tercapai di pihak kita, pihak yang menuntut keadilan dan kebenaran”.

Ulama Bergerak: Institusi dan Wacana

Perlu ditegaskan bahwa terbitnya artikel Wachid Hasjim di atas dalam *Soeara Masjoemi* (1 Juni 1944) tidak hanya menandai satu respon intelektual seorang tokoh Muslim, tapi sekaligus kebangkitan kelompok ulama dalam peta sosial-politik Indonesia saat itu. Hal ini bermula pada penghujung tahun 1943, ketika organisasi federasi baru berdiri, Majelis Sjoera Muslimin Indonesia (Masjoemi) pada awal tahun 1944, menggantikan MIAI sebelumnya. Pengakuan pemerintah Jepang terhadap NU dan Muhammadiyah pada September 1943 menjadi dasar hukum dari tidak berlakunya legalitas organisasi federasi MIAI, dan dengan demikian membuat Jepang, khususnya melalui Shūmubu, langsung berhubungan dengan kedua ormas Islam tersebut, tidak melewati MIAI yang kepengurusannya didominasi kalangan tokoh politik PSII. Maka melalui pertemuan

pada 24 Oktober 1943, di bawah komando Wondoamiseno, MIAI secara resmi berakhir (Benda 1985: 183).¹⁶ Segera setelah itu, Masjoemi didirikan dengan tujuan “memperkuat kesatuan semua organisasi Islam” dan “membantu Dai Nippon dalam kepentingan Asia Timur Raya”. Berdirinya organisasi baru ini, yang langsung diberi status hukum, merupakan wujud dari kontrol penuh Jepang atas eksistensi Muslim Indonesia. Keanggotaan Masjoemi hanya terbuka bagi organisasi-organisasi yang diberi status hukum oleh pemerintahan militer, tepatnya Muhammadiyah dan NU (Benda 1985: 185).¹⁷

Lebih dari itu, berdirinya Masjoemi juga sangat terkait dengan keberadaan komunitas Muslim yang disebut kaum santri di bawah pimpinan ulama, dan secara organisasi tergabung dalam NU, yang sejak awal berdirinya MIAI merasa terpinggirkan akibat dominasi politisi PSII. Bahkan, isu NU ini menjadi satu pembahasan penting di awal pembentukan MIAI, di mana NU menolak keras kecenderungan kelompok yang sebelumnya bergabung dalam Sarekat Islam (SI) mengklaim sebagai hasil kontribusinya dalam pertemuan di serangkain Kongres al-Islam pada beberapa tahun sebelumnya (Noer 1988: 263-4). Meski terselesaikan, terbukti ikutnya NU dalam kepengurusan MIAI, tidak bisa dipungkiri bahwa NU, lebih tepatnya kalangan ulama, tetap pada upayanya untuk dikau sebagai ormas Islam yang memiliki akar kuat di tengah massa Muslim Indonesia. Bahkan, sejak berdirinya NU pada 1926, jaringan ulama Indonesia semakin kuat dan terlembagakan, dalam artian bahwa ulama berkembang menjadi golongan sosial yang distinktif. Dan NU memfasilitasi para ulama dengan landasan kelembagaan untuk menciptakan otoritas keagamaan di tengah komunitas Muslim. Karena itu, bisa dipahami jika NU berusaha mengambil kepemimpinan dalam Islam Indonesia.

Periode di akhir 1943 dan awal 1944 menjadi momentum bagi NU, dan kelompok santri secara umum, untuk tampil dalam peta sosial-politik dan keagamaan di Indonesia. Dan hal ini tentu saja terkait dengan dukungan pemerintah tentara Jepang yang menghendaki kontrol efektif atas massa Muslim. Dalam hal ini, dua orang tokoh Muslim, KH. Mas Mansoer dan KH. Wahab Chasbullah (masing-masing dari Muhammadiyah dan NU), memberi kontribusi sangat penting dalam berdirinya Masjoemi, meskipun apa yang dilakukan kedua tokoh ini tidak terekam dalam sumber-sumber yang ada. *Soeara Moeslimin Indonesia*, majalah resmi Masjoemi, tidak memuat informasi detail, kecuali mencatat ucapan terima kasih pihak pemerintah Jepang atas jasa besar kedua tokoh tersebut dalam pembangunan Masjoemi (edisi 1 Desember 1943). Dengan demikian, jelas bahwa berdirinya Masjoemi menjadi bukti dari kebangkitan NU dalam peta keagamaan dan akhirnya pentas politik di Indonesia.

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

Bahkan, jauh sebelum itu, kalangan ulama NU telah memperoleh perlakuan khusus dari pemerintah Jepang. Hal ini terkait dengan program latihan untuk kiyai di Jawa,¹⁸ di mana pihak pemerintah langsung berhubungan dengan kiyai, tanpa berkordinasi dengan MIAI. Pada tahun 1943, sekitar 1.024 orang kiyai dari dua puluh keresidenan di Jakarta dan Jawa Tengah diundang untuk mengikuti latihan di Jakarta di bawah pengawasan Shūmubu (Kurasawa 1988: 415-7). Dua bulan sebelumnya, konferensi diselenggarakan di Hotel Des Indies sebagai langkah pendahuluan antara lain untuk menseleksi instruktur potensial dan juga tepat untuk peserta yang berasal dari komunitas ulama, yang tidak hanya memiliki pengetahuan keislaman memadai, tapi juga pengalaman panjang sebagai pendakwah. Dalam konferensi ini, yang dihadiri pegawai Shūmubu dan tokoh Islam, pemerintah tidak mengambil seorang pun dari MIAI untuk dipertimbangkan terlibat dalam kegiatan latihan (Benda 1985: 167-8). Hal ini merupakan bukti dari kebijakan Jepang yang pada dasarnya lebih memilih berhubungan langsung dengan ulama, yang kemudian terejawantah dalam Masjoemi.

Dengan demikian, NU menjadi bagian utama yang tidak terpisahkan dari Masjoemi. Hal ini bisa dilihat antara lain dalam struktur kepengurusan organisasi ini, di mana NU menempati posisi sentral, di samping beberapa orang dari Muhammadiyah. Sebaliknya tidak ada seorang pun dari PSII. Sebagaimana diketahui, ulama terkemuka NU dan sekaligus pemimpin sangat kharismatik dan dihormati di Indonesia KH. Hasjim Asj'ari diangkat sebagai ketua Masjoemi, dibantu putranya KH. Wahid Hasjim bersama KH. Mas Mansoer sebagai pengurus harian. Meski demikian, kepemimpinan riil organisasi ini ada di tangan Wachid Hasjim, karena ayahnya lebih memilih tinggal di Jombang, Jawa Timur, mengurus pesantren. Dia hanya sesekali saja datang ke Jakarta jika ada acara penting. Sementara KH. Mas Mansoer tidak lama setelah itu, pada 22 Januari 1944, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus harian, meski tetap sebagai anggota Masjoemi (Benda 1985: 185, 302).¹⁹ Kondisi ini memberi jalan lebar kepada Wachid Hasjim untuk tampil sebagai seorang tokoh Muslim terkemuka dalam pentas politik dan sosial-keagamaan di Indonesia.

Begitulah menjelang akhir tahun 1943, sejalan dengan naiknya posisi penting kaum ulama di mata Jepang yang membawa lahirnya Masjoemi, wacana bertema dukungan terhadap Dai Nippon semakin menguat. Bersamaan dengan tumbuhnya aspirasi untuk membentuk suatu Korps Sukarelawan Islam, tidak lama setelah pembentukan Pembela Tanah Air (PETA) pada Oktober 1943, melalui sebuah petisi yang ditandatangani sepuluh orang tokoh Muslim terkemuka,²⁰ berkembang suatu pemikiran yang menjadi argumen Islam secara lebih kuat

mendukung perang Asia Timur Raya oleh tentara Dai Nippon. Sebagaimana dimuat majalah *Djawa Baroe* (edisi 19, 1 Oktober 1943), surat pengajuan petisi tersebut juga mengemukakan satu pemikiran yang tidak hanya memandang Barat, Inggris dan Amerika, sebagai berseberangan dengan Islam, tapi lebih dari itu memaknai peperangan terhadap negara Barat tersebut, yang dilakukan Jepang, dalam kerangka agama. Berikut adalah kutipan dari majalah *Djawa Baroe* terkait isu tersebut:

“pandangan hidup Amerika dan Inggris sekali-kali tidak cocok dengan hukum agama Islam. Riwayat Islam di zaman akhir ini semata-mata riwayat perselisihan dengan Inggris yang cerdik kancil itu. Kaum Muslimin seantero dunia atas nama persatuan harus mengadakan ‘perjalanan salib’ buat memerangi Amerika dan Inggris yang menjadi musuh agama”.

Petisi tersebut memang tidak segera direspon. Kaum ulama dan komunitas santri secara umum harus menunggu hampir setahun ketika akhirnya, pada Desember 1944, pemerintah pendudukan Jepang mengabulkan permohonan untuk membentuk tentara sukarelawan melalui Hizbullah (tentara Allah). Namun demikian, pandangan di atas terkait ikatan agama antara Islam dan Dai Nippon tampak semakin mendapat dukungan luas. Tidak seperti sebelumnya yang hanya terbatas pada dukungan moral, Muslim Indonesia sejak awal 1944 secara tegas menyatakan bahwa peperangan Jepang melawan Barat sebagai “perang sabil melawan kaum kafir”. Hal ini terefleksikan misalnya dalam pernyataan seorang perwira senior Indonesia PETA dan juga ahli hukum serta pimpinan Muhammadiyah. Menurutnya, mereka yang gugur dalam perang tersebut adalah mati syahid, “yang setelah hidup ini akan selama-lamanya hidup di sisi Allah yang diberkati dengan kemurahan-Nya” (Benda 1985: 175).

Dengan nada yang sama, pemikiran di atas juga dikemukakan KH. Mas Mansoer. Dalam tulisannya di majalah *Asia Raya* (1 Januari 1944), Mas Mansoer dengan sangat tegas menyatakan tentang besarnya dimensi Islam dalam perang Asia Timur Raya oleh Jepang. Hal ini jelas bisa dilihat dari judul tulisannya yang memang sedikit provokatif, “Perang Asia Timoer Raja, perang Sabilillah!”. Dalam hal ini, Mas Mansoer berpendapat bahwa Islam menjadi bagian inheren dari perang Jepang, dan karenanya ikut terlibat membela Jepang dalam perang tersebut merupakan bagian dari kewajiban agama. Bagi Mas Mansoer, watak imperialis yang dinisbahkan kepada negara-negara Barat, tepatnya Inggris dan Amerika, tampak menjadi satu alasan penting di balik pelabelan ‘sabilillah’ dalam perang Asia Timu

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

Raya. Karena itu, dia mendorong Muslim Indonesia untuk mengangkat senjata membantu tentara Dai Nippon.

Demikianlah, dengan semua perkembangan di atas, hubungan ulama dan Jepang sangat dekat. Pemerintah Dai Nippon memberikan sepenuhnya kepada Masjoemi, tempat bergabungnya ulama dan komunitas santri secara umum, sebagai satu kekuatan politik sangat besar yang jelas dibutuhkan pemerintah pendudukan. Maka organisasi ini kemudian diberi tempat istimewa dalam administrasi pusat, Djawa Hokokai, dengan mengangkat ketuanya KH. Hasjim Asj'ari sebagai penasehat utama Indonesia untuk Gunseikan, bersama dengan Ir. Sukarno. Sementara Mas Mansoer dan Mohammad Hatta ditunjuk bertanggungjawab untuk masalah dalam negeri umum di pusat (Benda 1985: 191). Hubungan erat ini bahkan tetap bertahan ketika terjadi satu gerakan protest massa petani di bawah pimpinan seorang kiyai lokal di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 18 Pebruari 1944. Kiyai Zainal Mustafa, yang juga seorang anggota NU di daerah tersebut, memimpin massa melawan tentara Jepang menyusul tindakan penguasa militer yang meminta sumbangan beras kepada petani secara paksa dan bahkan dengan cara membabi buta. Meski berskala lokal, peristiwa tersebut sangat penting dan memperoleh perhatian pemerintah tentara pusat Jepang (Kurasawa 1988: 623-645). Namun, pemerintah percaya bahwa kasus tersebut sama sekali tidak mewakili gambaran ulama secara umum, dan sebaliknya menyatakan Kiyai Zainal Mustafa sebagai "orang gila".²¹ Maka, tidak lama setelah itu, selama Maret-April juru bicara Masjoemi dan para pejabat Jepang mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin Islam setempat dan masyarakat di seluruh Jawa (Benda 1985: 196).

Keberhasilan kaum ulama menjalin hubungan dengan pemerintah Jepang mencapai satu titik perkembangan yang sangat bermakna ketika kantor baru dibuka pemerintah pada April 1944, Shūmuka (kantor agama daerah), yang berada di tingkat keresidenan dengan mengangkat ulama setempat sebagai pimpinan.²² Dengan Shūmuka ini, pemerintah Jepang meluncurkan satu proyek kolonial yang sangat berpengaruh dalam politisasi ulama, di mana mereka terlibat dalam urusan agama dan akhirnya politik pemerintahan. Bagi Jepang, hal ini merupakan satu upaya besar untuk melakukan penyesuaian dalam penanganan isu-isu keislaman, setelah menghadapi pemberontakan Islam pedesaan di Jawa Barat. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan Jepang mengenai urusan dan administrasi keislaman tidak lagi di tangan penghulu yang langsung di bawah kontrol buati, tapi dipercayakan kepada ulama setempat (Lihat Kurasawa 1988: 400-410). Proses ini semakin meningkat saat Shūmuka terhubung dengan cabang-cabang Masjoemi,

dan karenanya memberikan fasilitas kepada para ulama untuk lebih terlibat di pemerintahan setempat.

Pembukaan kantor baru ini tentu saja berimplikasi serius dalam pola hubungan kuasa di tingkat lokal. Penghulu, yang sudah lama menjadi pejabat agama dan bersahabat dekat dengan lingkaran priyayi (Hisyam 2001), harus rela menerima kehadiran pejabat lain dari kalangan ulama. Perasaan tidak nyaman, bahkan terancam, dirasakan bupati dan priyayi. Selain gajinya dikurangi secara tajam, terutama jika dianding masa kolonial Belanda, mereka kini terpaksa harus bermitra dengan elit baru buatan pemerintah Jepang, mulai dari Dewan Penasehat Pusat dan Lokal, perwira-perwira PETA, dan kemudian pemimpin kantor baru Shūmuka (Benda 1985: 199). Pejabat di kantor yang disebut terakhir ini berasal dari kelompok sosial yang sebelumnya—akibat pegasaruh kebijakan politik Islam Belanda—dilihat hanya berada di lingkungan tradisional pedesaan, jauh dari dunia priyayi. Karena itu, bisa dipahami jika bupati dan priyayi ini sempat tidak mengikuti instruksi pemerintah Jepang. Mereka lebih suka mempertahankan cara-cara lama yang justru menjadi sasaran program penyesuaian Jepang.²³

Dengan semua perkembangan di atas, maka kaum ulama menjadi barisan terdepan yang secara formal menangani isu-isu keagamaan di Indonesia. Masjoemi berfungsi sebagai organisasi di mana rekrutmen dan mobilisasi berlangsung, yang kemudian memfasilitasi ulama (kiyai dan guru agama) untuk duduk dalam keanggotaan Shūmubu, dalam pimpinan Shūmuka, dan juga PETA serta Hizbullah. Gerakan ini telah menjadikan kaum ulama berpengaruh sangat besar tidak saja di kalangan Muslim, tapi juga kaum aristokrasi, termasuk para penghulu, yang sebelumnya menjadi pemegang monopoli wacana politik dan agama. Menarik membahas sekilas pertemuan Masjoemi, diwakili Wahid Hasjim, dengan penghulu seluruh Jawa pada 25 Mei 1944. Dirancang oleh pemerintah sebagai forum silaturahmi menyusul pengambil-alihan penanganan perkara agama oleh kaum ulama melalui Shūmuka, pertemuan tersebut telah memberi ruang bagi Wahid Hasjim untuk tampil dengan posisi demikian penting di depan pejabat agama—suatu kejadian “yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia” (Benda 1985: 201)—, seraya meminta penghulu untuk sadar dengan perubahan zaman yang berlangsung dan sama-sama mendukung pemerintah pendudukan Jepang.²⁴

Dalam kondisi demikian, maka kaum ulama telah menjadi satu kekuatan dominan dalam menangani masalah-masalah keagamaan, mulai dari tingkat daerah melalui Shūmuka hingga ke tingkat pusat di Shūmubu. Kontak dan komunikasi di antara mereka, ulama-pejabat agama, yang dilakukan secara reguler, telah membuat keberadaan dan gerakan mereka sedemikian penting dalam peta

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

politik Indonesia saat itu. Dalam kaitan inilah pemerintah Jepang melakukan suatu reorganisasi Kantor Urusan Agama, baik melalui struktur maupun personalia, dalam rangka "memudahkan dan meningkatkan aktivitas-aktivitasnya sehingga semua masalah yang terkait dengan agama, yang menjadi semakin penting dalam masyarakat Indonesia, bisa dipercepat dan diatur dengan mudah" (Benda 1985: 201).

Sangat mungkin terkait dengan perkembangan di atas Hoesain Djajadiningrat pada bulan Agustus 1944 menyatakan mundur dari jabatannya sebagai ketua Shūmubu, sebagai respon atas reorganisasi yang dilakukan pemerintah yang memberi tempat lebih besar kepada pemimpin Islam Indonesia untuk mengurus dan mengawasi masalah keislaman. Dia diganti oleh seorang ulama terkemuka Hasjim Asj'ari, yang sekaligus sebagai Ketua Masjoemi. Dan, seperti halnya di Masjoemi, Hasjim Asj'ari menyerahkan kepemimpinan harian kepada putranya Wahid Hasjim dan Abdul Kahar Muzakkir dari Muhammadiyah. Mereka berdua duduk sebagai wakil ketua Shūmubu. Diangkatnya Hasjim Asj'ari, *rais 'am* NU, menjadi ketua Shūmubu menjadi satu tahap sangat berarti dalam suatu proses di mana ulama bergerak di tengah suasana sosial-politik yang diciptakan Jepang yang menjadikan Islam dan tokoh Muslim (ulama) sebagai satu pertimbangan penting dalam kebijakan politiknya. Shūmubu dalam beberapa hal tertentu adalah kelanjutan dari *Kantoor voor Inlandsche Zaken* Belanda di abad ke-19, tempat kebijakan kolonial mengenai persoalan-persoalan keislaman dan bumiputera dirumuskan (Kurasawa 1988: 395-40; Yasuko 1997: 75-6; Benda 1985: 201-2; Suminto 1985).

Islam untuk Negara-Bangsa Indonesia

Tidak bisa diingkari bahwa Shūmubu dan Masjoemi didirikan untuk tujuan pendudukan Jepang, tepatnya untuk memperoleh dukungan politik dari tokoh-tokoh Muslim. Namun, dua institusi tersebut jelas mempunyai peran strategis dalam meningkatkan peran politik ulama. Baik Shūmubu maupun Masjoemi memberi ulama kesempatan untuk memasuki arena politik Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah ulama muncul sebagai tokoh politik, selain memegang peranan tradisional mereka di pesantren. Dengan kantor dan lembaga di atas, pemerintah kolonial Jepang menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kemunculan ulama di panggung politik. Ini berbeda dengan kondisi di masa penjajahan Belanda, di mana ulama dikucilkan dari kegiatan-kegiatan politik. Hasilnya, sejak pendudukan Jepang Islam Indonesia menyaksikan naiknya ulama ke jantung kehidupan politik.

Dan salah satu ulama dengan karier politik terpenting itu adalah Wahid Hasjim (1914-1953), putra Hasjim Asj'ari.

Lahir di Jombang, Jawa Timur, Wahid Hasjim menempuh pendidikan pertama kali di Pesantren Tebuireng milik ayahnya, masih di Jombang. Kemudian, di usia 18 tahun, dia melanjutkan studinya di Mekkah (1932-1933), mengikuti pengalaman belajar ayahnya dan ulama lain umumnya pada masa itu (Aboebakar 2011 [1957]: 165-8). Karier intelektual dan politik Wahid Hasjim dimulai kembalinya ia ke Jombang tahun 1933. Selain memodernkan Pesantren Tebuireng milik ayahnya,²⁵ Wahid Hasjim menunjukkan ketertarikannya pada politik. Tidak lama setelah bergabung dengan NU tahun 1938, ia kemudian ditetapkan pada November 1943 sebagai salah satu wakil-ketua dan sekaligus bertindak sebagai pengurus harian Masjoemi yang berada di bawah kepemimpinan ayahnya. Setahun kemudian, sebagaimana telah ditunjukkan di atas, ia pada Juli 1944 dipercaya menempati jabatan sebagai salah satu wakil ketua Shūmubu, juga di bawah Hasjim Asj'ari yang diangkat sebagai ketua.

Dengan jabatan-jabatan tersebut, Wahid Hasjim memegang peranan penting dalam urusan sosial-politik Islam di Hindia-Belanda ketika itu. Benda (1985: 227) menyebutnya wakil Islam Indonesia yang boleh jadi paling menonjol di akhir masa pendudukan Jepang. Sebagai putra pendiri dan pemimpin tertinggi NU, Wahid Hasjim memiliki jaringan kuat dengan ulama Jawa. Dan jaringan ini semakin luas seiring naiknya dia ke tampuk kepemimpinan Masjoemi dan Shūmubu. Dia berada dalam posisi yang strategis, baik di bidang sosial-keagamaan maupun di lingkungan politik, untuk menghubungkan kepentingan pendudukan Jepang dan aspirasi sosial-politik dan keagamaan Muslim. Perlu disebut di sini adalah Shūmuka (kantor agama daerah), yang memfasilitasi Wahid Hasjim dengan jaringan luas kepada kiyai-kiyai yang sekaligus menjadi pejabat agama di daerah-daerah di Jawa. Sementara untuk segmen masyarakat yang lain, Wahid Hasjim juga memiliki jaringan melalui Hizbullah, yang menjadi sayap sukarelawan Masjoemi. Oleh karena itu, Wahid Hasjim didukung massa Muslim yang sangat luas dan berpengaruh besar secara politik di Indonesia (Yasuko 1997: 89-92).

Dalam kaitan ini, penting dicatat bahwa Wahid Hasjim mewakili suatu gambaran umum kaum ulama saat itu yang bergerak dalam suasana baru di bawah pendudukan tentara Jepang. Wahid Hasjim sangat menyadari hal itu. Dia berpandangan bahwa Jepang memegang peranan sentral dalam membuka ruang lebar bagi tokoh ulama sekaliber Wahid Hasjim memiliki karir demikian mengesankan terutama di dunia politik. Maka, sebagaimana halnya ulama lain yang tergabung dalam Masjoemi, Wahid Hasjim juga menekankan perlunya bekerja

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

bersama-sama dengan pemerintah Jepang untuk kemajuan dan kebesaran Muslim Indonesia. Hal ini dikatakan dalam tulisannya "Tjatjat Kita" dalam *Djawa Baroe* (edisi 16, 15 Agustus 1944), yang ditulis tidak lama setelah dirinya, bersama-sama dan mendampingi ayahnya Hasjim Asj'ari, diangkat dalam pimpinan puncak Shūmubu. Wahid Hasjim menulis:

"Dalam pada itu saya percaya bahwa atas dorongan masa dan keadaan, di dalam suasana yang gilang gemilang di bawah pemerintahan Balatentara Dai Nippon selama dua tahun lebih sedikit ini, kita sekalian, yang dipimpin (rakyat) dan yang memimpin (penganjur-penganjur dan pemuka-pemuka) telah bersatu erat, ibarat benteng baja yang kokoh dan tahan uji. Apalagi jika kita pergunakan cara ingat-mengingat, kasih-mengasihani dan tolong-menolong".

Lebih jauh Wahid Hasjim mencatat pentingnya membangun jiwa masyarakat Indonesia, yang disebutnya sebagai "pokok yang terutama bagi kemajuan suatu bangsa". Dan hal itulah yang menjadi tantangan bangsa Indonesia, yang sudah lama akibat penjajahan Belanda telah mengalami kerusakan jiwa dengan tumbuhnya sikap yang "selalu menggantungkan nasib kita kepada orang lain". Padahal, dia melanjutkan, "kita mestinya wajib berusaha sendiri, dengan tenaga sendiri, untuk perbaikan nasib kita sendiri". Di sini, Wachid Hasjim menekankan satu dimensi penting lain dalam hubungan Islam dan Dai Nippon, yang tidak ditemukan dalam tulisan ulama lain yang telah dibahas sebelumnya, yakni apa yang disebutnya sebagai "cita-cita yang luhur untuk memadam penghidupan" yang terejawantah dalam semangat berjuang dan bahkan berkorban untuk Indonesia.²⁶ Dengan cita-cita inilah masyarakat Indonesia memiliki jiwa yang kuat untuk bekerja, bersama-sama pemerintah Jepang, untuk menuju ke arah perbaikan dan "kemakmuran bersama di Asia Timur Raya". Wahid Hasjim menulis:

"Sungguh menggembirakan sekali, bahwa ajaran-ajaran pahlawan Samurai yang diberikan dengan bukti yang nyata itu, termakan dan mengenai jiwa kita. Maka dalam masa pemerintahan Balatentara Dai Nippon di Jawa yang gilang-gemilang ini, dalam masa yang singkat saja (2 tahun lebih sedikit), keinginan akan menjadi pahlawan tanah air telah tumbuh dalam hati kita sekalian".

Dengan demikian, pendudukan Jepang merupakan titik balik dalam sejarah ulama. Dengan kebijakan Jepang mengenai Islam di atas, ulama mulai terlibat di jantung politik Hindia-Belanda. Dan lembaga-lembaga keagamaan yang

telah disebut di sepanjang pembahasan artikel ini menjadi semacam fondasi kelembagaan yang memfasilitasi ulama untuk diakui tidak hanya memiliki pengaruh keagamaan tapi juga politik. Karier politik Hasjim As'ari maupun Wahid Hasjim membantu menjelaskan bagaimana ulama muncul sedemikian rupa menjadi salah satu kelompok elit Indonesia, yang mempunyai otoritas agama dan juga terlibat dalam perpolitikan riil di Indonesia. Lagi-lagi karier Wahid Hasjim penting untuk dijelaskan lebih lanjut. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dia dipercaya menjadi anggota komite yang dirancang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tidak lama setelah kemerdekaan, Wahid Hasjim ditetapkan sebagai Menteri Agama (1949-1953) di Republik Indonesia yang baru lahir (Umam 1998: 83-113; Aboebakar 2011 [1957]: 681-771).

Dalam kapasitasnya sebagai tokoh Muslim terkemuka di Indonesia, Wahid Hasyim telah terlibat dalam corak pemikiran dan gerakan yang melampaui kepentingan kelompok keagamaan. Hubungan dan pergaulannya dengan berbagai elit dengan latarbelakang dan ideologi yang berbeda-beda, membuat Wahid Hasjim hadir dengan pemikiran yang menekankan kepentingan yang lebih luas dan berdimensi kebangsaan di atas kepentingan agama. Hal ini bisa dibaca dari tulisannya yang berjudul "Agama dalam Indonesia Merdeka", dimuat dalam *Indonesia Merdeka* (25 Mei 1945) bahwa:

"... menurut fikir kita yang penting dimajukan bukanlah pertanyaan: Di mana tempat agama di dalam negara itu nanti? Akan tetapi yang penting dimajukan adalah peranyaan: Bagaimanakah caranya menempatkan Agama di Indonesia Merdeka itu? Saya ulangi lagi: Persatuan bangsa yang kokoh teguh sangat perlu di waktu ini".

Dari kutipan di atas, jelas watak demokratis dan nasionalis menjadi ciri utama pemikiran Wahid Hasjim. Dia berusaha menempatkan Islam pada posisi sangat penting, tapi juga harus mempertimbangkan skala prioritas saat itu di mana Indonesia butuh persatuan. Karena itu, sangat beralasan ketika dia sama sekali tidak keberatan dengan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945, yakni "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Sebagaimana diketahui, Piagam Jakarta adalah hasil dari serangkaian rapat BPUPKI (28 Mei sampai 1 Juni dan 10-17 Juli 1945) dan kemudian berlanjut dengan Panitia Sembilan. Dan Wahid Hasjim terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan tersebut yang kemudian berhasil membuat rumusan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang dikenal sebagai Piagam Jakarta,

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

untuk negara-bangsa Indonesia yang diproklamkan merdeka pada 17 Agustus 1945.

Pemikiran Wahid Hasjim dalam tulisannya yang dikutip di atas memperoleh sambutan luas di tengah kaum Muslim, yang memang tengah mencari solusi terbaik dalam menghadapi keragaman bangsa Indonesia, secara sosial-budaya, politik dan agama. Tulisan Kiyai Mas Isman "Islam dan Kemerdekaan Indonesia" (*Djawa Baroe* edisi 12, 15 Juni 1945) memberi kita satu bukti penting di mana tulisan dan pemikiran Wahid Hasjim diakui sebagai acuan utama untuk membahas isu terkait ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an. Apa yang ditulis Wahid Hasjim di atas tentang kedudukan Islam di negara Indonesia merupakan jawaban atas pertanyaan fundamental yang dirumuskan sebagai berikut: "Kita ini umat Islam bangsa Indonesia, atau juga tepat: Kita ini bangsa Indonesia umat Islam". Dia menulis:

"Selaras dengan sari jawab ahli K.A. Wahid Hasjim itu, kita berpendapat bahwa di dalam negara Indonesia merdeka nanti, tempat agama Islam itu ialah di tengah dengan cara yang tepat menurut ajaran agama Islam itu sendiri: *la ikraha fi al-din*, tidak ada paksaan dalam agama".

"Maka pun tidak perlulah hal itu dikhawatirkan (posisi agama di Indonesia merdeka, penulis) sekarang, sebab yang paling perlu sekarang ialah ... kerja bersama serapat-rapatnya mencapai kemenangan akhir dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia".

Begitu pula pemikiran tentang persatuan Indonesia juga mengemuka dalam tulisan seorang tokoh Muslim A.R. Baswedan, "Persatoean Jang Boelat" (*Djawa Baroe* edisi 11, 1 Juni 1945). Dia mencatat bahwa "negara Indonesia merdeka yang sekarang sedang kita usahakan bersama pembangunannya, adalah suatu negara yang akan memperlindungi seluruh penduduk negeri ini". Ini adalah premis dasar dari pembangunan Indonesia, di mana semua golongan masyarakat yang ada di bumi Indonesia harus mendapat posisi dan kedudukan yang setara. Karena itu, dia memberi anak judul dari tulisannya yang disebut di atas dengan kata-kata "adalah salah satu dasar pembangunan negara baru". Dia menulis:

"Negara Indonesia baru tidak dapat dibangun dengan teguh dan sentosa, apabila hanya segolongan, atau beberapa golongan, atau golongan yang terbesar belaka yang akan hidup aman di dalamnya. ... Negara Indonesia merdeka ialah negara yang mewujudkan persatuan bulat seluruh penduduknya".

Catatan Penutup

Karier politik Wahid Hasjim adalah satu contoh dari keterlibatan ulama dalam dunia politik, yang terus berlanjut dalam sejarah Indonesia. Masjoemi, yang pada 1945 menjadi partai politik, memberi ruang yang luas kepada para ulama untuk meniti karir seperti Wahid Hasjim. Bahkan, para ulama NU kemudian mendirikan partai politik sendiri pada 1952, menyusul keluarnya NU dari Masjoemi. Ini berlangsung sampai permulaan masa Orde Baru dalam pemerintahan Indonesia, di mana pada tahun 1970-an NU dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai politik baru yang dibentuk atas dasar ketentuan pemerintah untuk menggabungkan seluruh partai politik Islam ketika itu. Dengan perkembangan tersebut, perubahan peran ulama (kiyai) sebagaimana diamati Geertz (1960) di tahun 1950-an bisa dilacak kembali ke masa pendudukan Jepang. Di samping menyebarkan Islam, ulama juga memainkan peranannya di dalam dunia politik.

Dengan demikian, masa pendudukan Jepang merupakan satu periode penting dalam sejarah Islam Indonesia, yang menyaksikan tampilnya ulama dalam pentas politik Indonesia—suatu keadaan yang tidak ditemukan pada masa kolonial Belanda. Dengan pola kebijakan yang menghormati Islam, pendudukan Jepang memberi ruang lebar bagi para ulama untuk mengalami satu proses pergerakan menuju jantung dari dinamika sosial-politik dan keagamaan di Indonesia. Memang, kondisi ini kerap ditafsirkan sebagai kemenangan Jepang yang menentukan secara dominan perkembangan Islam Indonesia, sebagaimana bisa ditemukan dalam karya klasik Benda (1985) yang telah dikutip dalam pembahasan ini. Namun, penulis berargumen bahwa elit Muslim Indonesia justru memanfaatkan kesempatan yang diberikan Jepang untuk bergerak, baik secara intelektual maupun sosial-politik.

Hal di atas bisa dilihat dari corak pemikiran yang berkembang selama masa pendudukan Jepang, yang menunjukkan bukti kuat dari usaha kaum ulama untuk membangun aliansi dan kerjasama dengan pemerintah Jepang, seraya membangun konsolidasi kekuatan untuk bisa dipertimbangkan—dan meman demikian—dalam perumusan kebijakan politik Islam pemerintah Dai Nippon. Karena itu, selain dukungan dan kesediaan bekerjasama dengan Jepang, kita juga menyaksikan berdirinya lembaga yang berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial-politik kaum ulama, yakni Masjoemi, Shūmubu dan Shūmuka. Juga perlu disebutkan dalam hal ini adalah pelatihan kiyai, sehingga mereka diharapkan dapat menyuarkan harapan dan maksud Jepang kepada masyarakat setempat.

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

Di atas semua itu, hal terpenting untuk dicatat adalah bahwa pendudukan Jepang telah memfasilitasi kaum ulama, dan pemimpin Muslim secara umum, untuk terlibat dalam proses-proses politik dalam rangka pembentukan negara-bangsa Indonesia bersama dengan kelompok elit lain, yang kerap disebut sebagai kelompok nasionalis. Hal ini membuat aspirasi politik Islam disuarakan dalam koridor formal-konstitusional. Dan hal itu terus berkembang hingga kini, di mana umat Muslim menjadi satu kekuatan penting dalam proses konsolidasi demokrasi di negara kesatuan Indonesia.

Catatan Akhir

¹ *Djawa Baroe*, 3, Februari 1943

² Karya Harry J. Benda berjudul *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945* (1958). Edisi Indonesianya *Bulan Sabit dan Matahari Tebit: Islam Indonesia Masa Masa Pendudukan Jepang* (1985).

³ Aiko Kurasawa, "Mobilization and Control: A Study of Social Change in Rural Java, 1942-1945" (1988). Karya tersebut adalah dissertasinya di Cornell University. Edisi Indonesianya *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 142-1945* (1993).

⁴ Lihat antara lain Kobayashi Yasuko (1997: 65-98). Untuk pembahasan tentang kajian Islam oleh sarjana Belanda bisa dibaca dalam Boland dan Farjon (1983).

⁵ Spiegel 2005: 20

⁶ Noer 1988: 262.

⁷ Yasuko 1997: 79; Benda 1985: 144.

⁸ Delegasi MIAI adalah H. Abdul Kahar Muzakkir (kepala sekolah Muhammadiyah), Ahmad Kasmat (PII), H. Mahfud Siddiq (NU), Farid Ma'rif (Muhammadiyah dan PII), dan seorang bernama Almudi. Lihat Benda (1985: 271, not. 6).

⁹ Yasuko. 1997: 74

¹⁰ Beberapa alasan dikemukakan Muhammadiyah. Pertama, mereka mempertimbangkan aspirasi Cina Muslim di Indonesia, karena persoalan hubungan Jepang-Cina belum terselesaikan. Kedua, Muhammadiyah tidak bisa melihat undangan Jepang memiliki motif sebagai propaganda pemerintah. Dan ketiga, jika pun tidak ada ambisi apa-apa, Muhammadiyah tidak punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan pengiriman delegasi ke Jepang. Lihat Yasuko (1997: 74).

¹¹ Majalah *Djawa Baroe* mulai terbit pada Januari 1943, berbarengan dengan *Soeara MIAI*. Terbit tengah bulanan oleh Djawa Shimbun, *Djawa Baroe* berada di bawah redaktur orang Jepang. Isinya dalam bahasa Indonesia dan Jepang. Majalah ini terbit hingga Agustus 1945.

¹² Pada edisi perdana *Djawa Baroe* (1 Januari 1943) dinyatakan bahwa majalah ini diarahkan sebagai "alat perantara sebaik-baiknya antara bangsa Indonesia dan Nippon", "meroepakan seatoe lapang pertemoean bangsa", dan untuk "dapat meningkatkan rasa persaudaraan antara bangsa Nippon dan Indonesia".

¹³ Poin-poin yang ditekankan *Soeara MIAI* adalah: memajukan agama, menciptakan kedamaian dan kemakmurak rakyat, memperbaiki semua hal atau urusan yang sangat penting bagi kehidupan kaum Muslim (perkawinan, waris, masjid, waqaf, dakwah, dan lain sebagainya, Lihat pula Yasuko (1997: 82).

¹⁴ Berdasarkan bacaan atas majalah *Soeara MIAI*, ada sejumlah artikel yang ditulis atas nama Mohd. Isa Anshary, yang sebagian besar terkait dengan isu Islam dan kondisi politik Indonesia saat itu di bawah tentara pendudukan Jepang. Dia memang dikenal seorang penulis produktif, di samping sebagai seorang politisi Muslim. Hanya saja, untuk kepentingan studi ini, pembahasan hanya difokuskan pada artikelnya yang telah disebut di atas. Artikel lain akan diacu sejauh terkait dengan tema pembahasan.

¹⁵ Untuk argumen Snouck Hurgronje mengenai isu ini, lihat karyanya (1910: I, 364-80; 1913; IV, 361-91), Bosquet dan Schacht (1957), juga Van Dijk (2002: 55-64).

¹⁶ Dalam *Soeara Moeslimin Indonesia* (1 Desember 1943) diberitakan bahwa Wondoamiseno selaku ketua MIAI dalam rapat pleno tersebut sengaja memutuskan pembubaran MIAI, sebagai satu langkah yang diambil untuk suatu pemikiran yang disebutnya sebagai "keyakinan yang teguh untuk memperoleh kemajuan yang pesat".

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

¹⁷ Menurut anggaran dasarnya, Masjoemi “bermaksud hendak mengemudikan dan merapatkan perhubungan antara perkumpulan-perkumpulan agama Islam di Jawa, serta memimpin dan memelihara pekerjaan perkumpulan-perkumpulan itu untuk mempertinggi peradaban agar supaya segenap umat Islam membantu dan menyumbangkan tenaganya untuk membentuk lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon”. Lihat majalah resmi organisasi ini, *Soeara Moeslimin Indonesia* (1 Desember 1943).

Keanggotaan Masjoemi bisa juga dari kalangan kiyai secara pribadi, sejauh mendapat persetujuan dari Shūmubu, di samping sebagai “pemimpin agama yang berwatak baik dan berpengetahuan tinggi”. Lihat KH. Mas Mansoer, “Mendelaskan Kedoedoekan Masjoemi”, dalam *Soeara Moeslimin Indonesia* (1 Desember 1943); juga Benda (1985: 185-6).

¹⁸ Program ini berlangsung selama dua tahun, dengan sekitar tujuh belas kali training yang diselenggarakan, dan kurang lebih seribu orang sudah mengikuti training ini. Kiyai-kiyai NU mendominasi peserta, karena hubungan erat NU dengan Masjoemi, yang kemudian menjadi barisan yang mengisi jabatan Shūmuka dan juga Hizbullah, yang akan dibahas nanti. Lihat van Nieuwenhuijze (1958: 127-34), Yasuko (1997: 84) dan Kurasawa (1988: 410-446) untuk pembahasan komprehensif tentang latihan kiyai ini.

¹⁹ Selain tokoh-tokoh Muslim yang telah disebut, juga perlu dicatat ketua NU dan Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab Chasbullah, sebagai dewan penasehat Masjoemi, dengan anggota sebagai berikut: KH. Muchtar (NU), Zainal Arifin (NU), KH. M. Sadie (NU), Farid Ma'ruf (M), Abdull Mukhti (M), T. Kartosudharmo (M), K.M. Hasjim (M), dan Nachrawi-Thahir (NU). Lihat *Soeara Moeslimin Indonesia* (1 Desember 1943), juga Benda (1985: 302).

²⁰ Petisi pembentukan Korps Sukarelawan Islam dikemukakan seorang pemimpin Muhammadiyah dan tokoh Islam di Yogyakarta, Wali al-Fatah, yang pernah menghadiri Kongres Islam Duniai di Jepang pada 1938. Beberapa tokoh yang namanya tercantum sebagai penandatanganan petisi adalah: KH. Mas Mansoer, Mr. R. Muhammad Adnan (ketua Mahkamah Urusan Islam), Dr. Amrullah, KH. Muchtar, dan empat orang kiyai. Lihat Benda (1985: 293), lihat pula *Djawa Baroe* (edisi 19, 1 Oktober 1943).

²¹ Berdasarkan laporan resmi pemerintah, Kiyai Zainal Mustafa digambarkan sering “melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar, dan karena itu kaum Muslim tidak lagi mengakui kewibawaannya dan rakyat menganggapnya sebagai orang gila. Akhirnya dia mengumumkan bahwa dia adalah wakil Allah, yang bertugas mendirikan masyarakat (Islam) yang akan direstu oleh-Nya. Untuk mencapai tujuan ini, dia menyebarkan kabar bohong, membohongi murid-murid dan orang desa, sampai dia mengumpulkan pengikut kira-kira sebanyak lima ratus orang; dia juga mengumpulkan berjenis-jenis senjata” (Benda 1985: 195-6).

²² Dalam pernyataan resminya, seperti dikutip Benda (1985: 195-6), dikatakan bahwa pemerintah “berusaha untuk melindungi dan memajukan agama Islam, bersama dengan para pemimpin agama yang adalah para pendidik rakyat terkemuka... Orang-orang yang akan ditunjuk untuk duduk di kantor ini harus betul-betul memahami hokum Islam dan adat kebiasaan Islam, di samping menunjukkan penghargaan yang jelas terhadap pemerintahan militer Dai Nippon... Karena itu kepala kantor yang baru tersebut (Shūmuka-cho) dan sekurang-kurangnya dua dari pembantunya akan diangkat dari kalangan Islam Indonesia yang terkemuka”.

²³ Hal ini bisa dilihat dari pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa “beberapa pejabat

yang menempati posisi tertinggi ... gagal memenuhi tugas-tugasnya yang penting. Mereka lebih suka melanjutkan cara-caranya yang biasa dan rutin dari administrasi pemerintahan yang dulu..." (dikutip dari Benda 1985: 198-9).

²⁴Pidato Wahid Hasjim tersebut kemudian dimuat dalam *Soeara Moeslimin Indonesia* (1 Juni 1944) berjudul "Melenjapkan Jang Kolot".

²⁵ Wahid Hasjim tercatat telah memperkenalkan system pendidikan modern dengan membuka madrasah di dalam pesantren Tebuireng, di mana ilmu-ilmu umum (bahasa [Inggris dan Indonesia], sejarah, matematika [al-Jabar], kebangsaan) dipelajari, selain tentu saja ilmu-ilmu agama yang sudah lama dipelajari di pesantren. Selain itu, Wahid Hasjim juga menerbitkan majalah di Tebuireng, *Suluh Nahdlatul Ulama*, yang sebagian menjadi bacaan murid-murid pesantren. Pada 1930-an sekitar 1.500 murid belajar di Pesantren Tebuireng, di mana mereka terbiasa membaca majalah dan surat kabar dalam bahasa Indonesia, Inggris dan juga Belanda. Lihat Yasuko (1997: 89).

²⁶Dalam konteks lain, sebagaimana terekam oleh Saifuddin Zuhri, yang kemudian menjadi tokoh di NU dan Kementerian Agama, Wahid Hasjim pada dasarnya sangat kritis dengan kebijakan Jepang. Dia bahkan mempertanyakan niat Jepang untuk membantu Indonesia merdeka. Karena itu, di balik ungkapan dukungan terhadap pemerintah Jepang, dia juga pada saat yang sama "memperalat" ("tipu-menipu") Jepang untuk kepentingannya dan kepentingan Indonesia secara umum. Prinsip Wahid Hasjim adalah menolong diri kita dengan kesempatan yang tersedia dalam pendudukan Jepang. Lihat Zuhri (1974S: 173-6); Yasuko (1997: 90), juga Umam (1998: 110).

*ISLAM DAN DAI NIPPON: RESPON INTELEKTUAL MUSLIM ATAS PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA (1942-1945)*

**HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG
1945-1958**

Aiko Kurasawa

Hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Jepang baru ditandatangani pada Januari 1958. Tetapi sebenarnya di masa sebelumnya sudah ada berbagai corak hubungan antara kedua negara ini yang tidak banyak diketahui secara umum.

Makalah ini terfokus pada bulan Agustus 1945 sampai Januari 1958, jadi sejak kapitulasi Jepang serta Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya hubungan diplomatik. Makalah ini terdiri atas 4 bab. Dua bab pertama menyangkut perkembangan umum pada dua sub-periode yaitu: (1) masa sebelum Indonesia dan Jepang mendapatkan independen penuh (Bab I) dan (Bab 2) masa sesudah ketika keduanya telah menjadi negara independen (Bab II). Sesudah itu dibahas dua isu yang sangat penting yang menjadi topik inti dalam hubungan Indonesia-Jepang, yaitu masalah repatriasi dan yang menolak repatriasinya (*deserter*) (Bab III), serta masalah pampasan perang (Bab IV).

Karya ini berdasarkan pada sumber primer dari arsip Jepang, Indonesia, dan Belanda yang dikumpulkan selama belasan tahun, dan juga wawancara yang dilakukan tahun 1990-an

I. Sub-periode pertama: Indonesia dalam Masa Perjuangan Kemerdekaan dan Jepang di Bawah Pendudukan Sekutu

(1) *Shūsen Renraku Chūō Jimukyoku* dan Misi Militer Belanda

Zaman pasca-Perang Asia Timur Raya adalah masa luar biasa baik bagi Indonesia dan maupun bagi Jepang. Waktu itu Indonesia mengalami perjuangan mati-matian demi kemerdekaan, sedangkan Jepang kemerdekaannya dibatasi dan diduduki oleh Tentara Sekutu. Artinya kedua negara ini sedang menghadapi zaman yang tidak normal. Meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan namun pemerintah RI belum cukup mempunyai kewenangan untuk menentukan nasib sendiri selama Belanda masih menguasai Batavia dan daerah-daerah luas yang lain (sampai Desember 1949). Pihak Jepang juga telah kehilangan banyak wewenang sebagai negara merdeka karena diduduki dan dikontrol oleh Tentara

*HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG
1945-1958*

Sekutu sampai April 1952. Kedua negara itu tidak bisa aktif dalam diplomasi atau hubungan dengan luar negeri dengan inisiatif sendiri.



Let.Jen Schilling & Pennink
Sumber: Koleksi Aiko Kurasawa

Departemen Luar Negeri Jepang hampir tidak berfungsi dan tugasnya diwakili oleh kantor yang bernama *Shūsen Renraku Chūō Jimukyoku (Central Liason Office disingkatkan Shūren)*. Kantor ini adalah instansi utama untuk mengadakan komunikasi dengan GHQ (*General Head Quarter*) tentara Sekutu, yang dalam hal ini diwakili oleh tentara Amerika. Pemerintah Jepang dilarang mengadakan hubungan langsung dengan negara-negara lain, dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan urusan luar negeri harus diurus melalui GHQ.

Di dalam GHQ ini setiap negara Sekutu membuka kantor perwakilan. Umpamanya Belanda mengirimkan Misi Militer Belanda dan hal yang bersangkutan dengan Indonesia ditangani instansi ini. Karena pemerintah Jepang sudah tidak berkuasa kecuali urusan dalam negeri tertentu, maka sesuatu yang bersangkutan dengan orang Indonesia yang berada di Jepang diputuskan oleh Panglima GHQ dan Misi Militer Belanda ini.

Misi Militer Belanda ini dibuka pada tanggal 20 Mei 1946. Kedudukan dan haknya setara dengan kedutaan, tetapi *credential*-nya disampaikan ke GHQ

Tentara Sekutu dan bukan kepada pemerintah Jepang. Kantor itu tidak mengadakan komunikasi langsung dengan pemerintah Jepang, tetapi melalui *Allied Council for Japan (Tainichi Rijikai)* di bawah *Far Eastern Council*. Sebelum dibuka secara resmi di Tokyo, Misi ini sudah diadakan di Batavia (Jakarta, diduduki oleh Belanda dan disebut "Batavia" oleh Belanda) dan personilnya dikirim dari Batavia. Cabang Batavia tetap dipertahankan sesudah kantor pusat dibuka di Tokyo.¹

Sebagai kepala Misi ditunjuk Let.Jen Schilling, dan sebagai penasehat bagian politik-ekonomi ditunjuk Pennink, mantan diplomat yang pernah ditempatkan di kedutaan Belanda di Tokyo sebelum perang. Kepala Misi diganti oleh Mouw pada tahun 1948 dan penasehat politik ekonomi diganti oleh Ketel pada tahun 1947. Menurut laporan tahun 1947 pegawai Misi ini terdiri dari 37 orang Belanda (termasuk 10 orang perempuan) dan 86 orang Jepang.² Takejirō Haraguchi, bangsa Jepang yang dulu tinggal di Hindia Belanda dan dapat kepercayaan pemerintah Hindia Belanda, diterima sebagai penasehat³.

Gedung ex-Legation Belanda (sekarang Kedutaan Besar Belanda) dipakai sebagai kantor Misi ini. Cabangnya dibuka di Kobe. Dalam Misi ini, selain dari bagian diplomasi dan urusan konsul juga ada bagian perdagangan, pengangkutan kapal, pampasan perang dan jaksa.⁴

(2) Masalah Repatriasi Warga Indonesia dari Jepang

Misi ini menangani berbagai hal yang bersangkutan dengan Indonesia. Umpamanya ada masalah repatriasi sekitar 100 orang Indonesia yang terlantar di Jepang, Kebanyakannya mahasiswa yang dibawa ke Jepang selama perang atas nama *Nanpō Tokubetsu Ryūgakjusei* (Mahasiswa Instimewa dari Daerah Selatan), tetapi juga ada yang sejak zaman Belanda sudah ada di Jepang. Kalau ingin pulang ke Indonesia, mereka harus lapor ke Misi Milliter Belanda dengan mengakui diri sendiri sebagai *onderdaan* Belanda. Sebagian besar menolaknya dan memilih tinggal di Jepang sampai penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada akhir 1949. Tetapi sebagian yang betul-betul didesak keperluan pulang ke Indonesia terpaksa harus ambil paspor Belanda dan pulang ke Indonesia dengan kapal yang disediakan Belanda secara gratis. Itu sungguh-sungguh keputusan sulit.

Mahasiswa yang memilih tidak pulang meneruskan studinya di universitas sambil kerja di kantor Sekutu. Mereka masuk organisasi yang bernama Serikat Indonesia dan ikut perjuangan mendukung RI di Jepang.

HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG
1945-1958



Nanpō Tokubetsu Ryūgakjusei belajar di Tokyo
Sumber: Koleksi Aiko Kurasawa



Nanpō Tokubetsu Ryūgakjusei berpakaian adat
Sumber: Koleksi Aiko Kurasawa

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

Selain masalah mahasiswa juga ada masalah repatriasi anak-anak campur yang berdarah Indonesia. Anak-anak ini lahir di Hindia Belanda dari ayah Jepang dan Ibu Indonesia, dan dididik dan dibesarkan dalam budaya Indonesia. Meskipun begitu, mereka ditangkap Belanda pada waktu pecah perang sebagai bangsa musuh, karena memegang warga negara Jepang. Mereka dibawa ke Australia untuk ditahan di sana sebagai warga negara musuh sampai selesai perang.



Anak-anak Campur selama di Australia
Sumber: Koleksi Aiko Kurasawa

Sesudah selesai perang, mereka secara otomatis dikirim ke Jepang, bukan ke Indonesia. Dengan latar belakang budaya Indonesia, mereka mengalami kesulitan tinggal di Jepang dan minta kepada Misi Militer Belanda agar dipulangkan ke Indonesia. Mereka menyatakan mempunyai *onderdaanschap* Belanda karena lahir di Hindia Belanda. Memang kelahiran itu bisa dibuktikan dengan cara mengambil akte kelahiran dari tempat lahir, tetapi ternyata ada peraturan yang banyak orang tidak menyadari. Menurut peraturan itu mereka yang tanpa kewarganegaraan Belanda akan kehilangan status *onderdaanschap*-nya kalau pergi ke luar negeri dan tidak lapor ke kantor perwakilan Belanda setempat didalam 3 bulan pertama dan memberitahu keinginan mempertahankan *onderdaanschap*-nya.

*HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG
1945-1958*

Anak-anak campuran yang ditawan di kamp Australia memang tidak ada kebebasan/ kesempatan melakukan hal itu dan sudah kehilangan *onderdaanschap* Belanda.

Tetapi keinginannya pulang ke tanah air sangat keras dan mereka mendesak terus Misi Militer Belanda, sehingga akhirnya pihak Belanda menganggap kasus itu istimewa dan memberi kebijaksanaan pengecualian. Anak-anak itu dipulihkan kembali hak *onderdaanschap*-nya, dan Belanda menyediakan kapal untuk repatriasi mereka ke Indonesia pada tahun 1947. Tetapi waktu itu ayah, Jepang asli, tidak boleh ikut ke Indonesia. Karena itu ada juga anak-anak yang tidak betah perpisahan dan terpaksa memutuskan tidak pulang.

Kapal itu yang namanya *Cibadak*, juga mengangkut sebagian mahasiswa Indonesia yang mengambil paspor Belanda dan pulang. Kapal itu juga mengangkut pengantin dari Indonesia yang baru-baru ini kawin dengan orang Jepang dan dibawa ke Jepang pada tahun sebelumnya (1946), tetapi tidak betah dan memutuskan pulang.

Dengan demikian Misi Militer Belanda berlaku sebagai badan mengurus dan membantu urusan orang Indonesia yang ada di Jepang.

II. Sub-periode kedua: Hubungan sebagai Negara Independen Penuh

(1) “Penyerahan Kedaulatan” dari Belanda

Sesudah perjuangan selama hampir 4 tahun, Kerajaan Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada Desember 1949. Sesudah itu Indonesia membuka kantor perwakilannya sendiri (*Indonesia Seifu Daihyōbu*) di Tokyo. Karena Jepang belum diberi kemerdekaan penuh pada saat itu, maka kantor perwakilan Indonesia itu dibuka untuk negosiasi, komunikasi dengan GHQ Tentara Sekutu tetapi bukan dengan pemerintah Jepang. Karena pemerintah Indonesia belum siap untuk kirim petugas ke Jepang, maka staf kantor itu untuk sementara diisi oleh personil dari Misi Militer Belanda. Pada saat itu Perdana Menteri Hatta minta kepada pemerintah Belanda agar kantor Perwakilan Belanda mewakili kepentingan Indonesia di beberapa negara termasuk Jepang.⁵

Rupanya RI tidak mempunyai ide untuk mempergunakan organisasi komunitas Indonesia yang sudah ada di Jepang sebagai kantor wakil pemerintah. Ada arsip Belanda tertanggal 23 Desember, 1949 yang menulis bahwa “Yogya (berarti pemerintah RI) tidak akan mengizinkan badan Indonesia berfungsi sebagai perwakilan pemerintah resmi”.⁶ “Badan Indonesia” yang dimaksudkan di sini

adalah Serikat Indonesia di mana hampir semua orang Indonesia kumpul. Organisasi ini mengadakan kegiatan seperti keluarkan semacam kartu identitas kepada warga Indonesia dan sering mewakili kepentingan bangsa Indonesia *viz-a-viz* Belanda. Serikat Indonesia juga mengadakan kegiatan politik mendukung RI dalam perjuangan terhadap Belanda. Secara teori Serikat Indonesia mampu diangkat menjadi kantor perwakilan RI, atau paling tidak pemimpinnya diangkat sebagai staf kantor perwakilan, tetapi hal itu tidak terjadi.

Urusan konsulat dipegang oleh Notohatiyanto, pegawai Misi Miiter Belanda. Dia bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda sejak sebelum perang dan pernah ditugaskan ke Konjen Belanda di Jedah. Sesudah selesai perang dia ditempatkan ke Misi Miiter Belanda di Tokyo. Urusan perdagangan dibantu secara pribadi oleh Mijnaerends, kepala Kamar Dagang Belanda di Tokyo.⁷

Memang zaman Notohatiyanto dan Mijnaerends hanya sebentar saja, dan tak lama kemudian mulailah usaha membuka kantornya sendiri: Mohamed Syarif, mantan mahasiswa yang sudah pulang dulu ke Indonesia pada 1947, dikirim dari Deplu, dan Adam Basorie, yang sudah pulang pada 1940 dikirim dari Dept. Perdagangan sebagai staf kantor perwakilan pemerintah Indonesia. Mereka dibantu oleh mahasiswa Indonesia yang masih tinggal di Jepang waktu itu dan membuka kantor di Ginza.

Pada Mei 1951 Raden Sudjono dikirim sebagai “Duta Besar” di kantor perwakilan ini. Pada saat itu fungsi kantor perwakilan ini masih untuk keperluan komunikasi dan negosiasi dengan GHQ Tentara Sekutu dan status Sudjono bukan “Duta Besar untuk Jepang”, tetapi untuk *Allied Council for Japan*.⁸

Raden Sudjono adalah mantan guru besar Bahasa Indonesia di Akademi Bahasa Asing di Tokyo sebelum perang. Sesudah tamat fakuluts Hukum Universitas Leiden, dia pernah bekerja sebagai advokat di Menado tetapi pada tahun 1934 dia pulang ke Jawa via Tokyo dengan kapal Jepang dan mendarat di Tokyo. Sesudah beberapa bulan tinggal di Tokyo, dia pulang dulu ke Indonesia tetapi tidak lama kemudian dia ditawarkan pekerjaan sebagai guru Bahasa Melayu. Dia memutuskan untuk menerima tawaran itu dan menetap di Tokyo dengan keluarga. Dia menjadi salah seorang pemimpin komunitas Indonesia di Jepang zaman sebelum perang.

Pada waktu Tentara Jepang mendarat di Jawa pada bulan Maret 1942, dia ikut Jend. Imamura dan mendarat di Merak. Sesudah itu dia kerja sama dengan tentara Jepang selama masa pendudukan Jepang. Sesudah Indonesia merdeka dia bekerja di Deplu dan ditugaskan ke Jepang pada 1951.

HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG

1945-1958



Sudjono dengan pakaian militer Jepang 1942

Sumber: Koleksi Aiko Kurasawa



Sudjono (kedua dari kanan) dan istrinya (kedua dari kiri) tiba di Tokyo

Sumber: Koleksi Aiko Kurasawa

Tidak lama kemudian Kantor Perwakilan Pemerintah Indonesia sebentar lagi mendapat tanah di Gotanda, tempat KBRI sekarang dan pindah ke sana. Notohatiyanto dan Mijnaerends juga berlanjut bekerja di situ. Tetapi menurut orang Indonesia yang masih tinggal di Jepang pada saat itu Sudjono tidak suka dengan Notohatiyanto karena dia dulu kerja sama dengan Belanda.⁹ Status Sudjono agak tidak jelas meskipun diberi jabatan duta besar. Dikatakan bahwa Sudjono tidak diperlakukan sebagai duta besar oleh korps diplomatik dan mengeluhkan hal itu kepada menteri Luar Negeri.¹⁰

(2) Konferensi San Fransisco (September 1951) dan Menuju ke Kemerdekaan Jepang

Meskipun Indonesia sudah lebih dulu mendapatkan kemerdekaan penuh pada Desember 1949, Jepang masih diduduki dan dijajah Tentara Sekutu. Tetapi tidak lama kemudian muncul gagasan untuk mengadakan konferensi perdamaian antara negara-negara Sekutu dan Jepang dan mengakhiri pendudukan Tentara Sekutu. Gagasan yang diprakarsa oleh Amerika Serikat ini baru direalisasikan pada September 1951.

Indonesia juga diundang sebagai negara yang pernah diduduki oleh Jepang. Tetapi Indonesia ragu-ragu, karena negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, dan Vietnam Utara tidak diundang ke konferensi itu. Indonesia sebagai negara yang netral, tidak bisa menerima konferensi yang sifatnya seperti itu. Di lain pihak kalau memikirkan peranan dulu diambil Amerika Serikat di PBB untuk membantu Indonesia merdeka, Indonesia tidak bisa menolak undangannya begitu saja.

Tanpa keputusan yang jelas apakah pantas dikirim rombongan atau tidak, rombongan yang dikepalai oleh Menteri Luar Negeri Subardjo tiba di San Francisco pada akhir bulan Agustus 1951. Raden Sudjono juga ikut ke San Fransisko dalam rombongan itu. Tetapi belum cukup dibahas apakah Indonesia ikut tanda tangan perjanjian yang disepakati dalam konferensi itu. Tetapi pemerintah Indonesia tergesa-gesa memutuskan bahwa Indonesia akan tanda tangan kalau sudah dikasih jaminan pembayaran pampasan perang dari pemerintah Jepang. Karena itu Subardjo berunding dengan Perdana Menteri Yoshida di San Fransisco dan berhasil dapat kepastiannya tentang pembayaran pampasan. Pada tanggal 6 September Partai Masyumi yang merupakan salah satu partai inti pemerintah memutuskan boleh menandatangani, sedangkan Partai Nasional Indonesia yang juga merupakan partai pemerintah menolak hal itu pada hari selanjutnya. Namun pada rapat

HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG

1945-1958

kabinet tanggal 7 September diputuskan boleh menandatangani. Dan berdasarkan atas perkembangan ini Subardjo akhirnya ikut memberikan tanda tangan pada tanggal 8 September.



Pertemuan Subardjo (kedua dari kiri) dgn Yoshida (paling kiri)

Sumber: Koleksi Aiko Kurasawa

Pada waktu kembali ke Indonesia rombongan Subardjo disambut dengan kritik yang keras. Kabinet Sukiman jatuh sebelum perjanjian itu dimajukan ke parlemen untuk ratifikasi. Kabinet Wilopo yang menggantikannya membiarkan ratifikasi dan akhirnya mengumumkan pada Agustus 1952 bahwa mereka menunda ratifikasi selama lamanya. Berarti Indonesia tidak terikat pada perjanjian itu, meskipun perundingan masalah pampasan dengan Jepang secara nyata sudah mulai secara terpisah pada masa pasca konferensi San Fransisco.

Perjanjian San Fransisco sangat penting bagi Jepang karena itu perjanjian inilah yang membebaskan Jepang dari penjajahan Sekutu. Dengan ratifikasi perjanjian ini maka tentara Sekutu secara resmi mengakhiri pendudukan atas Jepang dan Jepang berhasil mendapatkan kemerdekaan penuh pada tanggal 28 April 1952.

Dengan perubahan status ini Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kebijaksanaan dan sikap baru terhadap Jepang. Kantor Perwakilan Indonesia juga berubah status dan menjadi Konsulat Jenderal. Ironisnya kantor Konsulat Jenderal lebih rendah dari Kantor Perwakilan Pemerintah yang dikepalai oleh seorang duta besar, jadi terjadi diturunkan statusnya.¹¹ Zainal Abidin, diangkat menjadi Konjen. Sebelumnya Raden Sudjono sudah ditarik kembali ke negaranya pada Februari 1952.

Kantor Konsulat Jenderal Jepang juga dibuka di Jakarta pada bulan Agustus 1952 dan Yoshiharu Takeno diangkat menjadi Konjen. Tetapi tidak lama kemudian ia digantikan oleh Fumihiko Kai pada bulan Oktober. Lalu tidak lama kemudian Konsulat juga dibuka di Surabaya dan Shirahata diangkat menjadi Konsulnya. Kantor Konjen Jakarta mula-mula dibuka di Hotel Des Indes lalu pindah ke sebuah rumah di Tanah Abang. Lalu kemudian hari pindah lagi ke Jl. Balikpapan. Negara-negara lain kebanyakan memakai gedung Konjennya sendiri yang dipakai sejak zaman Hindia Belanda. Tetapi bekas gedung Konjen Jepang sebelum perang yang ada di Jl. Merdeka Barat disita sebagai aset musuh waktu pecah perang dan tidak dikembalikan ke Jepang.¹²

(3) Beberapa Isu pada masa 1952-57

Dengan berdirinya Konjen di kedua negara era baru mulai antara Indonesia dan Jepang. Meskipun belum ada hubungan resmi, sebenarnya sudah ada cukup banyak isu perundingan dan kegiatan antara kedua negara pada masa sebelum 1958.

Hubungan Ekspor-Impor

Ekspor-impor sudah mulai sejak 1946 melalui perusahaan Belanda. Jumlah impor dan ekspor tidak seimbang. Jumlah impor dari Jepang 4 kali lipat dari jumlah ekspor ke Jepang pada tahun 1950. Kekurangan atau utang pihak Indonesia dari Jepang makin lama makin besar dan mencapai \$60,000,000 pada tahun 1952.¹³ Item ekspor terbesar dari Jepang adalah tekstil yang merupakan 90 %. Negosiasi

HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG *1945-1958*

perdagangan dan upaya menambah ekspor dari Indonesia sering diadakan. Item ekspor Indonesia terbesar ke Jepang adalah karet dan kopra. Pihak Jepang mengakui mutu karet Indonesia paling bagus di dunia.¹⁴ Pada tahun 1953 Indonesia menjadi negara yang eksor karet ke Jepang yang paling besar.¹⁵ Kedatangan kapal Jepang terbatas ke 25 kali per tahun. Pemerintah Jepang selalu minta jatah ini dinaikan.¹⁶

Bank Perdania

Ada sedikit investasi modal Jepang untuk perusahaan Indonesia. Antaranya satu yang menarik perhatian adalah investasi untuk membangun bank *joint*, yaitu Bank Perdania. Investornya Daiwa Bank dan gagasan itu sudah hampir terealisasi pada thun 1953 dengan dikasih persetujuan dari Menteri Keuangan Indonesia, tetapi akhirnya angaran dasarnya tidak diakui oleh Menteri Kehakiman. Rencana ini baru terealisasi setelah 1958 sesudah diadakan hubungan diplomatik.¹⁷

Proyek Asahan

Tidak banyak diketahui bahwa ide projek Asahan di Sumatera Utara sudah mulai pada zaman ini: Yasuza'emon Matsunaga dari Tokyo Electric Power dan Yutaka Kubota dari PT Nihon Kō'ei, dan Gisuke Ayukawa dari Teikoku Petroleum mengadakan penelitian dan mencoba membangkitkan tenaga listrik di danao Toba lalu memproduksi aluminium dengan tenaga itu.¹⁸ Gagasan itu tidak terealissasi pada waktu itu dan baru bisa mulai pada tahun 1980an.

Tokoh-tokoh yang dulu ikut terlibat dalam pendudukan militer di Indonesia dan mempunyai hubungan pribadi dengan tokoh-tokoh Indonesia seperti Shigetada Nishijima dari Kantor Penghubung Angkatan Laut di Jakarta yang dipimpin Laksamana Maeda, Tomokazu Kaneko dan Hitoshi Shimizu dari *Sendenbu* (Departemen Propaganda) ikut datang untuk melancarkan jalan bisnis pada zama itu.¹⁹

Mahasiswa PP32

Dengan inisiatif Mohamad Yamin, Menteri Pendidikan waktu itu, mulai proyek pengiriman mahasiswa ke luar negeri pada 1952. Karena program ini berdasarkan atas Peraturan Pemerintah no. 32, maka mahasiswa ini disebut "Kelompok 32". Antara 1952 dan 1957, 85 orang dikirim ke Jepang melalui program

ini. Kebanyakan anggota “Kelompok 32” adalah mantan anggota Tentara Pelajar pada zaman revolusi yang pendidikannya terpaksa terhenti karena perjuangan. Antara 85 orang yang dikirim ke Jepang banyak yang belajar perkapalan.

Keikutsertaan Jepang ke Konferensi Asia Afrika

Satu hal yang menarik pada masa sebelum 1958 adalah kehadiran Jepang pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Pada masa itu konferensi ini sifatnya tantangan/*challenge* oleh negara-negara Asia-Afrika terhadap negara-negara Barat. Di dalam daftar undangan yang disediakan oleh India dan dimajukan pada rapat persiapan di Bogor nama Jepang tidak termasuk. Tetapi Pakistanlah yang menuntut agar Jepang akan diundang kalau India ingin mengundang Tiongkok. Ini adalah tawar menawar dalam saingan politik. Akhirnya India takut Tiongkok tidak jadi diundang, dan karena itu dia setuju dengan usulan Pakistan.²⁰ Ini adalah satu hal yang sangat istimewa. Negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Vietnam Selatan tidak diundang meskipun sama-sama Asia, karena negara-negara itu dianggap berada di bawah payung Amerika. Sebenarnya Jepang juga sangat tunduk di bawah payung Amerika Serikat, tetapi Jepang diundang.

Undangan itu disampaikan ke Jepang pada 29 Desember 1954, baru 3 minggu sesudah dibentuk kabinet baru oleh perdana Menteri Ichirō Hatoyama. Memikirkan fakta bahwa negara-negara Asia yang pro-Amerika tidak diundang kecuali Jepang, pada awalnya Menteri Luar Negeri takut berespons ke Amerika dan sangat hati-hati dalam pengambilan keputusan. Akhirnya pemerintah Jepang memutuskan menerima undangan dan kirim rombongan terdiri dari 28 orang dan dikepalai oleh Tatsunosuke Takasaki, kepala Biro Perencanaan Ekonomi. Ini sungguh keputusan berani.

Dalam pidato Konferensi ini Takasaki menyebutkan “Jepang memberi kerugian kepada negara-negara tetangga dalam perang dunia kedua. Waktu perang selesai Jepang sendiri juga mengalami penderitaan luar biasa”. Koran Indonesia menangkapnya dengan komentar “Kepala rombongan Jepang minta maaf atas kesalahan dalam perang”.²¹

III. Masalah Repatriasi Orang Jepang dan *Deserter*

Bab ini dan bab berikutnya akan membahas salah satu isu yang paling berat yang pernah dihadapi oleh Indonesia dan Jepang. Pertama masalah orang Jepang yang menolak repatriasi ke negerinya dan ingin tinggal di Indonesia. Kedua adalah soa

pembayaran pampasan perang yang dianggap syarat utama untuk membentuk hubungan diplomatik.

Pada waktu Jepang menyerah kepada Sekutu semua bangsa Jepang tanpa kecuali diwajibkan pulang ke negerinya, jadi repatriasi secara total. Tetapi kenyataannya banyak juga yang menolak repatriasi dan melarikan diri dari kamp konsentrasi. Pelari dari kamp bukan hanya prajurit tetapi juga ada sipil. Mereka pada umumnya disebut *deserter*.

(1) Alasan/Motivasi Melarikan Diri

Alasan melarikan diri *deserter* macam-macam. Antaranya ada sebagian yang maksud pertamanya untuk menggabungkan diri dengan tentara Indonesia. Sebagian dari mereka adalah yang diculik oleh mantan “*giyūgun*” yang pernah dilatih kemudian diajak bergabung dengan pasukan Indonesia. Juga ada sebagian kecil yang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kemerdekaan Indonesia yang sudah lama dijanjikan oleh pemerintah Jepang. Antaranya ada yang terkenal seperti Tomogorō Yoshizumi dan Tatsuo Ichiki Keduanya tinggal di Indonesia sejak zaman Belanda dan banyak bergaul dengan kaum nasionalis.

Boleh dikatakan banyak juga prajurit Jepang yang mempunyai rasa simpati pada kemerdekaan Indonesia. Mereka dididik dan diindoktrinasi bahwa tentara Jepang menduduki dan menjajah Asia Timur Raya untuk membebaskan bangsa Asia dari belenggu Barat. Artinya prajurit dan sipil Jepang itu pada umumnya percaya mereka menjalankan tugas yang luhur di Indonesia. Memang prajurit Jepang ada yang sifatnya sangat kejam dan sombong sehingga banyak orang Jepang yang dituduh sebagai penjajahat perang. Sikap itu berasal dari rasa *superiority* orang Jepang sebagai “saudara tua”.

Pada waktu Jepang kalah mereka menyadari bahwa tujuan mereka sudah tidak bisa terealisasi. Mereka bingung kehilangan semangat dan cita-cita, lalu putus asa. Sebagian memutuskan ikut tentara Indonesia dan meneruskan perjuangan melawan Belanda, musuh mereka.

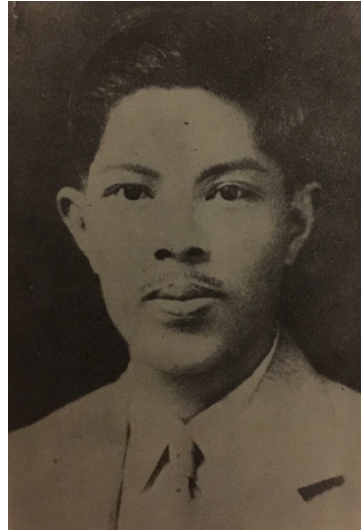
Tetapi alasan melarikan diri yang terbanyak adalah karena sudah ada pacar²² di Indonesia. Selama menduduki Indonesia memang banyak juga prajurit dan sipil Jepang yang jatuh cinta dengan wanita Indonesia, tetapi mayoritasnya membiarkan pacar dan memilih repatriasi ke Jepang. Ada juga sebagian kecil yang diberi kesempatan untuk melegalisasi perkawinan dengan bantuan tentara Inggris dan diizinkan membawa isteri pulang ke Jepang. Tetapi itu barulah sebagian kecil

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

saja. Sedangkan yang tidak termasuk kategori dua-duanya itu terpaksa melarikan diri dan ikut menggabungkan diri dengan keluarga pacar.



Tomegoro Yoshizumi



Tatsuo Ichiki



Tatsuo Ichiki (kiri) dan Bung Karno

Sumber: Koleksi Aiko Kurasawa

*HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG
1945-1958*

Mereka yang menolak repatriasi dan melarikan diri dari kamp konsentrasi jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Kebanyakannya berada di wilayah Jawa dan Sumatera di mana kekuatan Republik relatif kuat. Mereka menyembunyikan diri dalam kampung, lalu ikut masuk pasukan perjuangan Indonesia untuk bertahan hidup (*survive*) karena mereka tidak mempunyai sumber penghasilan lain. Pelarian dari kamp melanggar peraturan hukum militer dan kalau diketahui, mereka dihukum oleh tentara Jepang (selama mereka masih ada di Indonesia) dan juga oleh Sekutu sebagai *deserter* dan dilarang secara keras.²³ Wakil panglima besar AD ke-16 mengeluarkan maklumat pada 3 Juni 1946 yang didalamnya memberitahukan bahwa pelarian adalah pelanggaran hukum militer berat dan kelakuan yang menghinai kepercayaan Sekutu. Maklumat itu menyuruh agar *deserter* kembali sebelum tanggal 15 Juni 1946 dan siapa saja yang ditemui sesudahnya akan ditembak mati.²⁴

(2) Sikap pemerintah Indonesia dan Belanda terhadap *deserter*

Menurut sumber Nefis (Nefis Publikasi No.72) ada Biro Oeroesan Bekas Peradajorit India dan Djepang di pemerintahan RI. Tugas ini juga mengkontrol perajurit India yang melarikan diri dari Tentara Inggris.²⁵ Tidak diketahui kapan kantor ini dibentuk tetapi paling tidak sudah ada pada tahun 1947. Bagaimana sikap pemerintah RI terhadap *deserter* orang Jepang? Meskipun mereka disambut baik oleh pasukan Indonesia setempat karena bisa menyumbang keahlian militernya untuk perjuangan Indonesia, namun pandangan pemerintah pusat belum tentu sama, karena pemerintah harus selalu memikirkan dan memperhatikan soal seperti hukum internasional, diplomasi dengan Belanda dll.

Pada waktu itu kemerdekaan RI sering dipandang dan dikritik sebagai hadiah Jepang. Padahal sebenarnya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus itu adalah hasil perjuangan nasionalis Indonesia dan bukan hadiah Jepang. Tetapi perkembangan hari hari menjelang kapitulasi Jepang, seperti usaha melalui BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), memberi kesan seolah olah kemerdekaan itu diberi oleh Jepang. Sebenarnya usaha memberi kemerdekaan dibawah *auspice* Jepang sudah berhenti total karena kapitulasi Jepang. Jepang diperintahkan oleh Deklarasi Posdam untuk mempertahankan situasi *status quo*. Jadi proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah murni hasil perjuangan kaum nasionalis Indonesia yang melawan larangan Jepang. Tetapi Belanda menuduh proklamasi itu buatan Jepang.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

Karena ada pandangan Belanda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang, maka pemerintah Indonesia juga harus hati-hati agar jangan dikira perjuangan mereka dibantu oleh Jepang. Partisipasi perajurit Jepang di dalam pasukan Republik Indonesia dianggap kurang pantas. Perdana Menteri Syahrir juga mamakai jalur diplomasi dengan Belanda di samping perjuangan dan dalam diplomsni posisinya harus diperkuat.

Maka itu ada intervensi dari pemerintah pusat dan pernah pasukan Jepang yang ada di daerah Garut dibubarkan. Pada November 1946 pasukan Jepang yang ada di daerah Linggarjati dipindahkan ke Yogyakarta dengan alasan tidak pantas kalau kelihatan di mata orang Belanda.²⁶ Sesudah Perjanjian Renville pada bulan Januari 1948, pemerintah Indonesia terpaksa berkolaborasi dengan Belanda dan memperketat pengawasan terhadap *deserter* Jepang. Pemerintah Indonesia diperintahkan oleh Belanda agar mengadakan pendaftaran orang Jepang yang ada di dalam pasukannya dan menyerahkannya kepada pihak Belanda.

Menurut penyelidikan pihak Indonesia waktu itu ternyata ada 800 orang *deserter* Jepang di wilayah RI di Jawa dan Sumatera.²⁷ Dalam pembicaraan selanjutnya antara Indonesia dan Belanda disepakati bahwa orang Jepang akan dikirim ke Batavia dan diserahkan ke panglima Belanda.²⁸

Tidak diketahui berapa banyak orang yang pernah ditangkap pemerintah Indonesia dan diserahkan ke Belanda. Dikira tidak begitu banyak, karena pasukan Indonesia setempat biasanya senang dibantu oleh prajurit Jepang dan mereka tidak mungkin laporkan prajurit Jepang kepada Belanda. Tetapi sudah diketahui satu kasus di mana 3 orang Jepang (salah satu adalah orang Korea) ditangkap Belanda akibat pengkhianatan seorang Indonesia dan dihukum mati. Ditawarkan uang hadiah yang mahal oleh Belanda untuk salah satu dari tiga orang itu (kebetulan bangsa Korea), seorang isteri prajurit gerilya yang sudah lama menderita kehidupan sulit dalam perang gerilya, menyerah kepada godaan itu.²⁹

(3) Upaya memulangkan ke Jepang sesudah selesai perang (pada 1950-an)

Pada waktu perjuangan untuk kemerdekaan selesai dipermasalahkan lagi repatriasi *deserter* ini oleh pemerintah Indonesia. Semua badan perjuangan non-TNI dibubarkan dan mereka yang ikut didalamnya kehilangan posisinya. Sedangkan perajurit Jepang yang masuk TNI disuruh keluar oleh pemerintah Indonesia. Pihak pemerintah Jepang, sesudah kantor Konsulat dibuka pada tahun 1952, juga mulai mencari informasi tentang *deserter* Jepang. Menurut penyelidikan mereka terdapat kurang lebih 150 orang di Sumatera Utara, kurang lebih 10 orang di Sumatera

*HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG
1945-1958*

Tengah dan Selatan, kurang lebih 45 orang di Jawa Barat, kurang lebih 10 orang di Jawa Tengah, kurang lebih 30 orang di Jawa Timur.³⁰

Pada Maret 1953 Kabinet Indonesia sepakat memutuskan untuk memulangkan semua orang Jepang. Alasannya lebih baik menghapuskan memori tentang zaman Jepang. Lalu keputusan ini disampaikan kepada Konjen Jepang. Mereka ditawarkan kesempatan untuk pulang ke Jepang secara gratis. Kurang lebih 60 orang, mayoritas masih bujang, menerima tawaran ini dan pulang ke Jepang.³¹ Tetapi yang lain menolak.

Departemen Luar Negeri Indonesia mengambil sikap keras untuk melaksanakan keputusan ini. *Deserter* di Sumatera mendirikan "Gabungan Orang Nippon" di Medan yang terdiri dari 134 anggota dan dikepalai oleh Masaharu Ishi'i. Mereka memajukan permohonan agar mereka diizinkan tinggal di Indonesia.³² Pihak Konjen Jepang juga berusaha membela kepentingan mereka. Pemerintah Jepang berpendapat bahwa yang sudah berkeluarga mesti diizinkan menetap di Indonesia, dan mengadakan negosiasi dengan pemerintah Indonesia.

Di Tokyo juga Dirjen Biro Asia Deplu menyampaikan permintaan agar *deserter* diberi hak tinggal selama lamanya itu kepada Konjen Zainal Abidin pada 24 Maret 1953.³³ Tetapi pihak Indonesia mengatakan bahwa tidak ada undang-undang di Indonesia mengenai naturalisasi. Upaya pemerintah Indonesia memulangkan orang Jepang secara paksa lebih kuat di Aceh dan Sumatera Utara. Ada rumor bahwa sebagian orang Jepang ikut pemberontakan Daud Beureuh di Aceh. Ada informasi bahwa ada juga yang bergabung dengan *Darul Islam* di Jawa Barat.³⁴

Mulai 1957 *deserter* harus bayar *foreigners' tax*. Jenderal Gatot Subroto merasa kasihan kepada mereka yang dulu ikut membantu perjuangan Indonesia dan memberikan sertifikat kepada mereka pada bulan Agustus 1957 untuk membuktikan bahwa orang Jepang tersebut ikut berjuang dalam perang kemerdekaan. Dibuat pula peraturan baru bahwa yang bertugas di TNI lebih dari 2 tahun berhak menuntut warganegara Indonesia³⁵. Tetapi untuk menjadi warganegara Indonesia sulit dan hanya sedikit yang berhasil mendapatkannya. Akhirnya Presiden Sukarno membuat keputusan istimewa pada 1963 untuk memberi kewarganegaraan kepada semua *deserter* yang menginginkannya. Di belakang keputusan ini ada upaya oleh Duta Besar Jepang Furu'ichi dan Ratna Sari Dewi, isteri Bung Karno dari Jepang.³⁶

IV. Pampasan Perang

(1) Pembayaran berdasarkan atas Perjanjian San Fransisco

Satu hal lagi yang sangat penting dan serius yang dihadapi Indonesia dan Jepang pada masa sebelum 1958 adalah negosiasi tentang pembayaran pampasan perang Jepang kepada Indonesia.

Pembayaran pampasan perang dipaksakan dalam Perjanjian Perdamaian San Fransisko yang ditandatangani pada bulan September 1951. Pasal 14 dari Perjanjian itu menentukan kewajiban pemerintah Jepang membayar pampasan perang kepada negara-negara lawan dan juga negara-negara yang pernah dijajahnya seperti Indonesia. Isi pasal 14 itu seperti berikut:

It is recognized that Japan should pay reparations to the Allied Powers for the damage and suffering caused by it during the war. Nevertheless it is also recognized that the resources of Japan are not presently sufficient, if it is to maintain a viable economy, to make complete reparation for all such damage and suffering and at the same time meet its other obligations.

Isinya sangat meringankan beban pemerintah Jepang. Keputusan ini memberi jaminan bahwa pembayaran itu tidak boleh mengganggu berjalan ekonomi Jepang. Dalam kata lain Jepang tidak usah bayar pampasan yang melebihi kemampuan ekonominya. Hal ini mencerminkan ide pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu. Pada tahun 1951 Perang Dingin telah jelas terasa di Asia sesudah Korea Utara dan Republik Tiongkok terbentuk pada tahun 1948 dan 1949. Dalam situasi ini, pemerintah Amerika Serikat mengharapkan Jepang menjadi benteng yang kuat menghadapi negara-negara komunis. Oleh karena itu pemerintah Amerika Serikat melakukan kebijakan yang ramah terhadap Jepang. Kebijakan politik Amerika Serikat sangat berbeda dengan kebijakannya antara tahun 1945 hingga 1947 yang berusaha mengurangi kekuatan Jepang dengan membubarkan Tentara dan *Zaibatsu* serta mengadakan *Land Reform* dan bermacam reformasi yang melemahkan kekuatan Jepang pasca Perang Asia Timur Raya.

Pandangan dasar pemerintah Amerika Serikat dalam penyelesaian tuntutan pampasan perang Jepang dari negara-negara yang dirugikan Jepang selama Perang Asia Timur Raya adalah pampasan tidak boleh menghancurkan perekonomian Jepang karena dapat melemahkan kekuatan anti komunis. Berdasarkan pandangan itulah pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara Sekutu lainnya melepaskan hak tuntutan pampasan perang pada Jepang.

HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG 1945-1958

Empat Negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Birma, Filipina dan Vietnam Selatan menuntut pampasan perang kepada pemerintah Jepang. Empat negara penerima pampasan mengadakan negosiasi bilateral dengan pemerintah Jepang berdasarkan atas syarat yang ditentukan pasal 14 Perjanjian San Fransisko yang berbunyi *“Japan will promptly enter into negotiations with Allied Powers so desiring, whose present territories were occupied by Japanese forces and damaged by Japan”*.

Seperti sudah dibahas di atas Konferensi Sanfransisco ini diadakan atas prakarsa pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara nonkomunis. Indonesia, sebagai negara yang pernah dikuasai Jepang juga diundang dan menandatangani perjanjian itu. Tetapi di kemudian hari, perjanjian itu tidak bisa diratifikasi Parlemen Indonesia dengan alasan konferensi San Fransisco itu cacat karena tidak dihadiri dan oleh negara-negara komunis.

Tetapi hal itu tidak berarti Indonesia kehilangan hak menuntut pampasan, dan negosiasi untuk itu sudah mulai secara bilateral pada tahun 1951 sejak selesai konferensi San Fransisco. Tetapi negosiasi pampasan itu mengalami banyak kesulitan dan menghabiskan waktu hingga 6 tahun lamanya (1952-1958). Ada pengertian secara tidak tertulis bahwa hubungan diplomatik tidak akan dibuka kalau masalah pampasan perang tidak beres. Karena itu perjanjian perdamaian dan pembukaan hubungan diplomasi itu tidak terealisasi sebelum Jan. 1958 pada waktu perjanjian pampasan ditandatangani.

Akhirnya pembayaran pampasan disetujui oleh pihak Jepang pada Januari 1958 tetapi jumlah pampasan perang yang disepakati hanya 13 % dari yang mula mula dituntut pihak Indonesia. Mengapa jumlah pembayarannya dikurangi begitu banyak? Dana mengapa negosiasi makan waktu begitu lama?

(2) Tuntutan Indonesia Semula : Pertemuan DJuanda-Tsushima (Desember 1951)

Pemerintah Indonesia mengirim delegasi yang diketuai Menteri Perhubungan Djuanda Kartawidjaja untuk negosiasi pampasan yang pertama kali di Tokyo. Mereka tiba di Tokyo pada 17 Desember 1951 dan mengadakan negosiasi dengan tim Jepang yang diketuai Gubernur Bank Jepang Juichi Tsushima. Jumlah yang dituntut pihak Indonesia adalah US \$ 17.5 milyar, senilai dengan 32.5 milyar gulden.³⁷ Berdasarkan perhitungan kerusakan aktual, jumlah itu cukup wajar dan tidak terlalu mahal. Namun angka itu hampir sejumlah dengan *Annual Gross National Income* Jepang pada tahun 1951 (US \$15.2 milyar). Maka itu tuntutan itu

oleh parlemen Jepang dinilai tidak sesuai dengan pasal 14 Perjanjian San Fransisco yang memerintahkan agar pembayaran pampasan perang tidak membahayakan kekuatan ekonomi Jepang. Maka itu pemerintah Jepang bernegosiasi agar jumlahnya dikurangi sampai "*reasonable amount*".

Selain jumlah pembayaran pampasan perang yang tidak cocok, juga ada perselisihan tentang masalah apakah pampasan juga meliputi kompensasi terhadap penderitaan yang dialami para korban perang: seperti *rōmusha* dan wanita penghibur. Pemerintah Jepang menolaknya dengan alasan bahwa pasal 14 tidak menuntut itu.

Pemerintah Indonesia juga menuntut pembayaran pampasan berupa uang kontan (tunai) tetapi pemerintah Jepang menolaknya berdasarkan atas catatan pasal 14 yang berbunyi "*war reparation should be paid by making available the services of the Japanese people in production, salvaging and other work.....so as not to throw any foreign exchange burden upon Japan*". Artinya pampasan dibayar dengan "jasa" orang Jepang dan bukan dengan uang tunai. Akhirnya pemerintah Indonesia menerima keberatan pemerintah Jepang ini. Masalah yang masih belum beres menyangkut perselisihan jumlah pembayaran. Negosiasinya ternyata berlangsung hingga akhir tahun 1957.

Di samping tuntutan dari pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda juga menuntut ganti rugi atas semua kerugian yang diderita orang Belanda di Indonesia selama perang. Menurut perhitungan mereka kerugian sipilnya berjumlah 25 miliar gulden dan kerugian militernya berjumlah 25 juta gulden³⁸. Pihak Belanda mula mula menuntut agar jatahnya digabung dengan tuntutan Indonesia dan nanti akan dibagi dua. Akhirnya kesepakatan dicapai antara pemerintah Belanda dan Jepang pada bulan Maret 1956. Di dalamnya ditentukan bahwa pembayaran kepada orang Belanda akan diberikan tersendiri, terpisahkan dari Indonesia, yakni US\$ 10 juta.³⁹

(3) Respons masyarakat Jepang terhadap tuntutan Indonesia

Faktor yang menyulitkan negosiasi pampasan adalah pandangan masyarakat dari kedua negara terhadap masalah pampasan. Tentang persetujuan sementara yang dicapai antara Juanda dan Tsushima pada tanggal 18 Jan. 1952, memunculkan keritik dari masyarakat kedua negara. Masyarakat Indonesia tidak senang karena dua tuntutan mereka, yaitu pembayaran dalam bentuk uang kontan dan kompensasi terhadap penderitaan dan kehilangan jiwa manusia human, ditolak pemerintah Jepang.

*HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG
1945-1958*

Sedangkan di Jepang muncul pertanyaan, mengapa pemerintah Jepang diwajibkan membayar pampasan perang ke Indonesia karena mereka menganggap Jepang tidak berperang melawan Indonesia dan justru sebaliknya berminat memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.

Di dalam Kementerian Luar Negeri Jepang pun juga ada suara yang cenderung menentang pembayaran pampasan perang tersebut. Ei'ichi Wajima, pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Jepang yang bertanggung jawab atas masalah pampasan juga ragu ragu melaksanakan kewajiban Jepang yang ditentukan oleh Perjanjian San Fransisco ini. Rasa keberatan juga muncul dalam masyarakat dan parlemen Jepang.

Oleh karena sikap dan pandangan Jepang yang demikian dan juga karena jumlah tuntutan Indonesia yang melampaui kekuatan ekonomi Jepang pada masa itu, negosiasi untuk pampasan mula mula mengalami kesulitan. Tetapi lama kelamaan dunia pengusaha Jepang mulai menyadari bahwa penyelesaian pampasan perang dan pembukaan hubungan diplomasi yang cepat menguntungkan pembangunan ekonomi Jepang.

Pada tahun 1954 Menteri Luar Negeri Okazaki mengeluarkan ucapan yang senada itu dalam ceramah yang diberikan untuk kaum pengusaha di Osaka. Untuk meyakinkan kaum pengusaha agar menyetujui pembayaran pampasan, beliau mengatakan bahwa pampasan itu jangan dipandang sebagai kewajiban (*duty*) tetapi sebagai kesempatan baik untuk mengambil untung dari pembangunan yang sedang berjalan di negara-negara Asia Tenggara.⁴⁰

Ucapan itu sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia karena dianggap mencerminkan maksud tersembunyi di belakang pembayaran pampasan perang dan isu itu diambil dalam sidang parlemen Indonesia. Koran *Harian Umum* menulis bahwa ucapan itu mencerminkan sifat Jepang sebagai penyerbu agressif.⁴¹ Meski Ei'ichi Wajima, wakil pemerintah Jepang yang ada di Indonesia untuk negosiasi pampasan, meminta maaf kepada pemerintah Indonesia, tetapi kasus ini menimbulkan kemarahan besar masyarakat Indonesia. Akibatnya Okazaki dipanggil oleh parlemen Jepang untuk menjelaskan ucapannya yang telah menimbulkan kemarahan bangsa Indonesia itu.

Pengertian bahwa pembayaran pampasan bisa bermanfaat untuk bangkit kembali ekonomi Jepang dimiliki oleh banyak orang sebagai pikiran alternatif.⁴² Anggapan itulah yang akhirnya mendorong Jepang ke pembayaran pampasan. Menurut kalkulasi Jepang mereka bisa mengambil keuntungan dari pampasan.⁴³ Sejak itu para elite dunia usaha Jepang mulai ikut campur tangan dalam negosiasi antara kedua negara. Pihak Indonesia sangat berhati hati terhadap ambisi dunia

usaha Jepang ini yang mencoba mempergunakan pampasan perang untuk perkembangan ekonomi Jepang.

Negosiasi tetap sulit dan mengalami bermacam hambatan, apabila pihak Indonesia menuntut bahwa angka merah (*debt*) dari ekspor-impor dibereskan dengan pampasan. Pada masa itu, meskipun belum ada hubungan diplomatik, sudah diadakan ekspor-impor antara Indonesia dan Jepang. Tetapi oleh karena jumlah impor ke Indonesia jauh melebihi ekspor ke Jepang dan juga pembayaran dari pihak Indonesia banyak macet sehingga utangnya mencapai 170 juta dollar US.

Pemerintah Jepang tidak bisa memenuhi tuntutan Indonesia karena utang perdagangan adalah urusan sektor swasta dan tidak mungkin bisa ditutupi dengan dana pemerintah. Pembayaran demikian juga bermasalah karena ini menimbulkan pemakaian (keluaran) uang kontan (tunai), yang bertentangan dengan ide dalam pasal 14 Perjanjian San Fransisiko.

Halangan satu lagi berasal dari pihak Jepang. Pemerintah Jepang berprinsip bahwa jumlah pampasan harus ditentukan dengan mempertimbangkan rasio antara tiga negara yang menuntut pampasan, yaitu Filipino 4, Indonesia 2 dan Birma 1. Indonesia tidak bisa menerima rasio ini karena jumlah penduduk Indonesia yang menderita jauh lebih besar daripada yang dialami di Filipina.

Unsur satu lagi yang negatif adalah fakta bahwa Hatoyama yang menjabat Perdana Menteri Jepang pada 1954-1956, tidak begitu giat dalam membangun hubungan dengan Asia, ia lebih mengutamakan pemulihan hubungan dengan Soviet. Tetapi menjelang 1957 dengan pengantian Perdana Menteri kepada Nobusuke Kishi situasi mulai berubah. Kishi, mantan tahanan kejahatan Perang yang diadili di Tokyo dan dipenjarakan sampai 1951, pernah mengambil peranan penting dalam administrasi di Manchukuo sebelum perang dan boleh dikatakan mempunyai ideologi Pan Asianism. Ia bersama golongan pengusaha berusaha secara aktif membangun hubungan erat dengan Indonesia. Dengan inisiatif Kishi, didukung oleh sikap Sukarno yang ingin menerima pampasan secepat mungkin, negosiasi pampasan cepat maju dan akhirnya kesepakatan tercapai.

(4) Dekolonisasi ekonomi Indonesia dan pampasan

Di sini muncul pertanyaan faktor apakah yang mendorong Sukarno ingin menerima pampasan secepat mungkin? Pemerintah Sukarno berminat mengambil kebijaksanaan dekolonisasi/nasionalisasi ekonomi, yaitu membatalkan hubungan istimewa dengan Belanda, dan menyita aset perusahaan Belanda. Indonesia pada masa 1950-an diwarnai dengan perjuangan untuk merebut kembali kekuasaan

*HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG
1945-1958*

ekonomi dan kekayaan alam dari manajemen Belanda, yaitu dekolonisasi ekonomi. Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 mengizinkan Belanda untuk tetap mempertahankan modal yang telah ditanam di Indonesia. Pada zaman itu kebanyakan perusahaan besar yang ada di Indonesia adalah milik Belanda dan ekonomi Indonesia masih sangat dikuasai Belanda. Sukarno ingin mengambil alih perusahaan-perusahaan itu (nasionalisasi), tetapi untuk itu perlu dukungan dana yang bisa menutup kerugian dan kesulitan yang akan timbul sebagai akibatnya. Dihitung Sukarno bahwa dana pampasan berguna untuk mendukung ekonomi Indonesia yang bergoyang sebagai akibat nasionalisasi aset dan menutupi kesulitan itu.

Menurut arsip Kementerian Luar Negeri Jepang, Sukarno pada November 1953 sudah pernah membuka rahasia kepada Konjen Jepang, Fumihiko Kai, tentang keinginannya menghapus *Economic Union* dengan Belanda dan mengadakan nasionalisasi aset Belanda. Sukarno menambah kata bahwa perlu bantuan Jepang untuk melaksanakan rencana ini.⁴⁴

Pada tahun 1956 kabinet Ali Sastroamijoyo memberitahukan pemerintah Belanda bahwa Indonesia memutuskan *Dutch-Indonesian Union*. Dengan ini Indonesia menjadi bebas dari ikatan ekonomi khusus dengan Belanda, tetapi perusahaan Belanda masih tetap beroperasi di Indonesia.

Akhirnya pada bulan November 1957 Perdana Menteri Jepang, Nobusuke Kishi, mengunjungi Indonesia dan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Sukarno. Dalam kesempatan itu kedua pemimpin negara ini mencapai kesepakatan total tentang pembayaran pampasan, Jumlah pampasan murni yang ditentukan ternyata agak kecil, hanya 223 juta dollar US atau 13% dari tuntutan semula. Tetapi Kishi menerima permintaan Indonesia untuk melunaskan hutang impor (sudah menjadi kurang lebih 200 juta dollar US saat itu) dan juga memberi bantuan ekonomi gratis (hibah) bernilai 400 juta dollar US. Jadi nilai totalnya kurang lebih 800 juta dollar US dan ini hampir sama dengan jumlah pampasan (550 juta dollar US) ditamba dengan bantuan ekonomi (250 juta Dollar US) untuk Filipina, yaitu 800 juta dollar US. Jumlah pampasan kepada negara-negara lain di Asia Tenggara sebagai berikut: Birma (1955) US\$ 200 juta dan Vietnam Selatan(1959) US \$ 38 juta.

Indonesia cukup puas karena dana Jepang itu bisa menjamin mengisi kekurangan daya ekonomi yang diakibatkan nasionalisasi asset Belanda. Kebetulan satu hari sesudah perundingan Sukarno-Kishi, pada 28 November 1957 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa menolak permohonan Indonesia mengenai Irian Barat, dan hal ini mendorong Indonesia untuk bergerak ke arah nasionalisasi

aset Belanda pada tanggal 2 Desember. Saya yakin bahwa dibelakang keputusan ini pampasan dari Jepang mengambil peranan penting menambahkan rasa percaya diri sehingga mendorong pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi.

Dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa kasus yang mendukung hipotesis saya ini. Salah satu contohnya ialah kasus kapal laut. Tidak lama sesudah nasionalisasi aset Belanda, justru Indonesia menderita kekurangan kapal transport dalam negeri karena tidak berhasil menyita kapal-kapal milik KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij). Meskipun kantor KPM disita, tetapi kapal-kapalnya berhasil diselamatkan oleh Belanda keluar wilayah lautan Indonesia tanpa berhasil dihalangi Indonesia. Akibatnya Indonesia mengalami kehilangan 85 buah kapal untuk perhubungan dalam negeri, (total jumlah 146,000 tons),⁴⁵ Pemenuhan sirkulasi barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari mengalami kemacetan sehingga kekacauan ekonomi tersebar di seluruh Indonesia.

Pada waktu itu Indonesia minta Jepang agar diberikan kapal dengan dana pampasan, meskipun perjanjian pampasan belum secara resmi ditandatangani.⁴⁶ Pada awalnya pihak Jepang ragu-ragu karena takut dituduh oleh dunia Internasional bahwa Jepang merampas kuasa dari Belanda. Tetapi pemerintah Indonesia mengirim Menteri Perhubungan dan lainnya untuk meminta bantuan dari Jepang. Akhirnya Jepang menyetujui penjualan 51 kapal dengan syarat bahwa pembayarannya dijamin oleh dana pampasan.⁴⁷

Penutup

Dalam esai ini saya memperkenalkan beberapa cerita sejarah yang belum sempat dibahas dalam *mainstream* sejarah hubungan Indonesia-Jepang. Karena sejarah kedua negara ini cenderung berkonsentrasi ke zaman pendudukan Jepang (1942-45) dan zaman setelah 1958, perkembangan antara 1945 dan 1957 sering dilupakan seolah-olah hubungan antara kedua negara tiba-tiba mulai pada tahun 1958. Tetapi kenyataannya ada berbagai isu penting selama itu yang merupakan dasar perkembangan sejarah masa berikutnya.

Dalam bahasan pertama dijelaskan bahwa pada masa revolusi Indonesia dan pendudukan Sekutu di Jepang, tidak ada komunikasi langsung antara kedua negara, tetapi kenyataannya ada berbagai masalah yang harus dibereskan secara individu.

Dalam bahasan kedua dibahas perubahan status kedua negara dan pembentukan hubungan kedua negara sesudah penyerahan kedaulatan ke Indonesia dan berhentinya pendudukan Sekutu di Jepang.

*HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG
1945-1958*

Di kedua periode itu salah satu masalah yang paling berkesan adalah nasib orang kecil yang dipermainkan dalam arus sejarah. Masalah ini dibahas dari segi masalah repatriasi yang dialami oleh berbagai orang sebagai akibat perang; dalam esai ini diambil kasus mahasiswa, anak campur dan kasus *deserter*, dan masalah itu ditulis dalam bab I, II dan III. Di belakang itu pasti ada cerita perpisahan keluarga, kehilangan tanah air dan lain-lain.

Sebagai penutup esai ini saya mengambil masalah pampasan perang dalam bab IV. Masalah inilah yang menghambat berdirinya hubungan diplomatik kedua negara pada masa lebih awal. Tetapi akhirnya muncul pikiran/pandangan yang mendorong proses negosiasi itu di kedua pihak. Di pihak Jepang ada ide/pikiran bahwa pembayaran itu akan memperkembangkan ekonomi Jepang dan lebih baik cepat bayar pampasan. Di pihak Indonesia ada antisipasi bahwa pembayaran pampasan itu akan membantu /mendukung ekonomi Indonesia setelah nasionalisasi aset Belanda. Perjanjian Pampasan Perang yang akhirnya tercapai pada Januari 1958 antara pemerintah Indonesia dan Jepang dan sejak itu sudah 60 tahun.

Catatan Akhir

- ¹ Arsip ANRI AS-1592 “Nederlansche Missie in Japan”
- ² Arsip ANRI AS-1592 “Nederlandsche Militaire Missie naar Japan; Verslag 1947”
- ³ Gotō, Ken’ichi (1987) *Haraguchi Takejirō no shōgai: nanpō chōsa no senku*, Waseda University Press p. 274
- ⁴ Arsip ANRI AS-1592 “Nederlandsche Militaire Missie naar Japan; Verslag 1947”
- ⁵ Arsip Nationaal Archief, Belanda (selanjutnya disingkat sebagai NA), Inventaris 348-3
- ⁶ Arsip NA Inventaris 348-1
- ⁷ Arsip NA Inventari 348-4)
- ⁸ Sebaliknya kantor *zaigai jimusho* pemerintah Jepang dibuka di Jakarta pada Nov. 1951. Kepala kantor ini, Yoshiharu Takeno, tidak setingkat duta besar.
- ⁹ Wawancara dengan Sam Suhaedhi (Nanpō Tokubetsu Ryūgakusei, pegawai Deplu) 14 Jan 1993 10 Sep. 1996 di Jakarta)
- ¹⁰ Wawancara dengan Sam Suhaedi, op.cit.,
- ¹¹ Karena status Konjen lebih rendah tidak mungkin Sudjono, tadinya sebagai duta besar, diangkat menjadi Konjen baru (Soebagio 1983, *Mr. Sudjono Mendarat dengan Pasukan Jepang di Banten 1942*, Jakarta p.306) Satu tahun kemudian Sudjono diangkat menjadi duta besar Brazil. (Soebagio op.cit., p. 307)
- ¹² Wawancara dengan Satria Ishi’i (deserter dan karyawan Konjen Jepang) 30 Maret & 6 April 1993 di Jakarta
- ¹³ Ike’o, Katsumi 1954, *Indonesia no Keizai to Nihon*, Tokyo: Indonesia Tsūshō Sangyō Kyōkai pp. 328 & 332
- ¹⁴ Harian Umum 25 Sep. 1952
- ¹⁵ Mestika 7 Maret 1953
- ¹⁶ Mestika 13 Feb. 1953
- ¹⁷ Osumi Akira & Kudō Yūko, 2008, *Aduh Sabar Perdania: Jitsuroku Indonesia Nikkei gōben ginkō no 50nen*, Tokyo: Enu Enu E
- ¹⁸ Nishihara, Masashi, 1976, *The Japanese and Sukarno’s Indonesia: Tokyo-Jakarta Relations, 1951-1966*, Honolulu: University Press of Hawaii, p.65
- ¹⁹ Wawancara dengan Shigetada Nishijima (staff di Kantor Penghubung Angkatan Laut di Jakarta pada zaman Jepang) (transcript of his speech at Institute of Developing Economies on 14 Feb 1992 in Tokyo)
- ²⁰ Miyagi, Taizō, 2001, *Bandon Kaigi to Nihon no Ajia Fukki: Amerika to Ajia no hazama de*, Sōshisha p.43
- ²¹ Mestika, 21 April 1955
- ²² Sebenarnya bukan pacar dan bisa disebut “isteri”, karena mereka biasaya sudah hidup bersama dan sering sudah punya anak juga. Tetapi pada zaman pendudukan orang Jepang tidak diijinkan menikah resmi..
- ²³ Hak pensiun mereka dicabut. Mereka dibeban nama jelek sebagai *deserter (tōbōhei)* itu dan nama baik mereka dipulihkan baru sesudah 1990-an
- ²⁴ Arsip Kementrian Pertahanan Belanda GG-8
- ²⁵ Yang pertama kali datang ke Indonesia sesudah kapitulasi Jepang untuk mengurus hal hal yang berkaitan likuidasi pasca perang adalah tentara Inggris. Kebanyakan perajurit itu orang India dan antaranya sering ada yang menolak menyerbu pasukan Indonesia dan melarikan diri.

-
- ²⁶ Wawancara dengan Satria Ishi'i, op.cit.
- ²⁷ Arsip NA, Inventaris 439 "Japanners en Duitsers"
- ²⁸ Arsip NA, Inventaris 439 "Rijchtrijnen t.a.v. behandeling van Japanners"
- ²⁹ Utsumi, Aiko & Murai Yoshinori, 1980, *Sekidōka no chōsenjin hanran*, Tokyo; Keisō Shobō, pp. 234-241
- ³⁰ Arsip Deplu Jepang K'0002 Surat dari Konjen Kai ke Menlu 3 Maret 1953
- ³¹ Ishi'i Masaharu 1984, *Minami kara: Indonesia zanryū moto nihonhei no kaisō*, Tokyo: Nishida Shoten p.165 & wawancara dengan Susumu Kawaji (deserter 17 June 1975 di Tokyo)
- ³² Arsip Deplu Jepang K'0002 "Zairyū hōjin hikiageni kansuru ken" 4 Juli 1953
- ³³ Arsip Deplu Jepang K'-0002-3 "Indonesia Zanryū Nihonjin no soukan ni kansuru ken"
- ³⁴ Utsumi & Murai 1980, op.cit., p.254 & Sankei Shinbun 13 Maret 1953. Konjen Jakarta, Kai pergi ke Medan untuk menyelidiki masalah ini.
- ³⁵ *Fukushi tomonokai Geppō* no.120 April 1992
- ³⁶ *Fukushi tomonokai Geppō* no.120 April 1992 & wawancara dengan Ratna Sari Dewi Sukarno (di Tokyo)
- ³⁷ Angka ini berdasarkan atas kerugian yang diselidiki dan dihitung oleh Kantor Urusan Jepang pemerintah Hindia Belanda pada masa pasca perang, yaitu 32.5 miliar Guilder. Jumlah itu senilai dengan \$ US17,5 miliar berdasarkan kurs pada 1951. (Dwi Daralis Hardini, 1989 "Hubungan diplomatik Indonesia Jepang tahun 1951-1958: Satu kajian mengenai Pampasang Perang" skripsi diserahkan ke Univ. Sebelas p.100
- ³⁸ Mestika, 27 Maret 1952
- ³⁹ Kiriya, Noboru, (1995) "Nihon Gunsei hōkai to Tōnan Ajia: Sensō sekinin, shokuminchi saiseifuku soshite dokuritsu e no kokusai chitsujo" *Rekishigaku Kenkyū* no.672 June 1995 pp.10-11
- ⁴⁰ Fujisaki, Nobuyuki, 1955, "Indonesia baishō mondai no ke'i to sono haikai", *Ajia Mondai* June 1955 p.53, & Asahi Shinbun 7 Nov. 1954
- ⁴¹ *Harian Umum* 23 Jan. 1954
- ⁴² Jadi pandangan/sikap Jepang terhadap pampasan dibagi dua: di satu pihak ada "berusaha mengecilkkan jumah pampasan dan meringankan beban rakyat Jepang", Di lain pihak juga ada pikiran bahwa "mesti berusaha mempererat hubungan ekonomi melalui pembayaran pampasan" (Shirahata, 1958, "Indonesia baishō kyōtei no seiritsu to kongo no mitōshi" *Ke'idanren Geppō*, Vol. 6 No.3 Maret 1958 p.42)
- ⁴³ Wawancara dengan Satria Ishi'i, op.cit.,
- ⁴⁴ Arsip Deplu Jepang B7-0151
- ⁴⁵ Dick, Howard, *The Indonesian interisland shipping industry: An analysis of competition and regulation*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1987 p.24 and Meijer, Hans, 1994 *Den Haag-Djakarta: De Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1950-1962*, Utrecht: AURA p. 601.
- ⁴⁶ Mestika 7 Des. 1957
- ⁴⁷ Nishihara op.cit, 1976 p.104

Daftar Pustaka

Arsip/ Dokumen

- “Pengoemoeman dari Kementerian Negara Oeroesan Peranakan” dan “Pidato J.M.Perdana Menteri pada Tg. 8/9/1947”, dalam *Negara Republik Mendjamin Golongan Tionghoa*. Siaran Kilat. (Jogjakarta: Kementerian Penerangan, 1947), h. 12-13, 19.
- Navy Department, ONI 232 S. (1943). *Japanese Military Aircraft*. Washington, D.C.: Office of The Chief of Naval Operations.
- Nederlands Instituut voor Oorlogdocumentatie (NIOD) Amsterdam, "Verklaring Kapt. Tsuchiya Kiso" (1947), *NIOD-IC-1640* no. 30:, h.3, "Mizuta Shigetoshi Interrogation", *H.O. NEFIS, confidential* (14-3-1946).
- Tan Po Goan. (1 November 1946). "Chinese Problems in Indonesia", *The Voice of Free Indonesia*.
- The Headquarters of the 16th Army Java, "Explanations Regarding All Kinds of Armed Bodies" (t.t), *NIOD 10-041640* no.7, h. 9.

Wawancara dan Pidato

- Adam Basori. Staf kantor Perwakilan Pemerintah Indonesia. (3 Agustus 1993). Jakarta.
- Dewi Sukarno (isteri Sukarno).
- Ishii Satria. *deserter*, karyawan Konjen Jepang. (30 Maret & 6 April 1993). Jakarta.
- Kawaji Susumu. *deserter*. (17 Juni 1975). Tokyo.
- Liem Liang Djing. (30 Agustus 1993).
- Liem Liang Kioe dan Ety Liem. (6 Mei 1995).
- Nishijima Shigetada. Staff at Navy liaison office during WW II) transkrip pidato terdapat di Institute of Developing Economies. (14 Februari 1992). Tokyo.
- Sam Suhaedhi. Nanpō Tokubetsu Ryūugakusei, pegawai Departemen Luar Negeri. (14 Januari 1993 dan 10 September 1996. Jakarta.
- Tan Thiam Kwie. (17 April 1992).
- The Djan Liong. (5 Maret 1994).
- Woo Shu Fe. (Yogyakarta, 24 Juli 1993).
- Woo Shu Fe. (24 Juli 1993)

Surat Kabar

- Abdullah, Basuki. *Sepatah Kata untuk Pelukis-pelukis Kita*. Dalam *Asia Raja*, 29 April 1943.
- Akashi. *Nanyang Chinese*, h. 33; Peter Post, "Chinese Business". *Asahi Shinbun*.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

Asia Raja (17 Juli 2603 (1943)

Asia Raja. (22 September 1944).

Asia Raja. (4 Agustus 2602)

Fukushi tomonokai Geppō

Harian Umum.

Indonesia Merdeka

Kan Po, 2 (I) (10 September 2602/1942)

Mestika.

Pengoemoeman Balatentara: Tentang Memperkoat Pembelaan Tanah Djawa Dengan Pendoedoek Tionghoa", *Kan Po* 55 (III), 25 November 1944.

Rivai, Abdoel. (1 Maret 1907). "Pengadjaran Bangsa Tjina di Tanah Hindia", *Bintang Hindia*, no 22 (IV).

Sin Po (10 November 1928).

Sinar Matahari (16 November 2604/1944).

Sinar Matahari (27-10-2604/1944).

Sinar Matahari (28 Oktober 2604/1944).

Sinar Matahari (4 Maret 2602/1942).

Sinar Matahari (7 Desember 2602/1942).

Sinar Matahari, (11 Januari 2604/1944).

Sinar Matahari, 31 Juli 2603 (1943/1943).

Sinar Matahari. (13 Mei 2604/1944).

Soera MIAI.

Soera Moeslimin Indonesia.

Thian Joe, Liem. (1948). "Nama-nama Tionghoa di Djaman Pantjaroba", *Jade*, 1.

Tik Kie, Tjeng. (15 Februari 2603.) "Siaran Lagoe-lagoe dan Moesik Tionghoa dalam Radio", *Sinar Matahari*.

Tik Kie, Tjeng. (17-2-2603.). "Kenang-kenangan Tahoen 2603 (II)", *Sinar Matahari*.

Tik Kie, Tjeng. (4 Februari 2603). "Tahoen Baru Imlek Pertama dalam Suasana Baroe", *Sinar Matahari*.

Tik Kie. (5-3-2603 (1943)). Tjeng. "Satoe Tahoen dibawah Perlindoengan Nippon", *Sinar Matahari*.

Majalah

"Dibawah Pengaroeh Semangat Baroe", *New Light Magazine* 6(I),5-4-1948: 3-4.

Djawa Baroe. (1 Januari 1943 sampai dengan edisi terakhir 1 Agustus 1945).

Djawa Baroe. (No.1, Januari 1943)

Djawa Baroe. (No.18, 15 September 1944)

Djawa Baroe. (No.3.Th.2603/1943)

Djawa Baroe. (No.6.Th 2603)

Djawa Baroe. (No.5. 1 Maret 1943)

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

Kebudayaan Timur. (No.2, 26 Desember 2603/1943).

Buku

- A. Coppel, Charles. (1993). *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Aboebakar (2011 [1957]). *Riwayat Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangannya Tersiar*, Jakarta: Mizan dan Panitia Buku Peringatan Al-marhum K.H.A. Wahid Hasjim.
- Aiko, Utsumi & Yoshinori, Murai. (1980). *Sekidōka no chōsenjin hanran*. Tokyo: Keisō Shobō.
- Akira, Osumi & Yuko, Kudō. (2008). *Aduh Sabar Perdania: Jitsuroku Indonesia Nikkei gōben ginkō no 50nen*. Tokyo: Enu Enu E.
- Akashi, Yoji. (1970). *The Nanyang Chinese National Salvation Movement, 1937-1941*. Lawrence: University of Kansas.
- Anderson, Benedict. (1961). *Some Aspects of Indonesian Politics Under the Japanese Occupation*. Ithaca: Cornell MIP.
- Anwar, Chairil. (1952). Dalam Aoh.K. Hadimadja, *Beberapa Paham Angkatan 45*. Jakarta: Tinta Mas.
- Atō, Masuda (ed). (1981). *Sukaruno Daitōryō no Tokushi: Cho Sin Mo Kaisōroku*. Tokyo: Chuō Kōron.
- Bahar, Saafroedin; Hudawati Sinaga, Nannie; dan Kusuma, Ananda B. (ed) (1998). *Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*. Edisi ke-4. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Balfas, M.. (April 1951). *Seni Lukis Indonesia Baru*, Majalah Kebudayaan 'Indonesia' No.4, TH.II.
- Ban'no, Tokutaka. (2008). *Samurai Bali ni junzu: Indonesia dokuritsu sensō no eiyū ni natta kyū nihonhei no kiroku*. Tokyo: Kōdansha.
- Benda, Harry J. (1972). *Continuity and change in Southeast Asia: Selected journal articles of Harry J. Benda*, New Haven: Yale University.
- _____ (1985). *Bulan Sabit dan Matahari Tebit: Islam Indonesia Masa Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bergerud, Eric M. (2001). *Fire in The Sky: The Air War in The South Pacific*. Oxford: Westview Press.
- Bishop, Chris. (1998). *The Encyclopedia of Weapons of World War II*. London: Barnes & Noble, Inc.
- Boechori Zainuddin, Imam. (1966). *Latar Belakang Sejarah Pembinaan dan Perkembangan Seni Lukis Indonesia Modern (1935-1950)*. ITB: Skripsi Sarjana.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

- Boland, B.J. and I. Farjon. (1983). *Islam in Indonesia: a Bibliographical Survey 1600-1942 with post-1945 Addenda*, Dordrcht: Foris Publication.
- Boon Keng, Cheah. (1980). "The Social Impact of the Japanese Occupation of Malaya (1942-1945)", dalam Alfred McCoy (ed). *Southeast Asia Under Japanese Occupation*. New Haven: Yale.
- Bosquet, G.-H. and Schacht, J. (eds) (1957) *Selected works of C. Snouck Hurgronje*, Leiden: Brill.
- Bradley, John H., dan Jack W. Dice. (1989). *The Second World War: Asia and The Pacific*. Wayne, NJ: Avery Publishing Group Inc.
- Brown, David. (1990). *Warship Losses of World War Two*. London: Arms and Armour.
- C. Lebra, Joyce. (1988). *Tentara Gemblengan Jepang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Carey, Peter. (1984, April). Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central Java, 1755-1825". *Indonesia*, 37.
- Chalmers, Douglas A.. (1985). "Corporatism and Comparative Politics", dalam Howard J. Wiarda (ed.), *New Directions in Comparative Politics*. Boulder: Westview.
- Cox, Jeffrey R. (2014). *Rising Sun, Falling Skies: The Disastrous Java Sea Campaign of World War II*. Oxford: Osprey Publishing.
- Cribb, Robert (1991). *Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution 1945-1949*. Honolulu: UP of Hawaii.
- Daralis Hardini, Dwi. (1989). "Hubungan Diplomatik Indonesia Jepang tahun 1951-1958: Satu kajian mengenai Pampasan Perang" skripsi diserahkan ke Univ. Sebelas Maret.
- De Jong, Louis. (1984). *Het Koninkrijk de Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog*, jil. 11a: *Nederlands-Indie I*. S-Gravenhage: Martinus Nijoff.
- Deacon, Richard. (1986). *Menyingkap Dinas Rahasia Jepang Kempei Tai*, terj. Tim USA. Jakarta: PT Upaya Swadaya Aksara.
- Dick, Howard. (1989). *The Indonesian Inter Island Shipping Industry: An Analysis of Competition and Regulation*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Dijk, Kees van. (2002). "Colonial Fear: the Netherlands Indies and Malay Peninsula 1890-1918: Pan-Islamism and the Germano-Indian plot", in H. de Jonge and N. Kaptein (eds), *Transcending borders: Arabs, politics, trade and Islam in Southeast Asia*, Leiden: KITLV Press.
- Dilley, Roy. (1970). *Japanese Army Uniform and Equipment, 1939-1945*. Edgware, Middlesex; Almark Publication.
- Djajusman. (1978). *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL)*. Bandung: Angkasa.
- Djojoadisuryo, Ahmad Subardjo. (1978). *Kesadaran Nasional Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Penerbit PT Gunung Agung.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

- Dwi Pratisto, Sujud. "Tan Eng Hoa: Pengusul Pasal Kebebasan Berserikat" *Gatra* 29 Agustus, "Edisi Khusus Hari Kemerdekaan: Tokoh Lintas Agama Perumus Indonesia".
- Elsbree, Willard H.. (1955). *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist Movements, 1940 to 1945*. New York: Russel & Russel.
- _____. (1953). *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist Movement 1940-1945*. Cambridge: Harvard.
- Francillon, René J. (1970). *Japanese Aircraft of The Pacific War*. London: Putnam and Company.
- Geertz, Clifford. (1960). "The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker", *CSSH* 2: 228-249.
- Giok Tjhan, Siau. Lima Jaman: Perwujudan Integrasi Wajar (Amsterdam: Teratai, 1981), h.74.
- Giok Tjhan, Siau. *Renungan Seorang Patriot Indonesia*.
- Goto, Ken-ichi, (1998). *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. (terjemahan Hiroko Otsuka dkk) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. (1997). *Returning to Asia: Japan-Indonesia Relations, 1930s-1942*. Tokyo: Ryukei Shosha.
- Gunseikanbu (ed.). (1986). *Orang-orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____. (ed.). (2604). *Boekoe Pengoempoelan Oendang-oendang*. Djakarta: Balai Poestaka.
- Hanifah, Abu. (1972) *Tales of a Revolution*. Sydney: Angus and Robertson.
- Hardjono, R. "Komuniti Tionghoa Jogjakarta", *Skripsi Sardjana Sedjarah*, Jogjakarta: IKIP Sanata Dharma.
- Hatta, Mohammad. (2002). *Memoir*. Jakarta: Panitia Penerbitan.
- Hayashi, Saburo, dan Alvin D. Cox. (1959). *Kogun: The Japanese Army in the Pacific War*. Quantico, Va.: Marine Corps Association.
- Hisyam, Muhammad (2001). *Caught between Three Fairs: The Javanese Pangulu under the Dutch Colonial Administration*, Jakarta: INIS.
- Holt, Claire. (2000). *Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia*. Bandung: Seni Masyarakat Pertunjukan Indonesia (MSPI).
- Holt, Claire. (1967). *Art in Indonesia: Continuities and Change*. New York: Cornell Univ Press.
- Hüsken, Frans. (1984). "Islam and Collective Action: Rural Violence in North Central Java in 1942", dalam Dick Kooiman, Otto van den Muijzenberg dan Peter van der Veer (ed), *Conversion, Competition and Conflict: Essays on the Role of Religion in Asia*. Amsterdam: Free University Press.
- I. N., Soebagio (1983). *Mr. Sudjono Mendarat dengan Pasukan Jepang di Banten 1942*. Jakarta: Gunung Agung.
- Jaspan, M.A.. (1965). "In Quest of Law: the Perplexity of Legal Syncretism in Indonesia", *CSSH*, vol. VII, no. 3.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

- Karim, H. Abdul (Oey Tjeng Hien). (1982). *Mengabdikan Agama, Nusa dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kartodirdjo, Sartono. (1966). *The Peasant Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Courses, and Sequel*, The Hague: Martinus Nijhoff.
- Katsumi, Ike'o. (1954). *Indonesia no Keizai to Nihon*. Tokyo: Indonesia Tsushō Sangyō Kyōkai.
- Ken'ichi, Gotō. (1977). *Hi no umi no bohyō: aru ajia shugisha no ruten to kiketsu*. Tokyo: Jiji Tsushinsha.
- Kennedy, Paul. (1972.) *Pacific Onslaught: 7th Dec. 1941/7th Feb. 1943*. New York: Ballantine Books.
- Kesheh, Mobini. (2007) *Hadrami Awakening: Kebangkitan Hadhrami di Indonesia*, Penerjemah Ita Mutiara dan Andri. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Korver, APE. (1982). *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Kurasawa, Aiko. (1997). "Persiapan Kemerdekaan pada Hari-hari Terakhir Pendudukan Jepang", dalam Taufik Abdullah (ed), *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama-Program Studi Asia Tenggara.
- _____ (1988) .“Mobilization and Control: A Study of Social Change in Rural Java 1942-1945”, Ph. D. Dissertation, Cornell University, Ithaca.
- _____ (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.
- _____ (1987) *Propaganda Media on Java Under The Japanese 1942-1945*, Journal Indonesia Vol.44. Ithaca: Southeast Asia Program Publication Cornell University.
- _____ . (2011). *Sengo Nihon Indonesia kankeishi*. Tokyo: Soshisha.
- Kusnadi. (1990-1991). *Seni Lukis Zaman Pendudukan Jepang* dalam Mochtar Kusuma Atmadja,dkk., *Perjalanan Seni Rupa Indonesia: Dari Pra-Sejarah hingga Masa Kini*. Jakarta: Panitia Pameran KIAS.
- Kwartanada, Didi. 'The Road to Resinification: Education for the Chinese during the Japanese Occupation', dalam Peter Post et al. (eds), *Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War*. Leiden: E.J. Brill.
- _____ "Kolaborasi dan Resinifikasi: Komunitas Cina Kota Yogyakarta pada Jaman Jepang", naskah belum diterbitkan.
- _____ (1996). Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945". Dalam Lembaga Studi Realino (ed.). *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*. Yogyakarta: Kanisius-LSR.
- _____ (Juni 2002). 'Competition, Patriotism and Collaboration: The Chinese Businessmen of Yogyakarta Between the 1930s-1945'. *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol.33, no.2.
- Kwee Kek Beng. (1947). *Doea Poeloe Lima Taon Sebagai Wartawan*. Batavia: Kuo, 1947.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

- Laffan, Michael F.. (2003). *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Wind*. London and New York: Routledge and Curzon.
- Locher-Scholten, Elsbeth. "European Images of Japan and Indonesian Nationalism Before 1942", dalam J. van Goor (ed.), *The Indonesian Revolution*. Utrecht: HES.
- Lombard, Denys dan Salmon, Claudine. (2001). "Islam and Chineseness", dalam Alijah Gordon (ed.), *The Propagation of Islam in the Indonesian-Malay Archipelago*. Kuala Lumpur: Malaysia Sociological Research Institute.
- Mamoru Shinozaki. (1975). *Syonan: My Story, The Japanese Occupation of Singapore*. Singapore: Asia Pacific.
- Mangoenkoesoemo, Goenawan. (1981). "Lahirnya Boedi Oetomo", dalam Pitut Soeharto dan A. Zainul Ichsan (ed), *Cahaya di Kegelepan. Capita Selecta Kedua*. Jakarta: Jayasakti.
- Marger, Martin N. (1994). *Race and Ethnic Relations: American and Global Perspectives*. Belmont: Wadsworth.
- Masaharu, Ishii. (1984). *Minami Kara: Indonesia Zanryū Moto Nihonhei no Kaisō*. Tokyo: Nishida Shoten.
- Masyhuri. (2006). *Bakar Pecinan!: Konflik Pribumi vs. Cina di Kudus Tahun 1918*. Jakarta: Pensil 324.
- Meijer, Hans. (1994). *Den Haag-Djakarta: De Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1950-1962* Utrecht: AURA.
- Military Intelligence Service. (1942). *Japanese Ground and Air Forces*. Washington, D.C: War Department.
- Mook, H.J.van. (1944). *Netherlands Indies and Japan*. London: G. Allen & Unwin.
- Morison, Samuel E. "How and Why Japan Prepared for World War", dalam Reader's Digest (peny.). (1971). *Illustrated Story of World War II*. New York: The Reader's Digest Association, Inc.
- Murayama, Yoshitada. (1998). "Pola Penetrasi Ekonomi Jepang ke Hindia Belanda Sebelum Perang", (dalam Saya Shiraishi dan Shiraishi, *Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara*, Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nagazumi, Akira (ed.). (1988). *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Yayasan Obor, 1988.
- Nakamura, Mitsuo. (Oktober 1970). *General Imamura And The Early Period of Japanese Occupation*, *Jurnal Indonesia* Vol.10, Ithaca: Southeast Asia Program Publication Cornell University.
- Nila, Gary, dan Robert A. Rolfe. (2006). *Japanese Special Naval Landing Forces Uniforms and Equipment 1932-45*. Oxford: Osprey Publishing.
- Nishihara, Masashi. (1976). *The Japanese and Sukarno's Indonesia: Tokyo-Jakarta Relations, 1951-1966*, Honolulu: University Press of Hawaii.
- Noboru, Kiriyaama. (Juni 1995) "Nihon Gunsei Hōkai to Tōnan Ajia: Sensō sekinin, shokuminchi saiseifuku soshite dokuritsu e no kokusai chitsujo" *Rekishigaku Kenkyū* no.672.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

- Nobuyuki, Fujisaki. (1955). "Indonesia baishō mondai no kei'i to sono haikai". *Ajia Mondai June*.
- Noer, Deliar. (1988). *Gerakan Modern di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Nortier, J. J. (1983). "Japanese Parachutisten: Samoerai van de Tweede Wereldoorlog". *Militaire Spectator*, 152; 511.
- Notosusanto, Nugroho. (1979). *Tentara PETA pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Okada Hidenori, *Probin a Void in Documentary Film History: The Rise and Fall of Nippon Eigasha Jakarta Studio* di <http://www.yidff.jp/>, diunduh pada Januari 2008.
- Oktorino, Nino. (2013). *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- _____ (2018). *Hancurnya Armada Sekutu: Kisah Pertempuran di Laut Jawa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- _____ (2018). *Hancurnya KNIL Minahasa: Kisah Terlupakan Palagan Manado 1942*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pakpahan, G.. (1979). *1261 Hari dibawah Matahari Terbit*. Jakarta: Marintan Jaya.
- Pane, Sanusi. (22 Mei 2603). *Seni Eropa Siap Berkembang, Soeara Asia*.
- Parish, H. Carroll, dan Koichi Kawana. (1986). *Jepang Tersulut Perang*, terj. A. Widyamartaya. Jakarta: PT Tira Pustaka.
- Peck-yang, Twang. (1998). *The Chinese Business Élite in Indonesia and the Transition to Independence 1940-1950*. Kuala Lumpur: Oxford, 1998.
- Persada (ed). (1991). *Suka Duka Pelajar Indonesia di Jepang: Sekitar Perang Pasifik 1942-45* Jakarta: C.V. Antarkarya.
- Pirous, A.D. (2003). *Melukis itu Menulis: Kumpulan Tulisan A.D.Pirous Tentang Seni Rupa dan Kebudayaan*. Bandung: Yayasan Serambi Pirous dan Penerbit ITB.
- Post, Peter. (1995). "Chinese Business Networks and Japanese Capital in South East Asia, 1880-1940". Dalam Rajeswary Ampalavanar Brown (ed), *Chinese Business Enterprise in Asia*. London: Routledge.
- Pratt, G.J.. (1974). "The Japanese Occupation in Indonesia: The Role of Putera in the Development of Indonesian Nationalism", Thesis Honours Department of History, Monash Universty.
- Pringgodigdo, A.K.. (1994). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Cetakan ke-13. Jakarta: Dian Rakyat.
- Pugin Kai, Daiwa (ed). (1989). *Perdania ginkō no kaisō: sōritsu 30 shūnen kinen sokumenshi*. Tokyo: Daiwa Pugin Kai.
- Purcell, Victor. (1965). *The Chinese in Southeast Asia*. Singapore: Oxford University Press.
- Rosidi, Ajip. (1977). *Pelukis S. Sudjojono*. Jakarta: Pustaka Jaya: 1977.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

- Rottman, Gordon L. (2005). *Japanese Army in World War II: Conquest of the Pacific 1941–42*. Oxford: Osprey Publishing Ltd.
- Rottman, Gordon L., dan Takizawa, Akira. (2005). *Japanese Paratroop Forces of World War II*. Oxford: Osprey Publishing Ltd.
- Saeroen. (1934). "Apa jang Toean Saeroen njataken", dalam *Mata-Hari* nomor perdana, 1934, tanpa nomor halaman.
- Salecker, Gene Eric. (2010). *Blossoming Silk Against The Rising Sun: U.S. and Japanese Paratroopers at War in the Pacific in T World War II*. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books.
- Samsuedin, Mr. R.. (18 Djoeni 2602). "Poetjoek Pimpinan Pergerakan Tiga A: Instroeksi-Instroeksi", Gambir Barat 2, Djakarta. Koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta.
- Sanento Yuliman. (1968). *Beberapa Masalah dalam Kritik Seni Lukis di Indonesia*. Bandung: Skripsi Sarjana Jurusan Seni Rupa-ITB.
- Seizaburo, Okazaki. (1942). "Menjamboet Hari Peringatan Enam Boelan", dalam *Nomor Istimewa Asia Raja*. Djakarta: Asia Raja, 2602, tanpa nomor halaman.
- Setiono, Benny G. (2002). *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.
- Shigetada, Nishijima et al. (1968). *Japanese Military Administration in Indonesia*. Washington: Joint Publication Research Centre.
- Shirahata. (Maret 1958). "Indonesia baishō kyōtei no seiritsu to kongo no mitōshi" *Ke'idanren Geppō*, Vol. 6 No.3 Maret.
- Sjahrir. (1945). *Perdjoengan Kita*.
- Snouck Hurgronje, C.. (1915). *Nederland en de Islam* [2de vermeerderde druk], Leiden: Brill.
- _____ (1931). *Mekka in the Latter Part of the 19th Century*, Leiden: E.J. Brill.
- _____ (1906). *The Achehnese*, [transl. by A.W.S. O'Sullivan with an index by R.J. Wilkinson], Leiden: Brill, 2 vols.
- _____ (1924). *Verspreide Geschriften*, Den Haag: Nijhoff, vol. 4/1.
- Soedarno, Noerhadi. (1982). *POETERA (Poesat Tenaga Rakjat)*. Jakarta: Tintamas.
- Soemantri, Hilda (ed.) (1998). *Indonesian Heritage: Visual Art*. Singapore: Archipelago Press.
- Soetoesoendoero, Soemarno. (19 Juni 2603). *Peloekis Kita Mentjari Hoeboengan dengan Tjorak Ketimoeran Sedjati*, Asia Raja.
- Somers Heidhues, Mary. (19 April 2003). "Bystanders, Participants, Victims: The Chinese in Java and West Kalimantan, 1945-46", *Makalah pada Konperensi NIOD*, Amsterdam.
- Somers-Heidhues, Mary. (1974). *Southeast Asia's Chinese Minorities*. Melbourne: Longman, 1974.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

- Somers, Mary F. (1965). "Peranakan Chinese Politics in Indonesia". *PhD Thesis: Cornell University*.
- Sosroatmodjo, Soemarno. (1981). *Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya*. Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Spiegel, Gabrielle M. (2005), "Introduction", in Spiegel, Gabrielle M. (ed.), *Practicing History: New Direction in Historical Writing after the Linguistic Turn*, New York and London: Routledge.
- Sudarmanta, J.B. (2004). *Tengara Orde Baru: Kisah Harry Tjan Silalahi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sudjojono. S. (Desember 1974). "Pengalaman Saya Pada zaman Jepang dan Di Zaman Revolusi", dalam *Budaja Djaja* No.79, Thn.VII.
- Suharyo Padmodiwiryo. (1995). *Memoir Haryo Kecil Volume 1*. Jakarta: Obor.
- Sukarno. (1963). *Dibawah Bendera Revolusi Jilid ke-2*, Panitya Penerbit.
- _____ (1989). *Indonesia Menggugat*, Jakarta: PT Gunung Agung.
- Sumardjo, Trisno. *Kedudukan Seni Rupa Kita* dalam Zaini (ed), *Almanak Seni 1957* (Jakarta: Badan Musyawarah Kebudayaan nasional, 1956), hal. 127-128.
- Suminto, H. Aqib. (1985). *Politik Islam Hindia Belana: het Kantoor voot Inlandsche Zaken, 1899-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Supangkat, Jim (1997)., *Indonesian Modern Art and Beyond*. Jakarta: The Indonesian Fine Arts Foundation.
- Suromo. (Mei-Juli 1949). *Timbul dan Tumbuhnya Seni Lukis Indonesia (II)*, Mimbar Indonesia edisi.
- Suryadinata, Leo. (1986). *Dilema Minoritas Tionghoa*. Terjemahan Ny Wilandari Supardan. Jakarta: Grafiti Pers.,
- Suryadinata, Leo. (1995). *Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches*. Edisi Ketiga. Singapore: ISEAS.
- _____ (2005). *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China: A Study of Perceptions and Policies*. Edisi Revisi. Singapore: Marshall Cavendish.
- _____ (2016). "Yap Tjwan Bing" dalam Leo Suryadinata dan Didi Kwartanada (ed). *Tionghoa dalam Keindonesiaan Jilid 3*. Jakarta: Yayasan Nabil.
- The Kenpeitai in Java and Sumatra: Selections from the Authentic History of the Kenpeitai, by the National Federation of Kenpeitai Veterans' Associations*. (1986). Diterjemahkan oleh Barbara Gifford Shimer & Guy Hobbs. Ithaca: Cornell MIP.
- The War History office of the National Defence College of Japan*. (2015). *The Invasion of the Dutch East Indies*. Edited and translated by Willem Rummelink. Leiden University Press.
- The War History Office of the National Defense College of Japan. (2015). *The Invasion of the Dutch East Indies*. Leiden: Leiden University Press.
- Tjoe Tat, Oei. (1995). *Memoar Oei Tjoe Tat*. Jakarta: Hasta Mitra.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

- Tomczyk, Andrzej M. (2002). *Japonska Bron Pancerna (Japanese Armor)*, Jil. 1. Gdansk: A.J. Press.
- Touwen-Bouwisma, Elly. (Maret 1996). "The Indonesian Nationalists and the Japanese 'Liberation' of Indonesia: Visions and Reactions". *Journal of Southeast Asian Studies* 27, 1.
- _____ (1949). "The Indonesian Nationalists"; A.J.Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan*. 's Gravenhage: Van Hoeve.
- Tucker, Spencer C. (peny.) (2012).. *World War II at Sea: An Eyclopedia*. Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC
- Umam, Saiful. (1998) "K.H. Wahid Hasyim: Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi", in Azyumardi Azra and Saiful Umam (eds.) (eds.) *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*, Jakarta: INIS-PPIM-Balitbang Depag RI.
- US Military Intelligence Division. (1973). *Japanese Parachute Troops, Special Series No.32, 1 July 1944*. Wickenburg, AZ: Normount Technical Publications.
- _____ (1944). *Japanese Tanks and Tank Tactic*. Washington, D.C.: United States Government Printing Office.
- Van Nieuwenhuijze, C.A.O.. (1958). *Aspect of Islam in Post-Colonial Indonesia*, The Hague and Bandung: W. van Hoeve.
- W. F. Wertheim. (1999.). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- War Department Technical Manual Tm-E 30-480. (1944). *Handbook On Japanese Military Forces*. Washington, D.C.: United States Government Printing Office.
- Ward et al (ed). (1994). *The Memoirs of Tan Kah Kee*. Singapore: Singapore University Press.
- Wertheim, W.F.. (1972). "Counter-Insurgency Research at the Turn of the Century: Snouck Hurgronje and the Acheh War", *Sociologische Gids* 19: 320-28.
- Williams, Lea. (1960). *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movement in Indonesia 1900-1916*. Glencoe: Free Press.
- Womack, Tom. (2006). *The Dutch Naval Air Force Against Japan: The Defence of the Netherlands East Indies, 1941-1942*. Jefferson: McFarland & Company, Inc.
- Yan Goan, Ang. (2009). *Memoar Ang Yan Goan: Tokoh Pers Tionghoa yang Peduli Pembangunan Bangsa Indonesia*. Penerjemah Tan Beng Hok. Jakarta: Hasta Mitra/Yayasan Nabil.
- Yang, Tsung-rong. (2001). "A Short History of Anti-Chinese Riots", dalam Michael R.Godley & Grayson J.Lloyd (ed). *Perspectives on the Chinese Indonesians*. Adelaide: Crawford House.
- Yasuko, Kobayashi. (1997). "Kyai and Japanese Military". *Studia Islamika* 4, 3: 65-98.
- Yenne, Bill. (2014). *The Imperial Japanese Army: The Invincible Years 1941-42*. Oxford: Osprey Publishing Ltd.

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

- Yoder, Lawrence. (1980). *Tunas Kecil: Sejarah Gereja Kristen Muria Indonesia*. Semarang: Komisi Literatur Sinode GMKI.
- Yuliman, Sanento. (1968). *Beberapa Masalah dalam Kritik Seni Rupa Indonesia*. Bandung: Skripsi Sarjana Jurusan Seni Rupa-ITB.
- Zapotoczny Jr. Walter. "The Road to Nanking", diakses dari <http://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/the-road-to-nanking/>, 5 Juli 2018.
- Zenner, Walter P. (1991) *Minorities in the Middle: A Cross-Cultural Analysis*. New York: SUNY Press.
- Zich, Arthur, dkk. (1978). *The Rising Sun*. Alexandria: Time-Life Books.
- Zuhdi, Susanto dan Iskandar, Mohammad. (2012). "'Janji Kemerdekaan' Jepang dan Perencanaan Negara dan Bangsa". Dalam Mestika Zed dan Mukhlis PaEni (ed.). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 6. Perang dan Revolusi*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.
- _____ (2017) *Cilacap (1830—1942) Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa* (ed.kedua).. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Zuhri, K.H. Saifuddin. (1974). *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*, Bandung: Al-Ma'arif.

Internet

- <http://news.detik.com/read/2014/02/04/182716/2487284/103/penghapusan-nama-tokoh-tionghoa-dalam-sejarah?9922022>
- <http://www.sayangi.com/politik1/read/2564/wikrama-i-abidin-uud-45-belum-lindungi-kemerdekaan-pers>.
- <http://www.ui.ac.id/id/news/archive/6686>
- <http://www.ui.ac.id/id/news/archive/6686>

INDEKS

A

A.K. Pringgodigdo, 8, 127
A.R. Baswedan, 118, 119
ABDACOM, 49, 50
Abdul Kahar Muzakkir, 156, 163
Abdul Rivai, Dokter, 2, 94
Aceh, 36,100, 147, 148, 184
Achdiat Kartamihardja, 4
Affandi, 61, 63, 64, 66, 78, 80,
81,87,88
Ahmad Subardjo, 13, 17, 25
Ali Sastroamijoyo, 190
Amerika Serikat, 15,16, 27, 29, 31, 45,
46, 49, 52, 53, 54, 77, 123,
175, 179, 185, 186
Arabujin Shidô linkai, 109
Asia Tenggara, 25, 30, 31, 33, 40, 98,
110, 133, 145, 147, 148, 186,
188, 190
Asia Timur Raya, 3, 4, 5, 6, 16, 21, 60,
61, 63, 64, 68, 80, 85, 86, 139,
144, 145, 150, 151, 153, 158,
164, 167, 180, 185
Asrul Sani, 4
Australia, 23, 32, 40, 43,47, 49,50, 54,
58,93, 94, 171, 172

B

Basuki Abdullah, 64, 66, 74, 79, 87
Batavia, 16, 19, 21, 30. 36, 50, 51, 63,
83, 93, 94, 98, 105, 128, 129,
138, 167, 169, 183
Ben Anderson, 11, 119, 131
Bintang Hindia, 2, 94, 127
Birma, 29, 31, 32, 49, 186, 189, 190
Boedi Oetomo, 2, 94, 127
BPUPK, 5, 8, 12, 119, 120, 121, 122,
123, 132, 133, 159, 182

C

Chairul Anwar, 4
Chuo Sangi In, 118
Cilacap, 22, 23, 25, 50, 51
Cipto Mangunkusumo, 17

D

Da Vinci Code, 8
Dai Nippon, 3, 4, 5, 44, 74, 89, 103,
109, 110, 110, 112, 113, 135,
136, 138, 139, 140, 141, 142,
144, 146, 148, 150, 151, 152,
153, 154, 156, 158, 160, 161,
162, 164, 166
De Jonge, 20
De Ruyter, 50
Deserter, 167, 179, 180, 182, 183,
184, 192, 193, 194
Divide et impera, 90
Djawa Baroe, 69, 72, 73, 74, 77, 81,
83, 85, 86, 87, 130, 136, 139,
140, 141, 144, 153, 158, 160,
163, 164
Djawa Hokokai, 74, 86, 154
Douwes Dekker, 95
Dutch East Indies, 13, 25, 54

F

Filipina, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 47, 48,
52, 125, 133, 186, 189, 190

G

Gatot Mangkupraja, 15
Gerindo, 95
GHQ, 168, 172, 173
Go Jikken Kenkyu, 34
Guam, 15, 32, 33

INDEKS

Gunseikan, 72, 89, 117, 118, 130,
131, 154
Gyugun, 4

H

H.B. Jassin, 10
Hakko Ichi-u, 28
Hasjim As'ari, 148, 152, 154, 156,
157, 158, 159
HCCH, 108, 109, 110, 111, 112, 118,
123, 124, 125
Heiho, 4, 110
Hendra Gunawan, 63, 74, 78, 81, 88
Henk Ngantunk, 78
Hinomaru, 114
Hizbullah, 153, 155, 157, 164

I

Imamura Hitoshi, 23, 101
Indian Independence League, 109
Indische Partij, 95
Inlander, 89
Insulinde, 2

J

Jamiat Khair, 94
Jerman, 9, 15, 16, 23, 28, 29, 31, 38,
52, 54, 58
Jûgûn ianfu, 110

K

Kabinet Sukiman, 176
Kabinet Wilopo, 176
Kaigun, 101
Keibôdan, 116, 117
Keibôtai, 116, 117, 118

Keimin Bunka Shidoso, 59, 60, 61, 62,
66, 68, 70, 71, 72, 74, 77, 79,
80, 81, 83, 85, 86

Kemajuan, 2, 94,

Kenpeitai, 99, 103, 110, 123, 130

Ki Hadjar Dewantara, 106

KNIL, 50, 51, 52, 54, 56

Kondo Nobutake, 35, 50

Konketsu Jûmin linkai, 109

Konoye Fuminaro, Pameran, 29

Kuomintang, 97, 98, 102

Kwee Tjing Hong, 95

L

Lampung, 98

Lekra, 83

Lesbumi, 84

Liaison Conference, 101

Liem Koen Hian, 96, 119, 120, 121,
123

London Naval Treaty, 15

Luzon, 30

M

Machida Keiji, 35, 61

Malari, 92

Malaya, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 43, 47, 48, 49, 58, 102,
125, 130, 133, 154

Manado, 34, 35, 36, 48, 56

Manchuria, 10, 15, 16, 18, 21, 29, 30,
34, 38, 45,

Mas Mansoer, 63, 106, 137, 138, 141,
144, 145, 151, 152, 143, 154,
164

Masjoemi, 136, 149, 150, 151,

Matsuoka Yosuke, 29

Matthew Perry, 27

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH

MIAI, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 144, 149, 150, 151,
152, 163

Middlemen minority, 92, 99

Mohammad Hatta, 15, 16, 25, 63,
106, 120, 154,

Mooi Indie, 4, 80

Multifilm Batavia, 63

Mutsuhito, Kaisar, 27

N

Nahdlatul Ulama, 5, 136, 165

Nanpō Tokubetsu Ryūgakjusei, 169,
170

Nazi, 29, 52

Nihon Bunka Renmei, 19

Nobusuke Kishi, 189, 190

O

Oei Tjong Hauw, 118, 119, 123

Oey Tiang Tjoei, 108, 118, 119, 123

Ohya Soichi, 61, 62, 68, 69

Okazaki Seizaburo, 89, 127

Ordonansi Darurat, 21

Ordonansi Guru, 142

P

Padang, 2, 149

Palembang, 30, 34, 36, 48, 49, 95, 98

Pampasan Perang, 6, 8, 9, 167, 169,
175, 180, 185, 186, 187, 188,
189, 192, 194

Pancasila, 5

Pearl Harbor, 31, 32, 43, 101

Perhimpunan Indonesia, 13, 70, 136

Persagi, 59, 64, 66, 78, 79, 80, 81

Pertempuran Laut Jawa, 3

PETA, 4, 15, 25, 45, 46, 54, 74, 77,
110, 116, 150, 151, 152, 153,
154, 155

PKI, 95, 119, 121, 122, 123, 132, 159,
182

PNI, 95, 96

Port Arthur, 16, 28

PPKI, 119, 121, 122, 123, 132

Pramoedya Ananta Toer, 11

PTI, 96, 127, 132

Pujangga Baru, 10, 81

PWI, 120

R

Radjiman Wedyodiningrat, 120

Repatriasi, 167, 169, 171, 172, 179,
180, 182, 183, 192

Restorasi Meiji, 27, 28

Romusha, 3, 66, 67, 73, 77, 87, 110,
187

Rusia, 2, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 22, 23,
27, 28, 71

S

Saiko Sikikan, 72, 74, 75

San Fransisco, Perjanjian, 175, 177,
185, 186

Sarekat Islam, 2, 94, 127, 136, 151

Saseo Ono, 62, 71, 73

Seinendan, 116

Selat Karimata, 47

Semarang, 18, 22, 63, 68, 71, 92, 100,
118, 119, 124, 129, 131

Sendenbu, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 104

Shogun, 27, 44

Shūmubu, 138, 150, 152, 155, 156,
157, 158, 161, 164

Shūmuka, 154, 155, 157, 161, 164

Shūsen Renraku Chūō Jimukyoku,
167, 168

INDEKS

Snouck Hurgronje, 18, 145, 146, 147,
148, 163
Soeara MIAI, 135, 139, 140, 141, 142,
149, 150, 151, 163
Sudjojono, 10, 63, 64, 66, 78, 79, 80,
81, 83, 86, 87
Sudjono, 173, 174, 175, 177, 193
Sukarno, 3, 17, 20, 21, 25, 63, 74, 75,
85, 92, 95, 106, 107, 122, 154,
184, 189, 190, 193, 194
Sumatra, 3, 30, 32, 34, 35, 47, 48, 49,
58, 97, 130
Surabaya, 22, 33, 36, 50, 51, 58, 63,
68, 71, 72, 86, 96, 98, 118,
119, 120, 136, 137, 138, 177
Surakarta, 98, 105, 114, 137
Sutatmo Suryokusumo, 17

T

Tainichi Rijikaim, 169
Taiso, 114
Takashi Kohno, 68, 69
Tangerang, 99, 117
Tarakan, 30, 36, 48, 121
Tiga A, 104
Tiga Pengemis, lukisan, 80
Tiong Hoa Hwee Koan, 93
Tjin Tjai Hwee, 98
Tjing Kwang, 111, 131
Tjipto Mangoenkoesomo, 95
Tokubetsu Kakyô Keibôtai, 116, 117
Tokubetsu Rikusentai, 34
Tokyo, 5, 27, 30, 77, 102, 128, 137,
139, 169, 170, 172, 173, 174,
178, 184, 186, 189, 193, 194

U

Uni Soviet, 30, 33, 175
UUD 1945, 5, 120, 121, 132

W

Wahab Chasbullah, 136, 151, 164
Wahid Hasjim, 138, 152, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 165
Washington Naval Treaty, 15
Wondoamiseno, 136, 137, 138, 139,
140, 151, 163

Y

Yamamoto Isoroku, 31
Yamashita Tomoyuki, 33
Yap Tjwan Bing, 118, 119, 121, 122,
133
Yogyakarta, 130, 131, 132, 133, 134,
164, 183
Yoshida, 71, 175, 176

Z

Zainal Mustafa, 154, 164

PENULIS DAN EDITOR

PENULIS



AIKO KURASAWA

Sejarawan yang fokus pada kajian hubungan Indonesia-Jepang. Profesor Emeritus, Keio University ini memperoleh gelar doktor dari Cornell University dengan kajian sejarah zaman pendudukan Jepang di Indonesia, dan gelar doktor kedua dari Tokyo University tentang sejarah hubungan Indonesia-Jepang 1945-1972. Karya yang diterbitkan di Indonesia antara lain, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945* (Grasindo, 1993), *Peristiwa 1965: Persepsi dan Sikap Jepang* (Kompas, 2015), *Kuasa Jepang di Jawa*, (Komunitas Bambu, 2015), *Masyarakat & Perang Asia Timur Raya* (Komunitas Bambu, 2016). Sesudah pensiun dari Universitas Keio, tinggal di Indonesia kurang lebih 4-5 bulan setiap tahun.



AMINUDIN TUA HAMONANGAN SIREGAR

Lahir di Jakarta, 29 Juli 1973. Gelar Sarjana dan Magisternya diperoleh dari Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Pengajar pada Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, saat ini sedang menempuh Pendidikan S3 di Leiden University, Belanda. Pernah menjabat sebagai Ketua Galeri Soemardja (2004-2017) dan Adjunct Curator National Gallery Singapore (2015-2016). Beberapa publikasi terakhir di antaranya; "Mengenang Claire Holt", dalam Harian Umum Kompas 2017 dan "Stigma Mooi Indie" dalam Harian Umum Kompas 2018. Penulis dapat dihubungi melalui surel blupart@yahoo.com.



DIDI KWARTANADA

Lahir di Yogyakarta, 3 Februari 1968. Menyelesaikan Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Pernah bekerja pada Lembaga Penelitian Alocita-Surabaya (1992-1997), Waseda University-Jepang (1998-2001), Yayasan Nation Building (NABIL)-Jakarta (2009-2017). Beberapa karya terakhir di antaranya; *Tionghoa dalam Keindonesiaan: Peran dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa* (3 jilid) (2016), "Aiko Sensei: Karir Panjang Indonesianis Asal Jepang", Kata Pengantar untuk Aiko Kurasawa, *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945* (2015), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War* (2010) dan "Kemadjoean Ekonomi Indonesia (1941-1949): Rise and Fall of a Pribumi Muslim Economic Organization from Yogyakarta". Penulis dapat dihubungi melalui surel kwartanada2@gmail.com.

PENULIS DAN EDITOR



JAJAT BURHANUDIN

Lahir di Bogor, pada Januari 1967. Bekerja sebagai dosen pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Gelar doktronya diperoleh dari Leiden University, Belanda. Beberapa karya terakhirnya di antaranya; *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia* (2017), *The Triumph of Ruler: Islam and Statecraft in Pre-Colonial Archipelago* (2018), *Converting Belief Connecting People: The Kingdoms and the Dynamics of Islamization in the Achipelago* (2018). Penulis dapat dihubungi melalui surel j.burhanudin@uinjkt.ac.id.



NINO OKTORINO

Memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Pernah bekerja sebagai Staf Administrasi & Litbang di Dimhart & Ass. Law Firm (2001-2002), Staf Editor buku pelajaran dan buku umum di empat penerbitan (Ganeca Exact, Binarupa Aksara/TB Kharisma, ESIS/Erlangga, dan Libri/BPK Gunung Mulia (2003-2017), Pengelola Nilia Pustaka dan Gaco Books (2007-sekarang). Beberapa karya terakhir di antaranya; *Hancurnya KNIL Minahasa* (2018), *Perang Terlama Belanda* (2018), *Waffenbrüder: Kisah Divisi SS 'Das Reich' dalam Perang Dunia II* (2018), *Hancurnya Armada Sekutu* (2018), *Ganyang Malaysia!* (2018), *Hitler's Tank Destroyers* (2018), *Messerschmitt-262* (2018), dan *Bismarck* (2018). Penulis dapat dihubungi melalui surel noktorino@yahoo.com



SUSANTO ZUHDI

Lahir di Banyumas pada 4 April 1953. Saat ini mengajar pada Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Memperoleh gelar professor pada bidang Sejarah dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Beberapa karya terakhir di antaranya; *Integrasi Bangsa dalam Bingkai Keindonesiaan* (2017), *Sejarah Buton Yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana* (2010) dan *Cilacap 1830-1942 Bangkit dan Jatuhnya Sebuah Pelabuhan di Jawa* (2002).

EDITOR



TAUFIK ABDULLAH

Lahir di Bukittinggi pada 3 Januari 1936. Menyelesaikan pendidikan sarjananya di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada pada 1961; melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Universitas Cornell, Ithaca, Amerika Serikat, yang diselesaikannya pada tahun 1967 dengan tesis berjudul "Minangkabau 1900-1927: Preliminary Studies in Social Development". Di Universitas yang sama ia memperoleh gelar doctor pada tahun 1970, dengan disertasi berjudul "School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra", yang kemudian diterbitkan oleh Universitas Cornell pada 1971 dan kemudian oleh penerbit Equinox pada 2009. Beberapa jabatan pernah diembannya, antara lain: Kepala Bagian Umum Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (Biro MIPI) 1962-1963, Asisten Peneliti Leknas LIPI 1963-1967. Peneliti Leknas 1967-1974, Direkur Leknas LIPI 1974- 1978, dan Peneliti Leknas LIPI 1978 hingga menjabat sebagai Ketua LIPI 2000-2002. Selain di LIPI, ia juga menjadi peneliti di Departemen Ilmu Politik Universitas Chicago, Universitas Wisconsin, dan Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Science (NIAS), Wassenaar, Belanda. Ia menduduki beberapa posisi penting di institusi lintas bangsa, seperti Ketua Komite Eksekutif Program Kajian Asia Tenggara (ISEAS) Singapura, Wakil Presiden Asosiasi Ilmu Sosial Asia Tenggara, Kuala Lumpur, serta Wakil Presiden Asosiasi Sosiologi Internasional Dewan Riset Sosiologi Agama. Tulisannya telah tersebar di berbagai media dan jurnal, baik lokal maupun luar negeri. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 30 buku yang ditulisnya. Atas kontribusinya dalam dunia keilmuan, pada 2009 ia memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia.

HUBUNGAN *Indonesia dan Jepang* DALAM LINTASAN SEJARAH

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang telah resmi terjalin pada 20 Januari 1958. Meskipun sesungguhnya hubungan kedua wilayah sudah terjalin sejak awal abad 20. Pada tahun 2018 hubungan bilateral kedua negara telah memasuki usianya yang ke-60 tahun. Kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan teknologi telah dirintis kedua negara. Peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang menjadi momentum bagi kedua negara untuk melakukan kajian terhadap berbagai kemajuan yang telah dicapai selama enam dekade. Hal ini penting sebagai upaya memperkuat jalinan persahabatan dan kemitraan yang lebih dinamis pada masa akan datang. Buku ini berikhtiar menyajikan narasi sejarah hubungan Indonesia-Jepang dalam lintasan sejarah. Pembahasannya mencakup berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, politik, militer, seni, budaya dan agama. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memperkaya historiografi hubungan Indonesia-Jepang, baik tema, maupun metodologi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

ISBN 978-602-1289-81-5



TIDAK UNTUK DIJUAL